



LAPORAN KEGIATAN

KAJIAN PENDAHULUAN RPJMN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Studi Pendahuluan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga kesinambungan dan keterkaitan pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.

Bersamaan dengan akan berakhirnya RPJPN 2005-2025, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun RPJPN 2025-2045 sebagai dasar perencanaan pembangunan untuk dua puluh tahun ke depan. Sejalan dengan hal itu pula, penyusunan RPJMN 2025-2029 dilakukan sebagai bagian pertama dari lima periode pelaksanaan RPJPN 2025-2024 mendatang.

Laporan ini merupakan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Studi Pendahuluan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas pada tahun 2023. Selain mengidentifikasi landasan pemikiran visioner dan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya, kegiatan ini juga telah memetakan agenda pembangunan, isu-isu strategis dan tantangan di masa depan berskala lokal-global, serta rekomendasi kebijakan pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.

Laporan ini disusun oleh Tim Penyusun yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Tim Pendukung, serta Tim Konsultan. Kepada seluruh anggota Tim Penyusun kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas kerja keras dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para perencana kebijakan di Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan akademisi sebagai bahan rujukan dalam mengkaji persoalan yang berkaitan dengan isu-isu agama, pendidikan, dan kebudayaan. Laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jakarta, Januari 2024

Didik Darmanto

**LAPORAN KEGIATAN KAJIAN PENDAHULUAN RPJMN 2025-2029 BIDANG AGAMA,
PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN**

Diterbitkan oleh:

Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas

Penanggung Jawab:

Amich Alhumami, Ph.D.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Ketua:

Didik Darmanto, S.Sos, MPA.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Penyusun:

Sularsono, SP, ME
Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng
Zaky Mas'ul, S.Sos, MA, MSP
Cep Kiki Kusumah, S.Si, MA
Atisomya Nareswari, S.E
Risky Firmansyah, SE
Ulia Balqis, S.Pd
Muhammad Nashiruddin, S.Pd
Emhaka Yudhistira, S.Si

Tenaga Pendukung:

Novi Nur Asih, SE
Saniman

Editor:

Setyadi Sulaiman, M.Hum
Hikmatul Islamiyah, S.Stat
Annissa'dilla Nur Azizah, S.Stat

Cetakan:

Pertama, 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Pendahuluan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 ini merupakan ikhtiar menjaga kualitas dan kesinambungan pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Seiring dengan akan berakhirnya periode RPJMN 2020-2024, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2025-2029.

Ringkasan eksekutif ini merangkum temuan kajian pendahuluan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas pada tahun 2023. Selain mengidentifikasi landasan pemikiran visioner dan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya, kegiatan ini juga memetakan agenda pembangunan, isu-isu strategis dan tantangan di masa depan berskala lokal-global, serta rekomendasi kebijakan pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan setiap perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam hitungan skala yang lebih luas. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai pengembangan paradigma intelektual. Dalam paradigma ini, peserta didik diharapkan akan memiliki kesiapan mental dan kemampuan teoritik dalam menjalani kehidupannya yang selalu berubah dalam kompleksitas modern. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.

Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani-rohani. Perubahan sosial merupakan sebuah tubuh baru dari kondisi yang lama. Perubahan sosial terjadi sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia, inovasi, kemajuan sains dan sebagainya. Pendidikan merupakan hal utama yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada.

Dalam mewujudkan kemajuan pendidikan di Indonesia dapat dicapai dengan perumusan kebijakan. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami kesenjangan dalam lingkup pendidikan. Banyak daerah terpencil yang tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga pendidikan dan banyak anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, kekurangan guru, atau karena terganggu oleh konflik atau bencana alam. Selain itu, ketersediaan akses pendidikan yang belum merata dan kualitas guru yang masih rendah menjadi isu dan tantangan yang harus menjadi fokus dalam pembangunan pendidikan.

Di Indonesia, masih terdapat perbedaan aksesibilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan biasanya memiliki lebih banyak fasilitas pendidikan, guru yang berkualitas, serta akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan yang memadai. Sementara itu, di pedesaan, terutama di wilayah terpencil, infrastruktur pendidikan seringkali terbatas, guru yang terlatih jarang tersedia, dan akses terhadap teknologi pendidikan seringkali terbatas. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu,

kesenjangan akses pendidikan juga terjadi antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Kesenjangan ini memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial.

Salah satu faktor yang memengaruhi kesenjangan dalam lingkup pendidikan di Indonesia adalah kurangnya dana untuk pendidikan. Pemerintah Indonesia masih mengalokasikan sebagian kecil dari anggaran negara untuk pendidikan, sehingga banyak daerah yang tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk lembaga pendidikan. Serta, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi faktor penting dalam masalah ini. Di daerah pedesaan, infrastruktur pendidikan masih sangat terbatas dan kurangnya aksesibilitas juga menjadi masalah serius. Di sisi lain, di daerah perkotaan, infrastruktur pendidikan lebih baik dan lebih banyak pilihan, namun biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sangat tinggi.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah serius pembangunan pendidikan. Hal ini dapat diukur oleh capaian hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2022 yang menunjukkan skor rata-rata Indonesia menurun pada tiga bidang kompetensi capaian hasil PISA Indonesia untuk *Reading* sebesar 359 tertinggal 117 poin dibanding negara-negara *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, untuk *Mathematics* sebesar 366 tertinggal 106 poin dibandingkan dengan negara-negara OECD, untuk *Science* sebesar 383 tertinggal sebesar 102 poin dibandingkan dengan negara-negara OECD. Penurunan skor (PISA) Indonesia tahun 2022 mencerminkan krisis pembelajaran di Indonesia parah dan harus diatasi secara serius dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang kurang mampu memberikan pendidikan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia akan berdampak pada rendahnya kemampuan peserta didik untuk bersaing di pasar kerja dan kesulitan dalam mengembangkan potensi mereka.

Serta, kesenjangan pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat pada capaian RPJMN 2020-2024 menjelaskan bahwa angka kelulusan SMA/ sederajat masih cukup rendah yaitu 66,13 persen pada tahun 2022 dan masih cukup jauh dari target RPJMN yaitu 76,47 persen. Capaian ini diikuti dengan data anak yang pernah mengikuti PAUD masih cukup rendah. Angka partisipasi PAUD masih relatif rendah jika dibandingkan dengan target RPJMN. Di sisi lain, masih banyak sasaran dan indikator pada bidang pendidikan yang belum tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat meningkatkan performa pendidikan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan dalam 5 tahun ke depan. Serta, hasil evaluasi yang belum tercapai dapat menjadi motivasi dalam memperbaiki sistem dan langkah yang dianggap tidak efektif pada periode sebelumnya.

Hingga saat ini, Indonesia masih mengalami masalah kekurangan guru yang juga menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Diproyeksikan sekolah di Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1 juta guru hingga tahun. Hal tersebut terjadi karena adanya pembukaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, dan pensiunan setiap tahun yang tidak diimbangi dengan rekrutmen guru ASN. Selain masalah terkait kekurangan guru, Indonesia juga mengalami masalah kekurangan guru yang berkompeten dan berkualitas. Pada tahun 2015 Ujian Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, rata-rata nilai UKG guru adalah 56,69 dengan sebagian besar guru mendapatkan nilai UKG di bawah rata-rata. Ujian Kompetensi Guru bertujuan untuk mengukur kompetensi mengelola pembelajaran dan pemahaman atas mata pelajaran yang diampu. Salah satu penyebab signifikan dari rendahnya kualitas guru adalah proses perekrutan yang tidak fokus ke pemilihan tenaga pendidik profesional, melainkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, terdapat beberapa tantangan pendidikan yang dapat menghambat percepatan pembangunan pendidikan di Indonesia. Tantangan tersebut diantaranya transisi demografi, pendidikan dalam perkembangan teknologi, perubahan lanskap lapangan pekerjaan, rendahnya partisipasi publik,

lemahnya tata kelola pendidikan, dan pembiayaan pendidikan yang tidak efektif. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2035 merupakan puncak bonus demografi dengan komposisi jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Apabila Indonesia tidak dapat memaksimalkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan SDM berkualitas, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingginya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas.

Serta, isu terkait krisis pendidikan karakter dan pendidikan agama di dalam diri peserta didik terutama pada peserta didik yang menginjak usia remaja hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Salah satu permasalahan yang telah menjadi perhatian pemerintah yang semakin meningkat pada masa sekarang adalah permasalahan-permasalahan yang menyimpang dari nilai, norma dan moral dalam masyarakat, yang mana kebanyakan dari pelaku penyimpangan ini terjadi pada generasi muda terutama pada anak usia sekolah. Permasalahan yang menyimpang dari nilai, norma dan moral tersebut diantaranya *bullying*, pelecehan seksual, intoleransi, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain.

Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan dalam peningkatan pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi pada pendidikan juga memberikan risiko negatif berupa ketergantungan bagi peserta didik. Hal ini mengakibatkan peserta didik terlalu bergantung pada teknologi dan mengurangi kemampuan untuk berpikir kritis. Ancaman lain dari perkembangan teknologi adalah ketidakakuratan data sehingga berpotensi menghasilkan informasi keliru (hoaks) atau halusinasi, kehilangan interaksi sosial, penggunaan yang kurang etis seperti digunakan untuk melakukan kecurangan saat ujian, serta ketidakmampuan dalam memahami nuansa bahasa.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan dan tantangan terkait pembangunan pendidikan di Indonesia, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam mencari solusi terbaik. Langkah-langkah yang diambil haruslah terintegrasi dan berkesinambungan, serta melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Upaya dalam mencapai pembangunan pendidikan, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang berprinsip pendidikan berkualitas yang merata, mencakup:

1. **Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)** untuk mencapai pemerataan akses pendidikan yang dilaksanakan dengan: (a) perluasan layanan PAUD; (b) penyediaan sarana dan prasarana; penyaluran bantuan pendidikan; (c) pencegahan dan penanganan ats; (d) revitalisasi pendidikan non formal; serta (e) pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya
2. **Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM** yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas dan menguatnya bidang STEAM, melalui: (a) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas; (b) peningkatan infrastruktur dan daya tampung perguruan tinggi; serta (c) penguatan kelembagaan pendidikan tinggi berkualitas dan merata
3. **Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran** untuk mewujudkan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif, melalui: (a) penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual, pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogik modern (PTCK); (b) pemantapan sistem asesmen komprehensif, penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan tenaga kependidikan; serta, (c) peningkatan kualitas pendidikan agama, dan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)

4. **Penguatan Pengelolaan tenaga Pendidik dan Kependidikan Berkualitas** untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, dapat dicapai melalui: (a) reformasi LPTK dan penguatan PPG; (b) restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru; (c) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (d) peningkatan kualitas guru untuk pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas; serta, (e) peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan;
5. **Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan** untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem tata kelola pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta reputasi kelembagaan pendidikan yang dilaksanakan melalui: (a) penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan; (b) peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan; (c) penyediaan sistem informasi data pendidikan, penguatan sistem penjaminan mutu; dan (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas;
6. **Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja** untuk mewujudkan industri serta perkembangan Sains dan Teknologi, perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing global, dan mewujudkan talenta riset inovasi, seni budaya, dan olahraga yang memperoleh rekognisi di tingkat nasional dan internasional, melalui: (a) penerapan sistem pembelajaran vokasi berbasis industri; (b) peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik/instruktur vokasi; (c) penguatan program sertifikasi kompetensi vokasional; (d) pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) 3 bidang riset inovasi, seni budaya, dan olahraga; (e) peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi; serta (f) penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing.

2. Agama dan Kebudayaan

Pembangunan bidang agama dan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat tatanan pembangunan nasional. Sementara dimensi agama menjadi landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan, dimensi kebudayaan dikembangkan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Sejauh ini pembangunan bidang agama dan kebudayaan menghadapi serangkaian tantangan, antara lain: (1) Pembangunan dan modernisasi yang eksploitatif mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak negatif pada ekosistem alam dan budaya lokal; (2) Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat; (3) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (4) Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global; (5) Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif; dan (6) Kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan.

Dalam konteks ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan bidang agama dan kebudayaan difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat. Pembangunan bidang agama dan kebudayaan juga didorong agar dapat mampu meningkatkan kerukunan, toleransi, dan harmonisasi sosial. Memperkuat pembangunan di kedua bidang ini, pemerintah menghadirkan berbagai kebijakan pembangunan harus berorientasi pada penguatan aspek-aspek krusial dalam kehidupan bermasyarakat,

seperti penguatan moderasi beragama, pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan, serta pemenuhan hak berkebudayaan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, pembangunan juga perlu melibatkan masyarakat hukum adat yang hidup di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk memenuhi hak-hal dasar mereka sebagai warga negara.

Pada RPJMN 2025-2029, perencanaan pembangunan bidang agama dan kebudayaan merujuk pada salah satu dari 17 arah prioritas pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju” yang diwujudkan secara holistik melalui beberapa kebijakan dan strategi pembangunan.

- **Beragama Maslahat**

Beberapa program pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan, yakni: (1) penguatan moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat toleran dan inklusif; (2) Peningkatan sarpras layanan keagamaan; (3) Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan; (4) Jaminan hak beragama & advokasi konflik sosial keagamaan; (5) Transformasi KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif; (6) Transformasi Penyelenggaraan Haji dan umrah yang transparan, akuntabel, dan aman; (7) Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; (8) Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif. Lebih spesifik, Agenda Pembangunan (AP) Beragama Maslahat dijalankan melalui satu Program Pembangunan (PP) Penguatan Moderasi Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif. Pengejawantahan PP tersebut dilakukan melalui delapan Kegiatan Pembangunan (KP), yakni:

1. **Peningkatan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan.** Terwujudnya Layanan Bimbingan Keagamaan yang berkualitas untuk Calon Pengantin dan Rumah Tangga. Sasaran dari kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan literasi keagamaan yang sahih, inklusif, dan tranformatif serta bermaslahat. Adapun implementasinya melalui: peningkatan kompetensi penyuluh, penyediaan konten keagamaan digital inklusif dan transformatif, bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, serta bimbingan keagamaan keluarga.
2. **Jaminan Hak Beragama dan Resolusi Konflik Sosial Keagamaan.** Sasaran dari kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan jaminan kebebasan beragama dan jumlah penyelesaian konflik sosial keagamaan. Adapun implementasinya melalui: pengembangan Kantor Urusan Agama (KUA) yang memberdayakan *Early Warning System (EWS)*, memperkuat peran FKUB dalam melakukan advokasi, mitigasi konflik, dan dialog kerukunan.
3. **Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan.** Sasaran dari kegiatan pembangunan ini adalah untuk memperkuat peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan dalam mewujudkan layanan keagamaan yang inklusif. Adapun implementasinya melalui: pemberian bantuan operasional untuk lembaga keagamaan (MUI, Walubi, PGI, Matakini, KWI, PHDI) dan ormas keagamaan (NU, Muhammadiyah, Persis, Kelompok Kategorial-Katolik, SAGIN-Biksu, Prajaniti Hindu Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia (API), MUKI -Kristen, MAKIN-Khonghucu, dll), peningkatan profesionalisme lembaga sosial keagamaan, peningkatan kompetensi tokoh agama dalam layanan keagamaan, menggelar forum internasional tokoh lintas agama, dan memperbanyak sarasehan tokoh agama dan tokoh budaya.
4. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan.** Sasaran dari kegiatan pembangunan ini adalah tersedianya layanan keagamaan yang merata, memadai, dan memenuhi standar. Adapun implementasinya adalah melalui: peningkatan tata kelola sarpras layanan keagamaan yang handal dan sesuai standar ISO, penguatan sarpras IT dan digital, integrasi basis data keagamaan, penguatan peningkatan pelayanan rumah ibadah, dan penyediaan kitab suci bagi umat beragama.
5. **Transformasi KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif.** Sasaran dari kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan inklusivitas layanan KUA. Adapun implementasinya adalah melalui: revitalisasi dan pembangunan KUA, pengadaan lahan KUA yang

layak dan strategis, layanan KUA berbasis digital, pelayanan satu atap pernikahan, peningkatan kompetensi penghulu, revitalisasi bimbingan manasik haji, revitalisasi bimbingan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), revitalisasi KUA sebagai pusat pemberdayaan sosial ekonomi umat, dan peningkatan layanan penyuluhan agama untuk semua umat beragama, dan pelayanan khusus untuk kelompok lanjut usia dan disabilitas.

6. **Transformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman.** Sasaran kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan Haji dan Umrah, baik dalam negeri maupun di Saudi Arabia. Adapun implementasinya melalui: revitalisasi sarpras asrama haji, peningkatan produktivitas pemanfaatan asrama haji, pusat layanan haji dan umrah terpadu (PLHUT), penguatan sistem informasi haji berbasis *AI-Smart Service*, optimalisasi dana haji yang produktif, transparan, dan akuntabel, penguatan bimbingan manasik haji dan umrah, peningkatan profesionalitas petugas haji, penguatan layanan haji lansia, membangun Nota Kesepahaman (MoU) penyelenggaraan haji dan umrah antar negara agar aman, akuntabel, dan mempermudah jamaah, membangun kemitraan strategis pengelolaan daging sembelihan jamaah haji dan umrah, melakukan asesmen lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah, serta melakukan advokasi penyelenggaraan haji dan umrah.
7. **Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.** Sasaran kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sertifikasi produk halal yang professional (menyeluruh, tepat, dan cepat). Adapun implementasinya melalui: edukasi produk/jasa halal kepada masyarakat/konsumen, peningkatan kesadaran produk/jasa halal di kalangan produsen, sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha UMKM, penguatan standar jaminan produk halal, peningkatan kompetensi pendamping halal, membangun kemitraan strategis dengan komunitas dan universitas dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, peningkatan jumlah akreditasi lembaga pemeriksa halal, dan MoU penjaminan produk halal antar negara.
8. **Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif.** Sasaran kegiatan pembangunan ini adalah untuk mewujudkan pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas. Adapun implementasinya melalui: edukasi kedermawanan sosial keagamaan, kampanye program dana sosial keagamaan produktif, akreditasi lembaga filantropi keagamaan, integrasi basis data pengumpulan dan penyaluran dana sosial keagamaan, optimalisasi tanggap bencana berbasis dana sosial keagamaan, dan memperkuat program-program pengentasan kemiskinan melalui dana sosial keagamaan produktif.

- **Berkebudayaan Maju**

Beberapa program pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan, yaitu: (1) pembinaan ideologi Pancasila serta penguatan karakter identitas bangsa; (2) perlindungan dan pelestarian warisan budaya; (3) jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (4) pengembangan budaya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi; (5) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia; (6) pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa; (7) pengembangan budaya Bahari dan revitalisasi jalur rempah. Agenda Pembangunan (AP) Berkebudayaan Maju dijalankan melalui satu Program Pembangunan (PP) Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan. Adapun Pengejawantahan PP tersebut dilakukan melalui tujuh Kegiatan Pembangunan (KP), yakni:

1. **Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Berdasarkan Pancasila.** Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter dan jati diri bangsa yang kokoh berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Adapun implementasinya melalui: internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh berbagai elemen, kampanye Pancasila di ruang publik dan

forum internasional, memproduksi konten digital terkait Pancasila, pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi pengajar dan pelajar tingkat dasar, menengah, dan tinggi, penguatan karakter pelajar berdasarkan Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara, dan meningkatkan jumlah fasilitasi pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama, penghayat kepercayaan, ras, serta golongan.

2. **Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya.** Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan warisan budaya yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Adapun implementasinya melalui: Integrasi basis data kebudayaan, pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM)kebudayaan, pengelolaan koleksi cagar budaya dan benda budaya, pelestarian cagar budaya, Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), penetapan warisan budaya nasional dan warisan budaya kelas dunia, melakukan fasilitasi dan kemitraan warisan budaya, pengembangan pusat unggulan naskah Nusantara, meningkatkan upaya alih aksara, alih Bahasa, dan pengkajian naskah kuno, melakukan konservasi manuskrip dan naskah kuno, kodifikasi bahasa dan sastra daerah, dan sosialisasi dan perlindungan Bahasa dan sastra daerah, digitalisasi arsip statis, penyediaan informasi arsip di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan penetapan arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB).
3. **Jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.** Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya hak berkebudayaan dan kebebasan berekspresi, serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kegiatan lokasi Pembangunan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia terkhusus wilayah MHA pesisir dan pulau-pulau kecil seperti misalnya di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Adapun implementasinya melalui: pelestarian nilai budaya dan OPK, integrasi basis data kekayaan intelektual komunal (KIK), advokasi pendaftaran KIK, pengahayat kepercayaan, dan lembaga adat, pemberdayaan MHA, melakukan pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil, pengembangan wilayah adat sebagai ruang pemajuan kebudayaan, penatausahaan Tanah Ulayat, pengembangan dan penetapan hutan adat, perlindungan dan penguatan kapasitas MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan program fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta harmonisasi pelaksanaan kebijakan terkait masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. **Pengembangan budaya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi.** Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Masyarakat literat untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya cipta. Adapun implementasinya melalui: penguatan konten literasi serta pengelolaan bahan perpustakaan dan langganan jurnal elektronik, peningkatan jejaring perpustakaan, peningkatan kualitas sarana prasarana dan SDM perpustakaan, penguatan sistem perbukuan, akreditasi seluruh jenis perpustakaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan (umum, khusus, sekolah/madrasah, dan PT), revitalisasi Gerakan Literasi Nasional, pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan perpustakaan disabilitas, pemberdayaan masyarakat berbasis konten perpustakaan, serta pengembangan dan penguatan budaya gemar membaca.
5. **Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia.** Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Adapun implementasinya melalui: pembinaan penutur Bahasa Indonesia, menyelenggarakan pengujian bagi penutur Bahasa Indonesia, pengujian penutur bahasa Indonesia, pembinaan program literasi Bahasa Indonesia, pembinaan komunitas sastra, peningkatan jumlah lembaga yang terfasilitasi program BIPA, penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum internasional, dan pengembangan Pusat Studi Bahasa Indonesia di luar negeri.

- 
6. **Pengembangan dan Pemanfaatan Khazanah Budaya Bangsa.** Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan khazanah budaya bangsa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun implementasinya melalui: fasilitasi karya perfilman dan musik Indonesia, fasilitasi bidang kebudayaan, pembinaan desa sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan, peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan, film, dan musik.
 7. **Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah.** Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk wawasan dan kesadaran atas potensi dan nilai-nilai kebaharian dan jalur rempah. Adapun implementasinya melalui: pengembangan SDM pariwisata bahari, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas pariwisata bahari, pelestarian cagar budaya, ODCB, dan OPK di Jalur Rempah, penyelenggaraan event kebudayaan di Jalur Rempah, dan pelestarian manuskrip dan naskah kuno terkait jalur rempah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sasaran.....	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Metodologi.....	4
1.6 Keluaran	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II BIDANG PENDIDIKAN	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Modal Manusia (<i>Human capital Theory</i>)	6
2.1.2 Sistem <i>Cradle-to-Career</i>	8
2.1.3 Pendidikan sebagai Modal Manusia (<i>Human Capital</i>)	9
2.1.4 Pembangunan Manusia Berdasarkan Pendekatan Siklus Hidup	10
2.1.5 Studi Kasus Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	11
2.2 Evaluasi Capaian RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan	13
2.3 Evaluasi Renstra 2020-2024 K-L yang Mengampu Bidang Pendidikan	17
2.3.1 Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	17
2.3.2 Renstra Kementerian Agama	21
2.4 Tantangan Masa Depan yang Mempengaruhi Pembangunan Pendidikan.....	23
2.4.1 Transisi Demografi	23
2.4.2 Pendidikan di Tengah Perkembangan Teknologi dan Informasi	24
2.4.3 Perubahan Lanskap Lapangan Kerja	26
2.4.4 Demokrasi dan Partisipasi Publik Relatif Masih Rendah	28
2.4.5 Tata Kelola Pendidikan yang Lemah.....	30
2.4.6 Pembiayaan Pendidikan yang Tidak Efektif.....	31
2.5 Analisis Situasi	32
2.5.1 Akses dan Layanan Pendidikan	32
a. Perkembangan Partisipasi Pendidikan Penduduk	32
2.5.2 Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Penduduk.....	33
a. Perkembangan Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)	35
b. Perkembangan Partisipasi Pendidikan Prasekolah dan Akses terhadap PAUD... 36	
2.5.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Umum Pendidikan	37

a.	Sebaran Ketersediaan Satuan Pendidikan di Kecamatan	37
b.	Kondisi Ruang Kelas Satuan Pendidikan di Kecamatan	37
c.	Kondisi Kepemilikan Perpustakaan dan Laboratorium Komputer di Satuan pendidikan	38
d.	Ketersediaan Prasarana Pembelajaran Digital.....	39
2.5.4	Kualitas Pendidikan	40
a.	Hasil tes <i>Programme for International Student Assessment (PISA)</i>	40
b.	Hasil tes <i>Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)</i>	41
c.	Hasil Asesmen Nasional (AN)	42
2.5.5	Distribusi dan Kualitas Guru	43
a.	Jumlah Guru menurut Jenjang.....	43
b.	Gelombang Pensiun Guru.....	43
c.	Kondisi Sebaran Guru berdasarkan Rasio Guru Murid dan Status PNS	44
d.	Kualitas Guru.....	45
2.5.6	Kualifikasi Pendidikan dan Produktivitas Lulusan	47
a.	Perkembangan Kualifikasi Pendidikan Pekerja.....	47
b.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Berdasarkan Kelompok Usia dan Kualifikasi Pendidikan	47
c.	Perkembangan Pendirian SMK dan Mismatch Lulusan SMK	48
2.5.7	Pendanaan Pendidikan.....	49
a.	Tren Anggaran pendidikan dalam APBN	49
b.	Persentase Alokasi Anggaran pendidikan di Daerah	50
c.	Komponen Pemanfaatan Anggaran pendidikan.....	51
d.	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Biaya pendidikan.....	51
e.	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan Berdasarkan Komponen Biaya Pendidikan	52
f.	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	52
g.	Dukungan Program Pemerintah dalam Membantu Biaya pendidikan.....	53
h.	Ketidaktepatan Penerima Beasiswa Didik KIP	53
2.5.8	Akses dan Kualitas Pendidikan Nonformal	54
a.	Sasaran Anak Tidak Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Kursus Pelatihan.....	54
b.	Perkembangan Pendidikan Kesetaraan	54
c.	Perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan	55
d.	Perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan	56
2.5.9	Pendidikan Karakter, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.....	56
a.	Karakter dan Pemahaman Agama Peserta didik	56
2.6	Isu Strategis	58
2.6.1	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun	

	pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	58
2.6.2	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	59
2.6.3	Penguatan Pengelolaan tenaga Pendidik dan Kependidikan Berkualitas.....	63
2.6.4	Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	64
2.6.5	Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja.....	66
2.7	Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029	67
2.8	Kertas Kerja <i>Cascading</i> Kebijakan.....	70
2.9	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMN 2025-2029	79
2.9.1	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Sumatera.....	79
2.9.2	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Jawa.....	79
2.9.3	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Bali.....	79
2.9.4	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Kalimantan	79
2.9.5	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Sulawesi.....	80
2.9.6	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Nusa Tenggara	80
2.9.7	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Kepulauan Maluku.....	80
2.9.8	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Papua.....	81
2.10	Kerangka Regulasi.....	81
BAB III BIDANG AGAMA DAN KEBUDAYAAN		84
3.1	Landasan Teori	84
3.1.1	Landasan Teori: Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	84
3.1.2	Kerangka Teori: Agama, Budaya, dan Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>).....	92
3.2	Evaluasi Capaian RPJMN 2020-2024	93
1.	Indeks Capaian Revolusi Mental	97
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	100
3.	Indeks Pembangunan Masyarakat.....	103
4.	Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	106
5.	Indeks Pembangunan Keluarga	108
6.	Nilai Budaya Literasi	110
3.3	Evaluasi Renstra 2020-2024 Bidang Agama dan Budaya	113
3.3.1.	Renstra Kementerian Agama	113
3.3.2.	Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	116
3.3.3.	Renstra Perpustakaan Nasional	116
3.4	Tantangan Masa Depan yang Mempengaruhi Pembangunan Agama dan Kebudayaan.....	118
3.5	Analisis Situasi	120
3.5.1	Analisis Situasi Bidang Agama	120
3.5.2	Analisis Situasi Bidang Budaya	133
3.6	Isu Strategis.....	141

3.6.1	Urgensi Multiliterasi Budaya Majemuk	141
3.6.2	Budaya Literasi di Era Transisi	141
3.6.3	Media Sosial, Kecerdasan Buatan (AI), dan Disrupsi Praktik Beragama.....	142
3.7	Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029	142
3.7.1	Game Changer	142
3.8	Strategi dan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045.....	147
3.9	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029	148
3.10	Kertas Kerja <i>Cascading</i> Kebijakan RPJMN 2025-2029	151
3.11	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMN 2025-2029	152
3.11.1	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Sumatera	154
3.11.2	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Jawa	154
3.11.3	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.....	154
3.11.4	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan.....	154
3.11.5	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi dan Kepulauan Maluku.....	154
3.11.6	Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Papua	154
3.12	Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	155
3.12.1	Kerangka Regulasi.....	155
BAB IV PENUTUP		156
4.1	Kesimpulan.....	156
4.1.1	Bidang Pendidikan.....	156
4.1.2	Bidang Agama dan Kebudayaan.....	156
4.2	Saran	157

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, dan Target Peningkatan Pemerataan Layanan pendidikan Berkualitas	14
Tabel 2. 2 Sasaran Kinerja Sasaran Strategis tahun 2020-2021	17
Tabel 2. 3 Sasaran Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022-2024	19
Tabel 2. 4 Sasaran Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2022-2024	21
Tabel 3. 1 Sasaran/Indikator RPJMN 2019-2024	95
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi Tahun 2018 (Nilai)	105
Tabel 3. 3 Capaian Rencana Strategis Kementerian Agama.....	110
Tabel 3. 4 Capaian Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	113
Tabel 3. 5 Capaian Rencana Strategis Perpustakaan Nasional.....	114
Tabel 3. 6 Indikator Pembangunan Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama	122
Tabel 3. 7 Indikator Pembangunan Jaminan Hak Beragama dan Advokasi Konflik Sosial Keagamaan	123
Tabel 3. 8 Indikator Pembangunan Peran Lembaga Sosial Keagamaan dan Keagamaan.....	124
Tabel 3. 9 Indikator Pembangunan Sarpras Pelayanan Kehidupan Keagamaan	125
Tabel 3. 10 Indikator Pembangunan Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	129
Tabel 3. 11 Indikator Pembangunan Jaminan Produk Halal	131
Tabel 3. 12 Indikator Pembangunan Dana Sosial Keagamaan.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Komponen Human Capital (Mayo, 2000)	7
Gambar 2. 2	Analisis SWOT Fenomena Massive Open Online Courses (MOOCs)	26
Gambar 2. 3	Analisis SWOT Perubahan Lanskap Lapangan Kerja.....	28
Gambar 2. 4	Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2010-2023.....	33
Gambar 2. 5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar PAUD Hingga pendidikan Tinggi Tahun 2010-2023	33
Gambar 2. 6	Kesenjangan Partisipasi pendidikan Jenjang SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat Antarwilayah Tahun 2023.....	34
Gambar 2. 7	Kesenjangan Partisipasi pendidikan Jenjang SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat Antarstatus Sosial-Ekonomi Tahun 2000-2023	34
Gambar 2. 8	Kesenjangan Partisipasi pendidikan Jenjang SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat Antarjenis Daerah Tempat Tinggal Tahun 2015-2023	35
Gambar 2. 9	Perkembangan Jumlah Anak Tidak Sekolah Tahun 2018-2023.....	35
Gambar 2. 10	Sebaran Jumlah Anak Tidak Sekolah Tahun 2023.....	36
Gambar 2. 11	Jumlah TK/RA dan Persentase Anak Kelas 1 SD yang Pernah PAUD.....	36
Gambar 2. 12	Jumlah Kecamatan yang Belum Memiliki Satuan pendidikan Tahun 2021	37
Gambar 2. 13	Jumlah Satuan pendidikan Berdasarkan Kondisi Ruang Kelas Tahun 2022.....	38
Gambar 2. 14	Jumlah Satuan pendidikan Berdasarkan Kepemilikan Perpustakaan dan Laboratorium Komputer Tahun 2022	39
Gambar 2. 15	Sebaran Persentase Sekolah yang Memiliki Akses Internet Tahun 2023.....	40
Gambar 2. 16	Sebaran Persentase Sekolah yang Memiliki Akses Listrik Tahun 2023	40
Gambar 2. 17	Hasil PISA Tahun 2022	41
Gambar 2. 18	Hasil TIMSS Indonesia Tahun 1999-2015	42
Gambar 2. 19	Hasil Asesmen Nasional Tahun 2021	42
Gambar 2. 20	Jumlah Guru pada Setiap Jenjang Tahun 2021.....	43
Gambar 2. 21	Jumlah Guru yang Akan Pensiun dan Total Kekurangan Guru Tahun 2020-2024	44
Gambar 2. 22	Rasio Guru terhadap Peserta didik Tahun 2021	44
Gambar 2. 23	Rasio Guru PNS terhadap Peserta didik Tahun 2021	45
Gambar 2. 24	Hasil UKG Tahun 2015	46
Gambar 2. 25	Hasil UKG Per Provinsi Tahun 2015	46
Gambar 2. 26	Perkembangan Kualifikasi pendidikan Pekerja Tahun 2010-2021.....	47
Gambar 2. 27	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2021	48
Gambar 2. 28	Perkembangan Jumlah Pendirian SMK Baru Tahun 2000-2022.....	48
Gambar 2. 29	Perbandingan Kurikulum SMK di Indonesia dengan Jerman	48
Gambar 2. 30	Anggaran pendidikan dalam APBN (triliun rupiah).....	49
Gambar 2. 31	Persentase Alokasi Anggaran pendidikan di Daerah dengan Dana Transfer Daerah Tahun 2021.....	50
Gambar 2. 32	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk Biaya pendidikan per Peserta didik Menurut Jenjang pendidikan (juta rupiah)	51
Gambar 2. 33	Persentase Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan Berdasarkan Komponen Biaya pendidikan Tahun 2021.....	52
Gambar 2. 34	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 (Juta Rupiah)	53
Gambar 2. 35	Persentase Peserta didik yang Menerima Bantuan Biaya pendidikan Berdasarkan Sumber Bantuan Tahun 2021	53
Gambar 2. 36	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Anak Penerima PIP Tahun 2021	54
Gambar 2. 37	Jumlah Angka Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Tahun 2021	54
Gambar 2. 38	Perkembangan Jumlah Peserta pendidikan Kesetaraan Tahun 2016-2021.....	55
Gambar 2. 39	Perkembangan Jumlah Satuan pendidikan Kesetaraan Tahun 2018-2021	55
Gambar 2. 40	Akreditasi Satuan pendidikan Nonformal Tahun 2021	56

Gambar 2. 41 Proporsi Peserta didik/Mahasiswa Menurut Kategori Opini dan Aksi Intoleransi Internal, Intoleransi Eksternal, dan Radikalisme.....	57
Gambar 2. 42 Profil Pengajar Pesantren Tahun 2021	58
Gambar 2. 43 Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045	69
Gambar 2. 44 Cascading Kertas Kerja RPJMN 2025-2029 Bidang Pendidikan.....	71
Gambar 3. 1 Kerangka Teori Pembangunan Agama dan Budaya	93
Gambar 3. 2 Tren Capaian Kinerja Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2020–2024 (Nilai).....	98
Gambar 3. 3 Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2019–2022 (Gugus Tugas Daerah)	98
Gambar 3. 4 Tren Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020–2024 (Nilai)..	101
Gambar 3. 5 Peta Sebaran Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Berdasarkan Provinsi Tahun 2018-2019 2020–2021 (Nilai)	101
Gambar 3. 6 Perbandingan Capaian Dimensi Pembentuk IPK Tahun 2018–2021 (Nilai).....	102
Gambar 3. 7 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat (IPMas) Berdasarkan Dimensi Penyusunnya Tahun 2018.....	103
Gambar 3. 8 Tren Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat (IPMas) Sebelum Perubahan Metode Tahun 2020–2024 (Nilai).....	104
Gambar 3. 9 Tren Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat (IPMas) Setelah Perubahan Metode Tahun 2020–2024 (Nilai).....	104
Gambar 3. 10 Tren Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020–2024 (Nilai)	106
Gambar 3. 11 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 (Nilai)	108
Gambar 3. 12 Tren Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2020–2024 (Nilai)	109
Gambar 3. 13 Capaian Dimensi Pembentuk Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2020–2021 (Nilai)	109
Gambar 3. 14 Tren Capaian Kinerja Nilai Budaya Literasi Tahun 2020–2024 (Nilai)	110
Gambar 3. 15 Capaian Indikator Pembentuk Nilai Budaya Literasi Tahun 2021 (Nilai)	111
Gambar 3. 16 Capaian Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 (Nilai).....	112
Gambar 3. 17 Indeks Aktualisasi Pancasila	134
Gambar 3. 18 Dimensi Ketahanan Sosial Budaya.....	135
Gambar 3. 19 Dimensi Warisan Budaya IPK.....	136
Gambar 3. 20 Dimensi Ekspresi Budaya IPK	137
Gambar 3. 21 Jumlah Masyarakat Hukum Adat (hingga 2023).....	137
Gambar 3. 22 Dimensi Budaya Literasi IPK.....	139
Gambar 3. 23 Dimensi Ekonomi Budaya.....	140
Gambar 3. 24 Rencana Tahapan Pembangunan Manusia Menuju Indonesia Emas 2045.....	147
Gambar 3. 25 Kertas Kerja Cascading Arah Pembangunan “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”	152
Gambar 3. 26 Kegiatan Pembangunan/Intervensi Transformatif di Setiap Pulau	153

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, jangka pendek, dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945. RPJP Nasional memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 tahun.

RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebuah tahapan pembangunan lima tahunan yang bersifat sinergis dan disusun sesuai dengan visi-misi Presiden terpilih. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 4 ayat (2), bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam upaya memperoleh dukungan semua lapisan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, penyusunan RPJMN dilakukan secara partisipatif melalui proses politik dan proses teknokratis. Secara teoritis, kebijakan pembangunan yang diformulasikan secara partisipatif akan memperoleh dukungan yang lebih besar dibanding kebijakan yang diformulasikan secara elitis apalagi otoritatif (Wibawa, 1994). Pada proses politik akan dilakukan melalui penyampaian visi, misi calon presiden, sedangkan pada proses teknokratis dilakukan melalui kajian yang melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN berjalan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini, pelaksanaan RPJMN 2020-2024 telah memasuki tahun terakhir pelaksanaan. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan lima tahunan, maka perlu disiapkan tahapan RPJMN 2025-2029. Persiapan tersebut tentunya perlu dilakukan secara utuh dan terintegrasi melalui suatu perencanaan teknokratis yang partisipatif dengan tetap mengacu pada proses politik yang demokratis. Untuk itu Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan melakukan **Kajian Pendahuluan RPJMN 2025-2029 Bidang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan**. Dengan dilaksanakannya studi pendahuluan ini, diharapkan akan teridentifikasi landasan pemikiran visioner juga hasil evaluasi pembangunan sebelumnya, termasuk pemetaan agenda pembangunan, isu-isu strategis dan tantangan di masa depan berskala lokal-global, serta rekomendasi kebijakan pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.

Berkaitan dengan sektor pendidikan, sektor ini seyogianya dapat diakses oleh seluruh penduduk

Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, dan kelompok ekonomi. Pendidikan merupakan hak dasar bagi semua warga negara, dan bukan hak istimewa bagi sekelompok masyarakat. Karena itu, pelayanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat bahkan yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terdepan. Selain itu, layanan pendidikan juga harus berkualitas yang mampu mewujudkan SDM unggul dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Selain isu-isu tersebut, masih banyak isu strategis lainnya yang perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global, seperti kompetensi dan distribusi guru, penjaminan mutu pendidikan, pendanaan, dan lain-lain. Untuk itu, perencanaan pembangunan pendidikan harus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, kekuatan, dan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Sektor pendidikan juga perlu merespons beberapa tren global, salah satunya terkait fenomena *Massive Open Online Courses (MOOCs)*, teknologi kontemporer dalam pembelajaran yang semakin berkembang (eg: *metaverse*), kebutuhan akan penerapan *21st century skills*, dan pekerjaan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Merespons tantangan dan isu yang dihadapi tersebut, telah disusun rumusan tahapan transformasi sosial dalam empat tahap yaitu: Tahap 1 (2025-2029), *Perkuatan Fondasi Transformasi*, diarahkan untuk menuntaskan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; Tahap 2 (2030-2034), *Akselerasi Transformasi*, diarahkan untuk meningkatkan inklusivitas dan mempercepat pembangunan SDM berkualitas; Tahap 3 (2035-2039), *Ekspansi Global*, diarahkan untuk memperkuat daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan; dan Tahap 4 (2040-2045), *Perwujudan Indonesia Emas*, diarahkan demi terwujudnya manusia Indonesia yang unggul.

Pembangunan di bidang agama dan kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Keduanya sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang berkualitas, berkesinambungan dan menyeluruh serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan di bidang agama dan kebudayaan perlu disusun dengan baik, yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan bidang-bidang lainnya. Perencanaan Pembangunan di bidang agama dan kebudayaan diharapkan mampu memperkuat tatanan pembangunan nasional, dimensi agama perlu diperkuat sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan, sementara dimensi kebudayaan perlu perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Sejauh ini pembangunan bidang agama dan kebudayaan menghadapi serangkaian tantangan, antara lain: (1) Pembangunan dan modernisasi yang eksploitatif mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak negatif pada ekosistem alam dan budaya lokal; (2) Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat; (3) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (4) Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global; (5) Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif; dan (6) Kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan.

Merespons tantangan tersebut, telah disusun rumusan tahapan ketahanan sosial budaya dan ekologi (agama dan kebudayaan) dengan empat tahap utama. Tahap 1 (2025-2029), *Perkuatan Fondasi Transformasi*, diarahkan untuk melakukan optimalisasi peran agama, keluarga, dan masyarakat dalam penguatan karakter individu dan penanaman nilai positif. Tahap 2 (2030-2034), *Akselerasi*

Transformasi, diarahkan untuk memperkuat peran agama, kebudayaan, dan keluarga sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif. Tahap 3 (2035-2039), *Ekspansi Global*, diarahkan demi terwujudnya manusia dan masyarakat yang adaptif dalam menghadapi perubahan sosial budaya dan tangguh berkontribusi dalam pembangunan. Tahap 4 (2040-2045), *Perwujudan Indonesia Emas*, diarahkan demi terwujudnya masyarakat madani serta Indonesia sebagai pusat peradaban keagamaan dan kebudayaan dunia.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum:

Kajian ini bertujuan untuk menyusun konsep kebijakan, prioritas dan program pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2025-2029.

Tujuan Khusus:

1. Melakukan analisa situasi, meliputi identifikasi permasalahan, tantangan, hambatan, peluang, kekuatan, dan isu strategis bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
2. Melakukan analisa evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020-2024 untuk mengetahui capaian pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
3. Melakukan analisa kebijakan, meliputi *review* kebijakan pembangunan lima tahun pada RPJMN 2020-2024 terkait bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
4. Melakukan perumusan sasaran dan arah kebijakan pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
5. Melakukan perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
6. Melakukan penyusunan kertas kerja *cascading* kebijakan, strategi dan rancangan arah kebijakan kewilayahan RPJMN 2025-2029

1.3 Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya rumusan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bahan masukan/rekomendasi bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2025-2029 secara teknokratik.

1.4 Ruang Lingkup

- a. Pengumpulan dan pengolahan basis data sebagai bahan untuk analisa situasi yang meliputi: permasalahan, tantangan, hambatan, peluang, kekuatan, dan isu strategis dalam pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
- b. Evaluasi kinerja pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan tahun 2020-2024 sebagai landasan kondisi awal dalam penyusunan RPJMN 2025-2029.
- c. Inventarisasi kebijakan pembangunan agama, pendidikan, dan kebudayaan, baik di pusat maupun di daerah.
- d. Penelusuran bahan pustaka melalui buku dan *website* sebagai bahan *benchmarking* kebijakan pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
- e. Diskusi dan workshop di tingkat pusat dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* terkait pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.

- f. Koordinasi dengan daerah dalam rangka menjaring aspirasi dari daerah terkait dengan pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.

1.5 Metodologi

Kegiatan kajian pendahuluan ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dengan metode dan pendekatan tersebut kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan kajian yang mendalam dan rinci mengenai potret pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan kajian pendahuluan ini dirumuskan sesuai dengan kebutuhan jenis data yang akan digali. Data yang digunakan diambil baik dari data primer maupun data sekunder.

Data primer didasarkan pada, *pertama*, studi lapangan, yakni dengan melakukan kunjungan lapangan dan penjangkaran isu (diskusi kelompok terpusat, forum konsultasi publik) ke beberapa provinsi untuk melakukan pertemuan dengan instansi dan pemangku kepentingan di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Studi lapangan menggali berbagai data dan informasi yang terkait dengan lingkup kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.

Kedua, diskusi di tingkat pusat. Dalam hal ini dilakukan serangkaian pertemuan dalam bentuk workshop dan diskusi di tingkat pusat dalam rangka menggali data dan informasi serta pembahasan berbagai isu, kebijakan, dan program pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan dengan kementerian/lembaga mitra kerja Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas. Sedangkan untuk data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terkait dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam hal ini, media cetak, baik koran maupun majalah, juga digunakan sebagai data pendukung.

Data yang telah terkumpul dalam kajian ini akan dianalisis sebelum nantinya dideskripsikan dalam sebuah laporan. Data yang berbentuk dokumen, baik primer maupun sekunder akan diperiksa secara seksama dengan melihat orisinalitas, waktu penulisan, dan materi teks dokumen. Setelah itu, data akan diklasifikasi berdasarkan variabel yang sesuai dengan fokus kajian. Sedangkan terhadap data hasil wawancara, akan ditranskrip dan disadur dalam bentuk tulisan. Terhadap keduanya, akan dilakukan interpretasi menggunakan multidisipliner ilmu-ilmu sosial untuk selanjutnya ditulis dalam bentuk laporan dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan.

1.6 Keluaran

Kegiatan ini menghasilkan suatu rumusan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan tahun 2025-2029 yang dapat dijadikan sebagai:

1. Rekomendasi dalam perbaikan/penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan strategi di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan
2. Bahan masukan dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 agama, pendidikan, dan kebudayaan

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini disusun secara berurutan, sebagaimana berikut:

BAB I. Pendahuluan, mengemukakan latar belakang dan tujuan kegiatan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, keluaran, dan sistematika yang digunakan dalam pelaporan.

BAB II. Bidang Pendidikan, membahas landasan teori, evaluasi capaian RPJMN 2020-2024 bidang pendidikan, Evaluasi Renstra 2020-2024 K-L yang mengampu bidang pendidikan, tantangan masa depan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan, analisis situasi, isu strategis, arah kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-



2029, kertas kerja *cascading* kebijakan, strategi dan rancangan arah kebijakan kewilayahan RPJMN 2025-2029, kerangka regulasi.

BAB III. Bidang Agama dan Kebudayaan, membahas landasan teori, evaluasi capaian RPJMN 2020-2024 bidang agama dan kebudayaan, tantangan masa depan yang mempengaruhi pembangunan agama dan kebudayaan, analisis situasi, isu strategis, arah kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, kertas kerja *cascading* kebijakan, strategi dan rancangan arah kebijakan kewilayahan RPJMN 2025-2029, kerangka regulasi.

BAB IV. Penutup, meliputi: kesimpulan dan rekomendasi kebijakan

BAB II BIDANG PENDIDIKAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Modal Manusia (*Human capital Theory*)

Modal Manusia (*Human capital*) merupakan kesatuan ilmu pengetahuan, ilmu keterampilan, kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang didapat dalam periode waktu tertentu, melalui berbagai jenjang dan jenis pendidikan, pelatihan keterampilan, pengalaman dalam melakukan pekerjaan, pelayanan kesehatan dan mobilisasi (Theodore W. Schultz, 1961; Becker, 1992; Sultana et al., 2022;). *Human capital* meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang diakumulasi dalam kehidupan individu sebagai pendorong utama pertumbuhan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Dalam teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer (1986) menekankan bahwa pengembangan *human capital* merupakan unsur yang sangat penting dari modal intelektual. Hal ini dikarenakan pengembangan *human capital* mampu menciptakan manusia berdaya saing (Sultana et al., 2022b).

Schultz (1961) menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas ekonomi di suatu negara. Peningkatan *human capital* dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara, diantaranya: Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktivitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan *human capital*. Investasi tersebut berupa pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manusia yang akan meningkatkan produktivitas.

Todaro dan Smith (2012) mengungkapkan bahwa *human capital* dapat diukur salah satunya melalui kualitas pendidikan (termasuk pelatihan) dan kesehatan. Hal ini menginterpretasikan bahwa semakin tinggi pendidikan individu atau semakin banyak pelatihan yang diikuti, maka semakin tinggi pula kemampuan dan keterampilan yang dimiliki individu tersebut. Di samping itu, kesehatan merupakan sektor yang saling terkait dengan pendidikan. Hal ini dapat diartikan dengan individu dengan pendidikan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan kualitas kesehatan yang baik akan memengaruhi pada tingkat produktivitas individu tersebut. Di sisi lain, individu yang berpendidikan tinggi dapat memengaruhi pola pikir, perilaku, dan kesadaran tentang kesehatan individu tersebut.

Menurut Mayo (2000) dalam penelitiannya berpendapat bahwa *Human capital* memiliki 5 (lima) komponen diantaranya, *individual capability*, *individual motivation*, *the organization climate*, *workgroup effectiveness*, dan *leadership*.

Gambar 2. 1 Komponen *Human Capital* (Mayo, 2000)



1. *Individual Capability* (Kecakapan Individu) terbagi menjadi dua bagian:
 - a. Kecakapan nyata (*actual ability*) merupakan kecakapan yang diperoleh melalui belajar (*achievement* atau prestasi), yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji saat berlangsungnya pengujian.
 - b. Kecakapan potensial (*potential ability*) merupakan aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan. Kecakapan potensial ini terbagi menjadi dua bagian, yakni kecakapan dasar umum (*intelligence* atau kecerdasan) dan kecakapan dasar khusus (bakat dan *attitudes*).
2. *Individual Motivation* (Motivasi Individu), yakni terbentuk dari sikap (*attitude*) individu dalam menghadapi situasi. Sikap mental individu yang positif terhadap situasi yang dialami dapat memperkuat motivasi untuk mencapai *output* yang maksimal. Motivasi individu pada segi prestasi diartikan sebagai suatu dorongan dalam diri individu untuk melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang unggul.
3. *The Organization Climate* (Budaya Organisasi) adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang akan memengaruhi cara anggota organisasi bekerja dan berperilaku. Suasana yang kondusif akan mendorong individu untuk memberikan kontribusi yang semakin baik. Hal ini bermakna ketika individu merasa nyaman dan puas terhadap tempat dimana dia bekerja atau belajar, maka individu tersebut akan berusaha secara maksimal untuk mencapai kemajuan bersama.
4. *Workgroup Effectiveness* (Efektivitas Tim Kerja) didasarkan pada dua hasil, yakni produktivitas dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian dapat mempertahankan keanggotaannya, serta mampu berkomitmen terhadap kelompoknya. Hasil produksi individu berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti yang didefinisikan

oleh tujuan-tujuan tim yaitu konteks organisasional, struktur, strategi, lingkungan budaya, dan penghargaan.

5. *Leadership* (Kepemimpinan) merupakan sikap pribadi dalam memimpin aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan memiliki pengaruh antarindividu dalam situasi tertentu dan secara langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.

Dari 5 (lima) komponen *human capital* dan definisi *human capital* dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa *human capital* memiliki makna manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. *Human capital* merupakan sebagai jumlah total dari pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara. Konsep *human capital* dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek individual. Konsep kedua menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas. Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi.

2.1.2 Sistem *Cradle-to-Career*

Sistem *cradle to career* adalah sistem atau kerangka pikir yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memberi anak-anak dukungan kesehatan, sosial, dan pendidikan sejak lahir hingga perguruan tinggi dan karir (Hirst, 2020). Sistem *cradle-to-career* seperti *Promise Neighborhoods* dan *Harlem Children's Zone* di Amerika Serikat menggunakan dukungan pendidikan menyeluruh untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi dengan membantu anak-anak belajar, tumbuh, dan sukses secara efektif.

Sistem *cradle-to-career* menyatukan warga, staf sekolah, tokoh masyarakat, dan penyedia layanan pendidikan untuk memfokuskan upaya kolektif mereka dalam menangani area penting perkembangan anak dengan komitmen jangka panjang seluruh komunitas. Area penting tersebut meliputi pembelajaran dan pengembangan awal, tolok ukur pembelajaran dasar, transisi yang sukses ke sekolah menengah, kelulusan sekolah menengah atas tepat waktu, dan keberhasilan transisi ke jalur karir. Sistem *cradle to career* tidak hanya menyampaikan program berkualitas di dalam dan di luar sekolah, tetapi juga menyampaikan perubahan kebijakan dan sistem untuk mengatasi hambatan akses pendidikan (*The Cradle to Career Act 2010*).

Untuk mengembangkan infrastruktur yang kuat dalam menciptakan sistem *cradle-to-career* yang efektif membutuhkan komitmen dan disiplin jangka panjang di berbagai pemangku kepentingan. Dengan mengkoordinasikan dan menyelaraskan sumber daya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi anak-anak dan keluarga di lingkungan tertentu, dukungan pendidikan menyeluruh dapat menghasilkan lebih dari sekadar meningkatkan hasil sekolah bagi peserta didik. Sistem *cradle-to-career* akan menjadi rangkaian sumber daya ramah pengguna yang berfokus pada pembelajaran awal hingga K-12 dan pendidikan tinggi, serta bantuan keuangan dan layanan sosial yang membantu peserta didik mencapai tujuan mereka. Aspek-aspek yang dapat diimplementasikan dalam *cradle-to-career* mencakup:

- a. Alat perencanaan dan aplikasi untuk peserta didik, keluarga, dan tenaga kependidikan untuk menyederhanakan proses bantuan keuangan serta memfasilitasi kemajuan peserta didik.
- b. Data yang terintegrasi untuk peneliti, pembuat kebijakan, tenaga kependidikan, dan anggota masyarakat untuk penelitian, advokasi, dan analisis kebijakan. Pelibatan dan pelatihan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan data sistem dan memastikannya

... : : : : : :
dapat digunakan oleh peserta didik, keluarga, tenaga kependidikan, peneliti, dan pembuat kebijakan.

2.1.3 Pendidikan sebagai Modal Manusia (*Human Capital*)

Belke dan Wernet, (2015) pada studinya menjelaskan bahwa pada *human capital* menyatakan adanya hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan variabel kebijakan seperti modal manusia pendidikan dan kesehatan. Lucas, (1988) pada studinya menyatakan bahwa *human capital* sebagai salah satu faktor produksi dimana peran pendidikan sebagai akumulasi modal manusia. Pada kajian teoritis dan empiris menjelaskan terdapat hubungan langsung antara komponen modal manusia seperti lama pendidikan, pengalaman, keterampilan dan pendapatan (Egana-delSol dkk., 2019 dan Sultana dkk., 2022b).

Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar yaitu manusia dan kapital. Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dalam *human capital* merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Seiring perkembangan teori *human capital*, konsep *human capital* dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa model manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi, (2002) yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia.

Konsep kedua menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu (Robeyns, 2006b). Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia. Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Becker, (1992) dan Jude Eggoh dkk., (2015) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktivitas ekonomi. *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktivitasnya (Rosen, 1999). (Cook dan Frank, 2008) berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang memengaruhi produktivitas manusia.

Investasi pada modal manusia dapat dilaksanakan dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, pelatihan, dan keterampilan. Proses pendidikan sebagai dasar *human capital*, serta adanya pelatihan dan keterampilan bermanfaat bagi manusia dalam meningkatkan kemampuan belajar dan produktivitas. *Human capital* dapat ditingkatkan melalui jenis dan jenjang pendidikan yang ditempuh. Individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan berkorelasi pada peningkatan *human capital*. Peningkatan *human capital* dapat dilakukan investasi sumber daya manusia, yang dilakukan melalui berbagai jenis dan jenjang pendidikan, pengalaman yang diperoleh dari kerja, kesehatan, serta migrasi (Lanzi, 2007).

Teori *human capital* mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menghasilkan masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi (Schultz, 1961). Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas masyarakat tersebut. Dalam proses pembangunan, teori *human capital* tersebut setidaknya harus memiliki dua syarat keharusan. Pertama, adanya pemanfaatan teknologi secara

efisien serta adanya sumber daya manusia yang mengelola dan/atau menggunakan teknologi tersebut. Sumber daya manusia dihasilkan melalui proses pendidikan. Hal ini yang menyebabkan teori *human capital* meyakini bahwa investasi dalam pendidikan merupakan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat. Kasus di beberapa negara mengindikasikan hal yang sama mengenai investasi dalam pendidikan merupakan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat, misalnya di Afrika (Ghana, Kenya, Nigeria) dan di Asia (Korea, Jepang, Hongkong, Singapura, Malaysia). Hal ini menggambarkan kualitas pendidikan individu seperti lulusan SD dengan lulusan Doktor akan memiliki perbedaan kemampuan yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas.

2.1.4 Pembangunan Manusia Berdasarkan Pendekatan Siklus Hidup

Pada hakikatnya pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, memampukan manusia (*human capabilities*) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar. Pembangunan manusia dicapai dengan memenuhi tiga layanan dasar yang sebagai prasyarat utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pembangunan manusia di dalam pembangunan berkelanjutan memegang peran mendasar tidak hanya karena sumber daya manusia yang memiliki kesehatan, terpenuhi kebutuhan dasarnya serta terbangun kapabilitasnya; namun di dalam kapabilitas sumber daya manusia perlu adanya transformasi mendasar tentang tanggungjawabnya terhadap alam.

Sumber daya manusia seringkali dikenal sebagai upaya untuk meningkatkan modal manusia (*human capital*). Investasi modal manusia bersifat kumulatif, yang harus dipupuk sejak awal dan berlangsung terus menerus. Sen (1988) menjelaskan mengenai konsep pembangunan sumber daya manusia berbeda dengan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, sumber daya manusia dipandang sebatas salah satu input dalam faktor produksi, disamping modal dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan perekonomian. Beberapa pendekatan pembangunan sumber daya manusia menurut pendekatan modal manusia dan pembangunan kapabilitas yang mencakup pendekatan siklus kehidupan serta pendekatan terhadap 1.000 hari pertama kehidupan. Pembangunan manusia menurut Sen (1988), E (2004), dan Sachs (2015) dilakukan dengan menggunakan pendekatan siklus hidup yang berlangsung melalui enam fase, yaitu:

- a. Pertama, fase prenatal dan ASI atau disebut juga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan balita. Pada fase ini yang menjadi perhatian adalah memastikan kecukupan gizi dan pola asuh bayi, balita, dan balita untuk mencegah gagal tumbuh (*stunting*) dengan memberikan jaminan kesehatan ibu dan anak.
- b. Kedua, fase usia dini. Pada fase ini didukung dengan menginisiasi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan program pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif (PAUD-HI) yang memaksimalkan kemampuan kognitif anak (stimulasi psikologis, pola asuh yang tepat, pemberian makan yang tepat) termasuk pembiasaan pada nilai-nilai karakter yang baik.
- c. Ketiga, fase Wajib Belajar. Fase ini merupakan fase investasi sekolah melalui wajib belajar 13 tahun dan penguatan pendidikan karakter. Pada fase ini juga merupakan fase penguatan kemampuan dan keterampilan anak dengan memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi yang dimulai sejak pendidikan menengah hingga tingkat perguruan tinggi.
- d. Keempat, fase perguruan tinggi yang menargetkan peningkatan produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sangat dibutuhkan agar Indonesia siap menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada 2030 mendatang.

- e. Berikutnya, fase kelima yang merupakan fase produktif. Fase dimana manusia memasuki dunia kerja, membangun keluarga berkualitas. Pada fase ini didukung dengan memberikan pembelajaran sepanjang hayat dan jaminan ketenagakerjaan. Hal ini disiapkan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang.
- f. Fase terakhir, fase lansia. Diharapkan, pada fase ini bisa diwujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan bermartabat.

Pada seluruh fase siklus hidup tidak dapat lepas dari pemberian jaminan kesehatan nasional, pengendalian penyakit, bantuan gizi, bantuan sosial, asistensi dan rehabilitasi penyandang disabilitas. Hal ini untuk memastikan dan menjamin setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan.

2.1.5 Studi Kasus Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun

Pendidikan adalah keseluruhan upaya dan upaya untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi manusia untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Selain itu, pendidikan juga merupakan upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya, cerdas jasmani dan rohani, sehat, dan berakhlak mulia. Pendidikan yang baik dan bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas individu di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, setiap negara berlomba-lomba untuk merencanakan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi setiap warga negaranya. Melalui pendidikan yang bermutu, maka sebuah negara akan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Subjek utama pada pelaksanaan pendidikan yaitu anak-anak bangsa. Anak merupakan generasi muda yang memiliki potensi unggul untuk mewujudkan cita-cita tanah air. Sebagai bagian dari sumber daya manusia anak harus dididik dan dibina agar memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik dapat diperoleh melalui pendidikan. Hal itu menjelaskan bahwa pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Konsep pendidikan sepanjang hayat menjadi panduan dalam meninggikan harkat dan martabat manusia. Anak-anak bangsa ini tidak boleh tertinggal dengan bangsa lainnya di dunia.

Pendidikan merupakan investasi terpenting yang dilakukan orang tua bagi masa depan anaknya. Sejak lahir ke dunia, anak memiliki banyak potensi dan harapan untuk berhasil di kemudian hari. Pendidikanlah yang menjadi jembatan penghubung anak dengan masa depannya itu. Oleh karena itu, pendidikan sejak dini harus ditanamkan kepada mereka. Salah satu kebijakan pemerintah di sektor pendidikan yang mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah pelaksanaan pendidikan 1 tahun pra sekolah (PAUD) dan penerapan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pendidikan harus dilakukan di semua usia, maka pemikiran-pemikiran terhadap pendidikan harus mencakup semua golongan usia tersebut. Begitu pula dengan berbagai pemikiran dan kebijakan terhadap PAUD, harus merunut pada kebutuhan anak usia dini dalam proses perkembangannya. Kajian terhadap keberadaan PAUD dalam sistem pendidikan nasional perlu banyak dilakukan, baik kajian terhadap aspek-aspek filosofisnya maupun aspek-aspek

teknis, berupa kurikulum maupun proses pembelajaran PAUD di lapangan. Melalui hal tersebut diharapkan pengembangan PAUD dapat lebih meningkat, demi menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan melalui 3 jalur yaitu: Pertama, jalur pendidikan formal bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat; Kedua, jalur pendidikan non formal bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat dan ketiga, jalur pendidikan informal bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Jepang merupakan salah satu negara maju yang telah melaksanakan pendidikan 1 tahun pra sekolah (PAUD). Ada dua macam sekolah untuk anak usia dini (PAUD) di Jepang, yang pertama adalah *hoikuen* (*daycare*) dan yang kedua adalah *yochien* (taman kanak-kanak) (Mulyadi, 2020).

Publikasi *World Bank* (2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan 1 tahun pra sekolah (PAUD) dan penerapan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah berlangsung di beberapa negara. Negara-negara tersebut diantaranya Malaysia, China, Chili, dan Korea. Partisipasi anak yang mengikuti pendidikan 1 tahun pra sekolah di Malaysia pada tahun 2019 telah mencapai 98 persen, diikuti dengan Korea sebesar 92 persen, China sebesar 89,5 persen, dan Chili sebesar 85 persen. Jika diamati dari capaian di beberapa negara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan pra sekolah telah terlaksana dengan baik dan merata. Namun, Indonesia masih mengalami ketertinggalan partisipasi anak Indonesia pada pendidikan 1 tahun pra sekolah jika dibandingkan dengan 4 negara tersebut. Pada tahun 2019 Indonesia memiliki angka partisipasi anak yang mengikuti pendidikan 1 tahun pra sekolah sebesar 36,9 persen. Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia diperlukan upaya dalam meningkatkan dan memperluas akses pendidikan 1 tahun pra sekolah pada anak-anak berusia 5-6 tahun untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul tahun 2045.

Di sisi lain, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun (pendidikan dasar dan pendidikan menengah) tetap harus menjadi perhatian agar tetap berjalan dengan baik. Indonesia dan 4 negara tersebut memiliki capaian pelaksanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah cukup baik dan merata, serta tidak mengalami ketertinggalan yang signifikan. Dalam mendukung capaian pelaksanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang semakin berkualitas dan merata terdapat beberapa isu penting dalam penguatan wajib belajar 12 tahun, sebagai berikut: (a) menetapkan landasan hukum dalam mendukung wajib belajar 13 tahun; (b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah termasuk penyelenggaraan sekolah satu atap/SATAP SMP/MTs-SMA/MA untuk daerah-daerah terpencil dan terluar dan kecamatan yang tidak memiliki SMA/MA, termasuk perluasan skema sekolah terbuka dan pemanfaatan digitalisasi di bidang pendidikan; (c) melembagakan biaya operasional sekolah sesuai SPM pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan memperhatikan tingkat kemahalan masing-masing wilayah; (d) meningkatkan secara berkelanjutan kompetensi peserta didik yang diukur dengan tes berstandar internasional termasuk PISA dan penyelenggaraan tes kompetensi peserta didik berstandar internasional lainnya seperti Asesmen Nasional (AN) yang dilakukan secara agresif sehingga setara dengan beberapa negara maju; (e) meluaskan identifikasi peserta didik berpotensi talenta unggul untuk dikembangkan lebih lanjut talentanya; (f) memperluas pola kerjasama penyelenggaraan pendidikan antara pendidikan negeri dan swasta pada ketiga jenjang

pemerintahan; (g) memperkuat penanaman *21st Century Skills* dilengkapi peningkatan pendekatan pembelajaran pembelajaran dari *expository learning ke discovery learning*, selaras dengan penumbuh-kembangan *scientific inquiry* dan *scientific temper peserta didik* diikuti dengan percontohan penerapannya; (h) memperluas penguatan *soft skills* pada pendidikan menengah vokasi, serta Memperluas *link & match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui pelibatan industri sejak perencanaan sampai penempatan siswa; (i) Memperkuat dan memperluas pelaksanaan pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) dengan melibatkan lintas sektor; serta (j) memperkuat kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

2.2 Evaluasi Capaian RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah perencanaan pembangunan lima tahunan yang merupakan penjabaran langkah strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2024. Sistem perencanaan RPJMN terdiri dari empat tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan seperti yang diatur dalam PP No. 39/2006. Tahap evaluasi melakukan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, manfaat, dan keberlanjutan dari suatu program berdasarkan:

- a. Sumber daya yang digunakan
- b. Indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok, dan/atau,
- c. Indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

Menteri PPN/Bappenas bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap RPJMN berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) yaitu rencana pembangunan jangka menengah untuk periode lima tahun. Evaluasi Renstra K-L tersebut dilakukan oleh masing-masing menteri atau ketua lembaga terkait. Sesuai dengan UU No. 18/2020, evaluasi pelaksanaan RPJMN dilakukan dua kali yaitu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan.

Penyusunan RPJMN 2020-2024 menerjemahkan RPJPN dalam tujuh agenda pembangunan yang menjadi prioritas negara dalam periode lima tahun. Salah satu isu prioritas RPJMN 2020-2024 adalah pendidikan, yang berkaitan dengan agenda pembangunan nomor tiga, yaitu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mendukung agenda tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui:
 - i. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran,
 - ii. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun,
 - iii. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan yang merata,
 - iv. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, dan
 - v. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:
 - i. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri,
 - ii. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, dan
 - iii. Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan inovasi.

Kemendikbudristek, dalam Renstra Kemendikbudristek 2020-2024, menetapkan lima sasaran

strategis mendukung agenda pembangunan nasional di isu pendidikan yaitu:

- Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang;
- Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang;
- Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan;
- Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan; dan
- Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2.2.1 Capaian Utama RPJMN 2020-2024

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas diukur menggunakan sembilan indikator seperti yang terlihat pada Tabel 2.1 Target angka rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun dinaikkan menjadi 9,36 di akhir periode RPJMN menunjukkan adanya peningkatan yang progresif. Di sisi lain, target harapan lama sekolah pada RKP 2023 menjadi 13,30. Angka ini juga menunjukkan bahwa anak usia tujuh tahun ke atas memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga Diploma I.

Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, dan Target Peningkatan Pemerataan Layanan pendidikan Berkualitas

Uraian	Satuan	Baseline 2019	Realisasi				Target RPJMN	Status
			2020	2021	2022	2023	2024	
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,75	8,90	8,97	9,08	9,13	9,18	Belum tercapai
Harapan lama sekolah	Tahun	12,95	12,98	13,08	13,1	13,15	13,89	Belum tercapai
Tingkat penyelesaian pendidikan								
SD/MI/ sederajat	Persen	95,48	96,00	97,37	97,82	97,83	94,78	Tercapai
SMP/MTs/ sederajat	Persen	85,23	87,89	88,88	90,13	90,44	89,49	Belum tercapai
SMA/SMK/MA/ sederajat	Persen	58,33	63,95	65,94	66,13	66,79	76,47	Belum tercapai
APK pendidikan Tinggi	Persen	30,28	30,85	31,19	31,16	31,46	37,63	Belum tercapai
Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan AnakUsia Dini	Persen	63,30	62,48	61,93	63,28	64,79	72,77	Belum tercapai
Rasio APK 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya								
SMA/SMK/MA Sederajat	Poin	0,77	0,77	0,76	0,78	0,78	0,78	Tercapai
Pendidikan Tinggi	Poin	0,18	0,28	0,29	0,38	0,33	0,23	Tercapai
Nilai rata-rata hasil PISA:	Poin							

Uraian	Satuan	Baseline 2019	Realisasi				Target RPJMN	Status
			2020	2021	2022	2023	2024	
Membaca	Poin	371	371 ^a	371 ^a	359	359	396	Belum tercapai
Matematika	Poin	379	379 ^a	379 ^a	366	366	388	Belum tercapai
Sains	Poin	396	396 ^a	396 ^a	383	383	402	Belum tercapai
Proporsi anak di atas bataskompetensi minimal dalam tes PISA								
Membaca	Persen	30,10	30,10 ^a	30,10 ^a	25,30	25,30	34,10	Belum tercapai
Matematika	Persen	28,10	28,10 ^a	28,10 ^a	18,20	18,20	30,90	Belum tercapai
Sains	Persen	40,00	40,00 ^a	40,00 ^a	33,80	33,80	44,00	Belum tercapai
Proporsi anak di atas bataskompetensi minimal dalam asesmen kompetensi								
Literasi	Persen	53,20	53,20	52,54	59,49	59,49	61,20	Belum tercapai
Numerasi	Persen	22,90	22,90	32,29	45,24	45,24	30,10	Belum tercapai
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	42,76	40,46	34,34	38,53	38,5	52,6	Belum tercapai
Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) bidang studi seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya	Persen	2,33 ^b	2,33 ^b	2,33	2,71	2,90	3,11	Belum tercapai
Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	Persen	28 ^b	28 ^b	28	29	30	31	Belum tercapai
Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional		9 ^b	9 ^b	9	33	72	126	Belum tercapai
Jumlah talenta seni budaya yang terlibat		80 ^b	80 ^b	80	244	408	572	Belum tercapai

Uraian	Satuan	Baseline 2019	Realisasi				Target RPJMN	Status
			2020	2021	2022	2023	2024	
dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional								
Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional		21 ^b	21 ^b	21	46	75	108	Belum tercapai

Sumber: Perpres RKP Tahun 2023; SUSENAS 2019, 2020, 2021, 2022; PISA 2022.

Keterangan: a) Angka realisasi 2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022; b) Angka baseline DB MTN 2021

Persentase peserta didik SD dan SMP yang menyelesaikan pendidikan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, tingkat kelulusan SD/ sederajat sudah melampaui target. Namun, angka kelulusan SMA/ sederajat masih cukup rendah yaitu 66,13 persen pada tahun 2022, cukup jauh dari target RPJMN yaitu 76,47 persen.

Angka Partisipasi Kasar pendidikan Tinggi dan data anak yang pernah mengikuti PAUD masih cukup rendah. Progres APK pendidikan Tinggi tidak terlihat signifikan setiap tahunnya sehingga target 2024 juga diturunkan. Program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang Sekolah Dasar melalui pemberian rangsangan pendidikan (UU Sisdiknas). Masa pertumbuhan anak sejak lahir hingga berusia enam tahun merupakan fase kritis pematangan fungsi fisik dan psikis yang berpengaruh pada pola perilaku (Ariyanti, 2016). Angka partisipasi PAUD masih relatif rendah jika dibandingkan dengan target RPJMN. Kemendikbudristek telah berupaya meningkatkan partisipasi dengan pemberian Bantuan Operasional pendidikan untuk keluarga kurang mampu, kebijakan SPM, maupun mendorong pendirian PAUD oleh masyarakat.

Skor PISA 2022 Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup rendah di antara negara Asia Tenggara (RPJMN 2020-2024). Pada tahun 2022 skor PISA Indonesia mengalami penurunan dari hasil skor PISA pada tahun 2018. Di sisi lain, pada indikator tingkat penyelesaian pendidikan SD/MI/ sederajat memiliki capaian sebesar 97,83 persen pada tahun 2023. Capaian ini telah melampaui target RPJMN tahun 2024 sebesar 94,78 persen. Hal ini bermakna bahwa tingkat penyelesaian pendidikan SD telah mengalami perkembangan yang sangat baik dan signifikan. Hasil yang sama juga terlihat pada indikator rasio APK 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya pada SMA/SMK/MA Sederajat dan pendidikan Tinggi memiliki capaian yang telah melampaui target RPJMN tahun 2024. Namun demikian, dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Indonesia masih perlu upaya-upaya strategis dan adanya *refocusing* kebijakan khususnya pada target dan indikator keberhasilan pendidikan yang telah disusun dan dirumuskan.

Namun demikian, masih banyak sasaran dan indikator pada bidang pendidikan yang belum tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat meningkatkan performa pendidikan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan dalam 5 tahun ke depan. Serta, hasil evaluasi yang belum tercapai dapat menjadi motivasi dalam memperbaiki sistem dan langkah yang dianggap tidak efektif pada periode sebelumnya. RPJMN 2025-2029 diharapkan menjadi langkah dalam perbaikan pembangunan pendidikan selanjutnya.

2.3 Evaluasi Renstra 2020-2024 K-L yang Mengampu Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan dalam sistem pembangunan nasional diampu oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Pendidikan Islam. Renstra 2020-2024 baik pada Kemendikbudristek dan Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu 2020-2024 dengan berfokus pada pencapaian RPJMN 2020-2024. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 5 tahun, K/L memiliki Sasaran Strategis yang dalam perumusannya saling terintegrasi dengan penyusunan RPJMN. Pelaksanaan evaluasi renstra ini dilakukan untuk melihat bagaimana capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis dalam bidang pendidikan, baik yang diampu oleh Kemendikbudristek maupun Kementerian Agama

2.3.1 Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

a. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2020-2021

Dalam upaya menyelenggarakan tugasnya terkait pembangunan Pendidikan, Kemendikbudristek memiliki 5 Sasaran Strategis (SS) yang memuat indikator-indikator kinerja dengan capaian sebagaimana diuraikan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Sasaran Kinerja Sasaran Strategis tahun 2020-2021

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI		PERBANDINGAN TAHUN 2021 DENGAN 2020
			2020	2021	
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang				
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	%	37.52	35.59	Menurun
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	106.32	106.2	Menurun
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	%	92.06	92.8	Meningkat
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	84.53	85.23	Meningkat
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30.85	31.19	Meningkat
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang				
IKSS 2.1	Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)	Nilai	3	3.00	Sama dengan sebelumnya
IKSS 2.2	Persentase Peserta didik dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	75.8	52.54	Menurun
IKSS 2.3	Persentase Peserta didik dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	17.43	32.29	Meningkat
IKSS 2.4	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Membaca	Nilai	Tidak ada Penilaian pada tahun 2020	Tidak ada Penilaian pada tahun 2021	Tidak ada Penilaian
IKSS 2.5	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Matematika	Nilai	Tidak ada Penilaian pada tahun 2020	Tidak ada Penilaian pada tahun 2021	Tidak ada Penilaian
IKSS 2.6	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Sains	Nilai	Tidak ada Penilaian	Tidak ada Penilaian	Tidak ada Penilaian

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI		PERBANDINGAN TAHUN 2021 DENGAN 2020
			2020	2021	
			pada tahun 2020	pada tahun 2021	
IKSS 2.7	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan	%	40.46	46.30	Meningkat
IKSS 2.8	Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan	%	75.4	74.40	Menurun
IKSS 2.9	Persentase Guru dan tenaga Kependidikan Profesional	%	46.01	48.21	Meningkat
IKSS 2.10	Persentase Guru-Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri atau Sertifikasi Kompetensi yang Diakui oleh Industri	%	12.31	20.58	Meningkat
IKSS 2.11	Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri	%	68.74	81.51	Meningkat
SS 3	Menguatnya Karakter Peserta Didik				
IKSS 3.1	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	%	36.73	38.99	Meningkat
IKSS 3.2	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	%	12.8	15.60	Meningkat
IKSS 3.3	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	%	10.6	16.70	Meningkat
SS 4	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan				
IKSS 4.1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	551	520	Menurun
IKSS 4.2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	25651	42396	Meningkat
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55.91	54.65	Menurun
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel				
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	Sama dengan sebelumnya
IKSS 5.2	Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	90.7	96.41	Meningkat
IKSS 5.3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	Indeks	82.3	84.60	Meningkat
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	74.39	77.95	Meningkat

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2021, selain IKSS berkaitan PISA yang belum ada perhitungan, terdapat 14 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang sudah

menunjukkan trend peningkatan, 2 IKSS sama dengan tahun 2020, dan 6 Indikator justru mengalami penurunan. Enam indikator inilah yang kemudian perlu menjadi catatan untuk dapat dicari penyebab penurunan dan langkah untuk dapat menaikkan capaiannya pada tahun 2022, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat memenuhi target. Enam indikator tersebut meliputi: (1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun; (2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat; (3) Persentase Peserta didik dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum; (4) Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan; (5) Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia; (6) Indeks Pembangunan Kebudayaan

a. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022-2024

Memasuki tahun 2022, terjadi penyesuaian nomenklatur pada beberapa Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penyesuaian indikator tersebut diantaranya meliputi: (1) Perubahan nomenklatur SS; (2) Perubahan nomenklatur IKSS; (3) Penambahan IKSS baru.

Terkait perubahan nomenklatur SS, hal ini dapat terlihat dengan adanya nomenklatur SS tentang ‘Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan’ yang tidak ada pada tahun 2021 dan 2020. Terkait perubahan nomenklatur IKSS, hal ini salah satunya dapat terlihat pada IKSS terkait APK PAUD, SD, SMP yang mengalami penyesuaian menjadi Angka Kesiapan Sekolah (AKS) dan Angka Partisipasi Sekolah. Selain itu, juga terjadi penambahan indikator baru seperti ‘Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD’ serta ‘Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebhinekaan pada Kategori Baik’ pada SS 2. Adapun secara lebih rinci, nomenklatur SS dan capaian IKSS pada tahun 2022-2024 dapat diuraikan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Sasaran Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022-2024

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET		PERBANDINGAN REALISASI 2022 DENGAN TARGET 2024
				2022	2023	
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang					
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	74.34	75.59	75.59	98.35%
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	%	99.10	99.32	99.34	99.76%
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	%	95.92	96.34	96.55	99.35%
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	85.49	92.80	95.00	89.99%
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	31.16	36.64	37.63	82.81%
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang					
IKSS 2.1	Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	Nilai	0.53	0.52	0.53	100.00%

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET		PERBANDINGAN REALISASI 2022 DENGAN TARGET 2024
				2022	2023	
IKSS 2.2	Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum					
	a. Literasi	Nilai	59.49	49.75	52.00	114.40%
	b. Numerasi	Nilai	45.24	29.20	30.10	150.30%
IKSS 2.3	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebhinekaan pada Kategori Baik	%	27.52	30.00	32.50	84.68%
IKSS 2.4	Persentase Guru dan tenaga Kependidikan Profesional	%	50.94	48.83	49.83	102.23%
IKSS 2.5	Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	%	7.60	5.50	6.00	126.67%
IKSS 2.6	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP	%	45.22	45.00	47.77	94.66%
IKSS 2.7	Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1,2X UMP)	%	35.89	20.00	20.50	175.07%
SS 3	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan					
IKSS 3.1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Indeks	81.02	75.00	81.00	100.02%
IKSS 3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	51.90	61.20	62.70	82.78%
SS 4	Meningkatnya Kontribusi Perguruan Tinggi Terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan					
IKSS 4.1	Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	Jumlah	102993	86500	90500	113.80%
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel					
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	Opini	WTP	WTP	WTP	100
IKSS 5.2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	Indeks	85.90	83.00	84.00	102.26%

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET		PERBANDINGAN REALISASI 2022 DENGAN TARGET 2024
				2022	2023	
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	A	A	
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78.88	85.00	87.00	90.67%

Dari hasil pencermatan terhadap capaian IKSS, diketahui bahwa secara garis besar, IKSS kemendikbudristek telah memiliki progres yang baik. Hal ini dapat terlihat dimana 11 IKSS sudah memiliki realisasi tahun 2022 yang telah melampaui target 2024, sedangkan 9 IKSS lainnya sudah hampir memenuhi target 2024 karena memiliki nilai capaian lebih dari 80%.

2.3.2 Renstra Kementerian Agama

Kementerian Agama memiliki 6 Sasaran Strategis (SS) yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, yang meliputi SS 6 hingga SS 11. Keenam SS tersebut meliputi: (1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran; (2) Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan; (3) Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik; (4) Meningkatkan kualitas penjaminan mutu Pendidikan; (5) Meningkatnya kualitas mental/karakter peserta didik; (6) Meningkatnya pendidikan tinggi yang berkualitas. Adapun capaian dari keenam SS dapat diuraikan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Sasaran Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2022-2024

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET 2024	PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET	KEKURANGAN
SS 6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran					
IKSS 6.1	Persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi					
	a. Literasi	%	49,00	61,20	80.07%	19.93%
	b. Numerasi	%	70,00	30,10	232.56%	Telah melampaui target
IKSS 6.2	Persentase peserta didik di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA					
	a. Membaca	%	N/A	49,80	N/A	N/A
	b. Matematika	%	N/A	39,83	N/A	N/A
	c. Sains	%	N/A	48,00	N/A	N/A
SS 7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan					
IKSS 7.1	APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	%	7,57	14,00	54.07%	45.93%
IKSS 7.2	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%	15,13	16,00	94.56%	5.44%
IKSS 7.3	APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	%	25,93	26,20	98.97%	1.03%

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET 2024	PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET	KEKURANGAN
IKSS 7.4	APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	%	13,07	12,90	101.32%	Telah melampaui target
IKSS 7.5	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%	13,78	12,60	109.37%	Telah melampaui target
IKSS 7.6	APM MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman	%	19,01	22,60	84.12%	15.88%
IKSS 7.7	APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	%	8,92	20,60	43.30%	56.70%
IKSS 7.8	APK PTK/Ma'had Aly	%	5,48	7,35	74.56%	25.44%
SS 8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik					
IKSS 8.1	Rasio guru terhadap peserta didik yang memenuhi SNP	Nilai	26:1	15:1		
SS 9	Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan					
IKSS 9.1	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	%	78,12	70,00	111.60%	Telah melampaui target
IKSS 9.2	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/AdhiWidya Pasraman yang terakreditasi/B	%	71,05	70,00	101.50%	Telah melampaui target
IKSS 9.3	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	%	65,19	70,00	93.13%	6.87%
IKSS 9.4	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	%	2,05	60,00	3.42%	96.58%
SS 10	Meningkatnya kualitas mental/karakter peserta didik					
IKSS 10.1	Indeks Karakter Peserta didik	Nilai	80,88	73,00	110.79%	Telah melampaui target
SS 11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas					
IKSS 11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional	%	13,00	7,30	178.08%	Telah melampaui target
IKSS 11.2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	11,66	53,36	21.85%	78.15%
IKSS 11.3	Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional	%	26,40	22,00	120.00%	Telah melampaui target
IKSS 11.4	Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional yang disitasi	%	58,16	13,29	437.62%	Telah melampaui target

Dari hasil capaian indikator, diketahui bahwa terdapat 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang memerlukan perhatian karena memiliki capaian dengan kekurangan lebih dari 40%, yang meliputi: (1) APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha; (2) APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman; (3) Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul; (4) Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam

jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan. Hal ini memunculkan urgensi untuk merumuskan strategi percepatan sehingga di akhir tahun 2024 keempat IKSS ini dapat memenuhi target atau bahkan melampauinya.

2.4 Tantangan Masa Depan yang Mempengaruhi Pembangunan Pendidikan

2.4.1 Transisi Demografi

Bonus demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi. Bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan jendela peluang (*windows of opportunity*) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah dan struktur penduduk di suatu negara memegang peranan penting dalam menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap penduduk, dan sebaliknya, perubahan penduduk memiliki implikasi terhadap pembangunan perekonomian (Nirola dan Sahu, 2019). Bonus demografi menciptakan peluang yang tinggi bagi Indonesia untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena penambahan penduduk adalah salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang selanjutnya akan menghasilkan pertumbuhan output atau hasil (Todaro dan Smith, 2012). Puncak bonus demografi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi lebih besar pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagaimana telah diketahui bahwa pada tahun 2035 merupakan puncak bonus demografi. Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Apabila Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan maksimal, dan tingkat kemiskinan akan dapat berkurang dengan drastis. Namun, bonus demografi yang dikelola dengan tidak tepat dapat menyebabkan permasalahan yang serius. Beberapa permasalahan yang dapat timbul adalah tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingginya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif (Nguyen-Van et al., 2019).

Bonus demografi adalah fenomena yang kompleks dan berjangka panjang, yang berpotensi menjadi kendala seperti: peningkatan populasi yang berlebihan, sumber daya yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, intervensi pemerintah yang berlebihan, model kelembagaan, dan budaya yang membuat peningkatan sulit. Bonus demografi yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada kemiskinan. Kemiskinan sendiri dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Mihai et al., 2015). Kemiskinan absolut adalah sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang layak, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todaro dan

Smith, 2012).

Oleh karena itu, penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif melalui pengambilan kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan melimpahnya penduduk usia produktif tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan jendela peluang (*window of opportunity*) yang terbuka pada masa dimana suatu negara mengalami bonus demografi dan menghindari dampak negatif dari bonus demografi, kuantitas sumber daya manusia perlu diimbangi dengan kualitas yang memadai. Dalam hal ini, kualitas bukan hanya terkait dengan kapasitas otak, namun juga kapasitas fisik dari sumber daya manusia. Kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan dampak dari bonus demografi tersebut (Frongillo et al., 1997).

2.4.2 Pendidikan di Tengah Perkembangan Teknologi dan Informasi

Perkembangan industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data yang kemudian disebut dengan *Internet of things* (IoT). Perkembangan industri 4.0 mengubah cara pandang di setiap aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Konsep pendidikan 4.0 berarti memanfaatkan teknologi digital (*cyber system*) dalam proses belajar-mengajar. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan proses pembelajaran tidak terhalang ruang dan waktu. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi satuan pendidikan, salah satunya dalam pemanfaatan dan pengembangan fasilitas dalam proses belajar mengajar yang bersumber dari jaringan internet dan perangkat berbasis web.

Perkembangan *digital learning* mulai menjadi perhatian bagi institusi pendidikan seluruh dunia sejak pembatasan sosial atau lockdown karena pandemi COVID-19. *Digital learning* seringkali dinilai sebagai metode belajar yang buruk bagi para pelajar, hal itu ditunjukkan oleh penurunan kepuasan pelajar secara drastis seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Student Experience Survey di Universitas Deakin, Australia (2021). Namun, perkembangan *digital learning* dapat menjadi peluang untuk memperluas akses pembelajaran karena metode ini dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta daerah dengan kekhususan kondisi geografis. *Digital learning* juga dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keingintahuan dalam mengakses sumber-sumber informasi.

Salah satu perkembangan *digital learning* di Asia Tenggara dapat kita lihat dari program *Topica EdTech Group*. Program ini menerapkan pembelajaran berbahasa Inggris secara online yang disebut sebagai *Topica Native*. Dalam program ini, lebih dari 10.000 peserta didik di Indonesia, Thailand, dan Vietnam berpartisipasi. Metode ini diadaptasi dari Universitas Harvard dan Stanford. Melalui *Topic Native*, peserta didik dapat belajar kapan saja dan Dimana saja dengan 16 kelas per hari. Dan lebih dari 200 guru dari Amerika Serikat, Australia, dan Eropa membantu peserta didik untuk terbiasa berbahasa Inggris. *Topica* mempekerjakan lebih dari 1.000 manajer dan tenaga ahli dari perusahaan dan organisasi pendidikan untuk berkolaborasi, berkontribusi, dan juga menjembatani dunia bisnis dan akademisi. Misalnya, salah satu instruktur merupakan seorang eksekutif bank, namun dia bisa menghabiskan 800 jam per tahun mengajar secara daring bersama peserta didik. Sehingga, banyak dari peserta didik yang nilai kemampuan berbicaranya meningkat 300/1000 poin selepas mengikuti satu pelajaran saja. dan lebih dari 77 persen dari mereka lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang asing.

Dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dalam *digital learning* terdapat prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi antara lain: materi yang ditampilkan harus menunjang penyampaian informasi berbasis fakta, memperhatikan teknik belajar-mengajar yang digunakan, dan selalu mengadakan evaluasi kemajuan peserta didik dalam proses belajar-mengajar. Oleh karena itu,

guru harus memiliki berbagai metode atau strategi dalam *digital learning* yaitu: memanfaatkan teknologi elektronik, dengan teknologi elektronik ini guru/dosen dan peserta didik/peserta didik dapat berkomunikasi relatif mudah tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu; menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (*self learning materials*), sehingga materi pembelajaran tersebut dapat diakses kapan saja, dimana saja; jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di internet; dan menggunakan internet sebagai media utama.

Hambatan ketidaklancaran dan ketidakterjangkauan internet merupakan masalah yang dialami baik oleh peserta didik, guru, maupun orang tua. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mengoptimalkan jaringan internet agar bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia, khususnya peserta didik. Keterbatasan biaya pun menjadi masalah untuk mengakses internet. Dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring, salah satu keterbatasan dalam pelaksanaannya adalah sarana dan prasarana yang tidak mendukung, seperti laptop, komputer, smartphone, kuota internet dan lain sebagainya. Hambatan yang dialami peserta didik lainnya adalah keterbatasan waktu orang dalam mendampingi anak atau peserta didik saat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Rasa jenuh pun timbul karena terus berada di depan layar saat pembelajaran jarak jauh. Sehingga sebagian peserta didik berpendapat bahwa pembelajaran secara luring suasana diskusi menjadi lebih hidup dan lebih interaktif dibandingkan pembelajaran secara jarak jauh.

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi guru dalam *digital learning* adalah guru harus melek teknologi internet. Guru harus menguasai tata cara penggunaan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Penguasaan teknologi merupakan hal paling penting dalam *digital learning* karena merupakan alat untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di masa kini. Literasi digital masih menjadi masalah hingga saat ini, hal ini biasanya dialami oleh guru-guru tua atau lanjut usia. Jaringan internet merupakan kendala selanjutnya yang dialami guru. Hambatan guru lainnya dalam *digital learning* adalah karena tidak semua peserta didik mampu secara ekonomi dalam menunjang pembelajaran daring, guru harus mencari cara agar peserta didik yang tidak memiliki smartphone dan laptop tetap bisa mengikuti pembelajaran. Solusi yang ditawarkan adalah memperbolehkan peserta didik tersebut untuk ke sekolah agar tetap bisa menerima materi yang diajarkan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi membawa dampak negatif terhadap pendidikan. Dapat diketahui bahwa *e-learning* yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Bahkan dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawasi dan dibina, sehingga lambat laun etika dan manusia khususnya para peserta didik akan menurun drastis, serta hakikat manusia yang utama yaitu sebagai makhluk sosial akan tergerus (Shatri, 2020).

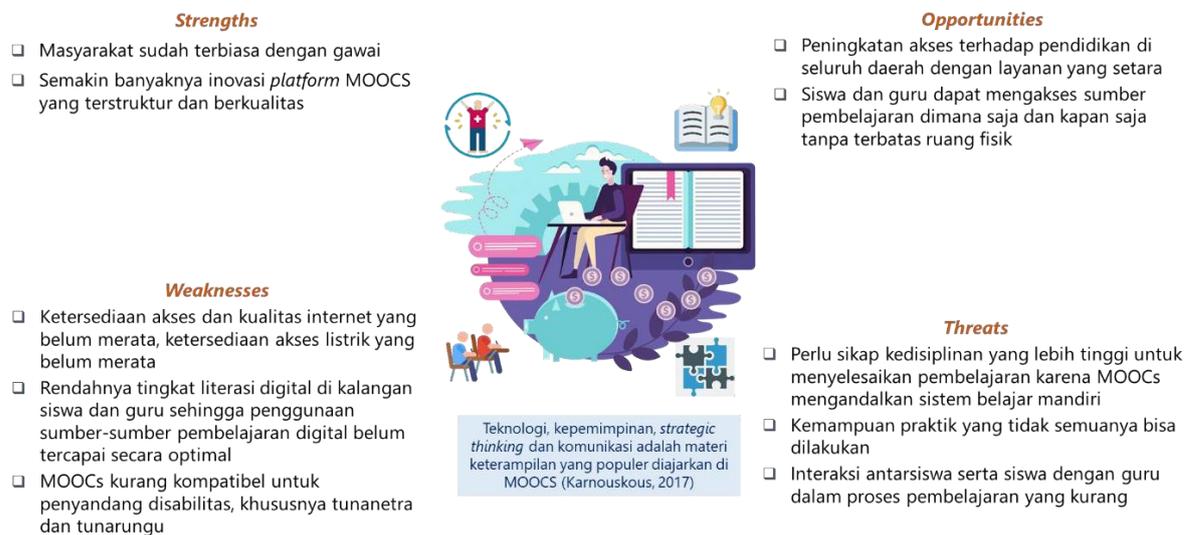
Terlalu sering mengakses internet dikhawatirkan peserta didik/mahasiswa tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik, seperti pornografi, game online. Bahkan dapat terkena *cyber-relational addiction* adalah keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet (seperti melalui *chat room* dan *virtual affairs*) sampai kehilangan kontak dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata (Shatri, 2020). Serta, perkembangan teknologi berakibat pada *information overload*, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat seseorang kecanduan dan mendapatkan informasi hoax (Vázquez-

Cano et al., 2022).

Pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi ketika peserta didik/mahasiswa tidak memiliki sikap skeptis serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru (Alhumaid, 2019). Apalagi dalam konteks dunia maya (internet) mereka secara tidak langsung telah masuk di dalam dunia yang *over free*, maka sangat penting adanya kedua sikap di atas untuk menjadi benteng atau filter dari segala sumber informasi yang ada. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian dari orang tua juga sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai tentang sebuah norma agama sebagai landasan hidup. Selain itu, perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tindakan kriminal (*Cyber Crime*). Di dalam dunia pendidikan hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan (dokumen mengenai ujian akhir atau negara) dengan media internet (Vázquez-Cano et al., 2022).

Di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar/peserta didik/mahasiswa maupun pengajar/guru/dosen. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun *e-learning*. Dimana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar, maka dapat terjadi peserta didik kurang aktif dan kurang kritis dalam sistem pembelajaran sehingga hasilnya tidak maksimal (Alhumaid, 2019).

Gambar 2. 2 Analisis SWOT Fenomena Massive Open Online Courses (MOOCs)



2.4.3 Perubahan Lanskap Lapangan Kerja

Transisi pemuda dan dewasa muda ke dunia kerja telah menjadi isu kebijakan penting bagi sebagian besar negara di seluruh dunia. Perubahan tren jenis pekerjaan yang sangat cepat telah melemahkan prospek karir jangka panjang, bahkan bagi kaum muda yang menempuh pendidikan tinggi. Tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi telah menjadi fenomena global dan sangat menonjol di kawasan Asia-Pasifik. Wilayah ini adalah tempat bagi lebih dari 45 persen kaum muda dunia tanpa pekerjaan (pada tahun 2005, 39,2 juta kaum muda menganggur).

Orang-orang muda tiga kali lebih mungkin menganggur daripada orang dewasa, dan

terutama perempuan. Di Indonesia, berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik profil angkatan kerja didominasi oleh lulusan SMA (BPS, 2021). Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat produktivitas secara nasional, hal ini dibuktikan dengan produktivitas yang relatif lebih rendah di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Tingkat produktivitas Indonesia hanya 1,3 persen atau hampir empat kali lebih rendah dari produktivitas Thailand sebesar 5,28 persen, juga lebih rendah jika dibandingkan dengan Vietnam (4,39 persen) dan Malaysia (2,16 persen) (Asian Productivity Organization, 2021).

Di sisi lain selama beberapa tahun terakhir ekonomi digital telah tumbuh di Asia Tenggara. Indonesia muncul sebagai salah satu negara di dunia yang mempunyai industri startup yang sedang berkembang pesat. Memiliki empat dari sepuluh startup unicorn langka di Asia Tenggara, Indonesia diprediksi berkontribusi sekitar 50 persen atau US\$120 juta terhadap ekonomi digital kawasan pada 2025. Empat startup unicorn terbesar di Indonesia terdiri dari satu aplikasi *ride hailing* (Go-Jek) dan tiga marketplace (Tokopedia, BukaLapak, dan Traveloka). Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Sementara itu di Malaysia, sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengumpulkan RM289 miliar, menyumbang 19,1 persen dari PDB pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 telah mempercepat pertumbuhan ekonomi digital serta mendorong rakyat, bisnis tradisional juga sebagai pemerintah untuk beralih secara online dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Lebih lanjut, sektor pendidikan vokasi, Malaysia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat dan mentransformasikan pendidikan vokasi. (Cetak Biru ekonomi digital Malaysia, 2021).

Di Brunei Darussalam, ekonomi digital adalah kunci pendorong untuk mendorong Brunei Darussalam ke status Bangsa Cerdas. Smart Nation didorong oleh Digital Government, Digital Economy, dan Digital Society. Ini berarti Brunei Darussalam perlu melampaui konektivitas yang memungkinkan dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperkaya masyarakat kita dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Hal ini didukung oleh 2 dari 6 strategi pembangunan prioritas Brunei Darussalam yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia melalui TVET, yaitu: peningkatan kualitas pengajaran dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil (Dewan Ekonomi Digital, 2020).

Di Timor Leste, menurut ICT Development Index (IDI) ITU, yang digunakan untuk memantau dan membandingkan perkembangan TIK antar negara dan dari waktu ke waktu, skor keseluruhan Timor-Leste sedikit meningkat dari 3,11 pada tahun 2016 menjadi 3,57 pada tahun 2017, serta peringkat keseluruhan dari 127 pada 2016 menjadi 122 (dari 176 negara) pada 2017. (ESCAP, 2019). Hal ini juga sejalan dengan komitmen Timor-Leste untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa pada tahun 2030, Timor-Leste tinggal di negara Dimana orang-orang berpendidikan dan berpengetahuan, dapat hidup lama dan produktif, dan memiliki kesempatan untuk mengakses kualitas pendidikan. memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik bangsa. (UNESCO, 2021).

Krisis pandemi COVID-19 semakin menunjukkan kemajuan revolusi digital yang sudah terjadi. Menurut Bank Dunia (2020), sistem TVET memiliki potensi yang signifikan untuk memitigasi dan mengurangi “dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari Covid-19”. Bank Dunia menyoroti bahwa sistem TVET dapat berkontribusi untuk mengaktifkan keterampilan tertentu yang muncul dari krisis, termasuk keterampilan digital. Di sisi lain, UNESCO menekankan pentingnya kemampuan lembaga TVET untuk melakukan adaptasi yang gesit dalam berbagai model pembelajaran dengan memanfaatkan keterampilan digital (UNESCO, 2022). Sistem TVET

juga dapat memainkan peran penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4, seperti yang dikatakan Kanwar, et al (2019) bahwa "...pembelajaran seumur hidup perlu menjadi bagian dari TVET jika ingin mencapai pembangunan berkelanjutan". Konsep belajar sepanjang hayat muncul untuk menawarkan alternatif cara belajar selain belajar formal, yang meliputi belajar nonformal dan informal. Pembelajaran sepanjang hayat membutuhkan "pergeseran paradigma saat ini Dimana pembelajaran diposisikan tidak hanya sebagai bentuk peningkatan kapasitas, menjadi sesuatu yang memandang pembelajaran sebagai transformatif, mengarah ke kapabilitas, atau kemampuan untuk menerapkan keterampilan dan kompetensi dalam konteks baru" (Kanwar dkk, 2019).

Selain itu, sistem TVET perlu mengalami modalitas pelatihan baru, termasuk melalui teknologi digital, yang menawarkan pembelajaran yang dipersonalisasi, adaptif, dan fleksibel. Pelatihan perlu diorientasikan kembali ke pekerjaan masa depan seperti ekonomi digital, industri kreatif, dan pekerjaan yang berkembang karena semua sektor beralih ke proses produksi yang ramah lingkungan. Pada tahun 2018, perwakilan ASEAN bersama dengan ILO mengadakan konferensi tingkat tinggi untuk membahas tanggapan ASEAN terhadap pekerjaan masa depan dalam ekonomi digital. Salah satu kesimpulan utama dari pertemuan ini adalah menemukan talenta yang memenuhi syarat untuk digitalpreneurs itu menantang. Oleh karena itu, beberapa negara ASEAN seperti Filipina dan Indonesia menunjukkan perhatian untuk mengembangkan strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas sistem TVET (ILO, 2018) untuk menanggapi pekerjaan ekonomi digital di masa depan. Schröder (2019) juga menyoroti pentingnya mengadaptasi budaya Asia bersama dengan keterampilan abad ke-21. Meskipun demikian, studi dari Adnan et al (2021) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara keterampilan penting untuk pengembangan ekonomi digital dan kesiapan mahasiswa untuk bertahan menghadapi tuntutan pasar kerja.

Gambar 2. 3 Analisis SWOT Perubahan Lanskap Lapangan Kerja



2.4.4 Demokrasi dan Partisipasi Publik Relatif Masih Rendah

Nafukho et al., (2004) menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut melalui pendidikan sehingga kualitas

pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan *teknologi* dan dilandasi keimanan dan ketakwaan.

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan sarana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun karakter bangsa (*Nation Character Building*)(Robeyns, 2006a). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis dan menghadapi kemajuan dunia.

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan memiliki tantangan berupa rendahnya partisipasi publik (masyarakat) (Aref, 2011). Partisipasi masyarakat terutama orangtua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Secara aktual partisipasi masyarakat sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal (Kusumaningrum et al., 2017).

Kebutuhan dan harapan masyarakat akan mutu pelayanan pendidikan yang baik tampaknya menjadi faktor pemicu utama inovasi manajemen pendidikan. Parji dan Prasetya (2020) menyatakan bahwa keputusan institusional yang dibuat oleh kepala sekolah dan staf untuk meningkatkan mutu pelayanan internal (di dalam lembaga sekolah) dan eksternal (hubungan sekolah dengan masyarakat) akan sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan inovatif dalam manajemen pendidikan.

Di samping komitmen kuat pemerintah, masyarakat pun harus makin kuat memberdayakan diri untuk membangun pendidikan. Terdapat asumsi yang dijelaskan oleh Essuman dan Akyeampong (2011) pendidikan yang bermutu berbasis pada masyarakat, untuk masyarakat dan keluaran sekolah akan kembali ke masyarakat. Pemikiran ini tidak secara otomatis mampu mengubah keadaan karena berkaitan dengan perubahan sikap mental yang sangat mungkin memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun hingga menemukan karakter yang baik dan berdampak signifikan.

Peningkatan partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu Pendidikan(Rao, 2009). Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bersangkutan akan mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah sehingga akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula rasa memiliki, semakin besar pula tanggung jawab dan semakin besar pula dedikasinya.

Burde (2004) berpendapat bahwa keterlibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan, dan kerjasama yang kuat. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan, sedangkan kerjasama adalah adanya sikap dan perbuatan kebersamaan/kolektif untuk meningkatkan mutu sekolah (Burde, 2004). Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh eratnya hubungan antar warga sekolah, hubungan

yang erat antara sekolah dan masyarakat, dan adanya kesadaran bersama bahwa output sekolah merupakan hasil kerjasama yang kompak, cerdas dan dinamis.

Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya masih terbatas pada dana, sedangkan dukungan lain dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kurang diperhatikan (Rao, 2009). Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. partisipasi masyarakat dalam kerangka pembangunan pendidikan yang memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, relevansi dan peningkatan mutu. Namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dan pendidikan menengah masih tetap relatif rendah (Rao, 2009).

2.4.5 Tata Kelola Pendidikan yang Lemah

Tata kelola atau pengelolaan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya baik manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan (Fullan, 2002). Oleh karena itu, tata kelola pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendidikan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan (Monyatsi, 2005).

Pengelolaan pendidikan menjadi penting untuk dibahas karena masih banyaknya anggapan bahwa tata kelola pemerintah masih kurang baik (Storey, 2002). Tata kelola pemerintah yang kurang baik ini akan berdampak pula pada bidang-bidang yang dinaunginya, salah satunya adalah pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang kurang baik ini akan menimbulkan gap antara tujuan yang ingin dicapai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan (van de Grift dan Houtveen, 2007). Tata kelola pendidikan ini sendiri meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Pengelolaan pendidikan ini dapat dianalisis menggunakan dua perspektif yang berbeda yaitu perspektif *good governance* dan *sound governance* (Ranson et al., 2005). Kedua perspektif ini digunakan sebagai acuan mengenai baik tidaknya tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dapat pula digunakan sebagai alat analisis tata kelola pendidikan.

Menurut Ranson et al. (2005) tata kelola pendidikan dipecah menjadi empat dimensi utama untuk mengukur tingkat efektivitas institusi pemerintah daerah yang melekat dengan penyelenggaraan layanan pendidikan, juga disertakan dengan tujuan untuk mengukur kinerja pendidikan daerah secara keseluruhan. Dimensi yang digunakan dalam mengukur tata kelola pendidikan diantaranya

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**
Upaya dan tindakan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong pengelolaan sektor pendidikan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan partisipatif
2. **Sistem Pengendalian Manajemen**
Mengukur taraf sampai dimana sistem yang ada akan menyertakan keputusan-keputusan yang dibuat pada proses perencanaan tingkat daerah dan sekolah ke dalam rencana kerja pendidikan tahunan tingkat daerah
3. **Sistem Informasi Manajemen**
Mengukur ketersediaan informasi yang berkualitas pada sistem pendidikan daerah yang

- dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan dan pemantauan pendidikan
4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Menentukan apakah sistem yang ada dapat merencanakan, menganggarkan dan memantau penggunaan sumber daya secara efektif
 5. Standarisasi Layanan pendidikan
Setiap layanan pendidikan selalu memiliki standar pendidikan yang sama baik standar pendidikan secara nasional maupun standar pendidikan minimal

Lemahnya tata kelola pendidikan dicirikan oleh beberapa hal. Pertama, transparansi dan akuntabilitas pendidikan yang lemah yang tampak dari masalah dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), rekrutmen guru PNS yang tidak transparan, hingga persoalan tidak adanya forum yang memfasilitasi komunikasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Kedua, ketiadaan standarisasi pendidikan, misalnya tidak adanya standar kualifikasi kepala sekolah. Ketiga, rendahnya sistem pengendalian manajemen pendidikan yang tampak dari tidak adanya pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sekolah. Keempat, sistem informasi manajemen sekolah yang tidak berjalan baik, seperti tidak adanya operator sekolah, ketiadaan SDM untuk mengelola Dapodik, maupun keterbatasan akses internet. Kelima, lemahnya efisiensi penggunaan sumber daya yang salah satunya tampak dari tidak sesuainya penggunaan dana BOS (Nindie, 2022).

2.4.6 Pembiayaan Pendidikan yang Tidak Efektif

Pembiayaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam memastikan keberlangsungan dan kualitas pendidikan di suatu negara. Terdapat berbagai aspek terkait pembiayaan pendidikan, termasuk peran pemerintah dan swasta dalam membiayai pendidikan, sumber pembiayaan pendidikan, dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola dana pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi negara. Terciptanya pendidikan yang berkualitas di suatu negara akan berdampak pada perbaikan kualitas sumber daya manusianya, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Chalos, 1967). Pembiayaan pendidikan juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan keadilan dalam masyarakat.

Di beberapa negara, dana pendidikan juga berasal dari donasi atau sumbangan dari organisasi internasional atau negara lain. Pemerintah biasanya membiayai pendidikan melalui anggaran negara dan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Di beberapa negara, pajak khusus digunakan untuk membiayai pendidikan, seperti pajak pendidikan atau pajak bumi dan bangunan. Lembaga swadaya masyarakat juga dapat memberikan kontribusi penting dalam membiayai pendidikan, terutama dalam membantu orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang layak. Di sisi lain, perusahaan swasta juga dapat memberikan sumbangan atau donasi untuk pendidikan. Sumbangan ini biasanya diberikan melalui program-program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) yang dilakukan oleh perusahaan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial di sekitar perusahaan dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Individu juga dapat memberikan kontribusi melalui donasi atau sumbangan yang diberikan kepada lembaga pendidikan tertentu. Sumbangan ini dapat diberikan secara langsung kepada lembaga pendidikan atau melalui program-program donasi yang diselenggarakan oleh organisasi non-profit (Ekaningrum dan Hadi, 2022).

Pembiayaan dalam dunia pendidikan memiliki hambatan dan tantangan. Tantangan dalam pembiayaan pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. 2. Kesenjangan sosial yang mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat sulit untuk mengakses pendidikan. 3. Kurangnya akses terhadap teknologi dan infrastruktur

pendidikan. 4. Tingginya biaya pendidikan di beberapa negara (Sanisah dan Santosa, 2023).

Permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di era saat ini adalah sebagai berikut (Ekaningrum dan Hadi, 2022; Sanisah dan Santosa, 2023):

1. Sistem anggaran pendidikan di Indonesia masih tergolong kompleks, rumit, birokratis, kaku, dan terlalu banyak melibatkan instansi dengan kepentingan masing-masing. Adanya otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah pemangkasan jalur birokrasi dan penyederhanaan sistem penganggaran pendidikan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang terjadi dengan pencairan anggaran lewat beberapa instansi DAU, DAK, proyek-proyek pemerintah berskala nasional, regional dan lokal. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi kebocoran anggaran serta penggunaan yang tidak efisien.
2. Perbedaan kondisi di masing-masing daerah yang menyebabkan perbedaan kemampuan masing-masing daerah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di daerahnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan kemajuan pendidikan antara daerah yang dikategorikan kaya dan daerah miskin.
3. Sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, tergantung dengan prioritas dan keinginan daerah masing-masing menyebabkan terjadinya ketidakmerataan, ketidakadilan, kurang efisien, kurang efektif, dan membuka pintu terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini berakibat pada kondisi anggaran pendidikan di beberapa daerah semakin memburuk dikarenakan keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.
4. Adanya penyelewengan pada pengelolaan dan penyaluran dana ke sekolah-sekolah, penyelewengan-penyelewengan tersebut di antaranya adalah : (a) pendistribusian dana yang kurang proporsional antara sekolah dan daerah; (b) proses penyaluran dana secara birokratis yang tidak transparan dan mengakibatkan terjadinya KKN; (c) peran pemerintah daerah terhadap proses pembiayaan pendidikan masih sangat rendah; serta e. lemahnya kemampuan sekolah dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolahnya dan kurangnya peran serta dukungan masyarakat di dalamnya.
5. Keterlambatan pencairan anggaran pendidikan yang tidak sesuai dengan agenda kegiatan pendidikan di masing-masing daerah yang menjadi kendala dan tidak kunjung menemukan solusi. Hal ini berdampak pada alih fungsi dana sekolah lainnya untuk menutup keterlambatan pencairan dana tersebut

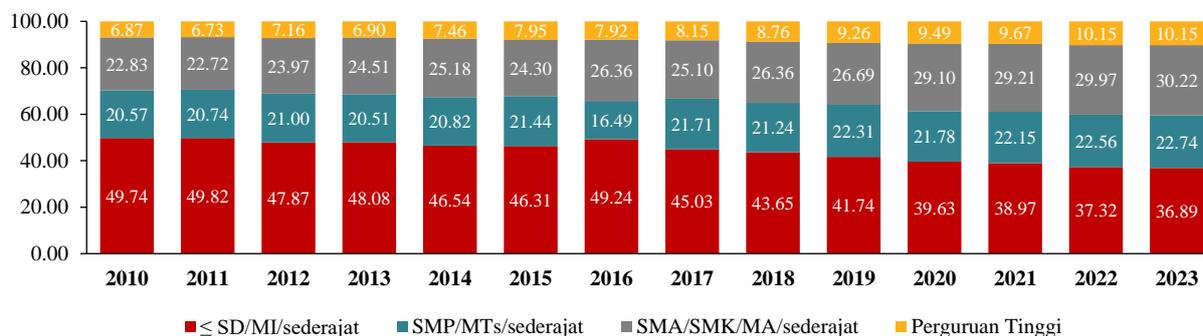
2.5 Analisis Situasi

2.5.1 Akses dan Layanan Pendidikan

a. Perkembangan Partisipasi Pendidikan Penduduk

Tingkat penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2010, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan jenjang menengah sebanyak 22,83 persen, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 30,22 persen. Selain itu, dapat dilihat pada Gambar 2.4 bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan terakhir SD/MI/Sederajat ke bawah semakin menurun setiap tahunnya.

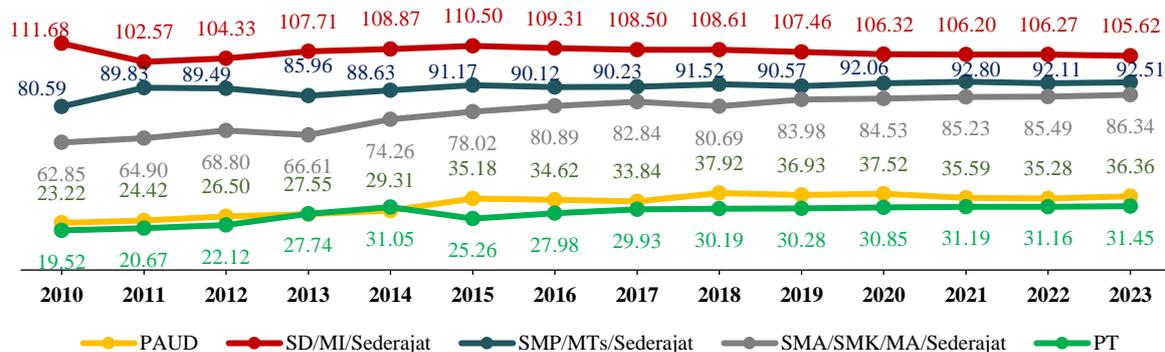
Gambar 2. 4 Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2010-2023



Sumber: Susenas, 2010-2023

Indikator pembangunan pendidikan lainnya yang menunjukkan peningkatan capaian pada setiap tahunnya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,92 tahun pada tahun 2010 menjadi 9,08 tahun pada tahun 2022. Tingkat pendidikan penduduk yang membaik selaras dengan perbaikan dari sisi akses ke layanan pendidikan yang ditunjukkan dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat hingga pendidikan Tinggi meningkat selama tiga tahun terakhir. Sejak tahun 2015, APK jenjang SD/MI/Sederajat terus mengalami penurunan hingga mendekati 100. Hal ini menunjukkan capaian yang baik yang artinya penduduk kelompok usia SD/MI/Sederajat sudah banyak yang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya.

Gambar 2. 5 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar PAUD Hingga pendidikan Tinggi Tahun 2010-2023

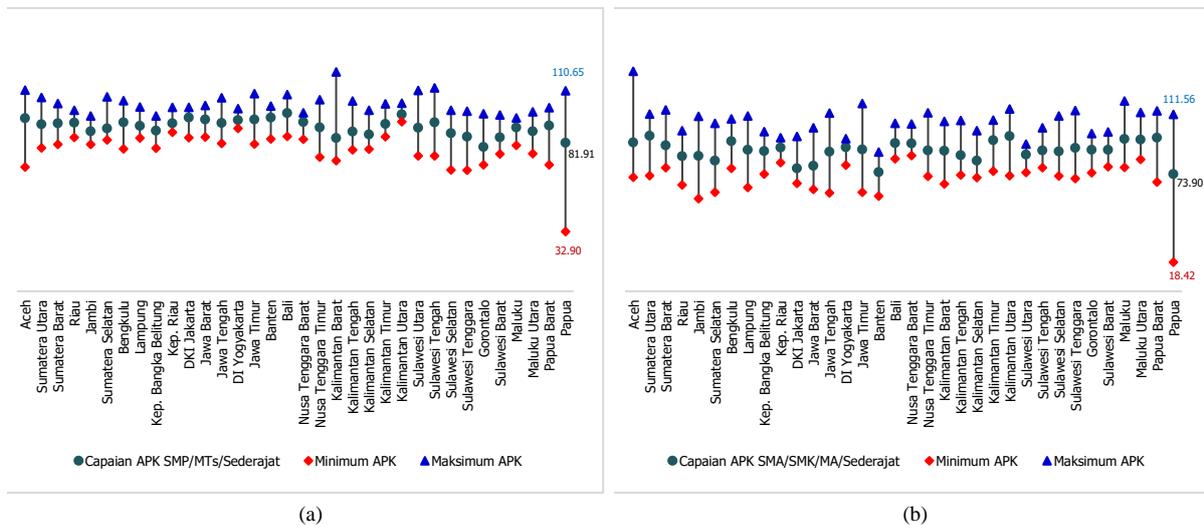


Sumber: Susenas, 2010-2023

2.5.2 Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Penduduk

Meskipun partisipasi pendidikan meningkat setiap tahunnya, namun masih dijumpai kesenjangan partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan antarwilayah terutama pada jenjang pendidikan menengah. Dari Gambar 2.6 terlihat bahwa variasi APK SMA/SMK/MA/Sederajat pada setiap wilayah cukup lebar dibandingkan dengan variasi APK SMP/MTs/Sederajat. Selain itu, terlihat bahwa kesenjangan tertinggi pada kedua jenjang pendidikan tersebut terjadi di Provinsi Papua. Kondisi ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah untuk memprioritaskan intervensi pembangunan pendidikan di Provinsi Papua.

Gambar 2. 6 Kesenjangan Partisipasi pendidikan Jenjang SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat Antarwilayah Tahun 2023

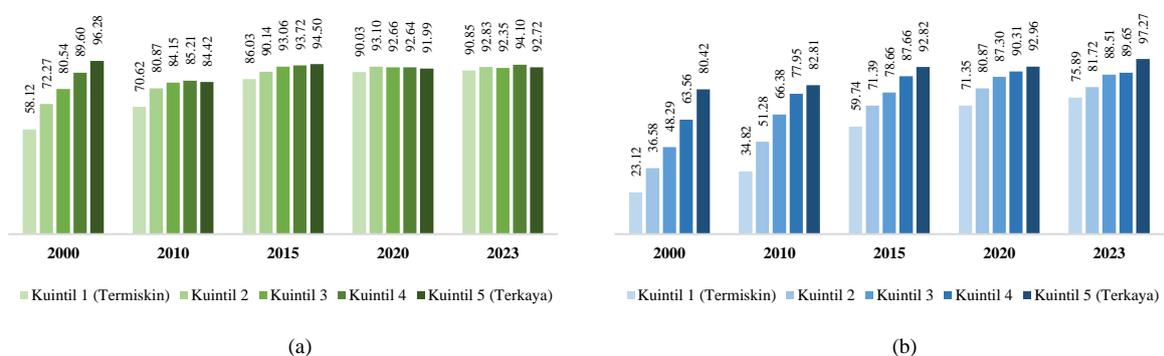


Sumber: Susenas, 2023

Keterangan: (a) Jenjang SMP/MTs/Sederajat, (b) Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat

Selain kesenjangan antarwilayah, pembangunan pendidikan di Indonesia juga masih ditemukan kesenjangan antarstatus sosial-ekonomi. APK SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat penduduk kelompok ekonomi lemah meningkat dari, secara berturut-turut, 58,12 persen dan 23,12 persen pada tahun 2000 menjadi 90,85 persen dan 75,89 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini memperkecil kesenjangan antara kelompok ekonomi lemah dan terkaya terhadap akses dalam mendapatkan layanan pendidikan yang semula selisih sebesar 38,16 persen dan 57,30 persen pada tahun 2000 menjadi hanya selisih sebesar 1,87 persen dan 21,38 persen pada tahun 2021. Capaian ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada kelompok ekonomi lemah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan biaya pendidikan lainnya.

Gambar 2. 7 Kesenjangan Partisipasi pendidikan Jenjang SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat Antarstatus Sosial-Ekonomi Tahun 2000-2023



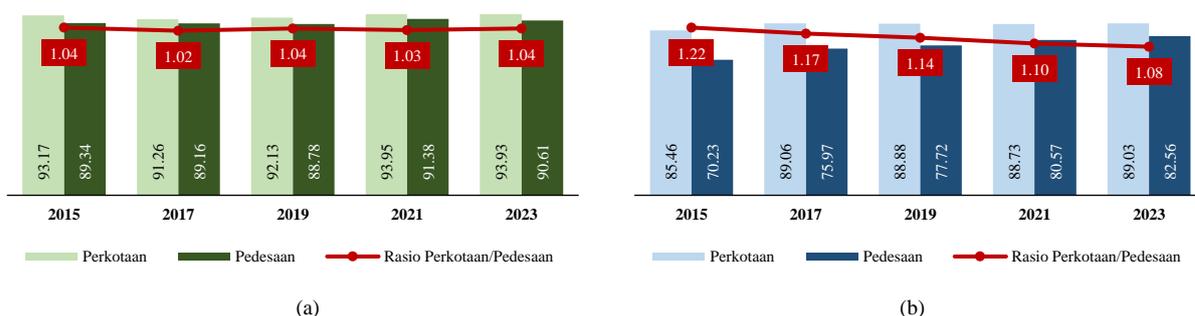
Sumber: Susenas, 2010-2021

Keterangan: (a) Jenjang SMP/MTs/Sederajat, (b) Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat

Berdasarkan jenis daerah tempat tinggal, hingga tahun 2023 juga masih ditemukan adanya kesenjangan akses ke layanan pendidikan antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan

pedesaan terutama pada jenjang SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat. Dalam mengatasi kesenjangan ini, Pemerintah berupaya dalam menyediakan satuan pendidikan yang mudah diakses oleh penduduk, satu kecamatan minimal tersedia satu satuan pendidikan pada masing-masing jenjang. Dalam pemenuhan satuan pendidikan di setiap kecamatan, hingga tahun 2021 ini masih ada 302 kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan jenjang SMP/MTs/Sederajat dan 727 kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat.

Gambar 2. 8 Kesenjangan Partisipasi pendidikan Jenjang SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat Antarjenis Daerah Tempat Tinggal Tahun 2015-2023



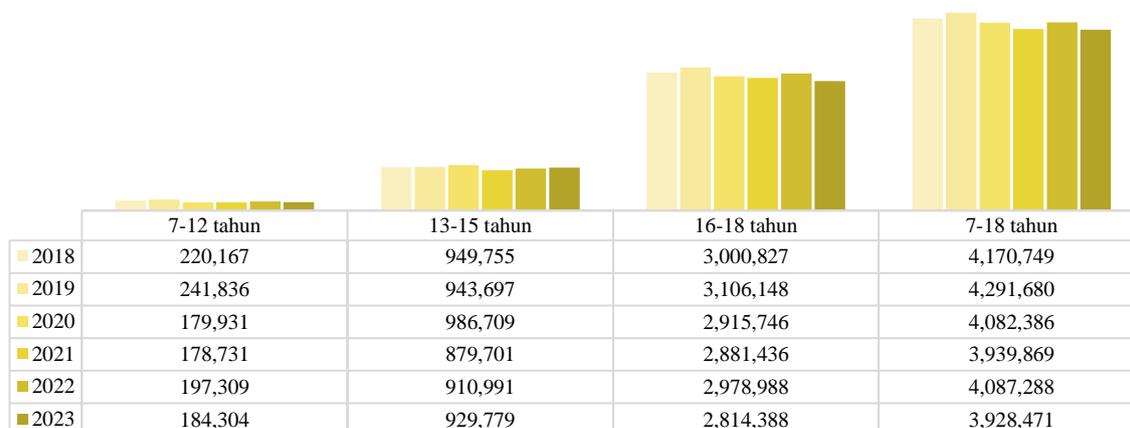
Sumber: Susenas, 2015-2023

Keterangan: (a) Jenjang SMP/MTs/Sederajat, (b) Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat

a. Perkembangan Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)

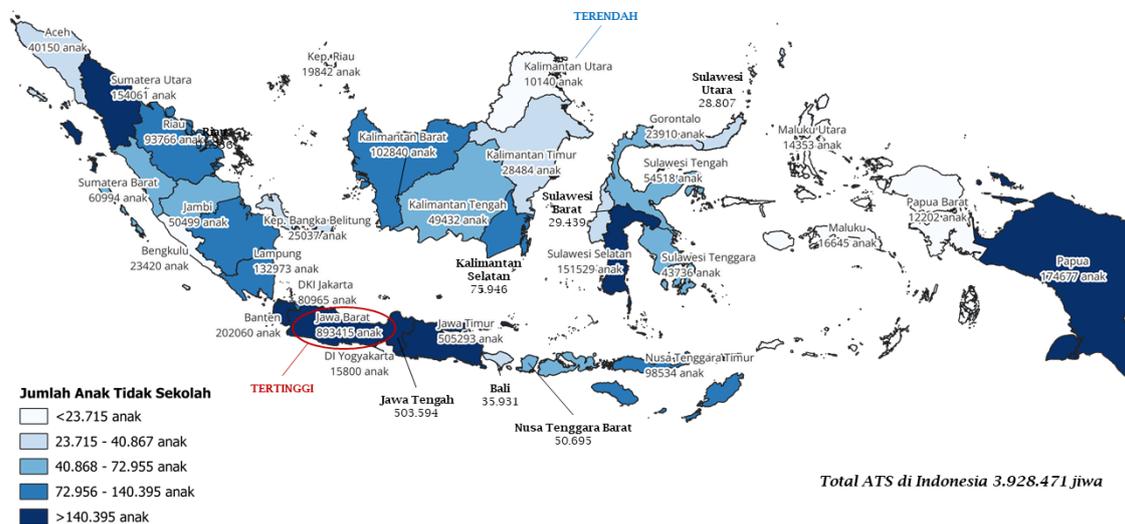
Selain masalah pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, Indonesia masih menghadapi masalah tidak kalah kompleks yaitu tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Hal ini karena ATS menyumbang pada tingkat partisipasi pendidikan penduduk serta penanganan ATS ini tidak bisa diselesaikan melalui satu atau dua K/L saja, melainkan harus menguatkan sinergi dengan lintas sektor di daerah maupun pusat. Selama tiga tahun terakhir, secara agregat jumlah ATS mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu dari 4,2 juta ATS pada tahun 2019 menjadi 3,9 juta ATS pada tahun 2023 dengan ATS paling banyak tersebar di Jawa Barat sebesar 893.145 ATS (lihat Gambar 2.9).

Gambar 2. 9 Perkembangan Jumlah Anak Tidak Sekolah Tahun 2018-2023



Sumber: Susenas, 2018-2023

Gambar 2. 10 Sebaran Jumlah Anak Tidak Sekolah Tahun 2023

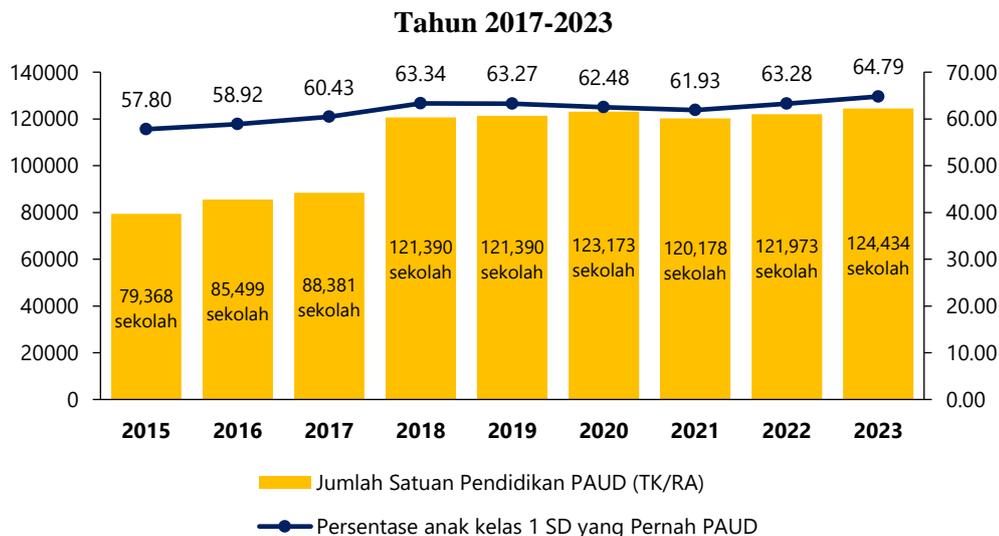


Sumber: Susenas, 2023

b. Perkembangan Partisipasi Pendidikan Prasekolah dan Akses terhadap PAUD

Tingkat partisipasi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2010 hingga tahun 2014 menunjukkan capaian yang progresif (dapat dilihat pada Gambar 2.3). Namun demikian, capaian partisipasi PAUD dari tahun 2015 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif dan menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2023. Salah satu upaya peningkatan partisipasi PAUD yang dilakukan pemerintah adalah program satu desa satu PAUD. Dari Gambar 2.9 diketahui bahwa selama 3 tahun terakhir (2021-2023), jumlah satuan PAUD (TK/RA) mengalami peningkatan yang secara tidak langsung berdampak pula terhadap kenaikan persentase anak kelas 1 SD yang pernah PAUD. Hingga tahun ajaran 2022/2023, jumlah satuan PAUD di Indonesia mencapai 124.434 sekolah.

Gambar 2. 11 Jumlah TK/RA dan Persentase Anak Kelas 1 SD yang Pernah PAUD



Sumber: Dapodik dan EMIS dalam Publikasi Statistik Indonesia, 2014-2023

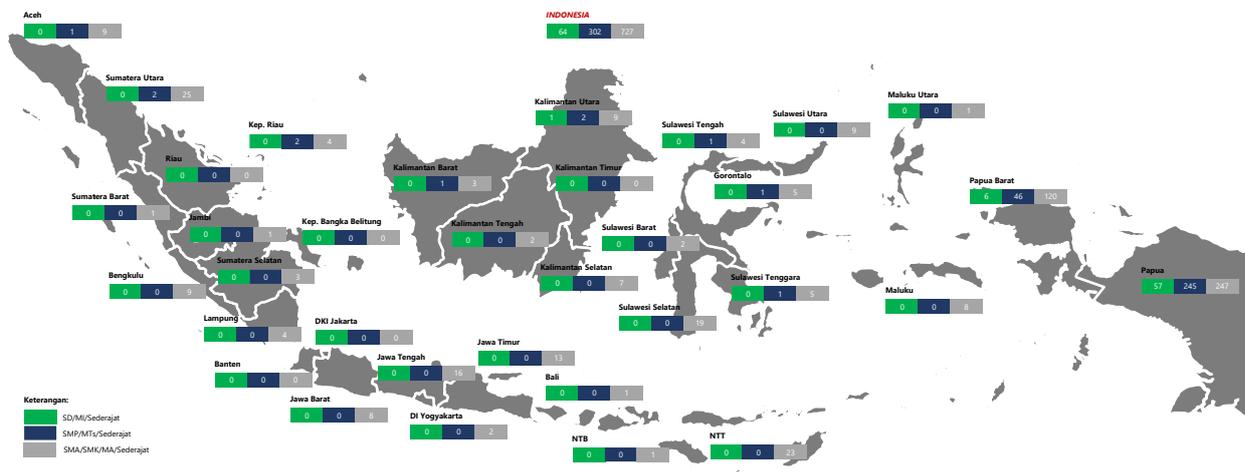
2.5.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Umum Pendidikan

a. Sebaran Ketersediaan Satuan Pendidikan di Kecamatan

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan partisipasi pendidikan adalah akses penduduk terhadap sekolah dengan menyediakan satuan pendidikan pada semua jenjang di setiap kecamatan. Jumlah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan jenjang SD/MI adalah sebanyak 64 kecamatan, jenjang SMP/MTs/Sederajat sebanyak 302 kecamatan, dan jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat sebanyak 727 kecamatan. Jumlah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan jenjang dasar hingga menengah pada setiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Berdasarkan peta di bawah juga kita dapat melihat bahwa, disparitas akses satuan pendidikan di kecamatan yang masih rendah juga dapat terlihat nyata. Dari gambar di bawah dapat terlihat bahwa papua dan papua barat adalah provinsi yang memiliki kecamatan tanpa akses pendidikan tertinggi. Dari data tersebut, masih terdapat 120 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK di Papua Barat, sementara masih terdapat 247 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK di Papua.

Gambar 2. 12 Jumlah Kecamatan yang Belum Memiliki Satuan pendidikan Tahun 2021



Sumber: Potensi Desa, 2021

b. Kondisi Ruang Kelas Satuan Pendidikan di Kecamatan

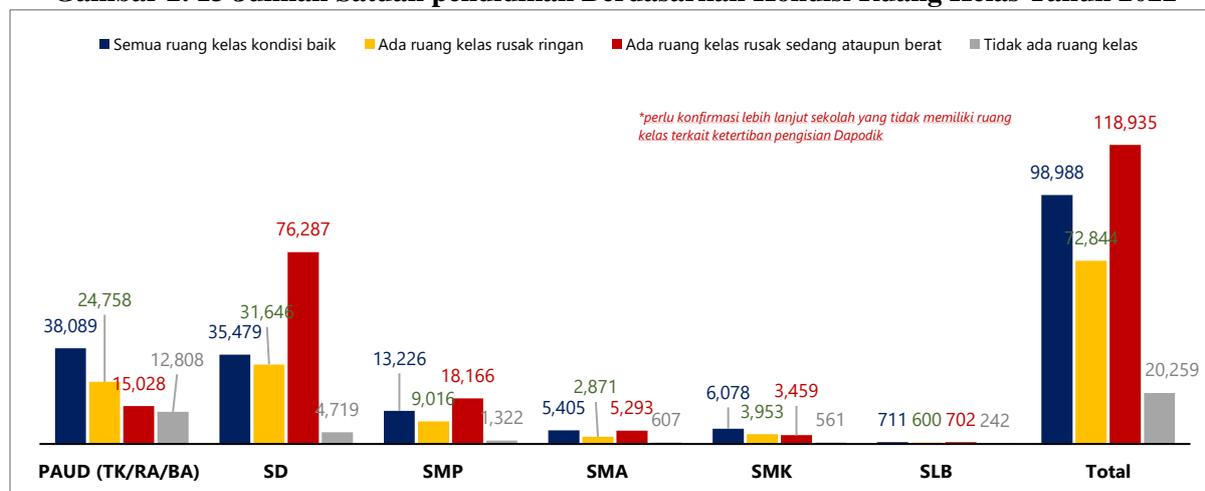
Selain penyediaan satuan pendidikan di setiap kecamatan, perlu juga memastikan kondisi ruang kelas pada setiap sekolah sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Berdasarkan data tahun 2022 diketahui bahwa 96.280 sekolah memiliki kondisi ruang kelas rusak sedang maupun berat yang tersebar pada 61.530 sekolah jenjang SD, 14.961 sekolah jenjang SMP, 7.838 sekolah jenjang SMA/SMK.

Untuk memastikan agar peningkatan akses dan memastikan ruang kelas aman dan nyaman untuk proses pembelajaran, maka dibutuhkan upaya yang serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat menyediakan bantuan sehingga permasalahan ini dapat segera diselesaikan.

Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui kebijakan rehabilitasi ruang kelas melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui DAK Fisik ini, diharapkan dapat mengakselerasi seluruh satuan pendidikan untuk memperbaiki ruang kelasnya. Namun demikian, upaya yang sungguh-sungguh juga masih sangat diperlukan oleh daerah,

karena selain penyediaan anggaran, kualitas pelaksanaan sangat diperlukan sehingga dihasilkan pemanfaatan anggaran pendidikan secara efektif dan efisien.

Gambar 2. 13 Jumlah Satuan pendidikan Berdasarkan Kondisi Ruang Kelas Tahun 2022



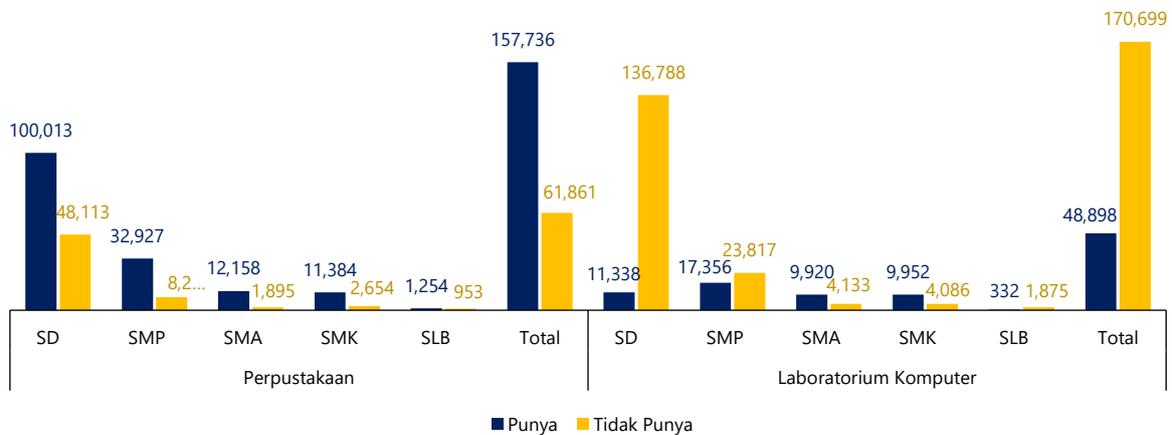
Sumber: Dapodik *cutoff* April 2023

c. Kondisi Kepemilikan Perpustakaan dan Laboratorium Komputer di Satuan pendidikan

Sarana pendidikan penting lainnya di satuan pendidikan adalah perpustakaan dan laboratorium komputer. Perpustakaan dan Laboratorium komputer merupakan hal esensial yang perlu dipenuhi satuan pendidikan dalam memastikan kualitas satuan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Data Pokok pendidikan (DAPODIK) Hingga tahun 2022, sudah ada 71,83 persen atau 157.736 sekolah yang memiliki perpustakaan. Selain itu, sebanyak 22,27 persen atau 48.898 sekolah sudah memiliki laboratorium komputer. Pada jenjang SD, terdapat sebanyak 48.133 SD yang tidak memiliki perpustakaan dan 136.788 SSD yang tidak memiliki laboratorium komputer. Di jenjang SMP, masih terdapat 8.246 SMP yang tidak memiliki perpustakaan dan 23.817 SMP yang tidak memiliki komputer. Sedangkan di jenjang SMA dan SMK masih terdapat sekitar 4000 satuan pendidikan yang tidak memiliki perpustakaan dan sekitar 8000 satuan pendidikan yang tidak memiliki laboratorium komputer. Untuk itu, masih perlu upaya percepatan dalam mewujudkan semua sekolah memiliki perpustakaan dan laboratorium komputer agar menjamin layanan pendidikan yang berkualitas dapat merata.

Gambar 2. 14 Jumlah Satuan pendidikan Berdasarkan Kepemilikan Perpustakaan dan Laboratorium Komputer Tahun 2022



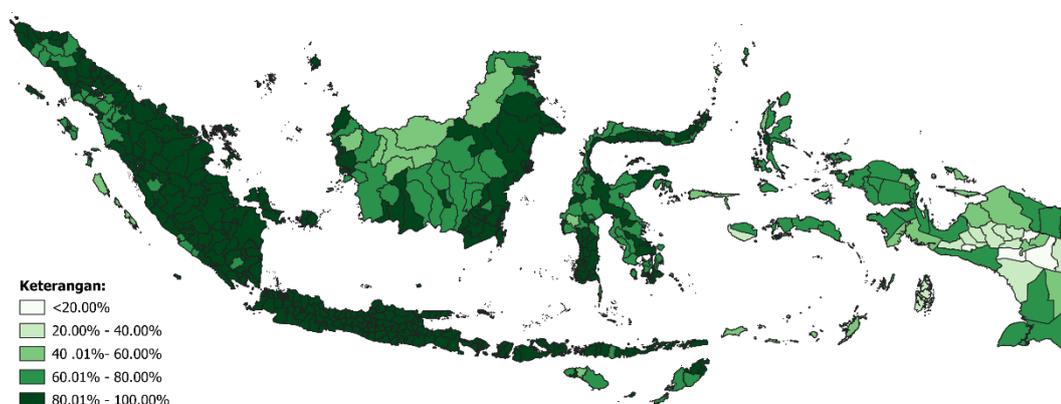
Sumber: Dapodik *cutoff* April 2022

d. Ketersediaan Prasarana Pembelajaran Digital

Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mengakibatkan perubahan lanskap lapangan kerja, sehingga perubahan ini harus diikuti dengan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran di satuan pendidikan dengan menyesuaikan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Selain itu, dampak pesatnya perkembangan teknologi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan (pembelajaran tanpa batas), salah satunya melalui pembelajaran digital. Namun, implementasi pembelajaran digital hingga saat ini belum bisa dilakukan secara masif, salah satunya karena terkendala oleh infrastruktur teknologi informasi di Indonesia yang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data *Speedtest Global Index* tahun 2023, kecepatan mengunduh (median) mobile dan fixed broadband di Indonesia berturut-turut sebesar 17,81 Mbps dan 21,95 Mbps, sedangkan di Malaysia sebesar 30,08 Mbps dan 83,9 Mbps. Dengan kondisi seperti ini, maka perlu mendorong percepatan transformasi digital di semua sektor, termasuk pemerataan kualitas jaringan broadband hingga ke daerah-daerah pedesaan.

Selain itu, berdasarkan data BAKTI Kominfo tahun 2021, pada level desa/kelurahan, masih ada 12.548 desa/kelurahan baik yang berada di daerah 3T maupun non 3T yang masih belum memiliki layanan seluler 4G hingga akhir tahun 2020 sehingga hal ini tentunya akan menghambat implementasi pembelajaran berbasis digital. Frekuensi layanan 4G dijadikan standar tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai dalam menerapkan pembelajaran digital saat ini, karena layanan 4G dianggap sudah bisa membantu masyarakat dalam mengakses internet dengan lancar. Pada level satuan pendidikan, juga menunjukkan kondisi yang sama yaitu sebanyak 27.363 satuan pendidikan (12,46 persen) belum memiliki akses terhadap internet. Gambar 2.15 menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang belum memiliki akses internet paling banyak tersebar di wilayah Indonesia bagian timur (44,79 persen satuan pendidikan di wilayah timur belum memiliki akses internet).

Gambar 2. 15 Sebaran Persentase Sekolah yang Memiliki Akses Internet Tahun 2023



Sumber: Dapodik *cutoff* April 2023

Gambar 2. 16 Sebaran Persentase Sekolah yang Memiliki Akses Listrik Tahun 2023



Sumber: Dapodik *cutoff* April 2023

Selain akses terhadap internet, keberhasilan implementasi pembelajaran digital juga harus diikuti oleh ketersediaan akses terhadap listrik, karena internet juga tidak akan bisa digunakan apabila tidak tersedia listrik yang memadai. Berdasarkan Gambar 2.16 diketahui bahwa akses satuan pendidikan terhadap listrik sudah meluas hampir pada seluruh wilayah Indonesia, hanya 1,66 persen atau 3.639 satuan pendidikan di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap listrik. Meski demikian, upaya pemenuhan prasarana sumber listrik juga tetap perlu dilakukan percepatan selaras dengan pemenuhan prasarana internet agar implementasi pembelajaran digital bisa segera diterapkan secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan melalui pembelajaran yang tanpa batas.

2.5.4 Kualitas Pendidikan

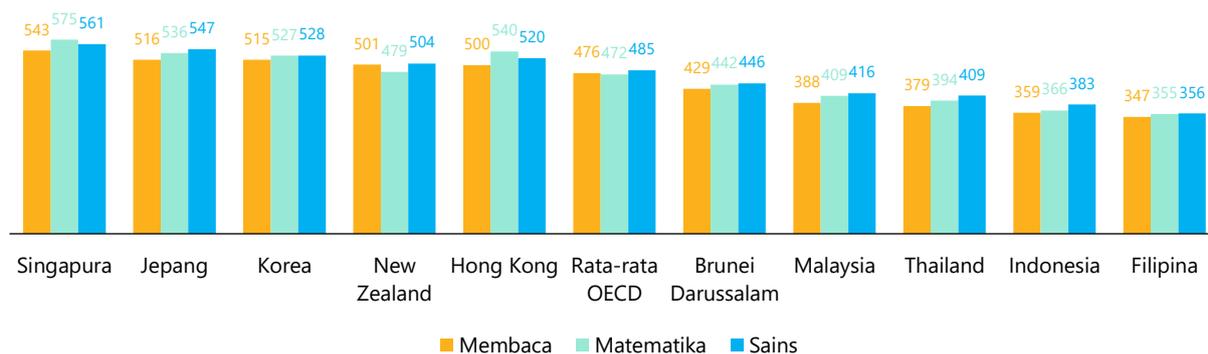
a. Hasil tes *Programme for International Student Assessment (PISA)*

Capaian kualitas pendidikan Indonesia yang dilihat berdasarkan hasil *Programme for*

International Student Assessment (PISA) tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD. Selain itu, dibandingkan dengan lima negara ASEAN lainnya yang berpartisipasi dalam PISA, Indonesia menempati posisi ke 5 dari 6 negara dengan urutan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, dan Filipina.

Berdasarkan Gambar 2.17, capaian hasil PISA Indonesia untuk *Reading* sebesar 359 tertinggal 117 poin dibanding negara-negara OECD, untuk *Mathematics* sebesar 366 tertinggal 106 poin dibandingkan dengan negara-negara OECD, untuk *Science* sebesar 383 tertinggal sebesar 102 poin dibandingkan dengan negara-negara OECD. Oleh karena itu, layanan pendidikan di Indonesia perlu diakselerasi untuk mengarah pada kualitas. Disisi lain, penurunan skor PISA ini berbanding terbalik dengan posisi peringkat Indonesia dibandingkan dengan 81 negara lainnya. Pada literasi membaca, peringkat Indonesia di PISA 2022 juga naik 5 posisi dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan peringkat juga terjadi pada literasi matematika, peringkat Indonesia di PISA 2022 naik 5 posisi dibanding pada PISA 2018. Pada literasi sains, peringkat Indonesia di PISA 2022 naik 6 posisi dibanding pada PISA 2018.

Gambar 2. 17 Hasil PISA Tahun 2022



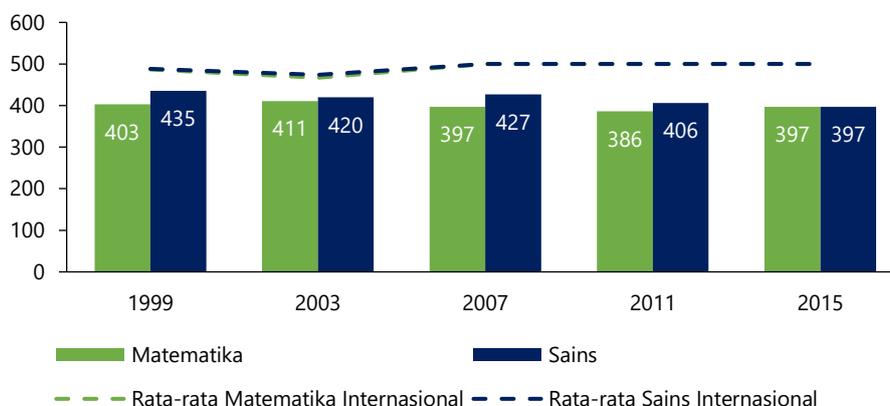
Sumber: OECD, 2023

b. Hasil tes *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS)

Berdasarkan hasil *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), capaian rata-rata kompetensi peserta didik Indonesia baik dalam matematika maupun sains juga termasuk rendah, selalu di bawah capaian rata-rata Internasional pada setiap periode pelaksanaannya. Keikutsertaan Indonesia dalam TIMSS pada tahun 1999 hingga 2011 hanya untuk kelas 8 SMP, sedangkan pada tahun 2015 hanya untuk kelas 4 SD. Hasil TIMSS tahun 2015 menunjukkan bahwa untuk matematika Indonesia berada pada urutan ke-44 dari 49 negara yang berpartisipasi, sedangkan untuk sains berada di urutan ke-44 dari 47 negara.

Berdasarkan Gambar 2.18 dapat terlihat bahwa tidak ada kemajuan yang cukup signifikan. Terbukti dari perkembangan hasil tes matematika untuk TIMSS sebesar 403 pada tahun 1999 yang justru mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 397. Sementara itu, untuk sains juga masih mengalami hal yang serupa yaitu turun dari 435 poin pada tahun 1999 menjadi 397 poin pada tahun 2015.

Gambar 2. 18 Hasil TIMSS Indonesia Tahun 1999-2015

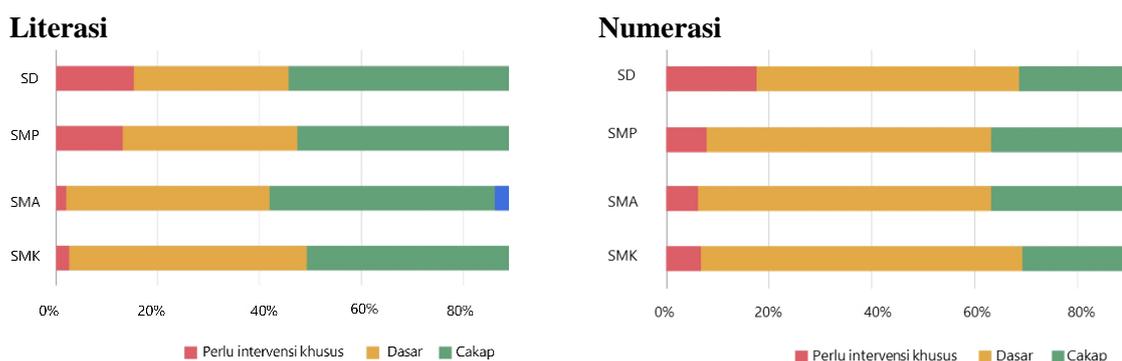


Sumber: <https://timssandpirls.bc.edu/>

c. Hasil Asesmen Nasional (AN)

Selain PISA dan TIMSS yang dilakukan oleh Internasional, Indonesia juga melakukan pengukuran kualitas pendidikan melalui Asesmen Nasional (AN). Berdasarkan hasil AN tahun 2021 yang ditunjukkan pada Gambar 2.19, lebih dari 50 persen peserta didik pada masing-masing jenjang telah mencapai kompetensi minimum literasi (cakap dan mahir) dan apabila dilakukan agregat, 1 dari 2 peserta didik telah mencapai kompetensi minimum literasi (cakap dan mahir). Selain itu, pada bidang numerasi diketahui bahwa tidak sampai 40 persen peserta didik pada masing-masing jenjang telah mencapai kompetensi minimum numerasi (cakap dan mahir), dan apabila dilakukan agregat, 1 dari 3 peserta didik telah mencapai kompetensi minimum literasi (cakap dan mahir).

Gambar 2. 19 Hasil Asesmen Nasional Tahun 2021



Sumber: Kemendikbudristek, 2022

Dari seluruh tes yang telah dilakukan baik internasional maupun nasional dapat diindikasikan bahwa kualitas hasil belajar di Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan. Sehingga, pemerintah Indonesia harus mulai bergerak dan berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik dari sarana dan prasarana maupun ketersediaan guru yang berkualitas di setiap satuan pendidikan.

2.5.5 Distribusi dan Kualitas Guru

a. Jumlah Guru menurut Jenjang

Hingga tahun 2021, jumlah guru di Indonesia untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebanyak 1.909.004 guru, jenjang SMP/MTs/Sederajat sebanyak 1.045.747 guru, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat sebanyak 844.876 guru. Guru-guru tersebut tersebar di sekolah negeri dan swasta baik sekolah umum di bawah naungan Kemendikbudristek maupun sekolah umum bercirikan agama (madrasah) di bawah naungan Kemenag. Gambar 2.20 menunjukkan bahwa karakteristik sebaran guru di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag berbeda yaitu guru di bawah naungan Kemendikbudristek paling banyak tersebar di sekolah negeri, sedangkan untuk guru di bawah naungan Kemenag banyak yang tersebar di sekolah swasta. Kondisi selaras dengan sebaran jumlah sekolah pada masing-masing Kementerian tersebut, dimana sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek didominasi oleh sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah di bawah naungan Kemenag didominasi oleh sekolah swasta.

Gambar 2. 20 Jumlah Guru pada Setiap Jenjang Tahun 2021



Sumber: Dapodik dan EMIS dalam Publikasi Statistik Indonesia, 2022

b. Gelombang Pensiun Guru

Kebutuhan guru yang diperlukan pada tahun mendatang harus mempertimbangkan jumlah guru yang akan pensiun. Berdasarkan Gambar 2.18 diketahui bahwa jumlah guru yang akan pensiun pada setiap tahunnya cukup banyak, oleh karena itu pengajuan formasi kebutuhan guru pada tahun X difokuskan untuk memenuhi kebutuhan penggantian guru yang akan pensiun pada tahun X+1 ke atas. Misalnya, formasi kebutuhan guru yang dibuka pada tahun 2021 difokuskan untuk memenuhi formasi kosong dari guru yang akan pensiun pada tahun 2023 dan 2024 dengan total sebanyak 144.957 formasi, dan begitu seterusnya.

Pada tahun 2020, jumlah guru yang pensiun sebanyak 72.976 orang yang berdampak pada kekurangan guru sebanyak 1.020.921. Pada tahun 2021, jumlah guru yang pensiun sebanyak 69.757 yang mengakibatkan kekurangan guru meningkat menjadi sebanyak 1.090.678 orang. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah guru yang akan pensiun sebanyak 77.124 sehingga kekurangan guru pada tahun tersebut sebanyak 1.167.802 orang. Dan seterusnya hingga tahun 2024 kekurangan guru sebanyak 1.312.759 orang. Tentunya isu ini harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan guru tersedia di setiap satuan pendidikan.

Gambar 2. 21 Jumlah Guru yang Akan Pensiun dan Total Kekurangan Guru Tahun 2020-2024



Sumber: Kemendikbudristek, 2022

Keterangan:

*PPG Pra-Jabatan Transisi — CASN Guru langsung bertugas sebagai guru pada masa menjalani studi PPG

**PPG Pra-Jabatan Model Baru — CASN Guru menjalani studi PPG dulu sebelum bertugas menjadi guru

c. Kondisi Sebaran Guru berdasarkan Rasio Guru Murid dan Status PNS

Kecukupan jumlah guru pada masing-masing wilayah dapat dilihat berdasarkan rasio jumlah guru terhadap peserta didik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio jumlah guru terhadap peserta didik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sebesar 1:20, sedangkan untuk jenjang SMK sebesar 1:15. Dari Gambar 2.20 dapat diketahui bahwa secara nasional rasio guru terhadap peserta didik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sudah memenuhi amanat PP No 74 Tahun 2008, sedangkan untuk jenjang SMK masih belum memenuhi amanat PP No 74 Tahun 2008. Selain itu, dari Gambar 2.20 dapat diketahui rasio guru terhadap peserta didik pada masing-masing provinsi, diketahui bahwa untuk jenjang SMP guru yang saat ini tersedia sudah mencukupi, sedangkan untuk jenjang SD, SMA, dan SMK masih ditemui kekurangan, terutama pada jenjang SMK, yang ditunjukkan oleh banyaknya provinsi dengan rasio guru terhadap peserta didik belum memenuhi amanat PP No 74 Tahun 2008. Gambar 2.20 menjelaskan kondisi rasio guru terhadap peserta didik tanpa memandang status guru, yaitu dengan menghitung semua guru, baik guru PNS maupun non PNS.

Gambar 2. 22 Rasio Guru terhadap Peserta didik Tahun 2021



Jenjang SMA



Indonesia = 1:16

Jenjang SMK



Indonesia = 1:17

Keterangan:

 Rasio guru terhadap peserta didik sudah memenuhi PP No 74 Tahun 2008 (Ketersediaan guru saat ini sudah cukup)  Rasio guru terhadap peserta didik belum memenuhi PP No 74 Tahun 2008 (Ketersediaan guru saat ini belum cukup)

Sumber: Kemendikbudristek dalam Publikasi Neraca Pendidikan Daerah, 2021

Guru harus mendapatkan hak yang lebih layak, salah satunya dengan mengangkatnya menjadi ASN melalui PPPK atau minimal mendapatkan sertifikasi. Namun demikian dengan melihat data pada Gambar 2.23, jumlah guru PNS masih sangat sedikit, ditunjukkan oleh banyaknya provinsi yang memiliki nilai rasio guru PNS terhadap peserta didik masih kecil.

Gambar 2. 23 Rasio Guru PNS terhadap Peserta didik Tahun 2021

Jenjang SD



Indonesia = 1:35

Jenjang SMP



Indonesia = 1:34

Jenjang SMA



Indonesia = 1:36

Jenjang SMK



Indonesia = 1:63

Keterangan:

 Rasio guru PNS terhadap peserta didik sudah memenuhi PP No 74 Tahun 2008 (Ketersediaan guru PNS saat ini sudah cukup)  Rasio guru PNS terhadap peserta didik belum memenuhi PP No 74 Tahun 2008 (Ketersediaan guru PNS saat ini belum cukup)

Sumber: Kemendikbudristek dalam Publikasi Neraca Pendidikan Daerah, 2021

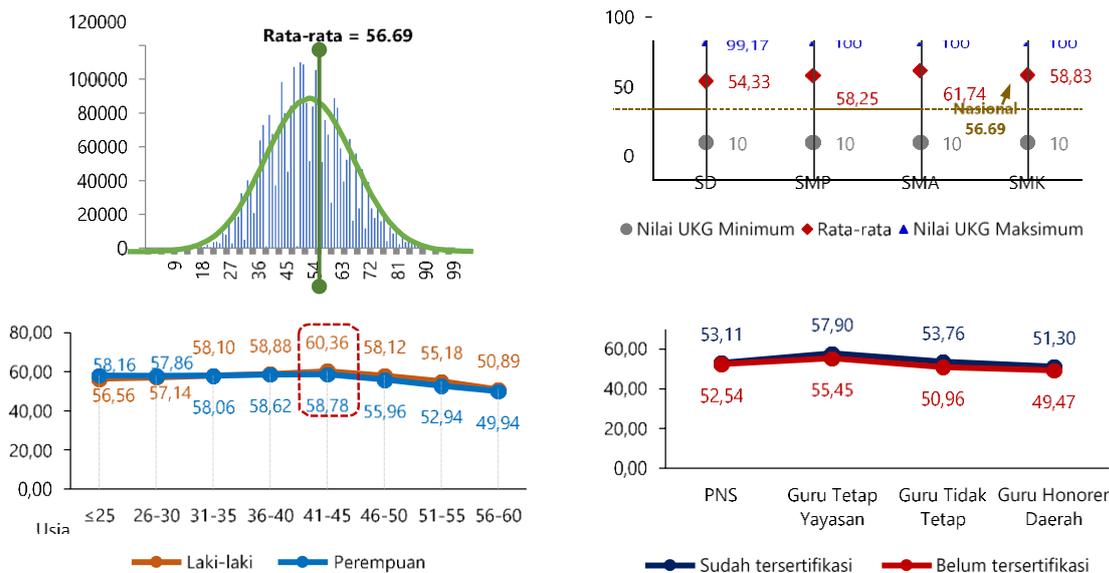
d. Kualitas Guru

Selain dari kondisi ketersediaan guru, perlu melihat juga kualitas dan kompetensi guru saat ini. Saat ini, mayoritas guru sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4/S1, sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun, secara kualifikasi kompetensi yang lain yaitu sertifikasi, sebagian besar guru belum memiliki sertifikasi, jumlah guru yang

tersertifikasi masih di bawah 50 persen untuk semua jenjang pendidikan.

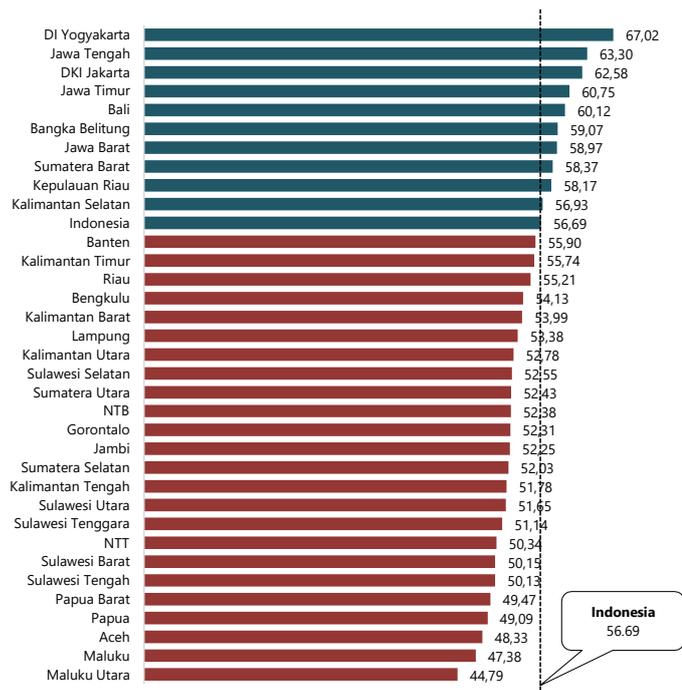
Berdasarkan hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, rata-rata nilai UKG guru adalah 56,69 dengan sebagian besar guru mendapatkan nilai UKG di bawah rata-rata. Rata-rata nilai UKG pada jenjang SMP, SMA, dan SMK sudah melampaui rata-rata nasional, namun untuk jenjang SD masih di bawah rata-rata nasional. Meski demikian, capaian rata-rata nilai UKG ini masih tergolong rendah.

Gambar 2. 24 Hasil UKG Tahun 2015



Sumber: Kemendikbudristek, 2015

Gambar 2. 25 Hasil UKG Per Provinsi Tahun 2015



Sumber: Kemendikbudristek dalam Publikasi Neraca Pendidikan Daerah, 2015

Selain itu, dari Gambar 2.25 diketahui bahwa nilai UKG mengalami penurunan setelah usia guru lebih dari 45 tahun. Hal lainnya juga diketahui bahwa guru yang memiliki sertifikasi cenderung memiliki nilai UKG yang lebih tinggi dibandingkan guru yang belum memiliki sertifikasi. Hasil UKG juga menunjukkan terjadi kesenjangan antarwilayah serta hanya 10 dari 34 provinsi yang memiliki rata-rata nilai UKG di atas nasional.

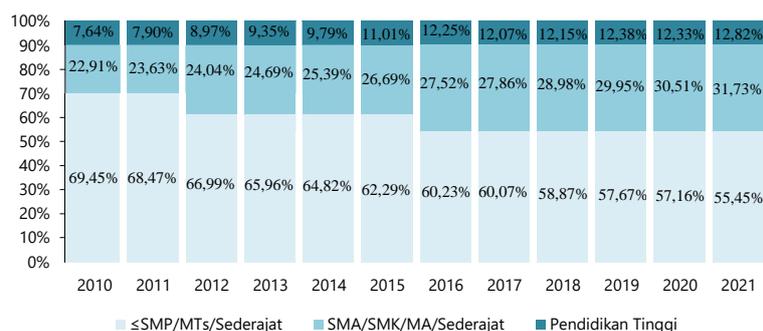
2.5.6 Kualifikasi Pendidikan dan Produktivitas Lulusan

a. Perkembangan Kualifikasi Pendidikan Pekerja

Kualifikasi pendidikan para pekerja di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 55,45 persen atau 72,66 juta pekerja masih berpendidikan SMP/MTs/Sederajat ke bawah. Namun, angka ini sudah lebih baik dibandingkan kondisi pada 11 tahun ke belakang (tahun 2010) yaitu sebanyak 69,45 persen atau 75,15 juta pekerja masih berpendidikan SMP/MTs/Sederajat ke bawah. Rendahnya kualifikasi pendidikan para pekerja ini memengaruhi produktivitas pekerja. Berdasarkan data ILO tahun 2019, diketahui bahwa laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia paling rendah di antara tiga negara tetangga di kawasan ASEAN yaitu Indonesia (1,7), Malaysia (2,6), Thailand (3,0), dan Vietnam (7,5).

Berdasarkan data pada Gambar 2.26 dapat terlihat bahwa pada tahun 2010 sebanyak 69,45 persen pekerja di Indonesia berpendidikan kurang dari SMP/MTs/Sederajat, sementara lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat masih berada di kisaran 22,91 persen dan 7,64 persen pekerja merupakan lulusan perguruan tinggi. Hal ini mengalami kemajuan yang konstan sehingga pada tahun 2021, pekerja dengan pendidikan terakhir kurang dari SMP/MTs/Sederajat berada di angka 55,45 persen, sementara pekerja dengan pendidikan terakhir SMA dan PT meningkat masing-masing menjadi 31,73 persen dan 12,82 persen. Meskipun pekerja sudah memiliki pendidikan yang membaik, namun produktivitas lulusan juga harus dilihat pada aspek ketenagakerjaan.

Gambar 2. 26 Perkembangan Kualifikasi pendidikan Pekerja Tahun 2010-2021

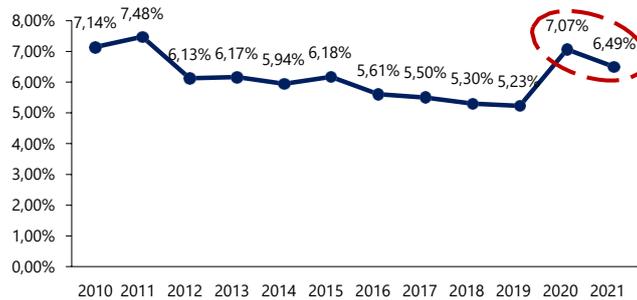


Sumber: Sakernas BPS, diolah dari berbagai tahun

b. Perkembangan Tingkat Pengangguran Berdasarkan Kelompok Usia dan Kualifikasi Pendidikan

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2010 hingga 2021 cenderung mengalami penurunan, kecuali terjadi peristiwa yang memengaruhi perekonomian seperti pada tahun 2020 yang terjadi pandemi COVID-19 yang meningkatkan angka TPT hingga 1,84 persen.

Gambar 2. 27 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2021

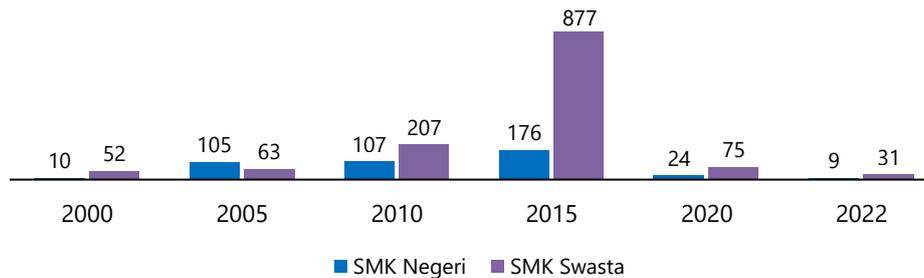


Sumber: Sakernas BPS, diolah dari berbagai tahun

c. Perkembangan Pendirian SMK dan Mismatch Lulusan SMK

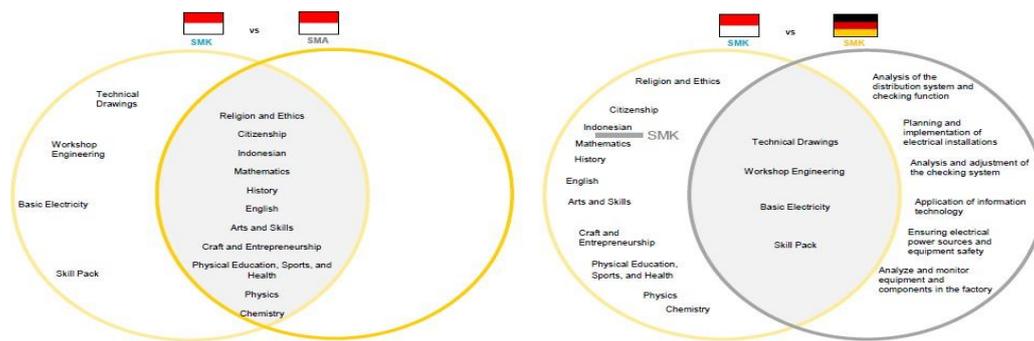
Selain itu, dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan, pengangguran secara umum didominasi oleh penduduk lulusan SMK yaitu sebesar 17,8 persen pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan vokasi belum mampu menghasilkan lulusan untuk memenuhi pekerjaan berketerampilan tinggi yang mudah terserap oleh pasar kerja. Namun demikian, pekerja berpendidikan rendah lebih rentan terhadap pengangguran jangka panjang. Berdasarkan Gambar 2.28, diketahui bahwa terjadi peningkatan pendirian SMK baru yang signifikan pada tahun 2015. Pendirian SMK ini masih belum diikuti dengan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Berdasarkan analisis Prospera (2020) yang dapat dilihat pada Gambar 2.28, kurikulum SMK di Indonesia masih cenderung sama dengan SMA, yang jauh berbeda dengan kurikulum SMK di negara lain misalnya Jerman yang sudah banyak mengadopsi keterampilan-keterampilan teknis sehingga lulusan SMK lebih siap untuk bersaing di pasar kerja.

Gambar 2. 28 Perkembangan Jumlah Pendirian SMK Baru Tahun 2000-2022



Sumber: Dapodik, berbagai tahun

Gambar 2. 29 Perbandingan Kurikulum SMK di Indonesia dengan Jerman



Sumber: Kemendikbudristek, dianalisis Prospera (2020)

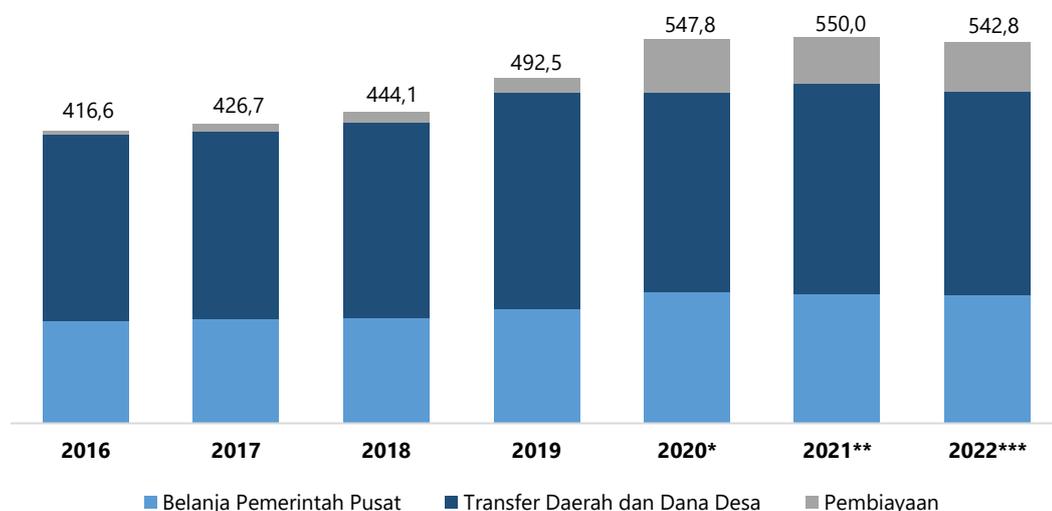
2.5.7 Pendanaan Pendidikan

a. Tren Anggaran pendidikan dalam APBN

Anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2022. Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Di tingkat pusat, pengalokasian anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat konstitusi tersebut, namun di tingkat daerah, masih banyak daerah yang belum mengalokasikan anggaran pendidikan dari total APBD.

Namun demikian, isu efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan di pusat masih perlu membutuhkan perbaikan yang cukup signifikan. Masih banyaknya anggaran pendidikan yang dipergunakan untuk pelatihan-pelatihan yang tidak terstandar sehingga tidak ada dampak yang nyata dalam peningkatan pencapaian pendidikan baik dari sisi kualitas maupun akses. Selain itu, masih banyaknya alokasi yang dimanfaatkan untuk pendidikan kedinasan dan pendidikan di ASN yang menyebabkan 20 persen anggaran pendidikan yang sudah terpenuhi tersebut tidak benar-benar nyata hasilnya. Sementara, kebutuhan anggaran pendidikan masih sangat besar dan tidak pernah dapat dipenuhi.

Gambar 2. 30 Anggaran pendidikan dalam APBN (triliun rupiah)



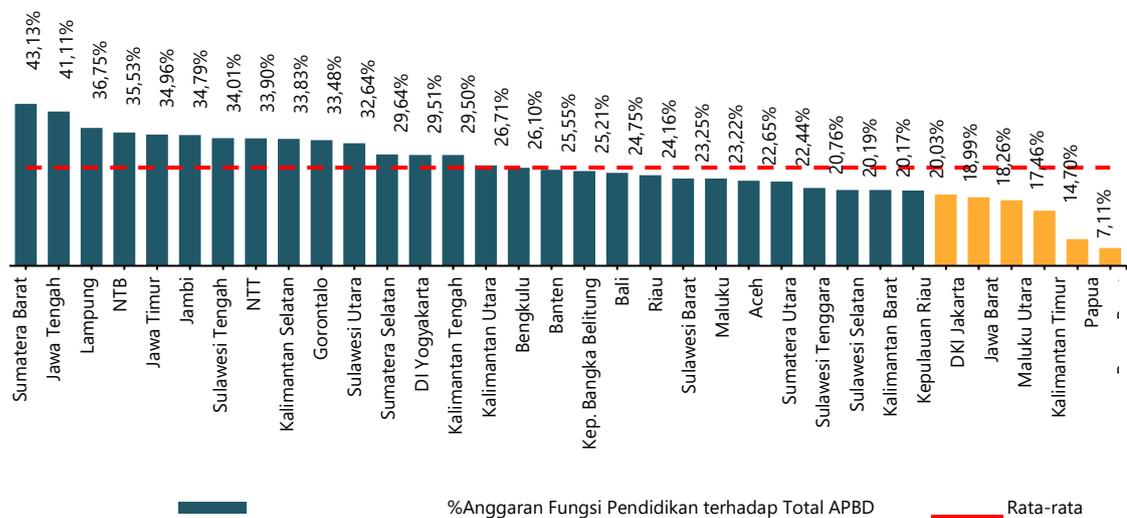
Sumber: APBN berbagai tahun

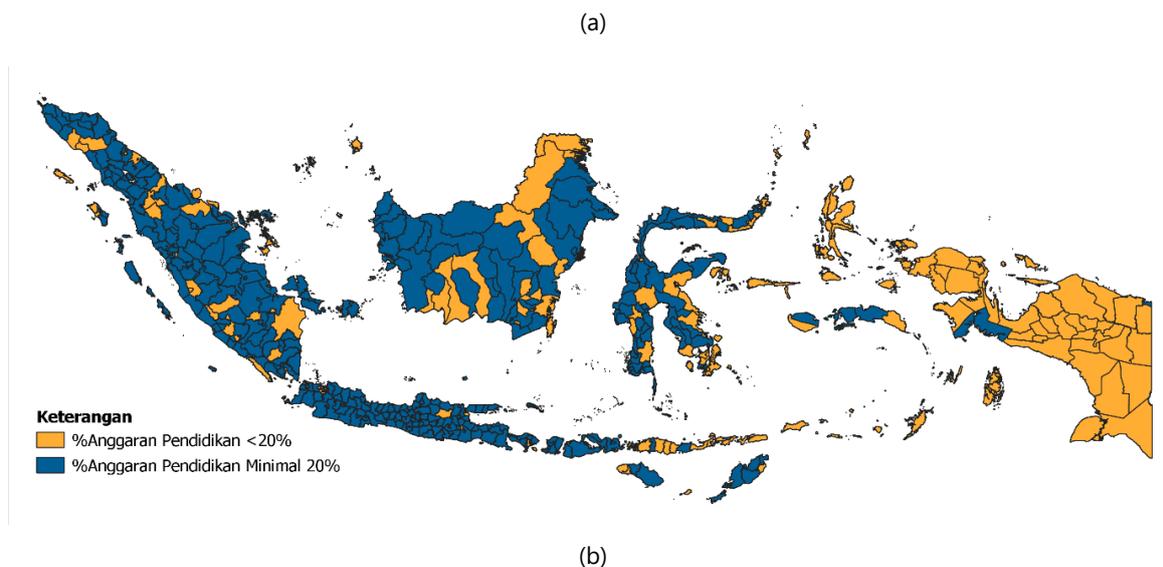
Keterangan: *berdasarkan Perpres 72/2020; **berdasarkan Perpres 113/2020; ***APBN 2022

b. Persentase Alokasi Anggaran pendidikan di Daerah

Di Indonesia, kemampuan daerah untuk memenuhi anggaran pendidikan 20 persen di APBD tanpa bergantung dari transfer daerah masih jauh dari harapan. Data menunjukkan hanya 1 dari 34 Provinsi (2,94 persen) yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen APBD (di luar dana transfer daerah), yaitu Provinsi Sumatera Barat. Sementara di tingkat kabupaten atau kota, 6 dari 514 Kabupaten/Kota (1,16 persen) yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen (di luar dana transfer daerah), yaitu Kab. Bandung, Kab. Bangli, Kab. Bogor, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Ogan Komering Ilir, dan Kab. Pematang Jaya (Neraca Pembangunan Kemdikbud 2019). Pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan di daerah sebesar minimal 20 persen dalam APBD masih tergantung pada APBN melalui dana transfer daerah (DAU, DAK Fisik dan Non-Fisik). Pada sebagian besar daerah, dengan bertambahnya alokasi anggaran pendidikan dari dana transfer ke daerah (APBN), ada tendensi mengurangi alokasi APBD murni (PAD) dalam memenuhi ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Permasalahan ketidakmampuan daerah dalam memprioritaskan anggaran pendidikan di APBD dapat mempengaruhi kualitas Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan yang wajib dipenuhi oleh daerah.

Gambar 2. 31 Persentase Alokasi Anggaran pendidikan di Daerah dengan Dana Transfer Daerah Tahun 2021





Sumber: Kemendikbudristek dalam Publikasi Neraca Pendidikan Daerah, 2021
 Keterangan: (a) Provinsi; (b) Kabupaten/Kota

c. Komponen Pemanfaatan Anggaran pendidikan

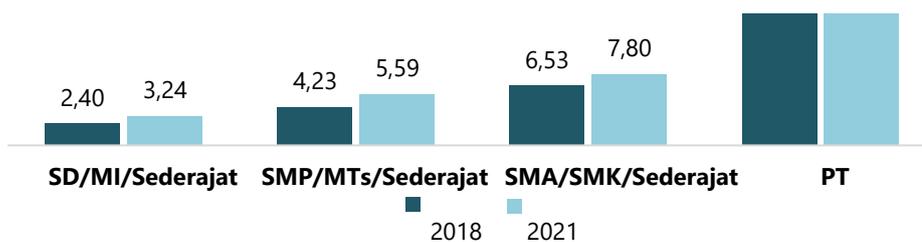
Komponen belanja daerah baik dilihat dari anggaran pendidikan maupun APBD secara keseluruhan masih didominasi oleh belanja pegawai. Belanja modal merupakan komponen belanja yang proporsinya paling kecil di setiap tahunnya. Belanja modal merupakan komponen yang sangat penting dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan mengalami penurunan dari 20,10 persen pada tahun 2017 menjadi 14,4 persen pada tahun 2021. Sementara, biaya pendidikan yang terhitung di Pusat untuk belanja pegawai hanya berada di kisaran 22 – 28 persen setiap tahunnya, namun demikian apabila merujuk pelaporan dalam APBD meningkat signifikan yaitu diatas 50 persen. Artinya belanja modal yang seharusnya penting dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan semakin tertekan.

d. Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Biaya pendidikan

Pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk biaya pendidikan per Peserta didik variatif tergantung jenjang pendidikan yang sedang dijalani. Berdasarkan data Susenas MSBP pada tahun 2021, untuk jenjang SD, rata-rata pengeluaran per rumah tangga sebesar Rp.2,4 juta per tahun pada tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp.3,24 juta per tahun pada tahun 2021. Untuk jenjang SMP, rata-rata pengeluaran per rumah tangga sebesar Rp.4,23 juta per tahun pada tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp.5,59 juta per tahun pada tahun 2021. Untuk jenjang SMA, rata-rata pengeluaran per rumah tangga sebesar Rp.6,5 juta per tahun pada tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp.7,8 juta per tahun pada tahun 2021. Untuk jenjang PT, rata-rata pengeluaran per rumah tangga sebesar Rp.14,4 juta per tahun pada tahun 2018 dan masih stabil di angka yang sama per tahun pada tahun 2021.

Gambar 2. 32 Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk Biaya pendidikan per Peserta didik Menurut Jenjang pendidikan (juta rupiah)

14,47 14,47

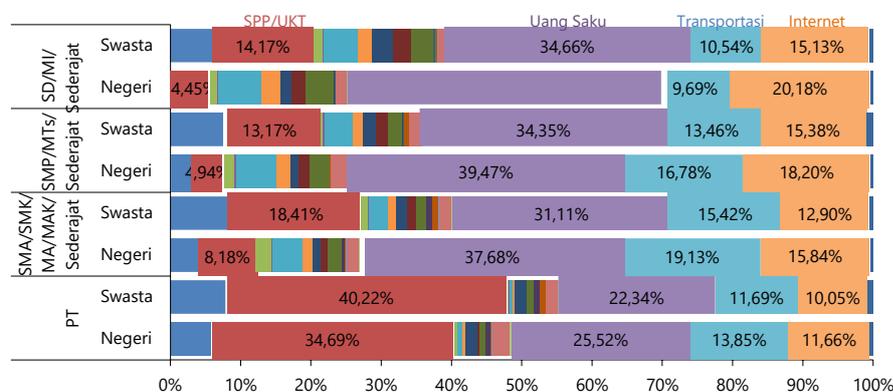


Sumber: BPS, diolah dari Susenas MSBP 2021

e. Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan Berdasarkan Komponen Biaya Pendidikan

Adapun secara detail, sebagaimana diperlihatkan pada gambar komponen pembiayaan yang dikeluarkan oleh rumah tangga juga variatif di masing-masing jenjang. Untuk jenjang SD, komponen pembiayaan didominasi uang saku yaitu 34,66 persen di sekolah negeri dan 44,62 persen di sekolah swasta. Untuk jenjang SMP, komponen pembiayaan didominasi uang saku yaitu 34,35 persen di sekolah negeri dan 39,47 persen di sekolah swasta. Untuk jenjang SMA, komponen pembiayaan didominasi uang saku yaitu 37,68 persen di sekolah negeri dan 37,68 persen di sekolah swasta. Berbeda dengan jenjang lainnya, biaya di PT didominasi oleh pembayaran SPP/UKT yang berkisar di angka 34-40 persen.

Gambar 2. 33 Persentase Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan Berdasarkan Komponen Biaya pendidikan Tahun 2021

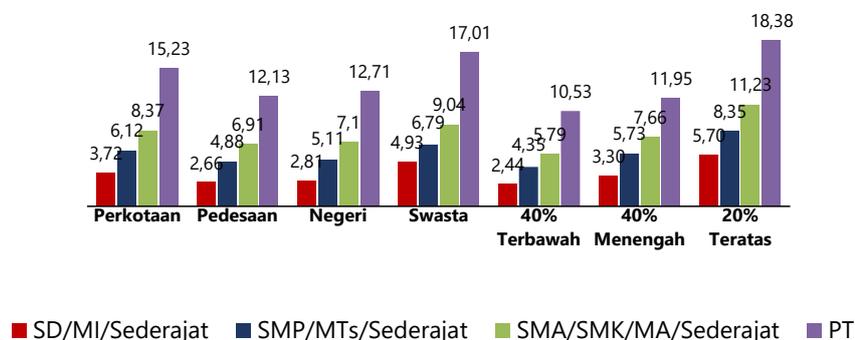


Sumber: BPS, diolah dari Susenas MSBP 2021

f. Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan pada kelompok pengeluaran 40 persen ke bawah pada semua jenjang pendidikan setengah kali lipat kelompok pengeluaran 20 persen ke atas. Meskipun begitu, kelompok rumah tangga ekonomi terlemah masih perlu mengeluarkan biaya yang relatif tinggi untuk biaya pendidikan yaitu 2,44 juta untuk jenjang SD/MI/Sederajat, 4,35 juta untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat, 5,79 juta untuk jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat, dan lebih dari 10 juta untuk jenjang pendidikan tinggi.

Gambar 2. 34 Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 (Juta Rupiah)



g. Dukungan Program Pemerintah dalam Membantu Biaya pendidikan

Upaya pemerintah untuk memastikan biaya pendidikan dapat terjangkau adalah dengan mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/SMK/MA/Sederajat, serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan sesuai karakteristik daerah dan kebutuhan satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik dari keluarga ekonomi terlemah melalui program Program Indonesia Pintar (PIP).

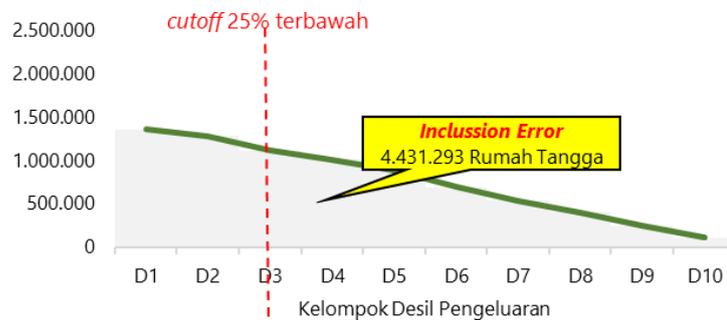
Gambar 2. 35 Persentase Peserta didik yang Menerima Bantuan Biaya pendidikan Berdasarkan Sumber Bantuan Tahun 2021



h. Ketidaktepatan Penerima Beasiswa dididik KIP

Berdasarkan data BPS pada Susenas MSBP tahun 2021, diketahui bahwa sebanyak 20,14 persen dari total peserta didik dan mahasiswa menerima bantuan pendidikan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga lainnya. Bantuan pendidikan melalui PIP merupakan sumber utama bantuan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun, diketahui bahwa dari 7,64 juta rumah tangga yang memiliki anak penerima PIP, sebanyak 4,43 juta rumah tangga berasal dari kelompok pengeluaran 75 persen ke atas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa angka inclusion error masih cukup tinggi yang seharusnya menyasar peserta didik/mahasiswa yang berasal dari keluarga kelompok pengeluaran 25 persen terbawah.

Gambar 2. 36 Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Anak Penerima PIP Tahun 2021

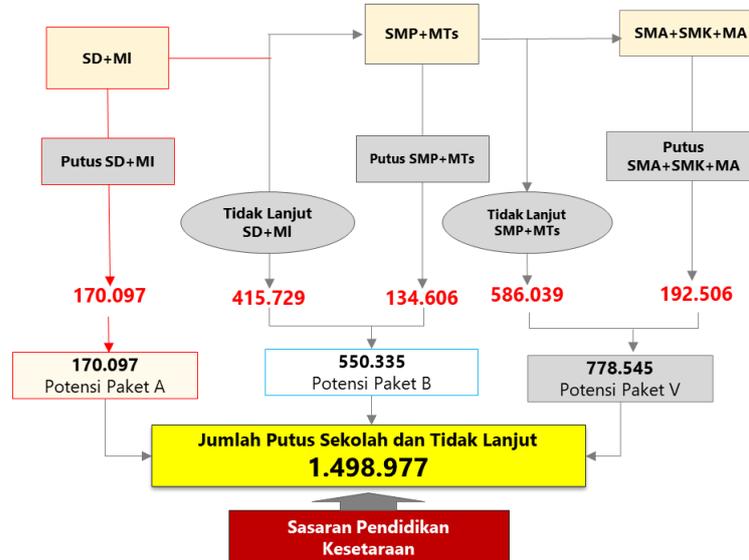


2.5.8 Akses dan Kualitas Pendidikan Nonformal

a. Sasaran Anak Tidak Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Kursus Pelatihan

Prinsip dasar dari pendidikan nonformal adalah pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning). Pendidikan nonformal diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan penduduk terutama penduduk usia produktif yang belum terpenuhi kebutuhannya melalui jalur pendidikan formal sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian APK khususnya jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat. Pada tahun 2021, angka buta huruf penduduk usia 15-59 tahun sebesar 1,56 persen atau sebanyak 2.761.189 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemendikbudristek per tanggal 22 September 2022 yang ditunjukkan oleh Gambar 2.35 diketahui bahwa jumlah penduduk yang putus sekolah dan tindak lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mencapai 1.498.977 penduduk. Angka ini menjadi fokus sasaran dalam pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C).

Gambar 2. 37 Jumlah Angka Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan Tahun 2021



Sumber: pd.data.kemdikbud.go.id per 22 September 2022

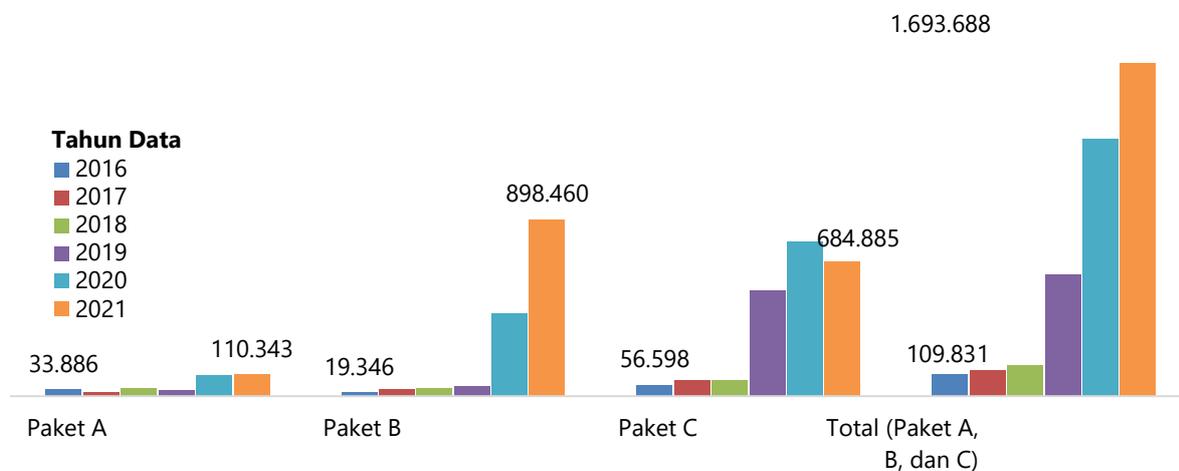
b. Perkembangan Pendidikan Kesetaraan

Jumlah peserta pendidikan kesetaraan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan minat terhadap layanan pendidikan nonformal melalui

pendidikan kesetaraan semakin meningkat. Peningkatan jumlah peminat pendidikan kesetaraan ini diikuti juga oleh peningkatan jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

Pada tahun 2016 jumlah peserta didik Paket A berada di kisaran 33.886 orang yang meningkat cukup tajam pada tahun 2021 hingga sebesar 110.343 orang. Sementara, untuk paket B meningkat sangat tajam dari 19.346 menjadi 898.460 orang. Untuk jenjang paket C, mengalami peningkatan juga dari tahun 2016 yang hanya untuk 56.598 orang, meningkat pada tahun 2021 menjadi 684.885. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa animo masyarakat terkait pendidikan kesetaraan ini semakin tahun semakin meningkat sehingga perlu juga dipastikan kualitas layanan dari pendidikan kesetaraan dimaksud.

Gambar 2. 38 Perkembangan Jumlah Peserta pendidikan Kesetaraan Tahun 2016-2021



Sumber: Susenas BPS, diolah dari berbagai tahun

Gambar 2. 39 Perkembangan Jumlah Satuan pendidikan Kesetaraan Tahun 2018-2021



Sumber: Dapodik per 22 September 2022

c. Perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan

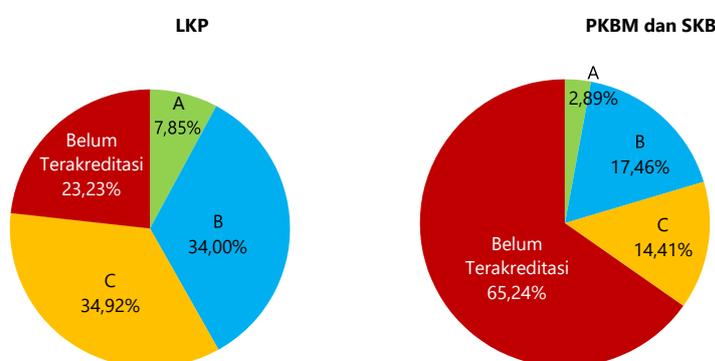
Selain pendidikan kesetaraan, pendidikan nonformal juga mencakup pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Berdasarkan data Sakernas Agustus 2021, sebanyak 5,86 juta dari 204,81 juta (2,85 persen) penduduk usia 15 tahun ke atas pernah atau sedang mengikuti kursus dalam setahun terakhir. Angka ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pendidikan keterampilan dan

pelatihan kerja juga tinggi. Berdasarkan data Kemendikbudristek, jenis kursus yang paling banyak diminati oleh penduduk adalah terkait seni rupa dan kriya, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan bahasa.

d. Perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan

Peningkatan minat penduduk terhadap pendidikan nonformal ini perlu diimbangi dengan penguatan kualitas, manajemen, serta akses layanan pendidikan nonformal agar lulusan pendidikan nonformal mampu bersaing di dunia kerja. Namun kondisi hingga tahun 2021 adalah kurang dari 50 persen lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan nonformal yang sudah terakreditasi minimal B. Berdasarkan Gambar 2.40 diketahui bahwa masih banyak satuan pendidikan penyelenggara pendidikan nonformal masih belum terakreditasi yaitu 23,23 persen LKP dan 65,24 persen PKBM dan SKB masih belum terakreditasi.

Gambar 2. 40 Akreditasi Satuan pendidikan Nonformal Tahun 2021



Sumber: Kemendikbudristek dalam Publikasi Neraca Pendidikan Daerah, 2021

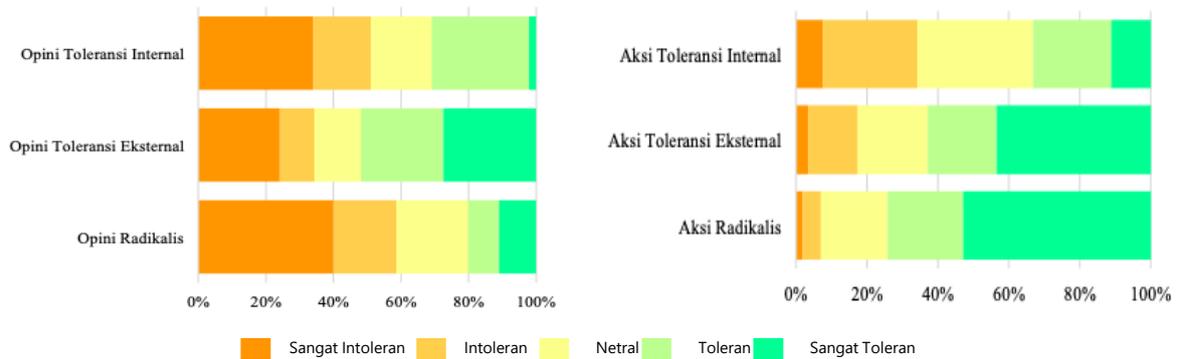
2.5.9 Pendidikan Karakter, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan

a. Karakter dan Pemahaman Agama Peserta didik

Pendidikan karakter sejak dini sangat penting karena karakter akan menentukan arah dari peradaban bangsa. Namun selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami krisis karakter yang ditunjukkan oleh maraknya kejadian perundungan (*bullying*) terutama yang menasar anak usia sekolah. Berdasarkan data *Programme for International Students Assessment* (PISA) tahun 2018, diketahui bahwa 41 persen peserta didik di Indonesia pernah mengalami perundungan. Angka ini termasuk tinggi karena jauh di atas rata-rata negara anggota OECD sebesar 22,7 persen sehingga menjadikan Indonesia menempati urutan ke-5 dari 78 negara dengan kejadian perundungan terbanyak pada peserta didik. Kejadian buruk lain yang dialami oleh peserta didik adalah dihina (22 persen), barang dicuri/dihancurkan (22 persen), kabar buruk disebarluaskan (20 persen), dikucilkan (19 persen), dipukul atau disuruh-suruh (18 persen), dan diancam (14 persen).

Selain itu, berdasarkan hasil studi PPIM UIN Jakarta menunjukkan sebagian besar peserta didik dan mahasiswa memiliki sikap atau opini yang masuk dalam kategori intoleran atau sangat toleran dan radikal atau sangat radikal. Namun, yang perlu diketahui dari sisi tindakan atau aksi, hasil survei menunjukkan sebagian besar peserta didik dan mahasiswa memiliki kecenderungan toleran dan moderat. Walaupun dalam tindakan responden (peserta didik dan mahasiswa) cenderung moderat dan toleran, tetapi kecenderungan sikap mereka yang sebagian besar radikal dan intoleran cukup mengkhawatirkan, karena sikap yang demikian berpotensi menjadi tindakan radikal (PPIM UIN Jakarta, 2018).

Gambar 2. 41 Proporsi Peserta didik/Mahasiswa Menurut Kategori Opini dan Aksi Intoleransi Internal, Intoleransi Eksternal, dan Radikalisme



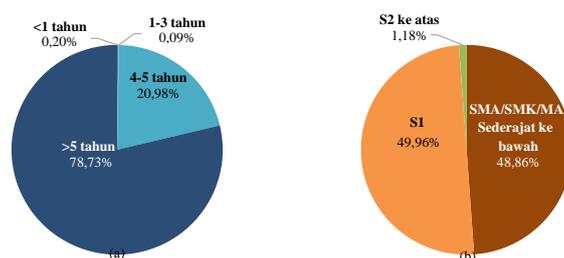
Sumber: Analisis PPIM UIN Jakarta, 2018

b. Kondisi pendidikan Keagamaan

Dilihat dari sisi sikap, peserta didik dan mahasiswa memiliki pandangan yang cenderung radikal. Apabila digabungkan, mereka yang memiliki sikap yang radikal dan sangat radikal lebih dari separuh total responden yaitu sebesar 58,5 persen. Sedangkan mereka yang memiliki sikap moderat hanya sebesar 20,1 persen (PPIM UIN Jakarta, 2018). Data mengenai sikap intoleran di lingkungan pendidikan (peserta didik dan mahasiswa) juga memperlihatkan kecenderungan yang sama. Namun, terdapat perbedaan antara sikap toleransi internal dan sikap intoleransi eksternal. Peserta didik dan mahasiswa cenderung lebih intoleran atau sangat intoleran secara internal dengan persentase 51,1 persen, daripada eksternal yang sebesar 34,3 persen. Begitu juga dengan tingkat toleransi, mereka cenderung toleran secara eksternal dengan persentase sebesar 51,9 persen ketimbang internal sebesar 31,1 persen (PPIM UIN Jakarta, 2018).

Pilar utama dari pendidikan karakter adalah pemahaman dan pengamalan nilai kemanusiaan dan agama. Pemahaman dan pengamalan nilai kemanusiaan dan agama tidak hanya didapatkan dari lingkungan sekolah, namun juga dari lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren. Data Statistik pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 37.626 pondok pesantren di Indonesia, dimana 43,36 persen atau sebanyak 16.316 pesantren hanya menyelenggarakan kajian kitab, sedangkan sisanya menyelenggarakan kajian kitab dan kajian pendidikan lainnya. Dari sisi pengajar di pesantren, diketahui bahwa mayoritas pengajar memiliki pengalaman menempuh pendidikan di pondok pesantren lebih dari lima tahun yaitu sebanyak 78,73 persen. Selain itu, pada kualifikasi pendidikan formal para pengajar di pesantren didominasi oleh lulusan S1 (49,96 persen) dan SMA/SMK/MA/Sederajat ke bawah (48,86 persen).

Gambar 2. 42 Profil Pengajar Pesantren Tahun 2021



Sumber: Statistik Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Pelajaran 2021/2022, Kementerian Agama

2.6 Isu Strategis

2.6.1 Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)

a. Keterbatasan akses pendidikan

Kualitas Pendidikan di Indonesia tidak tersebar secara merata terutama di daerah yang masuk dalam kategori 3T (Terluar, terpencil, dan tertinggal). Pendidikan di daerah pelosok belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat selain jumlah sekolah yang sedikit, letaknya yang jauh juga menyulitkan anak untuk bersekolah. Jarak tempuh yang sangat jauh serta akses jalan yang buruk tentu sangat bisa sangat dibandingkan dengan sekolah yang ada di perkotaan. Peserta didik yang bertempat tinggal di kota memiliki keuntungan berupa pilihan sekolah lebih banyak dan opsi kendaraan yang bisa digunakan lebih bervariasi. Serta, peserta didik tidak perlu melewati sawah, gunung, jalan berbatu atau menyebrangi aliran sungai.

Tidak hanya masalah mobilitas peserta didik saat akan pergi ke sekolah, lokasi yang terpencil juga menyulitkan mereka dalam memenuhi fasilitas sekolah. Informasi penting yang biasanya didapatkan melalui sosialisasi juga terkadang mereka lewatkan karena tak banyak dari mereka yang mengetahui lokasi sekolah mereka yang terpencil. Di sisi lain, Peserta didik dari wilayah ekonomi rendah dan terpencil memiliki kesempatan yang terbatas untuk mengakses pendidikan. Isu ini menjadi hal yang wajar jika tingkat pendaftaran peserta didik baru di wilayah timur lebih sedikit daripada wilayah lain di Indonesia.

b. Masih tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia

Jumlah ATS mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu dari 4,2 juta ATS pada tahun 2019 menjadi 3,9 juta ATS pada tahun 2023 dengan ATS paling banyak tersebar di Jawa Barat sebesar 893.145 ATS. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi penduduk yang lebih tinggi di Jawa merupakan salah satu faktor kunci tingginya angka anak tidak sekolah. Tingkat anak tidak sekolah yang tinggi di Jawa dan di daerah perkotaan menunjukkan bahwa faktor-faktor sisi permintaan cenderung menjadi yang paling penting di sini, tidak hanya tentang akses infrastruktur sekolah.

Sebuah studi yang dilakukan oleh UNICEF tentang ATS di Indonesia mengidentifikasi berbagai faktor penyebab sehingga anak dan remaja usia sekolah di Indonesia tidak bersekolah. Faktor-faktor tersebut terkait dengan keterpencilan daerah tempat tinggal, ketertinggalan atau kesenjangan pembangunan daerah, kemiskinan dan latar belakang ekonomi keluarga, serta masih belum memadainya layanan pendidikan untuk anak rentan seperti anak penyandang disabilitas. Dalam penanganan ATS di Indonesia diperlukan dukungan dari multi sektoral, salah satu contohnya terkait penanganan ATS pada kelompok anak yang berhadapan hukum dengan

menjalin koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Intervensi yang dapat dilakukan dengan memastikan setiap ABH mendapatkan layanan Pendidikan yang menjadi haknya, dan adanya layanan pendidikan yang beroperasi dalam setiap LPKA dan LPAS.

c. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kemampuan yang handal tersebut diawali dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan secara luas, ditentukan oleh pendidikan awal yang diterima oleh SDM pada suatu bangsa. Pendidikan awal atau kita sebut disini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pondasi bagi perkembangan kualitas SDM selanjutnya. Karena itu peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di suatu negara memegang peranan yang vital untuk kemajuan bangsa tersebut di masa mendatang.

Namun, pendidikan bagi anak-anak usia dini di Indonesia masih belum terselesaikan dengan baik. Sedangkan, pembinaan usia dini merupakan langkah strategis dan penting dalam membangun karakter dan kemampuan intelektual seseorang. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah laju pertumbuhan anak usia dini di Indonesia tidak seimbang dengan laju pertumbuhan pembangunan sarana fisik institusi pra sekolah.

Institusi anak usia dini belum merata ke daerah-daerah atau pelosok Indonesia sehingga anak usia dini berkembang hanya pada pusat-pusat kota yang jumlahnya sangat terbatas ini, menjadi salah satu penyebab terhambatnya pendidikan anak usia dini di masyarakat daerah. Selain itu, jenis pendidikan anak usia dini yang baru dikenal masyarakat adalah Taman Kanak-Kanak, sedangkan Kelompok Bermain (KB) kurang diminati dan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang memiliki popularitas rendah di mata masyarakat dan diikuti dengan minimnya pengadaan institusi secara fisik, begitu juga dengan bentuk-bentuk PAUD lainnya.

Pemerintah memegang peranan penting untuk membangun pendidikan anak usia dini di Indonesia. Sesuai dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan maka pengadaan kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan ini harus diperluas. Karenanya anggaran pembangunan untuk pengembangan PAUD di Indonesia harus ditingkatkan. Adanya anggaran pembangunan yang cukup maka penyelenggaraan PAUD dapat ditingkatkan secara merata di seluruh pelosok Indonesia, dan yang mengakibatkan meratanya pula kesempatan anak Indonesia.

2.6.2 Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

a. Masih rendahnya angka literasi dan numerasi peserta didik

Sejak adanya pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi anak untuk bersekolah di jenjang PAUD dan SD/MI di Indonesia. Di sisi lain, tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan pada jenjang lainnya terus mengalami peningkatan. Meskipun partisipasi meningkat Indonesia masih menghadapi dua permasalahan utama dalam kualitas pembelajaran pengajaran: yakni rendahnya angka literasi dan numerasi serta belum adanya sistem penilaian hasil belajar yang bersifat konstan. Hasil PISA Indonesia menunjukkan bahwa proporsi peserta didik yang berada di atas kemampuan standar minimum kompetensi membaca, matematika, dan sains masih lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan peserta didik di negara-negara lain di kawasan ASEAN dan pada tahun 2022 nilai rata-rata PISA mengalami penurunan.

Menurut laporan PISA, rendahnya kualitas guru, disparitas mutu pendidikan, dan dampak jangka panjang dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau *learning loss* di Indonesia merupakan penyebab utama buruknya kemampuan literasi peserta

didik secara umum. Hasil studi PISA 2022 menyebutkan ada lima kualitas guru di Indonesia yang menghambat belajar, yakni: guru tidak memahami kebutuhan belajar peserta didik; guru sering tidak hadir; guru cenderung menolak perubahan; guru tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik; dan guru tidak fleksibel dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil PISA dan TIMSS, perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas guru, mengurangi disparitas pendidikan, dan menjalankan program pendidikan secara masif dan menyeluruh. Selain itu, partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat dapat membantu menumbuhkan budaya belajar untuk mendongkrak kualitas peserta didik Indonesia. Artinya perlu semua pihak untuk berkomitmen dalam meningkatkan literasi peserta didik Indonesia yang ditandai dengan skor PISA pada periode berikutnya.

b. Penerapan teknologi pembelajaran dan pedagogik digital yang belum optimal

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat. Perangkat teknologi seperti komputer, gadget seluler, dan internet menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi berpengaruh besar terhadap semua bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. TIK merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi. TIK dapat meningkatkan mutu pengajaran, pembelajaran dan manajemen di sekolah dan sehingga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam pembelajaran diharapkan mampu memberikan solusi dan layanan baru untuk kegiatan pendidikan.

Pada era perkembangan teknologi yang telah masuk dan menjadi bagian dalam Pendidikan, maka harus diikuti dengan penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten. Tenaga pendidik tidak hanya harus mahir menggunakan teknologi tetapi juga harus bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pedagogik digital hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru yang diperlukan di abad 21 ini. Pedagogik digital merupakan suatu pendekatan yang bukan hanya sekedar kemampuan tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi, melainkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk membangun kemampuan berpikir kritis siswa dan mengembangkan sikap peserta didik dalam menyikapi teknologi. Tenaga pendidik dituntut dapat menyampaikan informasi kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Meskipun demikian, penerapan teknologi pembelajaran dan pedagogik digital di Indonesia masih memiliki hambatan dan kendala.

Kendala utama dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran yang dihadapi peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infokus. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru memanfaatkan teknologi pembelajaran adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal, serta ketersediaan listrik. Tenaga pendidik di Indonesia belum sepenuhnya dapat memanfaatkan kemajuan teknologi pembelajaran. Masih banyak guru yang ternyata belum siap dengan adanya perkembangan teknologi pembelajaran menjadi kendala berikutnya dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran di kelas.

c. Penerapan kurikulum dan sistem standar penilaian yang terus berubah-ubah

Pada hakikatnya setiap implementasi kebijakan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga pendidik dalam mengimplementasikandengan benar. Implementasi tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh

persepsi dan interpretasi yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Tantangan disrupsi kebijakan pendidikan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia yang terus berubah setiap pergantian kepemimpinan.

Kebijakan kurikulum yang berubah-ubah atau sering diganti bukan hanya memberikan dampak negatif kepada peserta didik yang semakin menurun prestasinya, bahkan sebenarnya kondisi ini akan berdampak langsung terhadap sekolah yaitu berkaitan kemampuan tenaga pendidik yang tidak mampu mengejawantahkannya dalam proses belajar mengajar dengan baik maka kurikulum tersebut tidak bisa berjalan lancar. Diharapkan adanya penerapan kurikulum yang dirancang dengan baik dan dijalankan secara maksimal dan konsisten agar membentuk pendidikan yang sehat. Perubahan kurikulum pada setiap periode pemerintahan akan menghambat jalannya pembangunan pendidikan di Indonesia.

Masalah terkait inkonsisten juga terdapat pada sistem standar penilaian pendidikan. Pada tahun 2021 terdapat tiga penentu kelulusan peserta didik yaitu evaluasi nilai rapor, perilaku baik dan evaluasi ujian sekolah. Tiga syarat tersebut telah merubah sistem penilaian pendidikan Ujian Nasional yang berlaku pada tahun 2011-2019. Penghapusan sistem Ujian Nasional hingga saat ini masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan pengukuran kualitas dan kapasitas peserta didik, tenaga kependidikan, serta satuan pendidikan.

Serta, hingga saat ini Indonesia belum memiliki metode penilaian hasil belajar peserta didik yang bersifat konstan. Metode pengukuran hasil belajar terus berubah di berbagai periode pemerintahan, diantaranya: UN, UNBK, AKSI kemudian Asesmen Nasional (AN). Selain itu, terdapat permasalahan di tingkat implementasi seperti guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah yang belum memiliki kapabilitas yang baik dalam memanfaatkan dan menginterpretasikan hasil AN.

d. Krisis pendidikan karakter dalam sistem pendidikan

Pendidikan karakter adalah suatu sistem berupa penanaman nilai karakter terhadap peserta didik yang meliputi kemauan atau kesadaran, dan tindakan dalam mengimplementasikan nilai, budi pekerti, karakter, serta akhlak ke dalam diri peserta didik, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik dalam mengambil keputusan, jujur, menghormati orang lain, maupun berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter ini bisa di dapat melalui beberapa aspek seperti dalam hal agama, orang lain, dorongan diri kita sendiri, maupun lingkungan, terutama pada lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.

Pendidikan karakter merupakan hal yang harus diperhatikan terutama didalam perealisasi pendidikan di indonesia, yang mana Indonesia pada masa sekarang dapat dikatakan telah mengalami krisis karakter atau moral di dalam diri peserta didik terutama pada peserta didik yang menginjak usia remaja. Salah satu permasalahan yang telah menjadi perhatian pemerintah yang semakin meningkat pada masa sekarang adalah permasalahan-permasalahan yang menyimpang dari nilai, norma dan moral dalam masyarakat, yang mana kebanyakan dari pelaku penyimpangan ini terjadi pada generasi muda terutama pada anak usia sekolah.

Adapun penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan yang menyimpang tersebut adalah karena krisis nilai karakter dan moral yang dialami oleh masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat maupun kurangnya pendidikan karakter yang didapat. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah semakin gencar lagi dalam menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian besar dari pembelajaran yang ditanamkan kepada peserta didik dalam lingkungan sekolah. Permasalahan-permasalahan yang menyimpang dari nilai, norma dan moral di negara ini antara lain (1) permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme; (2)

kejahatan atau kriminalitas yang tinggi; (3) pelecehan seksual; (4) perundungan atau *bullying*; (5) kekerasan dalam rumah tangga; (6) pelecehan seksual; (7) kecanduan obat-obatan terlarang (8) hamil diluar nikah yang mengakibatkan tingginya pernikahan pada anak dibawah umur; (9) kenakalan remaja, dan lain-lain.

Sepanjang tahun 2016 hingga 2020 terdapat 3.194 kasus pengaduan perlindungan anak bidang pendidikan. Kasus pengaduan perlindungan anak bidang pendidikan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus terkait penyimpangan nilai dan norma pada bidang pendidikan masih terus terjadi. Terdapat 4 jenis kasus pengaduan perlindungan anak pada bidang pendidikan selama tahun 2016 hingga 2020, antara lain, (1) tawuran pelajar dan perilaku kriminal; (2) perundungan; (3) Anak Korban Kebijakan (Anak Dikeluarkan karena Hamil, Pungli di Sekolah, Penyegehan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, *Drop Out*, dll); dan (4) penyalahgunaan narkoba.

Di tahun 2021, kejadian kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di rumah tangga. Namun demikian, masih ada 793 kasus kekerasan anak yang terjadi di lembaga pendidikan. Serta, selama tahun 2016 hingga 2020 terdapat kasus anak korban kebijakan (anak dikeluarkan karena hamil, pungli di sekolah, penyegehan sekolah, tidak boleh ikut ujian, anak putus sekolah, *drop out*, dll) sebanyak 1.698 kasus. Kasus terkait perundungan memiliki korban sebanyak 480 kasus, serta penyalahgunaan narkoba dari total pengguna narkoba 3,6 juta penduduk, sebagian didominasi oleh pemuda dengan rentang usia 15-24 tahun sebanyak 22,5%.

Dengan memperhatikan kasus-kasus terkait penyimpangan yang terjadi kepada anak dengan usia sekolah. Sehingga, kebijakan pembangunan pendidikan difokuskan kembali pada pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah ini bertujuan untuk menekan serta menghindari krisis moral pada peserta didik dan memperbaiki perilaku peserta didik sesuai dengan norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat.

e. Pelaksanaan pendidikan agama yang masih mengalami hambatan

Sekolah saat ini dituntut menerapkan sistem pendidikan agama yang mewujudkan generasi emas yang memiliki kecerdasan spiritual, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sekolah merupakan salah satu wadah bagi peserta didik mendapatkan pendidikan agama agar menjadi manusia taat melaksanakan nilai-nilai agama. Pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik yaitu untuk mengetahui, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan yang berguna untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan utama pelaksanaan pendidikan agama dalam sekolah dapat yaitu sebagai berikut: (a) untuk menguatkan serta mengembangkan nilai kehidupan yang penting sehingga menjadi kepribadian yang khas dimiliki oleh peserta didik, (b) sebagai koreksi terhadap perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh sekolah, dan (c) untuk membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat.

Namun, pelaksanaan pendidikan agama masih mengalami hambatan yang cukup serius. Hambatan utama dalam penciptaan pendidikan agama yaitu kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan agama yang harus ditanamkan pada peserta didik sejak masih kecil sehingga peserta didik akan terbiasa dalam melaksanakan nilai-nilai agama hingga dewasa. Selain itu, kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik dapat menghambat proses penumbuhan nilai agama, meskipun orang tua ataupun tenaga pendidik telah memberikan pembiasaan yang baik ataupun teladan kepada peserta didik. Serta, kurangnya kerjasama antara tenaga pendidik dan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan agama pada peserta didik. Tenaga pendidik hanya mengupayakan penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Namun, tenaga pendidik

tidak membentuk kerjasama dengan orang tua, sehingga program religius yang telah ditetapkan di sekolah tidak dilaksanakan di rumah. Tenaga pendidik hanya menyampaikan materi pembelajaran saja kepada peserta didik tanpa memperhatikan penumbuhan nilai spiritual peserta didik. Peserta didik yang memiliki dukungan dari keluarga akan menumbuhkan insan yang baik, akan tetapi jika tidak ada dukungan dari orang tua, tenaga pendidik, dan lingkungan akan berdampak pada penurunan nilai agama pada peserta didik.

f. Implementasi PAUD HI yang masih terhambat

Pengembangan PAUD Holistik Integratif merupakan pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara sistematis, yang meliputi berbagai aspek perkembangan fisik dan non fisik agar anak dapat tumbuh kembang sebagai anak yang sehat, kuat, cerdas, ceria dan berbudi luhur. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara fisik, mental, emosional serta sosial dipengaruhi oleh pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, stimulus mental, dan psikososial. Layanan stimulasi holistik integratif mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan orang tua.

PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan bagi anak usia dini yang dilakukan guna untuk memenuhi seluruh kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara sistematis, simultan dan terintegritas. Layanan stimulasi dalam PAUD Holistik Integratif terdiri dari layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Layanan PAUD Holistik Integratif ini cakupannya lebih luas dan terperinci dalam mempersiapkan tumbuh kembang anak dibandingkan dengan layanan lainnya. Tujuan umum dari terlaksananya PAUD Holistik Integratif yaitu terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, adanya PAUD Holistik integratif sangatlah diperlukan guna untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan terpadu, melalui pelayanan yang sistematis dan terencana, dapat mencakup lingkungan mikro, meso, exo dan makro.

Meskipun PAUD HI menjadi hal yang esensial, namun masih banyak lembaga PAUD yang masih belum menerapkan PAUD HI secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Minimnya pelibatan peran serta *stakeholder* dikaitkan dengan rendahnya implementasi PAUD HI sehingga layanan pada ana belum berjalan secara maksimal. Hingga saat ini Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang sudah memasukkan program PAUD dan PAUD HI ke dalam RKPD sebanyak 412 Kabupaten/Kota. Satuan PAUD yang seharusnya mengacu pada program holistik integratif belum sepenuhnya berjalan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan PAUD-HI, diantaranya: belum maksimalnya pemahaman guru terhadap PAUD HI; minimnya sosialisasi dari dinas atau pemerintah setempat terkait PAUD-HI; kurangnya keterlibatan masyarakat dalam layanan PAUD-HI; dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PAUD-HI.

2.6.3 Penguatan Pengelolaan tenaga Pendidik dan Kependidikan Berkualitas

a. Masih rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional guru

Terdapat empat kompetensi utama guru yakni pedagogi, sosial, kepribadian dan profesional yang perlu dicapai melalui pendidikan profesi, sertifikasi profesional guru, dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Kompetensi guru merupakan komponen penting

dalam menciptakan hasil dari pendidikan yakni peserta didik yang berkarakter, terdidik dan terampil. Kompetensi guru yang berkualitas mempengaruhi kualitas belajar peserta didik. Adapun kompetensi guru yang dievaluasi dalam perangkat asesmen yang bernama Uji Kompetensi Guru (UKG) adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Berdasarkan data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang terakhir diselenggarakan tahun 2015 ternyata kualitas kompetensi guru di Indonesia masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh RISE SMERU (2018) menunjukkan bahwa meskipun peserta telah mengikuti diklat Pengembangam Keprofesian Berkelanjutan (PKB), nyatanya banyak guru tidak dapat mencapai kriteria capaian minimal kompetensi. Hal yang diperhatikan lainnya adalah mayoritas peserta PKB sudah memiliki sertifikat tenaga kependidikan, yang pada akhirnya desain diklat ini hanya menjadi penyegaran atas materi yang pernah dipelajari guru semasa kuliah dan belum ada pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan.

b. Rekrutmen guru honor yang massif dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa mempertimbangkan pembiayaan

Isu terkait rekrutmen guru honorer yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah menjadi fokus pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan permasalahan guru honorer ini disebabkan tidak adanya aturan yang cukup jelas terkait pengangkatan guru honorer di daerah. Serta, kegiatan pengangkatan guru honorer di daerah tidak didukung dengan adanya anggaran yang dialokasikan khusus untuk guru honorer. Hal ini berdampak pada anggaran insentif yang diterima oleh guru honorer menggunakan alokasi dana dari BOS yang anggarannya terbatas. Secara tidak langsung juga berdampak pada tingkat kesejahteraan guru honorer yang masih rendah.

Hingga saat ini pemerintah belum mempunyai perencanaan kebijakan perbaikan karir guru dari sisi pengangkatan jenjang karir guru honorer. Kebijakan PPPK yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek saat ini belum dapat mengatasi permasalahan karir guru honorer secara komprehensif. Rekrutmen guru ASN PPPK dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan guru dan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

c. Distribusi guru yang tidak merata

Data yang dilansir oleh Direktorat GTK Kemendikbudristek (2022) menunjukkan masih terdapat kekurangan guru sebesar 1.090.678 guru pada tahun 2021. Jumlah guru yang akan pensiun akan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan kebijakan terkait penggantian guru dalam jumlah yang setara melalui pengangkatan guru baru berstatus ASN yang memenuhi syarat (seleksi). Prasyarat formasi CP3K saat ini hanya dapat diakses oleh guru honorer yang aktif terdaftar dalam sistem dan tidak dikhususkan untuk lulusan baru.

Ketidakseimbangan antara jumlah lulusan LPTK dengan kebutuhan guru di satuan pendidikan menunjukkan adanya masalah dalam sistem rekrutmen guru saat ini. Kebijakan yang diambil dalam menutup kekurangan guru yaitu sekolah dan dinas pendidikan di daerah yaitu mengangkat guru honorer tanpa proses seleksi yang ketat. Di sisi lain, saat ini LPTK belum memenuhi perannya untuk memastikan kualitas dan kompetensi guru. Hal ini berdampak pada ketersediaan guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

2.6.4 Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan

a. Kesenjangan penjaminan mutu pendidikan

Kebijakan desentralisasi pendidikan belum mampu menjawab kesenjangan akses dan mutu

pendidikan antarwilayah di Indonesia. Rasio Angka Partisipasi Kasar SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi antar 20 persen penduduk terkaya dan 20 persen penduduk termiskin masih cukup lebar (Renstra Kemendikbudristek 2020-2024). Capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,92 tahun pada tahun 2010 menjadi 9,08 tahun pada tahun 2022. Beberapa faktor penyebabnya di antaranya adalah perbedaan kesiapan SDM, keterbatasan dana APBD, dan sarana prasarana yang belum merata (Subijanto, 2010).

Di sisi lain, masih terdapat satuan pendidikan yang masih belum terakreditasi. Artinya, masih ada penyelenggaraan pendidikan yang belum terjamin kualitas pembelajarannya. Hal ini dikarenakan kapasitas Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang masih kurang dalam menjalankan proses akreditasi. Hasil akreditasi, meskipun dapat menjadi cerminan mutu sekolah – namun belum menjadi dasar perbaikan mutu sekolah kedepan. Serta, akreditasi sekolah kota dan sekolah desa terjadi kesenjangan antara kota yang dekat pusat pemerintah dengan sekolah yang jauh dari sentuhan pemerintah apalagi dari pedalaman. Oleh karena itu, proses akreditasi masih perlu banyak pertimbangan dan tinjauan ulang mengenai pelaksanaan proses pengakreditasi yang masih berjalan sampai sekarang.

b. Penerapan desentralisasi pendidikan yang perlu dievaluasi kembali

Undang-Undang 23/2014 secara rigid telah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Manajemen pendidikan, kurikulum, dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra merupakan kewenangan daerah, sedangkan akreditasi jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah merupakan kewenangan pusat. Urusan terkait jenjang pendidikan tinggi yang diatur sepenuhnya oleh pusat, sedangkan jenjang pendidikan menengah adalah urusan pemerintah provinsi dan sisanya merupakan kewenangan kabupaten/kota (Majalah Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, 2022). Porsi anggaran pendidikan APBN untuk daerah cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Selama 2015-2019, lebih dari 60 persen APBN pendidikan dialokasikan untuk daerah (Renstra Kemendikbudristek 2020-2024).

Desentralisasi pendidikan memberikan keuntungan untuk daerah agar dapat lebih leluasa dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk peningkatan kualitas. Selain itu, desentralisasi dapat mempersingkat prosedur administrasi. Namun, penerapan desentralisasi yang telah berjalan sepuluh tahun dinilai perlu dikaji ulang. Pada bidang pendidikan perlu adanya evaluasi terkait dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Desentralisasi pendidikan juga menimbulkan dampak negatif yaitu kesenjangan capaian pembangunan pendidikan antardaerah akan semakin tinggi. Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia akan berkembang lebih cepat daripada daerah miskin, tergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

c. Komitmen daerah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting yaitu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana Pendapatan Asli Daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20%.

Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi akan berdampak pada masyarakat yang semakin terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi

dengan maksud pencapaian target pendapatan dan pembangunan daerah. Dengan keterbatasan PAD dan DAK membutuhkan komitmen daerah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara baik dan merata untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Ketika pemerintah daerah tidak memiliki komitmen yang besar akan menimbulkan masalah kesenjangan pendidikan. Kesenjangan dapat diakibatkan dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota dan kabupaten.

2.6.5 Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja

a. Keterserapan lulusan SMK vokasi ke dunia kerja belum optimal

Saat ini, isu besar dari pendidikan vokasi adalah kinerja pasar kerja lulusan yang belum optimal. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Hal ini bermakna bahwa kinerja lulusan vokasi lebih rendah dibandingkan lulusan non vokasi. Salah satu penyebab dari ketidakoptimalan pasar kerja adalah terdapat *mismatch* keterampilan antara industri dengan lulusan. Keterampilan dasar serta *softskills* dari lulusan vokasi masih dianggap belum memadai oleh dunia usaha dan industri. Krisis keterampilan ini dapat menghambat operasional dan pengembangan industri di masa depan. Pendidikan kejuruan di Indonesia mengalami masalah mutu dan relevansi yang serius, sehingga berdampak pada lulusan SMK kurang diserap dunia usaha. Hal ini berkaitan dengan pelayanan mutu pendidikan.

b. Kompetensi pendidikan vokasi yang masih memuat kompetensi umum

Dari perspektif *supply side*, kerangka regulasi pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahan *mismatch* antara industri dan lulusan vokasi. Saat ini standar kompetensi lulusan pendidikan vokasi lebih mengandung kompetensi muatan umum ketimbang muatan vokasi. Selain itu, kurikulum yang diterapkan masih sangat bervariasi dan belum berorientasi dengan kebutuhan industri. Pemerintah perlu menjelaskan ulang terkait pendidikan vokasi yaitu pendidikan vokasi adalah pelatihan vokasi yang diperluas dengan dibekali kemampuan-kemampuan dasar yang memungkinkan untuk berkembang untuk lebih cepat dan kreatif.

Dari perspektif *demand side*, industri saat ini masih kesulitan untuk mengartikulasikan kebutuhan keterampilannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjembatani industri untuk dapat mengartikulasikan kebutuhannya. Kebutuhan industri akan tenaga terampil dan kompeten perlu diartikulasikan dengan cara menyampaikan basis kebutuhan tenaga kerja yang lebih kredibel sehingga pendidikan vokasi bisa memetakan output dari lulusan kedepannya.

c. Pengembangan talenta peserta didik Indonesia yang belum maksimal

Pada dasarnya setiap peserta didik memiliki talenta yang berbeda-beda. Perbedaan talenta itu terletak pada jenis talenta. Talenta dan kemampuan menentukan prestasi seseorang. Orang yang bertalenta di bidang seni, riset, maupun olahraga akan mampu mencapai prestasi tinggi dalam bidang itu. Prestasi yang sangat menonjol dalam salah satu bidang mencerminkan talenta yang unggul dalam bidang tersebut. Dengan keberadaan talenta dan potensi yang dimilikinya, peserta didik mampu mengembangkan dirinya ke tahap yang optimal dalam berbagai bidang yang menjadi kekhususannya, hal ini dikarenakan tidak setiap orang mampu berprestasi di berbagai bidang.

Namun, sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih cenderung menitikberatkan pada kemampuan akademik. Sedangkan faktor kecakapan hidup (*life skills*) kurang diasah dan

diperhatikan. Hal ini berakibat pada peserta didik akan kesulitan dalam mengembangkan talenta yang dimiliki. Hal ini dikarenakan sekolah tidak memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Sekolah di Indonesia hanya melatih kemampuan kognitif, namun dari segi motorik tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Pada kondisi yang saat ini, Indonesia memiliki bibit-bibit talenta unggul yang belum terwadahi yang memiliki kemungkinan untuk bersaing di ajang nasional maupun internasional

2.7 Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029

2.7.1 *Game Changer*

RPJPN sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Meskipun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*) dalam mewujudkan pendidikan Berkualitas yang Merata, yaitu:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
2. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan e.g. guru;

2.7.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045

Sebagai bentuk dukungan akan tercapainya visi Indonesia Emas 2045, maka disusun RPJPN 2025-2045 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) yang didalamnya mencakup berbagai kebijakan strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata untuk seluruh penduduk dan daya saing bangsa dalam setiap aspek pembangunan.

Pembangunan Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial mendasar, termasuk perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi sosial menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui kebijakan yang menyeluruh berdasarkan siklus hidup yang diarahkan pada berbagai tujuan salah satunya adalah pendidikan berkualitas yang merata. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peran sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Dalam mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*), mencakup:

- i. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan kurikulum adaptif dan sistem asesmen komprehensif; peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan profesionalisme pengelola lembaga pendidikan; penguatan pembelajaran bagi murid dan guru berkebutuhan khusus; peningkatan integrasi *soft skills*, *sosial skills*, dan *life skills*

- dalam pembelajaran; peningkatan kecakapan literasi kelas awal; penguatan pendidikan karakter; serta pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- ii. Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua; penerapan pedagogik modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk inovasi pembelajaran (*pedagogical-technological content knowledge*); serta peningkatan ketersediaan sumber pembelajaran digital, infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan pasokan energi (listrik);
 - iii. Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini); peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan; penguatan kebijakan diversifikasi layanan pendidikan; dan peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan;
 - iv. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics*) termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
 - v. Penguatan peran pendidikan tinggi untuk mobilitas sosial dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis *outcome* dan pendekatan multidisiplin;
 - vi. Peningkatan kualitas dan distribusi guru dan dosen dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang inklusif melalui reformasi pendidikan keguruan dengan penguatan LPTK (Lembaga tenaga pendidik dan kependidikan) dan revitalisasi PPG; peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen secara berkelanjutan; peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan dosen; peningkatan jumlah dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan dalam bidang STEAM; penguatan kebijakan afirmatif guru dan dosen di daerah khusus; penguatan guru dan dosen difabel dalam penyelenggaraan pendidikan; dan perbaikan pengelolaan sumber daya dosen;
 - vii. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah melalui: analisis kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) pada satuan pendidikan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah secara terpusat;
 - viii. Penguatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (seperti pesantren, sekolah teologi, seminari, pasraman, dan pabbajja samanera) melalui penguatan kebijakan kurikulum inklusif dan moderat; penjaminan hak yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan kesempatan kerja; dan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama;
 - ix. Revitalisasi pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat) serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan *life skills* melalui memberi ruang bagi peningkatan akses, kualitas pembelajaran, dan kompetensi lulusan;
 - x. Percepatan perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi melalui pemberian mandat, terutama kepada PTN;
 - xi. Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan melalui penguatan manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan; peningkatan kapasitas pemerintah daerah; serta pemantapan sistem informasi data pendidikan;
 - xii. Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan kerjasama penelitian dan pengembangan strategis; penguatan

keselarasan bidang keahlian/program studi sesuai kebutuhan DUDI, keterampilan abad 21, serta penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi termasuk untuk menghasilkan *innovation-based start up*; penguatan sistem pembelajaran berstandar industri; peningkatan kapasitas pendidik/instruktur/pelatih; peningkatan program sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, dan peningkatan kualitas pembinaan talenta olahraga; serta

- xiii. Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyalarsan pemanfaatan anggaran pendidikan pada tingkat pusat dan daerah; pemanfaatan sumber pendanaan inovatif; dan penerapan strategi pendanaan pendidikan yang berkeadilan.

2.7.3 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dikarenakan akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Dalam mewujudkan Indonesia Emas pada RPJPN 2025-2045 memiliki 4 tahapan, yaitu Tahap 1 Perkuatan Fondasi Transformasi, Tahap 2 Akselerasi Transformasi, Tahap 3 Ekspansi Global, dan Tahap 4 Perwujudan Indonesia Emas. Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum pada dokumen RPJPN. Tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6 – 6,1 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif yang menjadi visi dan misi penyusunan kebijakan jangka menengah 5 tahun pertama pada dokumen RPJMN 2025-2029.

Gambar 2. 43 Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045



RPJMN 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari tahap 1 penguatan fondasi transformasi Indonesia Emas. Pada tahap ini pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan berkualitas pada semua jenjang, termasuk PAUD, dengan memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat tidak mampu, wilayah 3T, dan daerah berkinerja (partisipasi) pendidikan rendah yang didukung oleh penyediaan tenaga kependidikan kompeten yang tersebar merata dan ditopang oleh teknologi informasi, untuk memperkuat konektivitas dan mengembangkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan aneka sumber pembelajaran berbasis digital, serta penguatan bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi. Dalam mewujudkan penguatan fondasi transformasi pada dokumen RPJMN 2025-2029 dilaksanakan dengan penyusunan strategi dan rancangan arahan kebijakan melalui:

- i. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) untuk mencapai pemerataan akses pendidikan yang

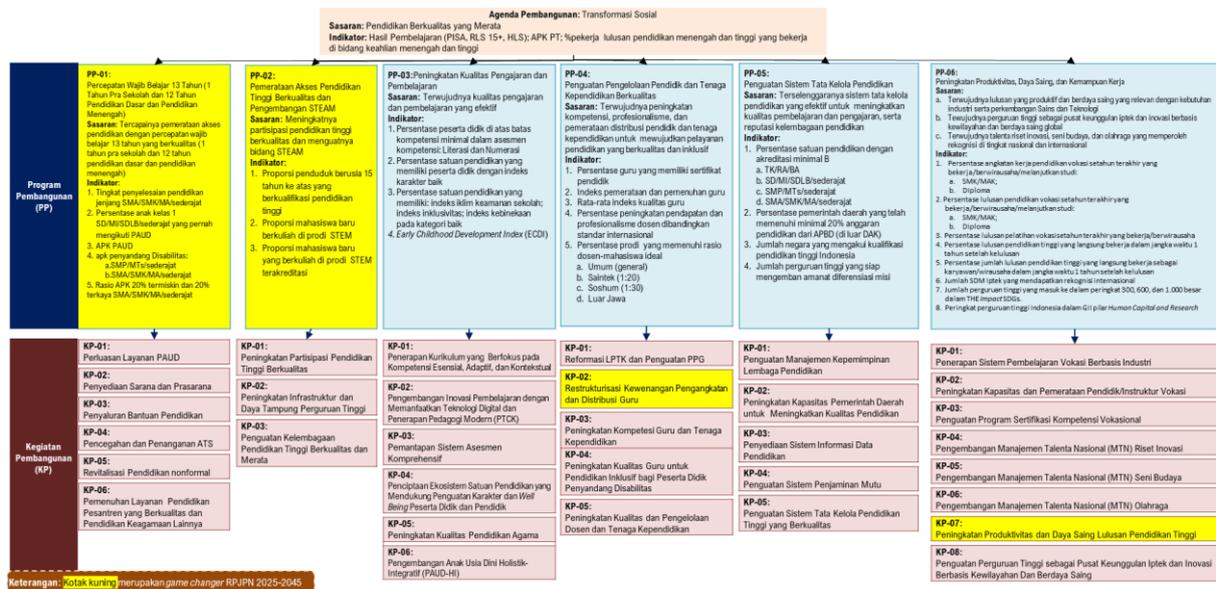
- dilaksanakan dengan: (a) perluasan layanan PAUD; (b) penyediaan sarana dan prasarana; penyaluran bantuan pendidikan; (c) pencegahan dan penanganan ats; (d) revitalisasi pendidikan non formal; serta (e) pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya
- ii. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas dan menguatnya bidang STEAM, melalui: (a) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas; (b) peningkatan infrastruktur dan daya tampung perguruan tinggi; serta (c) penguatan kelembagaan pendidikan tinggi berkualitas dan merata
 - iii. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran untuk mewujudkan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif, melalui: (a) penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual, pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogik modern (PTCK); (b) pemantapan sistem asesmen komprehensif, penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan tenaga kependidikan; serta, (c) peningkatan kualitas pendidikan agama, dan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)
 - iv. Penguatan Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan Berkualitas untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, dapat dicapai melalui: (a) reformasi LPTK dan penguatan PPG; (b) restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru; (c) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (d) peningkatan kualitas guru untuk pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas; serta, (e) peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan;
 - v. Penguatan sistem tata kelola pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem tata kelola pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta reputasi kelembagaan pendidikan yang dilaksanakan melalui: (a) penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan; (b) peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan; (c) penyediaan sistem informasi data pendidikan, penguatan sistem penjaminan mutu; dan (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas;
 - vi. Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja untuk mewujudkan industri serta perkembangan Sains dan Teknologi, perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing global, dan mewujudkan talenta riset inovasi, seni budaya, dan olahraga yang memperoleh rekognisi di tingkat nasional dan internasional, melalui: (a) penerapan sistem pembelajaran vokasi berbasis industri; (b) peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik/instruktur vokasi; (c) penguatan program sertifikasi kompetensi vokasional; (d) pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) 3 bidang riset inovasi, seni budaya, dan olahraga; (e) peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi; serta (f) penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing.

2.8 Kertas Kerja *Cascading* Kebijakan

Penyusunan struktur RPJMN 2025-2029 bidang pendidikan terdiri dari Agenda Pembangunan Transformasi Sosial dengan sasaran pendidikan berkualitas yang merata. Agenda Pembangunan

transformasi sosial memiliki indikator, meliputi: Hasil Pembelajaran (PISA, RLS 15+, HLS); APK PT; dan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Dalam mewujudkan sasaran transformasi sasaran agenda pembangunan pendidikan berkualitas yang merata didukung dengan 6 (enam) Program Pembangunan (PP) dan 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan Pembangunan (KP).

Gambar 2. 44 Cascading Kertas Kerja RPJMN 2025-2029 Bidang Pendidikan



Program pembangunan dan kegiatan pembangunan disusun oleh 20 Upaya Transformatif Super Prioritas dan PP Pendukung 45 Indikator. Program Pembangunan bidang pendidikan yang mendukung agenda Pembangunan transformasi sosial diantaranya: percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas, penguatan sistem tata kelola pendidikan, dan peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja. Dalam melaksanakan Program Pembangunan (PP) didukung dengan Kegiatan Pembangunan (KP) sebagai berikut:

- PP Wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) memiliki 5 indikator, meliputi: Tingkat Penyelesaian pendidikan Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat; Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD; APK PAUD; APK Penyandang Disabilitas (SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat); dan Rasio APK 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya SMA/SMK/MA/Sederajat. Serta, PP Wajib belajar 13 tahun mencakup 6 KP, diantaranya: (a) perluasan layanan PAUD; (b) Penyediaan sarana dan prasarana; (c) Penyaluran bantuan pendidikan; (d) Pencegahan dan penanganan ATS; (e) Revitalisasi pendidikan non-formal; dan (f) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya.
- PP Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM memiliki 3 indikator, meliputi: Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya); Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi; Proporsi mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi unggul; Proporsi mahasiswa

- berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul. PP Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM mencakup 3 KP, diantaranya: (a) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas; (b) Peningkatan infrastruktur dan daya tampung perguruan tinggi; serta (c) Penguatan kelembagaan pendidikan tinggi berkualitas dan merata.
3. PP Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran memiliki 4 indikator, meliputi: Persentase peserta didik di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi dan Numerasi; Persentase satuan pendidikan yang memiliki peserta didik dengan indeks karakter baik; Persentase satuan pendidikan yang memiliki: indeks iklim keamanan sekolah; indeks inklusivitas; indeks kebhinekaan pada kategori baik; dan *Early Childhood Development Index* (ECDI). Serta, PP Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran mencakup 6 KP, diantaranya: (a) Penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual; (b) Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogik modern (PTCK); (c) Pemantapan sistem asesmen komprehensif; (d) Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik; (e) Peningkatan kualitas pendidikan agama; dan (f) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI).
 4. PP Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas memiliki 5 indikator, meliputi: Persentase guru berkualifikasi minimal DIV atau S1; Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik; Indeks pemerataan dan pemenuhan guru; Rata-rata indeks kualitas guru; Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar; dan Persentase Prodi yang memenuhi rasio dosen-mahasiswa ideal (Umum (general), Saintek (1:20), Soshum (1:30), dan Luar Jawa). Serta, PP Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas mencakup 5 KP, diantaranya: (a) Reformasi LPTK dan Penguatan PPG; (b) Restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru; (c) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (d) Peningkatan kualitas guru untuk pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas; serta (e) Peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan
 5. PP Penguatan sistem tata kelola pendidikan memiliki 4 indikator, meliputi: Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B (TK/RA/BA, SD/MI/SDLB sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/SMK/MA/Sederajat); Persentase pemerintah daerah yang telah memenuhi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBD (di luar DAK); Jumlah negara yang mengakui kualifikasi pendidikan tinggi Indonesia; Jumlah perguruan tinggi yang siap mengemban amanat diferensiasi misi. Serta, PP Penguatan sistem tata kelola pendidikan mencakup 5 KP, diantaranya: (a) Penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan; (b) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan; (c) Penyediaan sistem informasi data pendidikan; (d) Penguatan sistem penjaminan mutu; dan (e) Penguatan sistem tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas.
 6. PP Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja memiliki 8 indikator, meliputi: Persentase angkatan kerja pendidikan vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha/melanjutkan studi (SMK/MAK dan Diploma); Persentase lulusan pendidikan vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha/melanjutkan studi (SMK/MAK dan Diploma); Persentase lulusan pelatihan vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha; Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; Persentase Jumlah Lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja sebagai karyawan/wirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional; Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di

ajang penghargaan internasional; Persentase olahragawan pelatnas yang berprestasi di tingkat regional/internasional; Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat 300, 600, dan 1.000 besar dalam THE *Impact* SDGs; dan Peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam GII pilar *Human Capital and Research*. Serta, PP Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja mencakup 7 KP, diantaranya: (a) Penerapan sistem pembelajaran vokasi berbasis industri; (b) Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik/instruktur vokasi; (c) Penguatan program sertifikasi kompetensi vokasional; (d) Peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi; (e) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset Inovasi; (f) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya; (g) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga; dan (h) Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing.

Dalam penyusunan RPJMN tidak hanya didukung oleh agenda pembangunan, program pembangunan, dan kegiatan pembangunan. Namun, dalam mendukung keberlangsungan RPJMN juga didukung oleh Proyek Pembangunan (ProP), ProP ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Perumusan ProP disesuaikan dengan sasaran Kegiatan Pembangunan pada RPJMN yang dijabarkan sebagai berikut:

1. PP Wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) mencakup 6 KP, diantaranya:
 - a) KP Perluasan Layanan PAUD memiliki indikator pendukung yaitu Persentase kabupaten/kota yang memiliki peserta didik kelas 1 SD/MI yang pernah TK/RA/BA di atas 70 persen. Serta mencakup 3 ProP, meliputi: (a) Peserta didik penerima bantuan operasional satuan pendidikan PAUD; (b) Satuan PAUD penerima bantuan revitalisasi/ pembangunan sarpras pendidikan; dan (c) Satuan PAUD yang mendapatkan bantuan pendidikan afirmatif.
 - b) KP Penyediaan Sarana dan Prasarana memiliki indikator pendukung yaitu Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan Persentase satuan pendidikan yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif. Serta, mencakup 3 ProP, meliputi: (a) Satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan pendidikan afirmatif; (b) Satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum dan model pembelajaran adaptif; dan (c) Satuan pendidikan menengah penerima bantuan revitalisasi/pembangunan sarpras pendidikan.
 - c) KP Penyaluran Bantuan pendidikan memiliki indikator pendukung yaitu Persentase penerima bantuan pendidikan (PIP dan ADEM) yang tepat sasaran. Serta, mencakup 7 ProP, meliputi: (a) Peserta didik penerima bantuan pendidikan tinggi; (b) peserta didik penerima bantuan operasional pendidikan menengah; (c) peserta didik penerima bantuan operasional pendidikan dasar; (d) peserta didik penerima bantuan pendidikan menengah; (e) peserta didik penerima bantuan pendidikan dasar; (f) peserta didik penerima bantuan afirmasi; dan (g) peserta didik penerima beasiswa didik prestasi.
 - d) KP Pencegahan dan Penanganan ATS memiliki indikator pendukung yaitu Persentase anak tidak sekolah usia 7-18 tahun dan Persentase kabupaten/kota dengan APK sekurang-kurangnya 95 persen (SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat). Serta, mencakup 5 ProP, meliputi: (a) Lembaga pendidikan Masyarakat yang Mendapatkan pembinaan dalam penanganan ATS; (b) Satuan pendidikan dasar yang mendapatkan pembinaan dalam penanganan ATS; (c) Satuan pendidikan menengah yang mendapatkan pembinaan dalam penanganan ATS; (d) Peserta didik miskin penerima beasiswa didik

- melanjutkan pendidikan; serta (e) Anak tidak sekolah penerima bantuan kembali ke sekolah.
- e) KP Revitalisasi pendidikan Non-Formal memiliki indikator pendukung yaitu Persentase pendidikan nonformal yang terakreditasi minimal B. Serta, mencakup 4 ProP, meliputi: (a) Peserta didik yang mendapat layanan pendidikan nonformal; (b) Satuan pendidikan penerima bantuan operasional pendidikan kesetaraan; (c) Satuan pendidikan yang mendapat pembinaan pendidikan nonformal; dan (d) Satuan pendidikan kesetaraan penerima bantuan revitalisasi/pembangunan sarpras pendidikan.
 - f) KP Pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya memiliki indikator pendukung yaitu Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal, Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang terakreditasi B, dan skor pada asesmen kompetensi santri Indonesia. Serta, mencakup 10 ProP, meliputi: (a) Satuan pendidikan keagamaan penerima bantuan operasional pendidikan; (b) Peserta Didik pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi; (c) tenaga pendidik dan kependidikan Keagamaan yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi; (d) Satuan pendidikan Keagamaan yang Mendapat Bantuan Sarana Prasarana; (e) Peserta Didik pendidikan Keagamaan yang Mengikuti Asesmen Pembelajaran; (f) Satuan pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Pembinaan; (g) Satuan pendidikan Keagamaan yang Terakreditasi; (h) Satuan pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran; (i) Peserta Didik yang Mendapatkan Pembinaan Keagamaan; serta (j) Satuan pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas.
2. PP Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM mencakup 3 KP, diantaranya:
- a) KP Peningkatan Partisipasi pendidikan Tinggi Berkualitas memiliki indikator pendukung yaitu Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20 persen termiskin dan 20 persen terkaya) dan APK PT pada kelompok pengeluaran keluarga 20 persen termiskin. Serta, mencakup 2 ProP, meliputi: (a) Mahasiswa yang menerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran dan (b) Rumusan kebijakan skema pembiayaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berkeadilan.
 - b) KP Peningkatan Infrastruktur dan Daya Tampung Perguruan Tinggi memiliki indikator pendukung yaitu Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31 persen. Serta, mencakup 4 ProP, meliputi: (a) Prasarana perguruan tinggi berbasis teknologi yang dibangun; (b) Sarana perguruan tinggi berbasis teknologi yang direvitalisasi; (c) Program studi yang mengembangkan sistem MOOCs/Online Course yang berkualitas dan bersinergi; serta (d) Mahasiswa yang mendapatkan layanan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
 - c) KP Penguatan Kelembagaan pendidikan Tinggi Berkualitas dan Merata memiliki indikator pendukung yaitu Proporsi perguruan tinggi terakreditasi, Proporsi program studi terakreditasi unggul, Proporsi program studi terakreditasi internasional, Proporsi program studi STEM, Proporsi kampus yang meratifikasi regulasi internal anti-intoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi, dan inklusifitas. Serta, mencakup 7 ProP, meliputi: (a) Perguruan tinggi yang diakreditasi; (b) Perguruan tinggi swasta (PTS) yang mendapatkan bantuan penguatan kualitas kelembagaan; (c) Perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan anti-intoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi; (d) Perguruan tinggi yang menyediakan layanan inklusif; (e) Program studi yang diakreditasi; (f) Perguruan Tinggi yang mendapatkan peningkatan menuju kelas dunia; serta (g) Perguruan tinggi yang mendapatkan

rekomendasi pengembangan kelembagaan.

3. PP Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran mencakup 6 KP, diantaranya:
 - a) KP Penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual memiliki indikator pendukung yaitu Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual dan Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran minimal baik. Serta, mencakup 3 ProP, meliputi: (a) Buku dan Bahan Ajar yang Berkualitas; (b) Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Adaptif; dan (c) Satuan pendidikan yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Adaptif.
 - b) KP Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogik modern (PTCK) memiliki Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran. Serta, mencakup 4 ProP, meliputi: (a) Guru yang aktif memanfaatkan platform digital pembelajaran dalam peningkatan kompetensi; (b) Peserta Didik yang aktif memanfaatkan platform digital pembelajaran dalam peningkatan kompetensi; (c) Satuan pendidikan yang menerapkan skema sekolah terbuka; serta (d) Satuan pendidikan yang mendapatkan akses listrik dan internet.
 - c) KP Pemantapan sistem asesmen komprehensif memiliki indikator pendukung yaitu Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Serta, mencakup 3 ProP, meliputi: (a) Kebijakan Hasil Asesmen pendidikan yang dimanfaatkan; (b) Satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Pembelajaran; (c) Model Asesmen pendidikan yang dikembangkan; dan (d) Peserta didik yang melaksanakan pengujian pendidikan.
 - d) KP Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan tenaga kependidikan memiliki indikator pendukung yaitu Persentase satuan pendidikan yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar. Serta, mencakup 6 ProP, meliputi: (a) tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan penguatan pendidikan karakter; (b) Layanan Penguatan Karakter yang dimanfaatkan satuan pendidikan; (c) Peserta Didik yang mendapatkan penguatan pendidikan karakter; (d) Peserta Didik yang mendapatkan bantuan pendidikan karakter; (e) tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan penghargaan dan perlindungan; dan (f) tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan.
 - e) KP Peningkatan kualitas pendidikan agama memiliki indikator pendukung yaitu Rasio guru agama yang bersertifikat tenaga kependidikan, Persentase satuan pendidikan yang memenuhi rasio ideal guru pendidikan agama dan murid yang seagama, dan Tingkat pemahaman dan pengamalan nilai agama pada peserta didik. Serta, mencakup 5 ProP, meliputi: (a) tenaga pendidik dan kependidikan agama yang mendapatkan peningkatan kompetensi; (b) tenaga pendidik dan kependidikan agama yang mendapatkan penguatan pendidikan karakter; (c) Lembaga yang mendapatkan bantuan pemberdayaan kualitas guru agama; (d) Satuan pendidikan yang melaksanakan pengembangan model kurikulum dan pembelajaran agama; dan (e) Satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan sarana penguatan pendidikan agama.
 - f) KP Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) memiliki indikator pendukung yaitu Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI. Serta, mencakup 4 ProP, meliputi: (a) Satuan PAUD yang mendapatkan pendampingan dalam peningkatan kualitas; (b) Satuan PAUD yang menerapkan pendekatan holistik integratif; (c) Orang tua

- yang mendapatkan pelatihan parenting; serta (d) Anak usia dini yang mendapatkan program peningkatan gizi.
4. PP Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas mencakup 5 KP, diantaranya:
 - a) KP Reformasi LPTK dan Penguatan PPG memiliki indikator pendukung yaitu Proporsi perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi dan Proporsi program studi PPG yang terakreditasi. Serta, mencakup ProP Perguruan tinggi yang ditingkatkan kualitas penyelenggaraan PPG (Revitalisasi LPTK).
 - b) KP Restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru memiliki indikator pendukung yaitu Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat baik dan Persentase Provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru pendidikan menengah baik. Serta, mencakup 2 ProP, meliputi: (a) tenaga pendidik dan kependidikan dasar yang dipenuhi ketersediaannya dan didistribusikan dan (b) tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan kesejahteraan afirmatif dalam memenuhi kekurangan guru.
 - c) KP Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan memiliki indikator pendukung yaitu Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi. Serta, mencakup 5 ProP, meliputi: (a) tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan kesejahteraan berbasis kinerja; (b) tenaga pendidik dan kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi; (c) tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan pengembangan karir; (d) tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan beasiswa pendidikan; (d) Lembaga profesi guru yang mendapatkan bantuan peningkatan kompetensi; serta (e) tenaga pendidik dan kependidikan agama yang mendapatkan kesejahteraan berbasis kinerja.
 - d) KP Peningkatan kualitas guru untuk pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas memiliki indikator pendukung yaitu Rasio guru pendamping khusus dengan peserta didik penyandang disabilitas dan Persentase guru yang mengikuti pelatihan pendidikan inklusif. Serta, mencakup 2 ProP, meliputi: (a) Guru Pendamping Khusus yang ditingkatkan kompetensinya dan (b) Guru yang diberikan pelatihan untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif.
 - e) KP Peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan memiliki indikator pendukung yaitu Persentase dosen berkualifikasi S3 (Umum (general), STEM, dan Non STEM), Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kapasitas yang mendukung inovasi pembelajaran (teknologi, konten, dan pedagogik), Jumlah dosen berkegiatan di luar kampus, Rasio inbound-outbound dosen perguruan tinggi, Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar, dan Proporsi dosen di program studi STEM dan Non STEM. Serta, mencakup 2 ProP, meliputi: (a) Dosen yang mendapatkan beasiswa S3; (b) Dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi; (c) Dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus; (d) Dosen berkegiatan di industri dalam dan luar negeri; serta (e) NSPK penguatan tata kelola dosen
 5. PP Penguatan sistem tata kelola pendidikan mencakup 5 KP, diantaranya:
 - a) KP Penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan memiliki indikator pendukung yaitu Persentase satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP. Serta, mencakup 4 ProP, meliputi: (a) Satuan pendidikan PAUD yang mendapatkan pendampingan dalam peningkatan kualitas; (b) Satuan pendidikan dasar yang mendapatkan pendampingan

- dalam peningkatan kualitas; (c) Satuan pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan dalam peningkatan kualitas; serta (d) Satuan pendidikan masyarakat yang mendapatkan pendampingan dalam peningkatan kualitas.
- b) KP Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan memiliki indikator pendukung yaitu Persentase provinsi memenuhi SPM pendidikan dan Persentase kabupaten/kota memenuhi SPM pendidikan. Serta, mencakup 3 ProP, meliputi: (a) tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran; (b) Pemerintah Daerah yang dibina dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran Pendidikan; serta (c) Asistensi dan Supervisi pemerintah daerah dalam penerapan SPM urusan Pendidikan.
 - c) KP Penyediaan sistem informasi data pendidikan memiliki indikator pendukung yaitu Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan. Serta, mencakup 2 ProP, meliputi: (a) Data dan Informasi pendidikan yang terintegrasi dan (b) Data dan informasi pendidikan yang dimanfaatkan.
 - d) KP Penguatan sistem penjaminan mutu memiliki indikator pendukung yaitu Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu. Serta, mencakup 9 ProP, meliputi: (a) UKS/M yang mendapatkan bantuan pengembangan peningkatan mutu; (b) Satuan pendidikan keagamaan yang mendapatkan peningkatan mutu; (c) Satuan pendidikan masyarakat yang mendapatkan peningkatan mutu; (d) Satuan pendidikan yang mendapatkan pengawasan pembelajaran; (e) Satuan pendidikan yang mendapat bantuan pemenuhan SPM; (f) Satuan pendidikan yang diakreditasi; (g) Satuan pendidikan yang mendapatkan pendampingan dalam peningkatan mutu; (h) Satuan pendidikan yang difasilitasi penjaminan mutunya; (i) Kebijakan pendidikan yang dikembangkan; (j) serta, Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M
 - e) KP Penguatan sistem tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas memiliki indikator pendukung yaitu Lembaga Pusat Informasi pendidikan Tinggi Indonesia (NIC) yang siap beroperasi, Peraturan Presiden tentang ratifikasi atas Konvensi Global Rekognisi Kualifikasi pendidikan Tinggi, dan Peta keunggulan perguruan tinggi berdasarkan misi. Serta, mencakup 3 ProP, meliputi: (a) Rancangan peraturan perundangan tentang ratifikasi atas Konvensi Global rekognisi kualifikasi pendidikan tinggi; (b) Rumusan kebijakan pengembangan Lembaga Pusat Informasi pendidikan Tinggi Indonesia (*National Information Center*); serta (c) Rumusan kebijakan pemberian mandat diferensiasi misi perguruan tinggi.
6. PP Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja mencakup 7 KP, diantaranya:
- a) KP Penerapan sistem pembelajaran vokasi berbasis industri memiliki indikator pendukung yaitu Persentase SMK/MAK/PTV yang memiliki Kerjasama dengan Dunia Usaha Dunia Industri. Serta, mencakup 4 ProP, meliputi: (a) Kerjasama industri yang dibangun; (b) Satuan pendidikan dan lembaga yang menerapkan pembelajaran berbasis industri; (c) Program studi vokasi yang melibatkan praktisi mengajar di dalam kampus; serta (d) Mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang melaksanakan pembelajaran di luar kampus.
 - b) KP Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik/instruktur vokasi memiliki indikator pendukung yaitu Persentase instruktur dan tenaga kependidikan dalam bidang STEAM dan Persentase tenaga kependidikan vokasi yang mendapatkan pelatihan. Serta, mencakup 4 ProP, meliputi: (a) tenaga pendidik dan kependidikan Kejuruan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya; (b) Instruktur kursus ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya; (c) Instruktur pendidikan Tinggi Vokasi berkegiatan di industri dalam dan luar negeri; serta (d)

- Dosen/Instruktur pendidikan Tinggi Vokasi bersertifikat kompetensi dan profesi.
- c) KP Penguatan program sertifikasi kompetensi vokasional memiliki indikator pendukung yaitu Persentase lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi. Serta, mencakup 2 ProP, meliputi: (a) Peserta didik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi; (b) Mahasiswa vokasi bersertifikat kompetensi dan profesi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja; (c) Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Inpres No 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK; serta, Peserta didik SMK bidang kehutanan yang kompeten dan bersertifikat.
 - d) KP Peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi memiliki indikator pendukung yaitu Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM dan Rasio *inbound-outbound* pertukaran mahasiswa. Serta, mencakup 6 ProP, meliputi: (a) Program studi dengan kurikulum adaptif dan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi; (b) Mahasiswa yang mengikuti program pendidikan karakter; (c) Mahasiswa yang mengikuti program pengembangan *softskills*; (d) Mahasiswa yang mengikuti magang internasional; (e) Mahasiswa yang mengikuti pertukaran internasional; serta (f) Mahasiswa yang mengikuti pertukaran internasional.
 - e) KP Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset Inovasi memiliki indikator pendukung yaitu Rasio SDM Iptek per satu juta penduduk, Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan World's Top 2 persen Scientists, dan Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia tingkat pelajar dan mahasiswa. Serta, mencakup 3 ProP, meliputi: (a) Pendampingan dan pematangan talenta riset dan inovasi; (b) Pengembangan kompetensi SDM bidang riset dan inovasi; serta (c) Peserta didik yang dikembangkan prestasinya di bidang sains, riset, teknologi dan inovasi
 - f) KP Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya memiliki indikator pendukung yaitu Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) bidang studi seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya dan Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional. Serta, mencakup 4 ProP, meliputi: (a) Bibit talenta seni budaya yang dikembangkan; (b) Pemandu talenta yang ditingkatkan kapasitasnya; (c) Manajemen talenta yang dikembangkan; serta (d) Ajang talenta keagamaan untuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan
 - g) KP Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga memiliki indikator pendukung yaitu Jumlah atlet elit nasional level dunia pada cabor olimpiik dan paralimpiik unggulan, Jumlah atlet usia muda level dunia pada cabor olimpiik dan paralimpiik unggulan, dan Jumlah pelatih cabor olimpiik dan paralimpiik bersertifikasi internasional. Serta, mencakup 4 ProP, meliputi: (a) Talenta olahraga yang dikembangkan bakatnya; (b) Talenta tenaga keolahragaan yang ditingkatkan kapasitasnya; (c) Sentra pembinaan talenta olahraga yang dikembangkan; serta (d) Kompetisi talenta olahraga yang berkualitas dan berkelanjutan.
 - h) KP Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing memiliki indikator pendukung yaitu Jumlah paten granted dari perguruan tinggi, Indeks sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia, dan Indeks QS *International Research Network Collaboration*. Serta, mencakup 3 ProP, meliputi: (a) Pusat Unggulan Iptek (PUI) perguruan tinggi yang dikembangkan; (b) Perguruan tinggi yang melakukan kolaborasi/kerjasama riset dengan mitra nasional dan internasional (mandiri dan/atau melalui konsorsium); (c) Perguruan tinggi yang mendapatkan co-funding riset ke arah hilirisasi/komersialisasi; (d) Dosen yang mengikuti kerjasama riset internasional; (e)

Perguruan tinggi yang menerapkan keterbukaan iptek dan inovasi (*Open Science*); (f) Produk inovasi dan produk riset perguruan tinggi yang dihilirisasi/ dikomersialisasi; serta (g) Kekayaan intelektual hasil perguruan tinggi yang difasilitasi pendaftaran paten.

2.9 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMN 2025-2029

2.9.1 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Sumatera

1. Penguatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan.
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan yang modern dan adaptif melalui peningkatan sertifikasi tenaga kependidikan, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.
3. Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor kemaritiman, industri berbasis sumber daya alam hayati (bioindustri, ekonomi biru, bioekonomi), dan mitigasi risiko bencana.
4. Perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh terutama bagi provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan tinggi di bawah rata-rata nasional.
5. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti perkebunan, industri berbasis SDA, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

2.9.2 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Jawa

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan non formal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.
2. Pemerataan pendidikan berkualitas dan peningkatan indeks kompetitif talenta global di Pulau Jawa melalui penguatan teknologi, pembangunan karakter, peningkatan kemampuan berbahasa asing, serta penguatan kemitraan Internasional.
3. Pengembangan hub pendidikan tinggi global (global higher education hub) dan penguatan kualitas pusat-pusat riset dan inovasi berkelas dunia di perguruan tinggi dan science technopark (STP) yang terhubung dengan kebutuhan industri berteknologi menengah tinggi.
4. Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung penyelesaian isu perkotaan (metropolitan dan megapolitan) dan daya dukung lingkungan hidup.

2.9.3 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Bali

1. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berorientasi spesifik terhadap potensi unggulan daerah.
2. Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian.
3. Penguatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi yang berorientasi spesifik kepada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian

2.9.4 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Kalimantan

1. Pembangunan sekolah baru yang berkualitas dalam mendukung pembangunan IKN.
2. Perbaiki infrastruktur dan penyediaan akses pendidikan di daerah perbatasan.
3. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil terutama pada sektor perkebunan, pertambangan, industri kelapa sawit dan turunannya, dan pariwisata

4. Penguatan perguruan tinggi dan percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor energi alternatif (Energi Baru dan Terbarukan/EBT) dan industri berbasis sumber daya alam, a.l. melalui penyaluran beasiswa pendidikan tinggi dan perluasan akses *teknologi* untuk pembelajaran jarak jauh.
5. Penyiapan kelayakan perguruan tinggi internasional di IKN dan kolaborasi untuk penguatan perguruan tinggi lokal menuju standar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan STEAM unggulan
6. Pembentukan *Center of Excellence* di IKN untuk mendukung perwujudan Superhub Ekonomi Nusantara.

2.9.5 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Sulawesi

1. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau (eg: penyediaan asrama peserta didik dan guru, penguatan sekolah terbuka, dll).
2. Peningkatan penetrasi dan literasi digital pada masyarakat.
3. Penguatan perguruan tinggi dan percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor kemaritiman (a.l. perkapalan, wisata bahari, dan perikanan) dan industri berbasis sumber daya alam dan pertambangan (nikel dan aspal), a.l. melalui penyaluran *beasiswa* afirmasi bagi Indonesia Timur dan perluasan akses teknologi untuk pembelajaran jarak jauh.
4. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil terutama pada sektor pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, dan perikanan.
5. Penguatan dan Pembentukan Konsorsium Riset Perguruan Tinggi di Sulawesi dengan perguruan tinggi di Indonesia Timur lainnya untuk mendukung inovasi dan hilirisasi sektor unggulan Kawasan Indonesia Timur
6. Penguatan pengelolaan tenaga tenaga kependidikan dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;

2.9.6 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Nusa Tenggara

1. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau (eg: penyediaan asrama peserta didik dan guru, penguatan sekolah terbuka, dll).
2. Pengembangan program profesional mengajar terkait sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri.
3. Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pendukungnya, ekonomi kreatif, dan pertanian serta upaya mitigasi risiko bencana (a.l. banjir, kekeringan) dan konservasi lingkungan hidup dan satwa.
4. Penguatan sekolah vokasi yang berorientasi spesifik kepada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian.

2.9.7 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Kepulauan Maluku

1. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau (eg: penyediaan asrama peserta didik dan guru, penguatan sekolah terbuka, dll).
2. Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM

- 
- unggulan yang mendukung pengembangan sektor kemaritiman, perkebunan (pala, cengkeh, dan kelapa), dan pariwisata.
 3. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil terutama pada sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata.
 4. Penguatan dan Pembentukan Konsorsium Riset Perguruan Tinggi di Kepulauan Maluku dengan perguruan tinggi di Indonesia Timur lainnya untuk mendukung inovasi dan hilirisasi sektor unggulan Kawasan Indonesia Timur.
 5. Penyiapan *Center of Excellence* dalam bentuk *Science Technopark* Kemaritiman.

2.9.8 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Spesifik Kewilayahan Papua

1. Kebijakan Bidang pendidikan di Provinsi Papua Barat
2. Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui sekolah alam dan sekolah berpola asrama.
3. Perbaikan infrastruktur dan penyediaan akses pendidikan di daerah perbatasan.
4. Penguatan literasi kelas awal.
5. Penguatan perguruan tinggi dan percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor industri kimia dasar, migas dan pertambangan, serta agro, a.l. melalui penyaluran beasiswa didik afirmasi kepada OAP dalam mengakses prodi STEAM unggulan.
6. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil terutama pada sektor industri kimia dasar dan agro.
7. Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk dosen berkualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).

2.10 Kerangka Regulasi

Regulasi dan kelembagaan menjadi salah satu penghambat utama (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif diyakini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan *tata kelola* yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

2.10.1 Kebutuhan Regulasi RPJMN 2025-2029 pada Bidang Pendidikan

- a. Rancangan Revisi UU Sistem pendidikan Nasional mengintegrasikan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU pendidikan Tinggi, Perubahan pasal terkait penyelenggaraan pendidikan dalam UU Pemda

Perubahan pasal terkait penyelenggaraan pendidikan dalam UU Pemda sebagai regulasi dalam memperkuat upaya restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru untuk memastikan pemerataan guru yang berkualitas. Perubahan pasal terkait penyelenggaraan pendidikan dalam UU Pemda sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk memastikan kemudahan mobilitas dan pemerataan guru antardaerah melalui: analisis kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan guru ASN pada satuan pendidikan milik

Pemerintah/Pemerintah Daerah secara terpusat. Perubahan pasal terkait penyelenggaraan pendidikan dalam UU Pemda akan mempermudah kegiatan pemantauan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru berkualitas, termasuk sekolah di wilayah 3T. Dengan demikian, Perubahan pasal terkait penyelenggaraan pendidikan dalam UU Pemda mampu mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

b. Inpres Wajib Belajar 13 Tahun

Inpres Wajib Belajar 13 tahun memiliki urgensi sebagai payung hukum dan memastikan hak anak memperoleh layanan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan 1 tahun pendidikan prasekolah. Inpres Wajib Belajar 13 tahun merupakan regulasi yang dapat menjamin hak anak dalam melaksanakan pendidikan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan 1 tahun pendidikan prasekolah tanpa adanya kekhawatiran mengenai biaya pendidikan yang telah dijamin oleh pemerintah. Serta, adanya Inpres Wajib Belajar 13 tahun dapat menyelesaikan masalah kesenjangan pendidikan dan diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar terhadap kesempatan pendidikan yang setara dan berkualitas.

Serta, Inpres Wajib Belajar 13 tahun mendukung pelaksanaan PAUD di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas), keberadaan pendidikan usia dini diakui secara sah. Hal itu terkandung dalam bagian tujuh, pasal 28 ayat 1-6, Dimana pendidikan anak usia dini diarahkan pada pendidikan pra-sekolah yaitu anak usia 0-6 tahun. Dalam penjabaran pengertian, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa: “ pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan yang dilaksanakan merupakan proses sepanjang hayat, Dimana proses pendidikan harus dilakukan secara terus menerus dari usia 0 tahun sampai manusia itu meninggalkan dunia.

UU Sisdiknas mengenai pelaksanaan PAUD diperkuat dengan adanya penyusunan Inpres Percepatan Peningkatan Akses dan Kualitas PAUD. Inpres Wajib Belajar 13 tahun sebagai regulasi dalam penyediaan akses PAUD di seluruh wilayah di Indonesia, serta untuk meningkatkan kualitas PAUD di *seluruh* wilayah di Indonesia. Serta, sebagai regulasi dalam menjamin dukungan dalam pemenuhan layanan esensial anak usia dini berupa penyediaan PAUD berkualitas.

Inpres Wajib Belajar 13 tahun merupakan regulasi dalam peningkatan akses dan kualitas PAUD. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus sejak anak usia dini dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas PAUD dapat mendukung peserta didik dalam meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi peserta didik. Selain itu, pendidikan pra-sekolah membantu memastikan kesiapan anak untuk masuk ke sekolah dasar. Kesiapan sekolah tidak hanya memungkinkan anak untuk berprestasi dalam jangka pendek, tetapi berpotensi berdampak pada pendidikan maupun karir selanjutnya.



Adanya Inpres Wajib Belajar 13 tahun merupakan salah satu langkah transformatif dalam mencapai peningkatan daya saing sumber daya manusia yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah, *Harmonized Test Score*, dan *Learning-Adjusted Years of Schooling* yang merupakan komponen *Human Capital Index (HCI)*. *Human Capital Index (HCI)* menjadi sasaran utama RPJPN 2025-2045 sebagai ukuran peningkatan daya saing SDM Indonesia.

c. Perpres Strategi Nasional Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Perpres Strategi Nasional Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai payung hukum dalam mengatasi permasalahan anak tidak sekolah yang akan berdampak dalam peningkatan angka partisipasi. Serta sebagai arah kebijakan pemerintah dalam upaya menangani isu Anak Tidak Sekolah dan mengurangi jumlah Anak Tidak Sekolah sehingga dapat menjadi panduan bagi daerah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan upaya penanganan ATS.

Perpres ATS ini diharapkan dapat memberikan arahan strategi kebijakan dan aksi prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga, K/L), provinsi, daerah, sampai ke desa, dan juga oleh masyarakat dalam upaya menangani isu ATS dan mengurangi jumlah ATS. Perpres ATS dapat membantu memastikan agar setiap anak di Indonesia memperoleh layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kehidupan mereka. Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan setiap anak di Indonesia akan menjamin kemampuan Indonesia untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi serta mewujudkan potensi pertumbuhan sosial dan ekonomi yang optimal.

BAB III

BIDANG AGAMA DAN KEBUDAYAAN

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Landasan Teori: Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Salah satu landasan beragama maslahat dan berkebudayaan maju sudah pernah muncul tidak lama sesudah Indonesia merdeka. Pada 1948 dalam Kongres Kebudayaan Pertama, Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia berujar bahwa kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Kebudayaan, menurut Bung Hatta, memiliki beragam bentuk, salah satunya, agama. Sebagai salah satu elemen paling penting bagi masyarakat Indonesia, agama bagi Bung Hatta juga merupakan suatu kebudayaan. “Sebab dengan beragama, manusia dapat hidup dengan senang. Karenanya saya katakan agama adalah bagian daripada kebudayaan...,” ujar Hatta.

Pada RPJPN 2025-2045, agama dan kebudayaan terintegrasi menjadi salah satu dari 17 arah prioritas pembangunan, yaitu: “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”. Semangatnya serupa dengan yang diutarakan oleh Bung Hatta: agama dan budaya menjadi landasan mewujudkan manusia unggul. Melalui arah prioritas pembangunan “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju” diharapkan akan terwujud pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang bermuara pada penguatan karakter dan jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memantapkan peran sekaligus posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Bila diletakkan dalam konteks pembangunan, Beragama Maslahat merupakan upaya kolektif untuk mewujudkan pesan-pesan kebajikan, keadilan, dan kemanusiaan yang dapat ditunaikan melalui kerja-kerja pembangunan yang membawa kemaslahatan umum dan mewujudkan kesejahteraan. Prinsip Beragama Maslahat dalam pembangunan adalah perlindungan, penghormatan, pengakuan, kesetaraan, dan keadilan. Beragama Maslahat menegaskan bahwa praktik beragama harus membawa faedah melalui partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, yang berorientasi meraih dan menebar manfaat (jalbul manfa’ah), sekaligus menghindari kerusakan dan mencegah madharat (daf’ul mafsadah) yang merugikan umat manusia.

Idealisasi yang termuat dalam praktik Beragama Maslahat adalah penjelmaan sila pertama Pancasila, yang menjadi nafas kehidupan keagamaan dalam masyarakat majemuk. Adapun Pancasila merupakan hasil konsensus nasional atas dasar nilai-nilai universal, yang diterima semua golongan dan kelompok sebagai rujukan untuk membangun dan mewujudkan kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Dalam bingkai Pancasila, Beragama Maslahat memberi pesan bahwa pengejawantahan sila pertama secara paripurna tidak berdiri sendiri, tetapi mensyaratkan pemenuhan sila-sila lain, termasuk sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Implementasi sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus disertai upaya mewujudkan dan menegakkan keadilan, agar tidak terjebak pada sikap “truth claim” dan mengeksklusi kelompok dan keyakinan lain yang berbeda, termasuk mendiskriminasi suatu kelompok yang menganut mazhab agama yang berlainan.

Beragama Maslahat tidak hanya mengutamakan toleransi, kerukunan, dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan semata, namun harus juga disertai keberpihakan pada kesetaraan (non-diskriminatif), tertib hukum (penguatan kesadaran kewargaan individu dan kelompok), dan penegakan hukum yang berkeadilan (imparsialitas). Beragama Maslahat menjadi fondasi bagi upaya membangun kepedulian sosial dan menguatkan gerakan filantropi berbasis

keagamaan, yang diwujudkan melalui mobilisasi dana sosial-keagamaan dan pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi produktif dan layanan publik: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial.

Beragama Maslahat juga menekankan pada upaya pelestarian alam sekaligus pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemaslahatan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga pada lingkungan alam dengan menjaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan lintas generasi. Semua ajaran agama melarang berbuat kerusakan pada lingkungan alam dan melakukan eksplorasi alam secara berlebihan (ekstraktif), bahkan sangat melarang perbuatan melampaui batas.

Beragama Maslahat menegaskan bahwa nilai-nilai agama harus ditransformasikan menjadi etos kemajuan dan pengungkit budaya kerja produktif serta sikap beragama yang inklusif dan moderat, sebagai antitesis dari fundamentalisme agama, yang kerap memicu munculnya spiritual poverty yang bertolak belakang dengan upaya mewujudkan spiritual wellbeing. Memaknai agama sebagai sumber nilai, moral, dan etika publik adalah dengan menjadikan agama sebagai kekuatan pendorong dan energi penggerak dalam merealisasikan program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat; mewujudkan bangsa yang maju, adil, makmur, dan bermartabat.

Beragama Maslahat berupaya menegaskan betapa agama berperan sebagai inspirasi untuk tindakan-tindakan yang berorientasi pada kebaikan bersama, bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban ritual. Dalam konteks Indonesia, Beragama Maslahat pada akhirnya sangat berkaitan dengan tantangan global seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan masalah lingkungan. Praktek beragama dengan pandangan maslahat mendorong para pemuka agama dan organisasi sosial-keagamaan untuk aktif dalam mengatasi masalah-masalah ini, menciptakan agama yang tidak hanya responsif dan dinamis, tetapi juga relevan dengan isu kontemporer, sekaligus memperkuat jaringan solidaritas sosial di antara masyarakat Indonesia yang beragama.

Berkaitan dengan Berkebudayaan Maju, dalam konteks ini dipahami sebagai upaya kolektif untuk mengangkat harkat dan martabat manusia guna mewujudkan cultural well-being yang berpuncak pada kemampuan individu dalam suatu komunitas untuk mengembangkan imajinasi sosial dan daya cipta, yang melahirkan karya-karya kebudayaan tinggi di masyarakat. Cultural well-being adalah sebuah situasi dan kondisi di mana individu, komunitas, dan masyarakat (i) memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreativitas sosial; (ii) punya ruang partisipasi dalam aneka kegiatan di masyarakat; (iii) terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan menyangkut urusan publik; (iv) terjamin hak-hak berkebudayaan untuk dapat mengekspresikan nilai-nilai budaya, mengartikulasikan aspirasi sosial, menegaskan afinitas budaya dalam masyarakat multikultur; serta (v) memiliki semangat toleransi, pengakuan, dan penghargaan atas kemajemukan sosial dan keragaman budaya, sehingga terbangun suatu harmoni dalam relasi antarwarga masyarakat.

Landasan ideal pengembangan praktik Berkebudayaan Maju adalah Pancasila yang selain merupakan dasar falsafah negara, juga pandangan hidup dan moral bangsa, sekaligus inti serta jiwa kebudayaan nasional Indonesia. Berkat peranan Pancasila, Berkebudayaan Maju menjadi panglima bagi seluruh kehidupan masyarakat dan negara yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan lahir dan batin semua warga negara, menjunjung tinggi harkat, martabat dan hak-hak asasi setiap manusia.

Prinsip Berkebudayaan Maju dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berkebudayaan Maju menegaskan bahwa praktik berkebudayaan harus membawa faedah bagi kemajuan bangsa, membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta memastikan seluruh elemen masyarakat berada pada posisi sentral,

baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat program-program pembangunan.

Berkebudayaan Maju berarti memastikan bahwa seluruh aktivitas berkebudayaan bersifat inklusif, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat luas, relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam. Berkebudayaan Maju menjadi mewujudkan bangsa yang bermartabat, berkebudayaan tinggi, dan berorientasi kemajuan.

a. Agama dan Pembangunan

Agama menjadi sumber rujukan nilai, etika, dan moralitas (publik) untuk memandu bangsa dalam membangun tatanan kehidupan yang damai, berfaedah, dan penuh maslahat. Misi profetik setiap agama adalah mewujudkan kemaslahatan umum dan kebajikan publik. Setiap agama niscaya mengandung nilai-nilai utama dan memuat ajaran-ajaran mulia untuk kemanusiaan universal. Para penganut agama dituntut mampu mengaktualisasikannya untuk membangun tatanan sosial-kemasyarakatan yang adil, makmur, dan sejahtera. Maka, umat beragama didorong untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kebaikan bersama (*Maslahah al-Ammah, the Common Good, Bonum Commune*).

Pesan profetik tentang kebaikan bersama (kemaslahatan umum) yang terkandung dalam ajaran semua agama merupakan suatu ikhtiar untuk membentuk masyarakat utama. Suatu tatanan dan kondisi sosial yang membuka peluang bagi semua pemeluk agama agar dapat berpartisipasi dalam memenuhi panggilan hidup untuk berkhidmat bagi kemanusiaan. Meski dengan cara berbeda, atas dasar saling percaya dan menjaga kepercayaan publik, setiap individu dan masyarakat dapat berkontribusi mewujudkan kebaikan bersama, merujuk nilai-nilai religiositas dan moralitas agama, juga *civic virtues* dan *civic moralities* yang hidup dan menjadi keyakinan di dalam masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan dasar keterkaitan agama dan pembangunan.

Pendekatan teoritis dan praktis pada pembangunan di berbagai negara didominasi oleh pandangan sekuler yang memisahkan agama dengan pembangunan. Teori pembangunan lebih banyak melihat agama sebagai permasalahan ketimbang potensi yang turut menentukan laju pembangunan. Kecenderungan baru mengemuka seiring meluasnya kegagalan berbagai program pembangunan berperspektif sekuler, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Menguatnya agama di ruang publik di negara maju maupun berkembang memunculkan urgensi untuk menimbang kembali perihal hubungan antara agama dan pembangunan. Agama yang pada dekade tahun 1980-an hanya berada di ranah privat mulai memasuki ranah publik, ditandai dengan meningkatnya perhatian media massa, akademisi, politisi dan masyarakat pada isu agama (Casanova, 1994).

Kelindan identitas dan simbol keagamaan pada kontestasi politik kala itu menjadi beberapa faktor yang memperkuat posisi agama dalam ranah publik. Faktor lain berkaitan dengan kecenderungan pemuka dan kelompok agama berorientasi sekuler yang mereduksi peran agama hanya ke ranah privat. Merespons hal tersebut gerakan sosial berlandaskan agama bermunculan untuk menentang paham sekuler dan kapitalis serta menolak pembatasan agama hanya pada lingkup privat dan moral (Casanova, 1994:5). Hal ini mendorong proses transformasi keagamaan di ruang publik semakin meluas, mencakup berbagai isu penting, di antaranya peningkatan peran agama dalam pembangunan.

Dalam konteks keterkaitan agama dengan pembangunan nasional, diskusi mengenai keduanya menjadi wacana yang sudah lama ada dalam pembahasan ilmu sosial. Merujuk karya klasik Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904) semua mafhum rasionalitas yang menjadi salah satu pilar pembangunan terlahir dari dialektika keagamaan.

Analisis dan pengamatan Weber atas tradisi Judeo-Christian dari era ide-ide Katolisisme, Lutheranisme, terutama etika Calvinisme yang doktrinnya mulai muncul pada abad ke-16 telah memberikan sumbangsih luar biasa dalam perdebatan di lingkup akademik mengenai keberlangsungan transformasi tatanan masyarakat dari era tradisional menuju masyarakat baru yang hidup berlandaskan rasionalitas.

Berdasarkan thesis Weber setidaknya terdapat dua doktrin utama kepercayaan yang diinisiasi oleh John Calvin dan memosisikannya pada etika rasionalitas (Peet dan Hartwick, 2009). *Pertama*, Calvinisme yang seperti juga aliran agama lainnya tetap percaya Tuhan sebagai zat yang menciptakan alam semesta. Hal yang membedakannya adalah Calvinisme meyakini setelah proses penciptaan selesai Tuhan tidak memiliki kepentingan lagi untuk bermanifestasi terhadap perkembangannya. Tidak ada lagi pengamatan Tuhan secara lebih lanjut terhadap setiap kejadian yang dilakukan, yang didengar, bahkan yang diucapkan dan yang menjadi pikiran umat-Nya. Oleh karena itu, Weber menyimpulkan penganut aliran Calvinisme memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak mengenai urusan-urusan duniawi, fisik dan perihal material lainnya. *Kedua*, Calvinisme percaya setiap perilaku individu pada akhirnya memiliki ganjaran masing-masing yang dipredeterminasikan sejak lahir dan tidak terungkap hingga setelah kematian. Namun alih-alih terjebak dalam hedonisme duniawi untuk menghindari dari takdir yang telah ditentukan, penganut aliran Calvinisme justru terbentuk secara disiplin untuk bekerja keras di dunia, bukan untuk tujuan keduniaan melainkan untuk terpilih agar termasuk ke dalam golongan orang-orang suci yang mendapatkan takdir kebahagiaan di akhirat (Firmansyah & Pratiwi, 2019).

Persoalan serupa diangkat oleh Robert N. Bellah (1957). Melalui *Tokugawa Religion: The Values of Pre-industrial Japan* Bellah dengan menggunakan kerangka kerja sosiologis Max Weber berupaya mengamati etika Protestan yang digunakan dalam proses pembangunan Jepang pada era Tokugawa dari awal abad ke-15 dan berakhir di penghujung abad ke-17. Bellah menemukan adanya pengaruh aliran-aliran agama Budha dan Konfusianisme yang dimodifikasikan dengan kultur kehidupan masyarakat Jepang yang dipengaruhi oleh konsep ajaran Shinto. Peleburan inilah yang kemudian melahirkan etos-etos kerja masyarakat praindustrial Jepang yang terus berlangsung hingga era perekonomian modern, seperti menahan diri, kerja produktif dan ketahanan serta konsisten dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dalam istilahkan oleh Weber dipahami sebagai etika Protestan.

Salah satu contoh keterkaitan agama dan pembangunan yang terjadi di masa Tokugawa yaitu munculnya pengaruh Konfusianisme dalam sistem perekonomian Jepang. Muncul keterkaitan langsung antara moralitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini ditandai dengan beberapa hal mendasar, seperti urusan ekonomi yang oleh para pemikir Konfusian diarahkan agar jumlah produsen lebih dominan daripada konsumen. Sehingga meskipun aktivitas produksi terus digenjut, penghematan dalam hal pengeluaran tetap tidak bisa dinegasikan. Hanya dengan begitu sumber daya ekonomi potensial untuk tercukupi bagi seluruh rakyat. Kesadaran ini turut pula dimanifestasikan ke dalam kesadaran para elit Jepang untuk memiliki sikap hemat dalam menjalankan kekuasaannya (Firmansyah & Pratiwi, 2019).

Namun, introduksi mengenai ide-ide modernisasi mulai mengalami reorientasi selepas pertengahan abad ke-20, serentak dengan berakhirnya Perang Dunia II. Keterlibatan pengaruh agama dalam ide-ide pembangunan mulai dikesampingkan, bahkan diasumsikan sebagai ancaman. Hal ini berlaku tidak hanya di dunia Barat tapi hampir di seluruh dunia, termasuk di berbagai negara berkembang. Dalam posisi ini optimisme yang digaungkan oleh Jeffrey Haynes perlu menjadi perhatian. Dalam bukunya *Religion and Development: Conflict or Cooperation?* Haynes meyakini kemungkinan kebangkitan peran agama dalam pembangunan. Gagalnya

pembangunan menjadi pemantik munculnya agama dengan berbagai peran pentingnya. Terutama bagi masyarakat kelas bawah di negara berkembang, agama menjadi aspek penting dari identitas masyarakat. Haynes menyitir kajian perihal kesejahteraan yang dilakukan World Bank terhadap 60 ribu orang dari 60 negara yang mengidentifikasi diri maupun diidentifikasi oleh komunitasnya sebagai masyarakat miskin. Kajian mengungkapkan aspek keharmonisan dengan urusan-urusan transendental seperti aktivitas spiritual keagamaan merupakan bagian dari kesejahteraan, sehingga memunculkan opini yang menyatakan agama harus terlibat sebagai *influential voice* dalam pemetaan strategi pembangunan (Firmansyah & Pratiwi, 2019).

Pandangan serupa pernah diutarakan Huntington dalam *The Clash of Civilizations* (1996). Huntington memosisikan agama sebagai kekuatan sentral yang memotivasi dan menggerakkan masyarakat. Meski hipotesa Huntington lebih mengarah pada dampak negatif agama sebagai pemantik konflik, agama faktanya mampu tampil sebagai kekuatan penggerak pembangunan. Melalui peran komunitas agama dan organisasi masyarakat berbasis agama terbentuk kehidupan beragama yang damai, inklusif dan toleran. Dengan posisi ini, relasi agama dan pembangunan menjadi erat dan saling mengisi. Merujuk analisa Marc Goblin dalam bukunya *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking* (2000) agama menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat global yang berkomitmen tinggi terhadap perdamaian. Semua agama di dunia mengajarkan komitmen pada nilai-nilai perdamaian yang meliputi, empati, rasa belas kasih kepada sesama, pengendalian ego dan keserakahan, hak asasi manusia, dan dorongan pada keadilan sosial (Gopin, 2000:13). Nilai-nilai kebaikan yang tertera pada semua agama menjadi landasan spiritual dan moral untuk membangun masyarakat dan bangsa yang berkeadaban. Agama menjadi sumber nilai, basis etika dan moralitas untuk memandu bangsa dalam membangun tatanan kehidupan yang damai, adil, dan maslahat.

Dalam konteks peran agama dalam pembangunan, secara konseptual, ada tiga pilar utama yang akan menopang arah kebijakan utama di bidang keagamaan, sebagaimana diutarakan oleh Simbarashe Gukurume (2021) dalam karyanya: "You Are Blessed to Be a Blessing": Pentecostal-Charismatic Churches and the Politics of Redistribution in Harare". *Pertama*, "Pilar Pembangunan Agama dan Ekologi"; sebuah pendekatan inovatif yang menggabungkan prinsip-prinsip agama dan kepedulian ekologis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Arah dari "Pilar Pembangunan Agama dan Ekologi" adalah menciptakan sebuah paradigma baru di mana agama dan ekologi menjadi bagian yang saling melengkapi dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan berkontribusi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Kedua, "Pilar Pembangunan Sosial-Budaya"; terfokus pada pengoptimalan nilai dan pelayanan agama untuk mewujudkan tatanan sosial yang moderat, damai, adil, dan Tangguh. Upaya ini mencerminkan suatu upaya integrasi antara agama, budaya, dan pembangunan sosial dalam konteks Indonesia. Kebijakan ini pertama-tama mencoba memperkuat peran agama dalam masyarakat, namun bukan dari sudut pandang dogmatis atau eksklusif, melainkan dengan pendekatan moderat. Agama di sini dipahami sebagai sumber nilai-nilai etis dan moral yang dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan damai.

Dalam konteks ini, penekanan diletakkan pada nilai-nilai universal: kasih sayang, toleransi, keadilan, dan perdamaian yang ada pada semua tradisi agama. Selain itu, pilar kedua ini mengatribusikan pentingnya pelayanan agama dalam kehidupan masyarakat. Ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan tempat ibadah dan fasilitas agama, hingga pendidikan agama dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk memastikan semua warga memiliki akses yang sama dan adil ke pelayanan agama, dan untuk mempromosikan pemahaman dan

praktek agama yang sehat dan konstruktif. Adapun arah dari pilar kedua ini adalah untuk mewujudkan tatanan sosial yang moderat, damai, adil, dan tangguh. Ini berarti menciptakan masyarakat yang toleran terhadap perbedaan, yang mampu menyelesaikan konflik dan pertikaian secara damai, yang menghargai keadilan dan hak asasi manusia, dan yang mampu beradaptasi dan pulih dari tantangan dan krisis.

Ketiga, Pilar Pembangunan Agama dan Ekonomi merupakan arah kebijakan strategis yang diusung guna pemanfaatan nilai-nilai dan layanan keagamaan untuk mendorong kedermawanan yang berbasis agama dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai agama seringkali mempromosikan keadilan sosial, solidaritas, dan kedermawanan. Dalam banyak tradisi agama, memberi atau berbagi dengan yang kurang mampu adalah praktek yang dianjurkan dan dihargai. Dalam konteks ini, nilai-nilai keagamaan dan layanan keagamaan dapat digunakan untuk memobilisasi sumber daya masyarakat dan mendukung program-program kesejahteraan sosial.

Agama juga dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Banyak komunitas agama memiliki tradisi bantuan kepada anggota komunitas yang kurang mampu atau mengalami kesulitan. Layanan keagamaan dapat melibatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada saat yang sama, mengembangkan potensi kedermawanan berbasis agama juga bisa membantu mendorong pembangunan ekonomi. Dengan memberikan bantuan kepada yang kurang mampu, program-program berbasis agama dapat membantu masyarakat yang rentan untuk keluar dari kemiskinan dan meraih peluang ekonomi. Ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menstabilkan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beragam contoh program dan kegiatan tersebut menegaskan posisi agama dan ekonomi yang *notabene* tidak harus dipisahkan, tetapi sebaliknya dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Membangun kemitraan antara institusi keagamaan, pemerintah, dan sektor swasta dapat membantu dalam mewujudkan visi ini dan memanfaatkan potensi penuh agama dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui tiga pilar tersebut, agama dapat berperan penting dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional sendiri dapat didefinisikan sebagai proses transformatif yang disusun dengan matang dan sistematis. Hal ini mengintegrasikan berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga aspek keagamaan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian tujuan ini memerlukan pembenahan komprehensif, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, akses keadilan, hingga kesetaraan hak. Dalam implementasinya, peran negara sangat krusial dalam mengintervensi dan memastikan partisipasi pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademis, masyarakat sipil, media, sektor swasta, dan organisasi internasional serta donor.

Agama tidak hanya dijadikan sebagai norma, tapi juga dijadikan sebagai etos; mengikat masyarakat Indonesia sehingga bisa menjadi bahan bakar mobilisasi pembangunan. Selain itu, dalam beberapa praktik baik di Indonesia, agama mampu menjadi garda depan dalam pelayanan sosial di masa-masa krisis. Tentu saja, agama menjadi faktor penting dalam pembangunan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian. Sebab, bagaimanapun, stabilitas dan kedamaian menjadi salah satu prasyarat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

b. Budaya dan Pembangunan

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep pembangunan telah mengalami evolusi signifikan, dari yang semula berfokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi pemahaman yang lebih holistik dan manusiawi. Budaya, sebagai elemen penting dalam masyarakat, kini diakui sebagai

komponen fundamental dalam proses pembangunan. Menukil pandangan Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat terdiri atas tujuh unsur utama, yaitu: 1) sistem religi; 2) sistem dan organisasi kemasyarakatan; 3) sistem pengetahuan; 4) bahasa: lisan dan tulis; 5) kesenian: seni rupa, seni suara, seni gerak; 6) sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi; dan 7) sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2004)

Dengan uraian tersebut jelas bahwa kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber- sumber alam yang ada disekitarnya. Dalam konteks ini, kebudayaan dikatakan sebagai perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan dalam mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Dengan menyandarkan diri pada definisi tersebut, nyatalah bahwa kebudayaan seyogyanya harus dilihat sebagai "mekanisme kontrol" bagi kelakuan dan tindakan manusia atau sebagai "pola-pola bagi kelakuan manusia".

Melalui definisi tersebut kebudayaan dalam perkembangannya menjadi begitu erat dengan manusia. Mengutip Clifford Geertz (1964),

“There is no such thing as a human nature independent of culture. Men without culture would not be the clever savages of Golding’s Lord of the Flies thrown back upon the cruel wisdom of their animal instincts; nor would they be the nature’s noblemen of Enlightenment primitivism or even, as classical anthropological theory would imply, intrinsically talented apes who had somehow failed to find themselves. They would be unworkable monstrosities with very few useful instincts, fewer recognisable sentiments, and no intellect: mental basket cases..... Without men, no culture, certainly; but equally, and more significantly, without culture, no men.”

Tanpa manusia tak akan ada kebudayaan, pun tak akan ada kebudayaan tanpa manusia. Keduanya ibarat sebuah keping uang logam yang di antara masing-masing sisinya tidak mungkin terpisahkan. Terkait hal ini, pandangan Masinambow setidaknya bisa membantu kita memahami fenomena tersebut. Dalam tulisannya *“Teori Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Budaya”*, Masinambow menjelaskan kebudayaan sangat berkait erat dengan banyak faktor, tak terkecuali manusia, pihak yang memang berkepentingan terhadapnya. Dengan kemampuan intelektualnya, manusia terus menerus berusaha agar kebudayaannya dapat mencapai tahap kesempurnaan maksimal sehingga bermanfaat baginya secara maksimal pula.

Problemnya, terkadang kebudayaan menjadi perangkat sistem yang superordinat, bukan subordinat terhadap manusia. Bahwa dalam sejarahnya, alih-alih mampu mengendalikan dan mengolah kebudayaan, manusia dengan segenap rasionalitasnya justru lebih banyak tidak berdaya terhadap pengaruh budaya itu sendiri. Inilah yang akhirnya memunculkan pandangan bahwa kebudayaan itu bersumber pada emosi, bukan pada rasio. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga atau tidak, sesuatu yang bersih atau kotor, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan

pada etos atau sistem etika yang dipunyai oleh setiap manusia (Masinambow, 1998).

Sementara definisi budaya menurut Mondiacult (1982) dan UNESCO mencakup ekspresi budaya sebagai manifestasi spesifik dari kebudayaan. Budaya memberikan konteks, nilai, sikap, dan keterampilan yang menjadi dasar proses pembangunan. Setidaknya, ada empat pilar budaya yang bisa menopang kegiatan pembangunan, dan satu pilar tentang bagaimana seharusnya pembangunan memosisikan budaya (UNESCO 2010).

Pertama adalah budaya sebagai sarana pembangunan ekonomi. Industri budaya, mata pencaharian tradisional, usaha mikro berbasis budaya, dan pariwisata budaya merupakan beberapa contoh bagaimana budaya dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pengembangan usaha mikro dan infrastruktur budaya, masyarakat dapat menciptakan peluang ekonomi yang baru dan berkelanjutan. Pariwisata budaya, misalnya, tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga mempromosikan kekayaan budaya setempat. Selain itu, budaya dalam konteks ini tidak hanya sebagai manifestasi seni dan warisan, tetapi juga sebagai fondasi yang mempengaruhi perilaku ekonomi, inovasi, dan pembentukan kebijakan.

Kedua, budaya berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Apresiasi terhadap keberagaman budaya membawa dampak positif terhadap keterlibatan konstruktif antar masyarakat. Hal ini menjadi warisan budaya sebagai identitas kolektif. Kekuatan simbolik warisan budaya dan pariwisata budaya dapat meningkatkan kohesi sosial. Selain itu, budaya menjadi alat pemberdayaan, khususnya bagi perempuan, serta menjaga dan menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Lebih jauh, aspek-aspek seperti warisan budaya, tradisi, seni, dan bahasa menjadi sarana dalam mempererat hubungan antar individu serta kelompok dalam masyarakat. Dalam studinya, Bouchard dan Taylor (2008) menekankan pentingnya kebudayaan dalam mendukung multikulturalisme. Argumennya bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya mendorong inklusi sosial dan mengurangi konflik etnis dan budaya. Ini pun kemudian sejalan dengan studi Mohanty (2003) yang melihat bahwa program-program yang memfokuskan pada seni dan kebudayaan dapat menjadi alat penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan kohesi sosial.

Ketiga, dalam budaya juga punya peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, diversitas budaya dan ekologi kerap berjalan seiring. Kasus masyarakat Baduy (Banten), Ciptagelar (Jawa Barat) memperlihatkan sistem budaya tradisional berperan penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Ini sejalan dengan studi Berkes dkk. (2012) yang menyoroti pentingnya pengetahuan ekologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat tradisional seringkali memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang dikembangkan melalui pengalaman berabad-abad dan diadaptasi untuk kondisi lokal. Oleh karena itu, dalam konteks tantangan ekologis modern, pemahaman tentang interaksi budaya dan lingkungan menjadi krusial.

Keempat, budaya bisa menjadi modal bagi tumbuhnya komunitas yang tangguh (*resilient*). Inovasi dan kreativitas yang bersumber dari budaya berkontribusi pada ketangguhan komunitas. Pemanfaatan bahan bangunan lokal dan teknologi tradisional, serta adaptasi budaya dalam konteks globalisasi, menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi agen pembangunan yang efektif. Namun, dalam membangun komunitas yang tangguh, peran budaya seringkali diabaikan dalam diskursus pembangunan konvensional. Padahal, bila kita cermati studi dari Adger (2000), terlihat bahwa ada hubungan antara resiliensi sosial dan ekologis, dengan budaya sebagai faktor penting dalam kedua aspek tersebut. Budaya membantu komunitas untuk memahami dan menanggapi perubahan lingkungan serta tantangan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Zimmerman (1995), kebudayaan dapat menjadi alat pemberdayaan bagi individu dan komunitas. Melalui partisipasi dalam praktik

budaya, individu memperoleh rasa memiliki, keterampilan, dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan.

Kelima, pembangunan yang sensitif terhadap budaya adalah kunci. Pembangunan semacam ini akan lebih mengutamakan pembangunan manusia daripada sekadar pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini mendorong berbagai jalur pembangunan yang plural, mengutamakan orang dalam proses dan hasil pembangunan, serta menghargai dan menjaga warisan budaya. Selain itu, pembangunan yang sensitif budaya berupaya mencari solusi lokal untuk agenda global, mengakui dan mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan, serta memelihara kekayaan spiritual dan intelektual untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, pendekatan juga memperhatikan kualitas hidup, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan di sebuah komunitas. Martha Nussbaum dalam "Creating Capabilities: The Human Development Approach" (2011) mengemukakan bahwa kemampuan intelektual dan spiritual merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia. Pembangunan harus memperkaya kekayaan spiritual dan intelektual masyarakat, yang merupakan bagian integral dari budaya mereka.

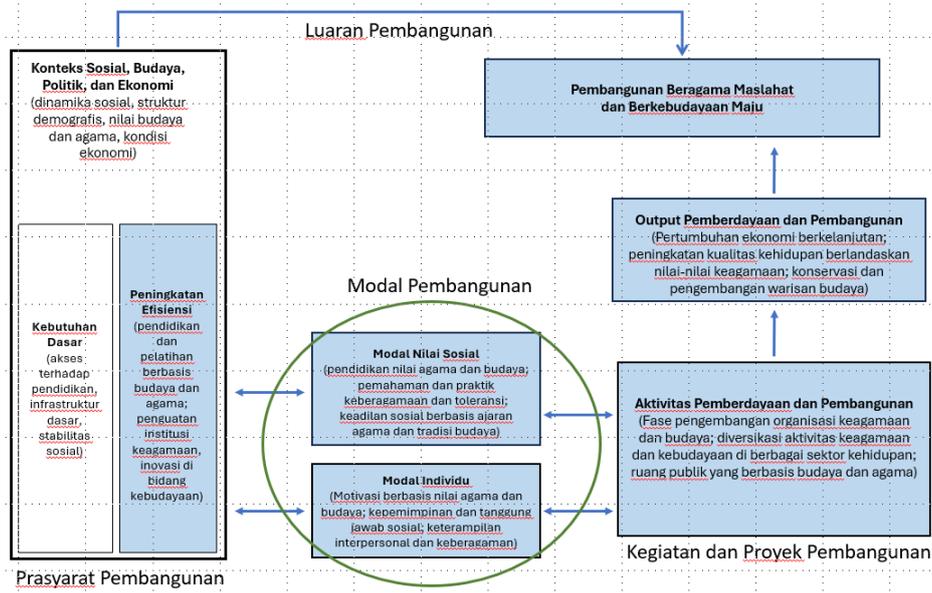
Pembangunan yang sensitif terhadap budaya, dengan demikian, menekankan pada pendekatan yang holistik, partisipatif, dan inklusif, yang menghargai dan memanfaatkan keunikan budaya setiap masyarakat sebagai aset dalam proses pembangunan. Pendekatan ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sambil memastikan bahwa kebudayaan dan identitas lokal tetap terjaga dan berkembang. Sehingga, dalam konteks Indonesia, kebudayaan yang mencakup keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya masyarakat yang tinggal mendiami wilayah Indonesia—terbentuk dari ratusan budaya daerah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara lain: ratusan adat istiadat, kesenian, dan bahasa sukubangsa yang berbeda-beda—merupakan potensi untuk dikembangkan dalam proses pembangunan ke depan terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebudayaan, dengan dinamika dan kompleksitasnya, memberikan sumbangsih yang tidak ternilai dalam proses pembangunan. Integrasi budaya dalam kebijakan pembangunan tidak hanya memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta membangun komunitas yang lebih tangguh dan inklusif. Oleh karena itu, memahami dan mengintegrasikan dimensi budaya dalam pembangunan adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik bagi semua.

3.1.2 Kerangka Teori: Agama, Budaya, dan Pemberdayaan (*Empowerment*)

Kerangka ini mengeksplorasi bagaimana agama dan nilai-nilai budaya dapat menjadi pendorong utama dalam menguatkan kapasitas individu atau kelompok untuk mengambil inisiatif dan mengelola sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan dan mencapai tujuan-tujuan sosial-ekonomi tertentu. Kerangka ini, lebih jauh, menerjemahkan dua konsep yang telah dijelaskan sebelumnya (agama dan pembangunan; budaya dan pembangunan) untuk menjadikan agama dan budaya sebagai pilar pemberdayaan dan pembangunan. Sementara model kerangka teori ini diadaptasi dari kerangka konsep Global Entrepreneurship Monitor (2015).

Gambar 3. 1 Kerangka Teori Pembangunan Agama dan Budaya



Pada gambar di atas terlihat sebuah ilustrasi dari kerangka teori pembangunan agama dan budaya; memaparkan model pembangunan yang berpusat pada nilai-nilai agama dan budaya sebagai modal dasar. Ini mencakup peningkatan efisiensi pendidikan dan pelatihan berbasis budaya dan agama, serta penanaman dan praktik kebermanfaatan dan toleransi sebagai pilar sosial. Individu didorong untuk mengembangkan kebebasan dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Muara akhirnya adalah pengejawantahan prinsip beragama maslahat dan berkebudayaan maju untuk penguatan pemberdayaan komunitas yang berkualitas, berbasis nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal. Dengan kerangka teori tersebut, nilai-nilai agama dan budaya akan terintegrasi ke dalam semua aspek pembangunan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga inovasi dan pengembangan usaha. Agama dan budaya akan menjadi pendorong utama untuk memotivasi dan menginspirasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2 Evaluasi Capaian RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 adalah perencanaan pembangunan lima tahunan yang merupakan penjabaran langkah strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden. Dokumen RPJMN 2020-2024 kemudian menterjemahkan tiga hal tersebut ke dalam 7 Agenda pembangunan prioritas nasional.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- 
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agama dan budaya menjadi domain agenda pembangunan prioritas nasional yang keempat, yakni menjadi bagian dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Agenda pembangunan ini, secara spesifik revolusi mental, dimaksudkan sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Lebih lanjut, revolusi mental dilaksanakan secara terpadu melalui empat program prioritas (PP) di bawah ini:

1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
3. Moderasi beragama
4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Pada tabel di bawah (Tabel 3.1), terdapat penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana empat PP tersebut diukur dengan serangkaian indikator yang mencakup dimensi seperti toleransi, kesetaraan, ekonomi budaya, dan literasi masyarakat. Terlihat bahwa pada setiap indikator dari tahun 2019 hingga 2023 ada kecenderungan peningkatan, baik yang terkait dengan memperkuat ketahanan budaya bangsa, mempertahankan jati diri bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa beberapa indikator menunjukkan fluktuasi dalam pencapaiannya menandakan bahwa perencanaan dan implementasi strategi pembangunan kebudayaan perlu disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berubah, misalnya seperti Pandemi Covid-19.

Tabel 3. 1 Sasaran/Indikator RPJMN 2019-2024

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi				Target 2024
			2020	2021	2022	2023	
PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter							
Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu							
1.1	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	78,98 ^{a)}	79,06 ^{a)}	86,54	79,22 ^{a)}	79,30 ^{a)}	79,38
1.2	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	68,98 ^{a)}	69,97 ^{a)}	72,52	71,96 ^{a)}	72,95 ^{a)}	73,95
1.3	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	76,42 ^{a)}	76,96 ^{a)}	73,15	77,64 ^{a)}	77,88 ^{a)}	78,08
1.4	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	50,08 ^{a)}	53,46 ^{a)}	47,69	59,93 ^{a)}	63,16 ^{a)}	66,39
1.5	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)	67,03 ^{a)}	68,40 ^{a)}	72,46	71,06 ^{a)}	72,36 ^{a)}	73,65
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila							
1.6	Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai)	81,17 ^{a)}	82,19 ^{a)}	73,06 ^{b)}	76,06 ^{b)}	74,61 ^{a)b)}	75,01 ^{b)}
1.7	Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (nilai)	76,65 ^{a)}	77,53 ^{a)}	76,93 ^{b)}	81,32 ^{b)}	79,07 ^{a)b)}	79,42 ^{b)}
1.8	Nilai Dimensi Persatuan Indonesia (nilai)	84,97 ^{a)}	86,33 ^{a)}	77,05 ^{b)}	78,80 ^{b)}	78,36 ^{a)b)}	79,07 ^{b)}
1.9	Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (nilai)	68,02 ^{a)}	71,27 ^{a)}	72,51 ^{b)}	74,47 ^{b)}	75,02 ^{a)b)}	75,43 ^{b)}
1.10	Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai)	59,21 ^{a)}	60,34 ^{a)}	65,10 ^{b)}	66,98 ^{b)}	72,47 ^{a)b)}	72,72 ^{b)}
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter							
1.11	Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	12,29	11,92	10,95	11,42	10,50 ^{a)}	10,00
1.12	Indeks Karakter Remaja (nilai)	N/A ^{c)}	79,60	72,97	71,33	69,42 ^{a)}	69,92
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia							
Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan							
2.1	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	43,89	41,00	46,63	48,92	54,85 ^{a)}	57,60
2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	37,14	35,82	27,13	31,48	38,60 ^{a)}	39,01

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi				Target 2024
			2020	2021	2022	2023	
2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	33,79	26,96	20,69	26,88	46,76 ^{a)}	50,00
PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial							
Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama							
3.1	Nilai Dimensi Toleransi (nilai)	72,37	64,15	68,72	70,39	74,47	73,39
3.2	Nilai Dimensi Kesetaraan (nilai)	73,72	69,54	75,03	75,32	77,61	77,33
3.3	Nilai Dimensi Kerjasama (nilai)	75,40	68,68	73,41	73,65	76,00	76,96
PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter							
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif							
4.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	10,12	12,93	13,54	13,55	15,00 ^{a)}	15,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpusnas, BKKBN, BPS, BPIP, 2019–2023.

Keterangan: a) Angka proyeksi, b) Berdasarkan metode baru (ada penajaman indikator), dan c) belum dihitung.

Sebelum dijelaskan lebih jauh dan mendetail, laporan ini akan melihat secara umum potret capaian RPJMN 2020–2024 yang baru berjalan sampai 2023. Pada PP 1 yang Fokus pada Revolusi Mental dan Ideologi Pancasila, ada kecenderungan peningkatan nilai pada aspek Indonesia Melayani dan Indonesia Bersih. Namun, ada fluktuasi pada bagian Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila menunjukkan variasi dalam peningkatan nilai. Lebih spesifik, untuk PP 1, "Indonesia Melayani" meningkat dari 79,06 ke 86,54, namun turun kembali ke 79,38 pada 2023. "Indonesia Bersih" naik secara bertahap dari 68,98 ke 73,95. "Indonesia Tertib" fluktuatif, dari 76,42 ke 73,15, kemudian meningkat ke 78,08. "Indonesia Mandiri" mengalami penurunan dari 50,08 ke 47,69, lalu meningkat signifikan ke 66,39 pada 2023. "Indonesia Bersatu" meningkat dari 67,03 ke 72,36 pada 2023.

Pada PP 2 yang bertujuan untuk pemajuan dan pelestarian kebudayaan, terlihat adanya kenaikan pada warisan budaya. Akan tetapi, nilai ekspresi budaya dan ekonomi budaya memiliki tren penurunan, menandakan perlunya strategi yang lebih efektif dalam sektor ekonomi budaya. Secara spesifik, PP 2 memperlihatkan peningkatan pada dimensi "Warisan Budaya" dari 43,89 ke 54,85 pada 2023. Sementara dimensi "Ekspresi Budaya" menurun dari 37,14 ke 27,13, lalu naik ke 38,60. Dimensi "Ekonomi Budaya" turun tajam dari 33,79 ke 20,69, kemudian naik menjadi 46,76 pada 2023.

Sementara itu, pada PP 3 yang fokus pada penguatan moderasi beragama, nilai toleransi, kesetaraan, dan kerjasama menunjukkan peningkatan. Meskipun ada variasi dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan efektivitas program dalam memperkuat kerukunan umat beragama. Hal ini terlihat dari bagaimana terjadi peningkatan pada nilai "Toleransi" dari 72,37 ke 74,47, nilai "Kesetaraan" dari 73,72 ke 77,61, dan "Kerjasama" dari 75,40 ke 76,00 pada 2022 ke 2023.

Lalu terakhir, pada PP 4 yang fokus pada memajukan budaya literasi dan inovasi, ada peningkatan yang cenderung stabil dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, sebuah indeks yang digunakan untuk melihat kemajuan budaya literasi dan inovasi. Selain itu, hal ini juga

menunjukkan peningkatan yang stabil, mencerminkan perkembangan positif dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan kreatif.

Secara keseluruhan, ada kemajuan dalam beberapa area, namun masih perlu peningkatan dan konsistensi dalam implementasi program untuk mencapai target 2024 secara penuh. Lebih jauh, kenaikan yang konsisten terlihat dari nilai yang awalnya 10,12 menjadi 15,00 pada 2023.

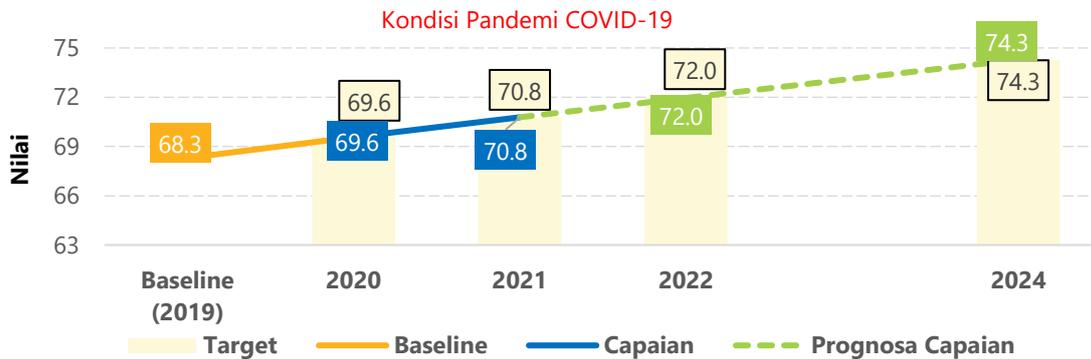
1. Indeks Capaian Revolusi Mental

Inti dari revolusi mental adalah transformasi fundamental dalam kehidupan nasional dan kenegaraan. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan Indonesia yang berorientasi pada pelayanan, kebersihan, keteraturan, kemandirian, dan persatuan. Revolusi mental sendiri merupakan sebuah gerakan nasional (Gerakan Nasional Revolusi Mental, GNRM) yang bertujuan untuk mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia menuju kemajuan berdasarkan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Gerakan ini dijalankan melalui lima program utama, yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 dan amanah RPJMN 2020–2024, yaitu: (1) Program Gerakan Indonesia Melayani, (2) Program Gerakan Indonesia Bersih, (3) Program Gerakan Indonesia Tertib, (4) Program Gerakan Indonesia Mandiri, dan (5) Program Gerakan Indonesia Bersatu. Lima program GNRM ini menjadi bentuk pengejawantahan amanah RPJMN 2020–2024 serta arahan utama Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Selama implementasi RPJMN 2020-2024, GNRM telah berkontribusi signifikan dalam membangun karakter bangsa Indonesia, mencakup aspek pelayanan, kebersihan, keteraturan, kemandirian, dan persatuan. Perkembangan ini dapat diukur melalui Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM), yang mencatat peningkatan nilai dari 68,3 pada tahun 2019 menjadi 70,8 pada 2021, dengan target lebih lanjut mencapai 74,29 pada tahun 2024. Ini mengindikasikan kemajuan berkelanjutan dalam penerapan nilai-nilai revolusi mental di Indonesia.

Dalam konteks perencanaan pembangunan RPJMN 2020-2024 tersebut, pencapaian target GNRM telah dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi antara berbagai instansi, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor bisnis, dan masyarakat. Upaya ini termasuk penguatan kapasitas pusat perubahan revolusi mental, yang telah melibatkan lebih dari 100 entitas sampai tahun 2022. Kolaborasi strategis juga telah terjalin dengan Forum Rektor Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia Daerah, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat inisiatif ini di tingkat daerah. Tren capaian kinerja indeks capaian revolusi mental dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3. 2 Tren Capaian Kinerja Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2020–2024 (Nilai)

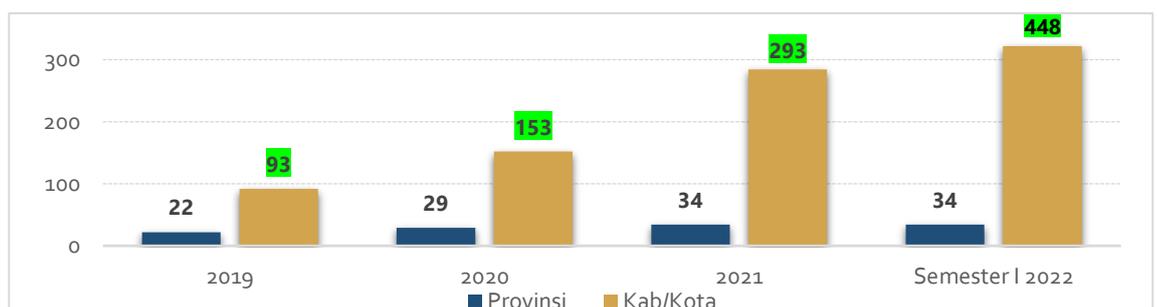


Sumber:

- a. Data Target: Dokumen RPJMN 2020–2024 dan Dokumen RKP 2023.
- b. Data Capaian: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, berbagai tahun (diolah).

Dalam rangka memperkuat program GNRM, pemerintah Indonesia telah mendirikan Gugus Tugas Daerah (GTD) yang terdiri dari 34 unit di tingkat provinsi dan 322.448 unit di tingkat kabupaten/kota. Sampai dengan pertengahan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, inisiatif GTD telah berhasil membawa perubahan signifikan terhadap perspektif, sikap, dan tindakan masyarakat menuju pendekatan yang lebih maju dan modern. Hal ini dilakukan dengan mengakar pada nilai-nilai fundamental revolusi mental seperti integritas, etos kerja, dan gotong royong—yang merupakan prinsip-prinsip dasar budaya nasional. GTD telah mencapai internalisasi dan realisasi dari nilai-nilai ini di tingkat lokal melalui inisiatif ‘Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu’. Detail mengenai jumlah GTD GNRM yang telah dibentuk selama periode 2019–2022 tersaji dalam Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2019–2022 (Gugus Tugas Daerah)



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, berbagai tahun (diolah).

Dalam konteks penguatan institusi negara Indonesia, program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) bertujuan untuk mengembangkan karakter dan mentalitas penyelenggara negara dalam rangka pencapaian kemajuan melalui pembangunan dan modernisasi. Program ini menitikberatkan pada pembinaan mentalitas yang mencakup disiplin, etos kemajuan, etika kerja, kejujuran, ketaatan pada hukum dan aturan, ketekunan, dan kegigihan, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sampai tahun 2021, telah dihasilkan 3.113 alumni ASN sebagai kader revolusi mental dari

berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. GNRM juga menyelenggarakan forum konsultasi publik (FKP) di 176 instansi, dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap instansi. Pada tahun 2021, tercatat ada 195 ASN yang melanggar nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, dengan 99 di antaranya mendapat rekomendasi pelanggaran. Sebanyak 68 ASN atau sekitar 68,69 persen telah dikenai sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Hingga pertengahan 2022, terdapat 12 rekomendasi baru terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dengan 2 di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi oleh PPK. Upaya untuk mendukung PPK dalam menindaklanjuti rekomendasi ini meliputi penguatan koordinasi. Sementara itu, pada tahun 2022, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berhasil menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) terhadap 159 ASN, yaitu sekitar 77 persen dari total 205 ASN yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 49 ASN terbukti melanggar NKK ASN dan telah mendapatkan rekomendasi terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat GNRM, program pembinaan ideologi Pancasila dan pengembangan struktur sosial telah dirancang untuk meningkatkan ketahanan serta meningkatkan kualitas dan peran keluarga dan masyarakat. Pemerintah telah merancang program pembinaan ideologi Pancasila yang sistematis, komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi pemuda, yang diwujudkan melalui Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Program ini tidak hanya mencetak kader potensial untuk menjadi pemimpin bangsa yang berideologi Pancasila, tetapi juga mengembangkan mereka menjadi Duta Pancasila setelah menyelesaikan tugas. Duta Pancasila ini ditujukan untuk menjadi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sosial, nasional, dan kenegaraan. Per Juni hingga Desember 2022, tercatat 9.350 Purna Paskibraka Duta Pancasila yang telah dilantik, menyebar di 30 provinsi dan 225 kabupaten/kota.

Langkah-langkah ini telah membawa kemajuan dalam pembinaan keluarga yang terindikasi oleh peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari 53,57 pada tahun 2019 menjadi 54,01 pada tahun 2021. Selain itu, median usia pernikahan pertama wanita pada tahun 2021 adalah 20,7 tahun, mendekati usia ideal 21 tahun, yang mencerminkan peningkatan kualitas keluarga dengan karakteristik kemandirian dan ketahanan. Kemajuan ini sangat penting dan terus diperkuat karena pembangunan keluarga merupakan aspek kunci dalam revolusi mental dan pembentukan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan revolusi mental antara lain (1) belum semua pemerintah daerah melaksanakan aktivitas pada GTD membentuk GTD dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan GNRM, sehingga amanat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang GRNM GNRM belum optimal; (2) terhambatnya pelaksanaan pengukuran capaian dan pelibatan masyarakat pada kegiatan revolusi mental; (3) belum adanya evaluasi dampak untuk menilai efektivitas pelatihan revolusi mental pada instansi serta dampak kepada masyarakat; (4) belum adanya *knowledge sharing management* yang dapat mempercepat pemahaman dan implementasi revolusi mental; (5) rendahnya komitmen PPK Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menindaklanjuti rekomendasi penanganan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku (NDKEKP NKK); (6) belum meratanya kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah dan kompetensi literasi digital SDM aparatur dalam pelaksanaan revolusi mental pada masa pandemi COVID-19; (7) belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Pedoman Umum dan Peta Jalan GNRM; (8) belum optimalnya penguatan nilai etos kerja, gotong royong dan integritas ke dalam rencana program/kegiatan K/L, pemerintah daerah, dan instansi lainnya; (9) masih lemahnya kolaborasi antarpemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, organisasi sosial, dan

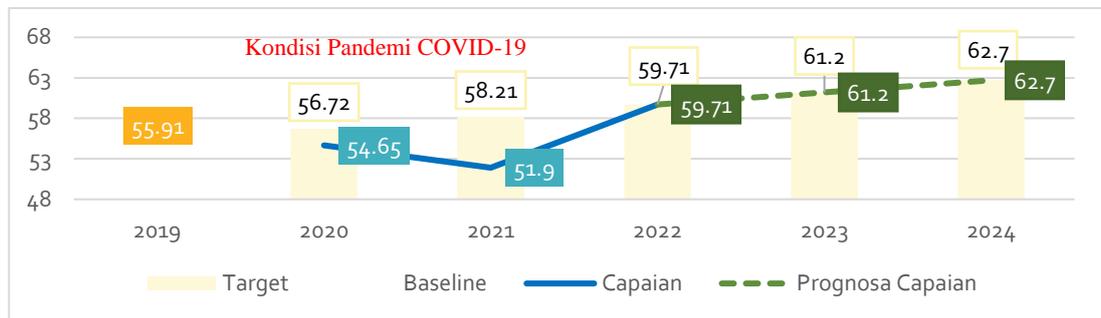
masyarakat) dalam mewujudkan lima program gerakan revolusi mental; serta (10) masih rendahnya keluarga yang memahami peran keluarga, pola asuh, dan pola hubungan antarkeluarga serta pendampingan bagi lanjut usia dalam pembangunan karakter sumber daya manusia.

Arah kebijakan revolusi mental adalah mempercepat implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM melalui (1) penguatan kapasitas gugus tugas pelaksanaan GNRM di K/L dan kabupaten/kota; (2) peningkatan jumlah dan aktivitas pusat-pusat perubahan revolusi mental di daerah; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dan unsur-unsur *pentahelix* dalam melaksanakan GNRM; (4) penyusunan evaluasi dampak sebagai bagian dari tindak lanjut pelatihan revolusi mental untuk menilai implementasi hasil pelatihan; (5) pembentukan forum *knowledge sharing* revolusi mental; (6) pengoptimalan sistem informasi pengawasan NDKEKP NKK ASN serta peningkatan sinergi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka *monitoring* pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh PPK; (7) pengembangan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Pedoman Umum dan Peta Jalan GNRM; (8) penguatan nilai etos kerja, gotong royong, dan integritas ke dalam rencana program/kegiatan K/L, pemerintah daerah, dan instansi lainnya; dan (9) peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup melalui peningkatan pemahaman delapan fungsi keluarga, peningkatan pemahaman pola asuh dan pendampingan balita dan anak, pembentukan dan penguatan karakter sejak dini, serta peningkatan kualitas dan karakter remaja.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Selama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah mengembangkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai suatu ukuran untuk menilai hasil dari upaya pembangunan kebudayaan di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun nasional. IPK, yang dirancang berdasarkan Cultural Development Indicators (CDIs) yang dirumuskan oleh UNESCO, mencakup 31 indikator yang dibagi ke dalam tujuh dimensi. Dimensi-dimensi tersebut meliputi ekonomi budaya dengan satu indikator, pendidikan dengan enam indikator, ketahanan sosial budaya dengan delapan indikator, warisan budaya dengan enam indikator, ekspresi budaya dengan empat indikator, literasi budaya dengan tiga indikator, dan gender dengan tiga indikator. Penghitungan IPK telah dilakukan di seluruh Indonesia. Dari semua dimensi tersebut, yang paling terpengaruh oleh pandemi COVID-19 adalah dimensi ekonomi budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya, mengingat layanan kebudayaan banyak yang terhenti karena pandemi. Namun, dalam menghadapi dampak sosial ekonomi dari pandemi, kebudayaan telah terbukti menjadi fondasi yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan dimensi ketahanan sosial budaya dalam IPK dari target 73,88 pada tahun 2020 menjadi realisasi 74,01.

Gambar 3. 4 Tren Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020–2024 (Nilai)



Sumber:

a. Data Target: Dokumen RPJMN 2020–2024 dan Dokumen RKP 2022.

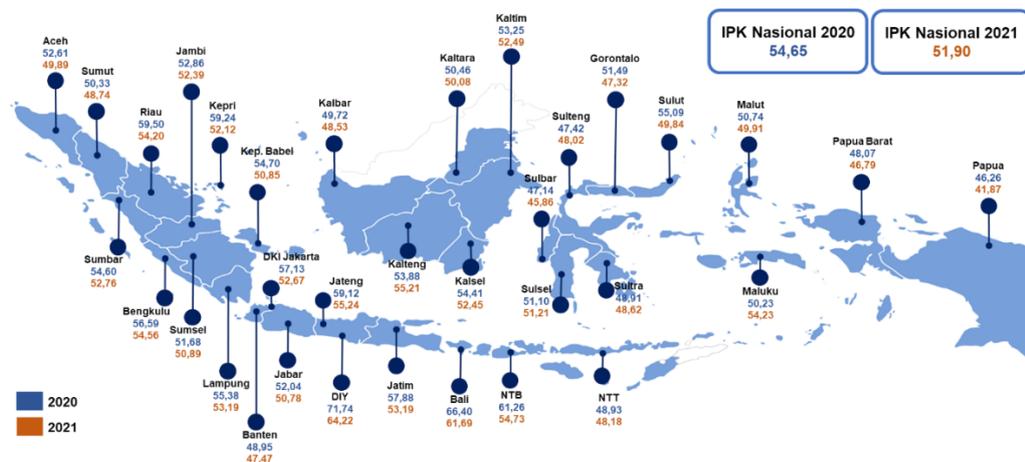
b. Data Capaian: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Pusat Statistik, berbagai tahun (diolah).

Keterangan: *) Prognosa Capaian merupakan angka proyeksi.

Di awal periode RPJMN 2020-2024, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Sektor kebudayaan, khususnya kegiatan yang melibatkan pertemuan fisik seperti pertunjukan seni, pameran, serta operasional museum dan galeri, terpaksa dihentikan selama pandemi, mengakibatkan penurunan signifikan dalam indikator seperti jumlah penonton dan pendapatan seniman. Hal ini tercermin dalam penurunan nilai IPK, dari 55,9 pada tahun 2019 menjadi 54,7 pada tahun 2020, dan lebih lanjut menurun ke 51,9 pada tahun 2021.

Dari perspektif regional, pencapaian Indeks Pembangunan Kemanusiaan (IPK) rata-rata di tingkat provinsi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Ini umumnya terlihat di provinsi-provinsi yang berada di kawasan tengah dan timur Indonesia. Sementara itu, provinsi-provinsi yang mencatatkan skor IPK yang lebih tinggi kebanyakan terletak di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali.

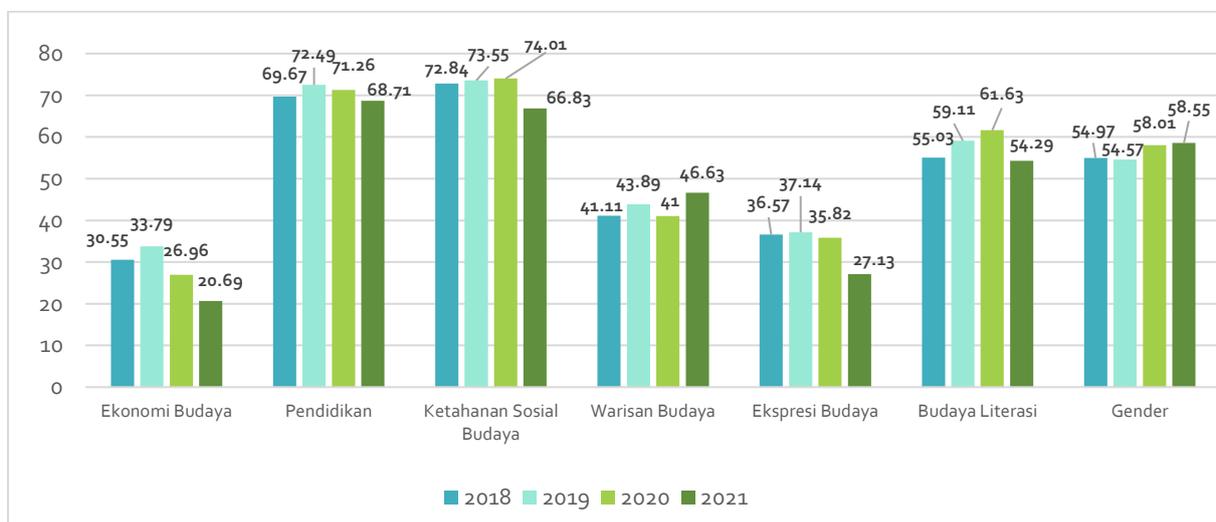
Gambar 3. 5 Peta Sebaran Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Berdasarkan Provinsi Tahun 2018-2019 2020–2021 (Nilai)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Pusat Statistik, 2021-2022 (diolah).

Selama pandemi COVID-19, dimensi-dimensi yang sangat berpengaruh terhadap IPK mencakup ekonomi budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya. Indikator-indikator dalam dimensi ini, yang berkaitan erat dengan layanan kebudayaan, terhambat sepenuhnya selama krisis. Meskipun pandemi berdampak negatif pada aspek-aspek tersebut, kebudayaan tetap memegang peranan vital dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya di Indonesia, yang merupakan aset fundamental dalam menghadapi konsekuensi sosial ekonomi dari pandemi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pada dimensi ketahanan sosial budaya, yang bertujuan mencapai 73,88 pada tahun 2020 dan berhasil melebihi target dengan nilai 74,01. Namun, seiring berlanjutnya pandemi, dampak signifikan terhadap IPK menjadi terlihat, dengan beberapa dimensi, khususnya ekonomi budaya dan ekspresi budaya, yang menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan hingga tahun 2021.

Gambar 3. 6 Perbandingan Capaian Dimensi Pembentuk IPK Tahun 2018–2021 (Nilai)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Pusat Statistik, 2022.

Pembangunan budaya menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan akses ke fasilitas budaya dan ruang bagi para pelaku dan komunitas untuk mengadakan acara kebudayaan, termasuk pertunjukan seni dan festival, yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Juga, pemanfaatan warisan budaya bangsa sebagai motor pemulihan ekonomi pasca-pandemi belum maksimal, begitu pula dengan penggunaan diplomasi budaya untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di panggung dunia. Ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan masih perlu dikembangkan untuk mendukung talenta seni budaya, dan tata kelola pembangunan kebudayaan, termasuk sinergi antar-stakeholder serta kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia, masih memerlukan perbaikan, begitu pula dengan integrasi data kebudayaan.

Untuk meningkatkan IPK secara lebih cepat, pembangunan kebudayaan harus fokus pada kemajuan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan strategi meliputi: perlindungan, pelestarian, dan pengembangan warisan budaya dengan partisipasi masyarakat; mengembangkan diplomasi budaya melalui acara seni budaya, termasuk inisiatif jalur rempah yang menegaskan posisi Indonesia sebagai poros maritim global; meningkatkan infrastruktur budaya termasuk revitalisasi museum dan taman budaya; mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media

baru untuk ekspresi budaya; memberikan bantuan sosial dan fasilitasi kegiatan untuk pelaku budaya agar mereka tetap aktif dan produktif; menguatkan sinergi antar-stakeholder pembangunan kebudayaan; dan mempercepat pengembangan sistem pendataan kebudayaan yang terpadu.

3. Indeks Pembangunan Masyarakat

Mendorong transformasi mental masyarakat Indonesia menuju karakter yang mulia, beridentitas kuat, gotong royong, toleransi, dan kesejahteraan merupakan inti dari upaya revolusi mental. Dalam konteks ini, pengukuran kemajuan sosial diwujudkan dalam bentuk Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebuah ukuran komposit yang terus direvisi untuk mencapai suatu konsep yang lebih holistik, kuat, dan valid. Terbaru pada tahun 2018, IPMas telah dirancang dengan 28 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi: kohesi sosial dengan 11 indikator, inklusi sosial dengan 6 indikator, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil dengan 11 indikator. Kohesi sosial menyoroti kekuatan hubungan sosial yang memungkinkan kerjasama dan bantuan timbal balik antarindividu dan antargrup. Inklusi sosial membahas upaya masyarakat dalam berpartisipasi aktif untuk mendapatkan akses yang setara terhadap peluang yang tersedia. Sementara itu, pengembangan kapasitas masyarakat sipil fokus pada peningkatan kemampuan warga untuk terlibat, berpengaruh, dan mempertahankan institusi yang transparan dalam kehidupan mereka. Data mengenai nilai masing-masing dimensi IPMas pada tahun 2018 disajikan dalam tabel 1.2.

Gambar 3. 7 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat (IPMas) Berdasarkan Dimensi Penyusunnya Tahun 2018

Dimensi	2018
IPMas (Indonesia)	0,69
Dimensi Kohesi Sosial	0,64
Dimensi Inklusi Sosial	0,84
Dimensi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil	0,56

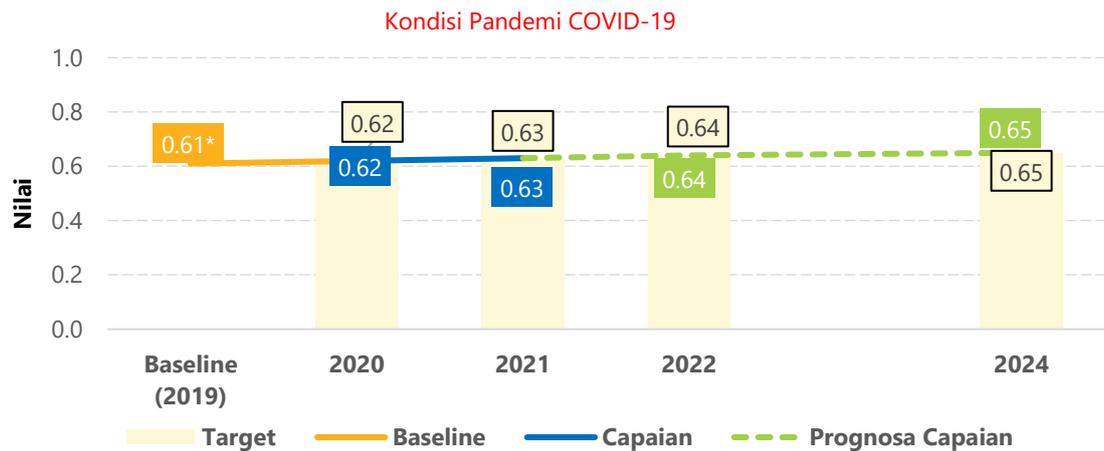
Sumber: Angka sementara hasil penghitungan Kementerian PPN/Bappenas dan BPS tahun 2021.

Indeks Pembangunan Masyarakat, bersanding dengan matrik lain seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kesejahteraan, Indeks Pembangunan Gender, dan Rasio Gini, menyediakan perspektif yang lebih luas tentang kemajuan manusia dan masyarakat. Indeks ini berperan dalam: (1) melacak dinamika sosial dalam masyarakat, mencakup aspek kohesi, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat di berbagai wilayah; (2) menjadi alat bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengenali dan merespons perubahan sosial; serta (3) menghadirkan visi yang lebih holistik dan beragam tentang masyarakat Indonesia. Indeks ini dikembangkan berdasarkan data dari serangkaian survei yang dilakukan secara berkala, termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Modul Ketahanan Sosial, Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan, Survei Angkatan Kerja Nasional, dan Survei Potensi Desa.

Seiring waktu, terjadi evolusi dalam metode penghitungan Indeks Pembangunan Masyarakat untuk menyesuaikan dengan perubahan konsep dan dimensi yang lebih akurat dan

valid dalam merefleksikan kondisi masyarakat kontemporer. Ini mencakup pergeseran dari Dimensi Gotong-royong, Dimensi Toleransi, dan Dimensi Rasa Aman ke Dimensi Kohesi Sosial, Dimensi Inklusi Sosial, dan Dimensi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil. Metode penghitungan yang diperbaharui ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih tepat tentang kondisi masyarakat dalam periode yang ditinjau.

Gambar 3. 8 Tren Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat (IPMas) Sebelum Perubahan Metode Tahun 2020–2024 (Nilai)

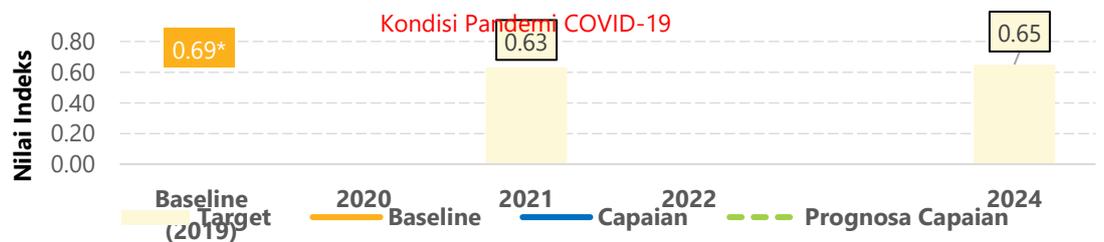


Sumber:

- a. Data Target: Dokumen RPJMN 2020–2024.
 - b. Data Capaian: Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, diolah.
- Keterangan: *) Capaian Tahun 2018.

Berdasarkan metodologi terkini dalam mengukur IPMas, pencapaian tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020–2024. Pada tahun 2018, IPMas mencatat angka 0,69, melebihi target RPJMN tahun 2024 yang sebesar 0,65. Selanjutnya, indikator-indikator yang terkait langsung dengan IPMas menunjukkan tren yang positif, menandakan bahwa IPMas memiliki prospek untuk mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Gambar 3. 9 Tren Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat (IPMas) Setelah Perubahan Metode Tahun 2020–2024 (Nilai)



Sumber:

- a. Data Target: Dokumen RKP 2022.
 - b. Data Capaian: Angka capaian Tahun 2021 belum dapat ditentukan.
- Keterangan: *) Capaian Tahun 2018.

Pada tingkat provinsi, capaian IPMas pada tahun 2018 tertinggi dicapai oleh Provinsi D.I Yogyakarta dengan nilai indeks 0,81. Sedangkan Provinsi Papua pada tahun yang sama memiliki capaian IPMas terendah dengan nilai indeks 0,65. Capaian kinerja IPMas berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2018 dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi Tahun 2018 (Nilai)

No.	Provinsi	2018
1.	Aceh	0,66
2.	Sumatera Utara	0,66
3.	Sumatera Barat	0,66
4.	Riau	0,68
5.	Jambi	0,67
6.	Sumatera Selatan	0,68
7.	Bengkulu	0,71
8.	Lampung	0,69
9.	Kepulauan Bangka Belitung	0,66
10.	Kepulauan Riau	0,67
11.	DKI Jakarta	0,69
12.	Jawa Barat	0,66
13.	Jawa Tengah	0,75
14.	D.I Yogyakarta	0,81
15.	Jawa Timur	0,70
16.	Banten	0,65
17.	Bali	0,80
18.	Nusa Tenggara Barat	0,71
19.	Nusa Tenggara Timur	0,68
20.	Kalimantan Barat	0,66
21.	Kalimantan Tengah	0,65
22.	Kalimantan Selatan	0,69
23.	Kalimantan Timur	0,67
24.	Kalimantan Utara	0,67
25.	Sulawesi Utara	0,73
26.	Sulawesi Tengah	0,69
27.	Sulawesi Selatan	0,67
28.	Sulawesi Tenggara	0,66
29.	Gorontalo	0,70
30.	Sulawesi Barat	0,66
31.	Maluku	0,67
32.	Maluku Utara	0,68
33.	Papua Barat	0,65
34.	Papua	0,62

Sumber: Angka sementara hasil penghitungan Kementerian PPN/Bappenas dan BPS tahun 2021.

Pada pertengahan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2020-2024, pembangunan komunal masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Ini termasuk belum maksimalnya strategi mitigasi terhadap risiko sosial, partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan yang masih kurang, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas publik yang perlu ditingkatkan, serta keberlanjutan ketidakseimbangan gender dalam masyarakat.

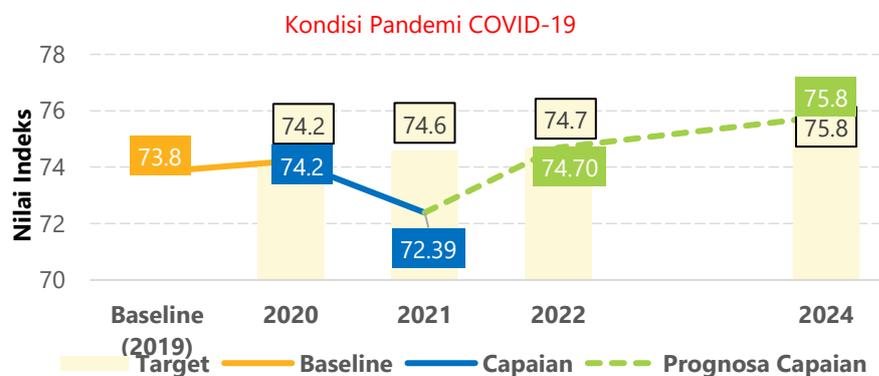
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) telah menjadi ukuran yang berguna dalam menilai peran masyarakat dalam proses pembangunan, memberikan sebuah perspektif komprehensif atas keterlibatan masyarakat. Namun, untuk periode RPJMN yang akan datang, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap IPMas, memastikan bahwa hasilnya akurat mencerminkan realitas sosial. Meskipun dimensi yang ada dalam IPMas telah berhasil mengcapture beberapa aspek fenomena sosial, variabel yang membangun dimensi-dimensi ini memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memperkuatnya.

Kebijakan pembangunan masyarakat di masa depan harus terus diperbaharui dan diperluas untuk mempromosikan kohesi sosial yang lebih kuat, inklusi sosial yang lebih luas, dan pembangunan kapasitas masyarakat sipil. Ini harus dilakukan melalui implementasi program dan inisiatif strategis yang holistik dan integratif, menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Dalam rangka memperkuat sektor keagamaan, pemerintah telah mengembangkan instrumen evaluatif untuk mengukur kemajuan dalam pembangunan agama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), yang merupakan salah satu alat ukur tersebut, mampu menggambarkan tingkat harmonisasi antar pemeluk agama. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, kerukunan umat beragama umumnya berada dalam kisaran tinggi, dengan skor antara 61 hingga 80. Namun, terjadi fluktuasi pada Indeks KUB, yang awalnya berada di angka 73,8 pada tahun 2019, turun ke 67,46 pada tahun 2020, dan naik kembali menjadi 72,4 pada tahun 2021. Penurunan ini diduga kuat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang secara signifikan telah mengubah dinamika sosial masyarakat, termasuk praktik keagamaan. Selain itu, pandemi juga menimbulkan tantangan dalam pengukuran Indeks KUB itu sendiri. Menjelang akhir tahun 2023, Indeks KUB meningkat hingga 76,09. Sehingga, capaian ini sudah melebihi mencapai target yang ditetapkan sebesar 75,8 pada 2024.

Gambar 3. 10 Tren Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020–2024 (Nilai)



Sumber: Kementerian Agama, 2021-2022.

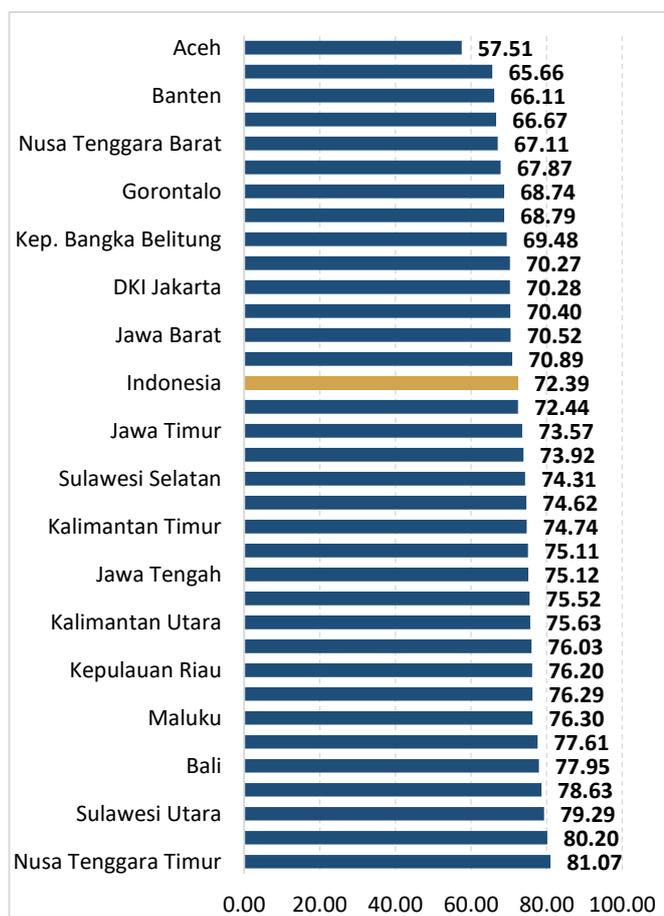
IKUB disusun melalui evaluasi atas tiga dimensi kunci: toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Data tahun 2021 menunjukkan perubahan variabel: dimensi toleransi mencatat skor 68,72, turun dari 73,37 pada tahun 2019; dimensi kerjasama tercatat 73,41, juga menurun dari 75,40 pada tahun 2019; sementara itu, dimensi kesetaraan mengalami kenaikan menjadi 75,03 dari 72,73 pada tahun 2019. Kenaikan pada dimensi kesetaraan ini mengindikasikan peningkatan persepsi masyarakat terhadap kesamaan hak dalam melaksanakan ajaran agama mereka, yang juga merefleksikan penerapan prinsip kesetaraan oleh negara terhadap warga negaranya yang beragama.

Sementara itu, secara kewilayahan, pada tahun 2021, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatatkan nilai tertinggi dalam indeks tertentu dengan skor 81,10, diikuti oleh Provinsi Papua dengan 80,20 dan Provinsi Sulawesi Utara dengan 79,29. Di sisi lain, Provinsi Aceh (57,50), Provinsi Kalimantan Selatan (65,66), dan Provinsi Banten (66,11) mencatatkan skor terendah. Tren ini mencerminkan perkembangan positif yang konsisten dalam semua aspek pembentukan indeks yang diamati, menunjukkan kemajuan yang berkelanjutan dalam bidang agama yang diperkirakan akan berlanjut hingga akhir periode RPJMN 2020-2024. Sementara dimensi-dimensi yang ada dalam indeks ini memberikan gambaran yang adekuat tentang dinamika antarumat beragama, variabel-variabel penyusunnya memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menguatkan hubungan antara intervensi program pemerintah dan pencapaian nilai indeks.

Namun, pembangunan di sektor agama masih menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, pengembangan pemahaman dan praktik nilai-nilai agama yang toleran dan moderat belum optimal, seringkali terhalang oleh sikap ekstrem. Kedua, dialog antarumat beragama yang dapat menumbuhkan kerjasama masih belum berkembang dengan baik. Ketiga, penggunaan dana sosial keagamaan dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan belum efektif. Keempat, kualitas layanan keagamaan yang merata bagi semua agama masih menjadi isu.

Untuk mempercepat pembangunan di sektor agama, diarahkan beberapa inisiatif, termasuk pengembangan moderasi beragama yang mendukung kerukunan dan harmoni sosial. Program-program prioritas yang diusulkan meliputi pengembangan literasi keagamaan yang moderat, dialog antarumat beragama yang produktif, optimasi dana sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf untuk peningkatan kesejahteraan, mekanisme blended finance untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, program penguatan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi dan layanan sertifikasi halal, serta fasilitasi sarana dan prasarana layanan keagamaan yang inklusif.

Gambar 3. 11 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 (Nilai)

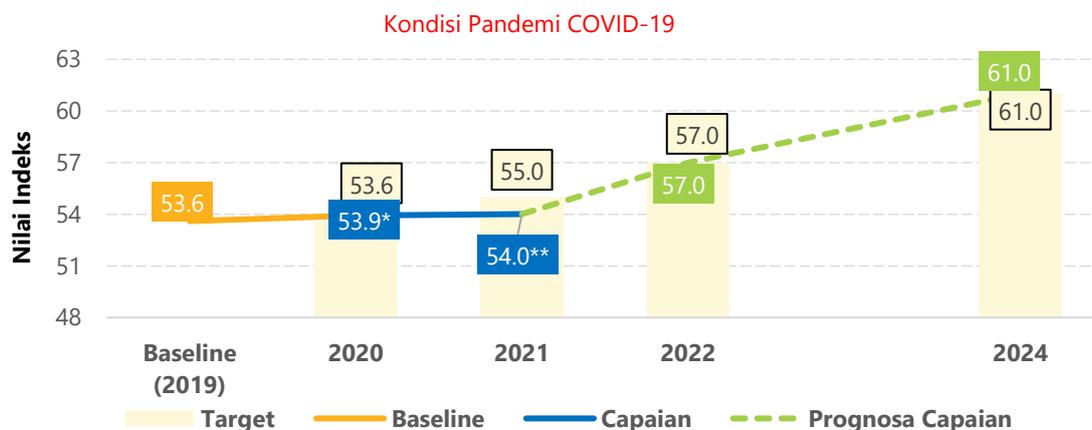


Sumber: Kementerian Agama, 2021-2022.

5. Indeks Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah fondasi awal dan terpenting bagi perkembangan anak, penanaman etika, serta pembentukan karakter setiap anggota masyarakat. Kehadiran keluarga yang berkualitas menjadi kunci esensial bagi peningkatan kualitas generasi mendatang dan, oleh karenanya, kemajuan bangsa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 telah memasukkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai alat ukur untuk menilai prestasi dalam pengembangan keluarga. iBangga dirancang untuk merefleksikan peranan serta fungsi keluarga melalui tiga aspek utama: ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks ini dikalkulasi berdasarkan tiga dimensi yang terdiri dari 17 variabel, dan dihitung melalui sistem penilaian yang membagi keluarga menjadi tiga kategori: rentan untuk skor di bawah 40, berkembang untuk skor antara 40 hingga 70, dan tangguh untuk skor di atas 70.

Gambar 3. 12 Tren Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2020–2024 (Nilai)



Sumber:

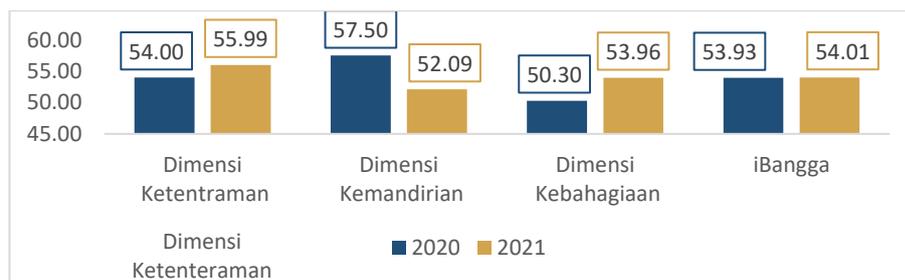
- a. Data Target: Dokumen RPJMN 2020–2024 dan Dokumen RKP 2022.
- b. Data Capaian: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berbagai tahun (diolah).

Keterangan:

- *) Perhitungan iBangga tahun 2020 bersumber dari susenas 2017, 2018 dan 2019 dan Modul Sosial, Budaya & Pendidikan (MSBP) 2018.
- ***) Perhitungan iBangga tahun 2021 menggunakan Pendataan Keluarga 2021 dengan pembobotan skor level nasional. Perhitungan tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan analisis data terkini, program iBangga mencatat kemajuan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun kemajuan ini belum memenuhi ambang batas yang diharapkan yaitu skor 55,00. Tinjauan mendalam atas indikator-indikator spesifik menunjukkan adanya dinamika yang berarti dalam berbagai aspek. Misalnya, dimensi ketentraman keluarga mengalami kenaikan pada tahun 2021, suatu fenomena yang dapat dikaitkan dengan peningkatan aktivitas keluarga di rumah, termasuk kegiatan keagamaan bersama, akibat pembatasan sosial yang diberlakukan selama pandemi COVID-19. Sebaliknya, dimensi kemandirian ekonomi keluarga tercatat menurun secara signifikan, yang dapat distributed pada dampak ekonomi pandemi, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Di sisi lain, dimensi kebahagiaan keluarga terlihat membaik, dengan pembatasan sosial memungkinkan keluarga untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama di rumah, memperkuat ikatan keluarga dan memungkinkan pengasuhan anak secara langsung oleh orang tua.

Gambar 3. 13 Capaian Dimensi Pembentuk Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2020–2021 (Nilai)



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022.

Pengembangan keluarga dihadapkan pada sejumlah rintangan yang signifikan, termasuk: dampak komprehensif pandemi COVID-19 terhadap kestabilan ekonomi, sosial, dan psikologis; tingginya angka konflik keluarga, kekerasan domestik, dan perceraian; kurangnya pendekatan pengasuhan yang berorientasi pada hak anak; prevalensi perkawinan usia dini di beberapa daerah; partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam mendukung pembangunan keluarga; dan program pembangunan yang belum merata di semua lapisan keluarga dan wilayah.

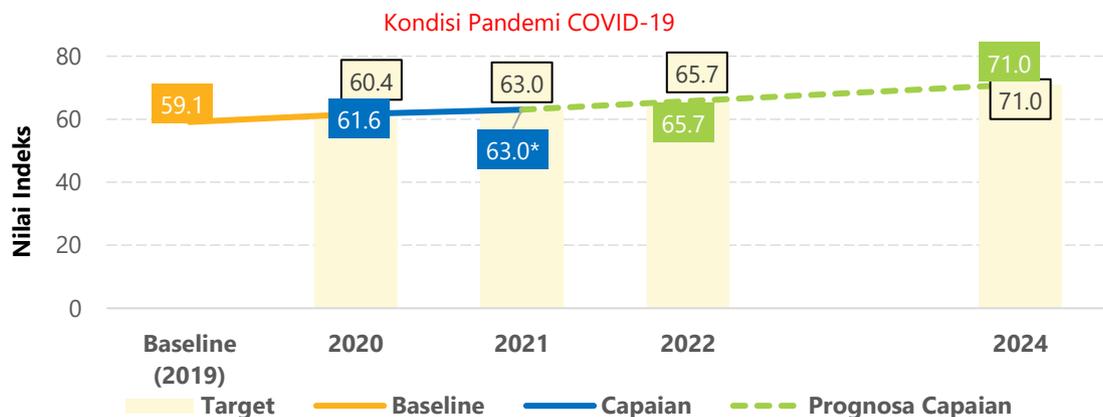
Untuk meningkatkan efektivitas program iBangga, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, di antaranya adalah: merancang strategi pembangunan keluarga yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kewilayahan; menyediakan bimbingan perkawinan dan pendampingan untuk calon pengantin, serta layanan konseling keluarga yang dapat diakses di semua tingkatan wilayah; menyediakan pendidikan, informasi, dan sosialisasi yang efektif tentang pengasuhan yang memprioritaskan hak anak dan memantau perkembangan anak; mengedukasi tentang pentingnya usia perkawinan yang matang; menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi keluarga dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat; dan menguatkan basis data keluarga serta sinergi dengan sistem pendataan lain untuk mendukung intervensi pembangunan keluarga yang terkoordinasi lintas sektor.

6. Nilai Budaya Literasi

Sebagai salah satu faktor utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), tingkat literasi budaya menjadi ukuran yang efektif untuk menilai kemajuan dari inisiatif revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sepanjang periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, terdapat tren peningkatan dalam nilai literasi budaya meskipun di tengah tantangan pandemi COVID-19. Menariknya, literasi budaya mengalami lonjakan pada tahun pertama pandemi, yang didorong oleh peningkatan permintaan informasi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan medis. Akan tetapi, tercatat adanya penurunan pada tahun 2021, yang sebagian disebabkan oleh keterbatasan akses langsung ke perpustakaan dan taman bacaan akibat kondisi pandemi.

Literasi budaya dalam IPK diukur melalui tiga indikator spesifik: (1) proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang membaca bahan bacaan non-kitab suci, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dalam satu minggu terakhir; (2) proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir; dan (3) proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berkunjung ke perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

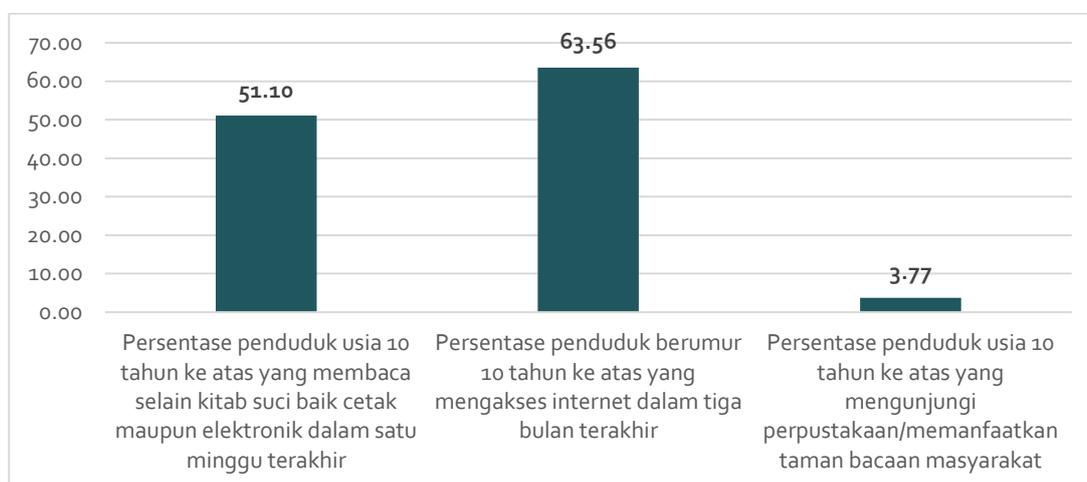
Gambar 3. 14 Tren Capaian Kinerja Nilai Budaya Literasi Tahun 2020–2024 (Nilai)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik, 2022.

Berdasarkan grafik di bawah, kunjungan masyarakat ke perpustakaan/taman bacaan masyarakat secara fisik menjadi capaian paling rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat tidak dapat beraktivitas secara langsung dan mendapatkan layanan di perpustakaan maupun taman bacaan. Meskipun demikian, dua indikator lainnya, yaitu terkait kebiasaan membaca masyarakat baik cetak maupun elektronik dan akses internet capaiannya menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pandemi COVID-19 berdampak pada tingginya kebutuhan masyarakat atas konten ataupun bahan bacaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, misalnya terkait kesehatan dan pengobatan, serta meningkatkan kesejahteraan.

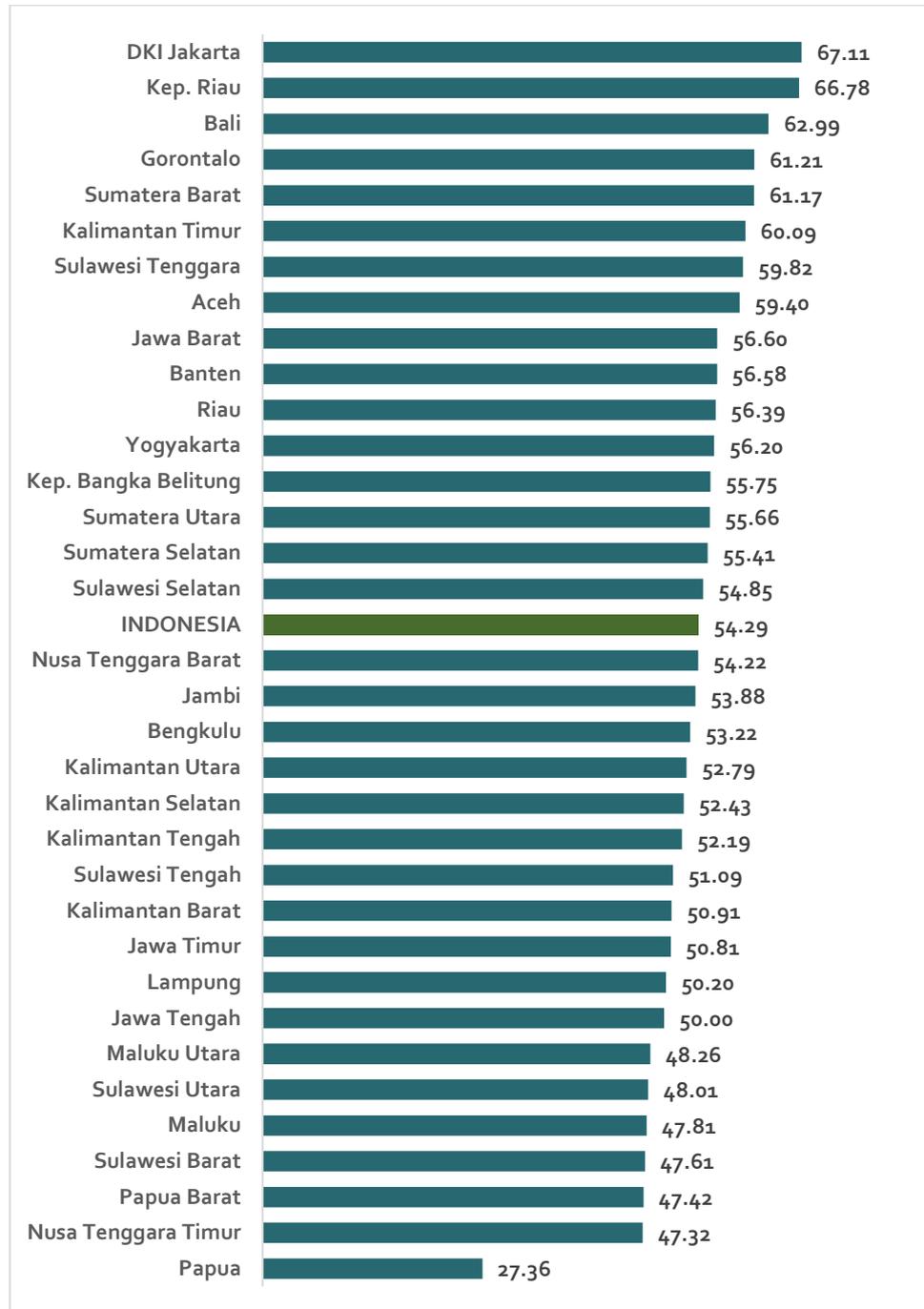
Gambar 3. 15 Capaian Indikator Pembentuk Nilai Budaya Literasi Tahun 2021 (Nilai)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik, 2022.

Capaian nilai budaya literasi pada tingkat provinsi juga memberikan hasil yang cukup memuaskan, meskipun masih terdapat provinsi yang nilainya di bawah rata-rata nasional. Nilai tertinggi dicapai oleh Provinsi D.I Yogyakarta DKI Jakarta, disusul oleh DKI Jakarta dan Kepulauan Riau dan Bali, sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Provinsi Papua.

Gambar 3. 16 Capaian Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 (Nilai)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik, 2022.

Untuk mempercepat pencapaian kemajuan dalam budaya literasi, pemerintah aktif memperbaiki kualitas layanan perpustakaan, termasuk melalui peningkatan infrastruktur dengan Dana Transfer Khusus (DTK). Namun, ada beberapa hambatan dalam mengembangkan literasi masyarakat, yang mencakup kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan informasi dan pengetahuan secara praktis demi kesejahteraan, ketidaktersebaran layanan perpustakaan berkualitas, kurangnya antusiasme masyarakat terhadap perpustakaan online

yang tidak sebanding dengan peningkatan layanan digital, dan kebutuhan akan sinergi yang lebih baik antar lembaga dalam program literasi dan dukungan finansial dari sektor ketiga.

Kebijakan saat ini ditujukan untuk meningkatkan layanan literasi yang inklusif untuk memajukan kemampuan literasi masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas hidup. Strategi ini meliputi peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum dan perpustakaan desa dengan pendekatan inklusi sosial, pembangunan ekosistem digital nasional untuk mentransformasi perpustakaan dengan meningkatkan akses ke sumber pengetahuan digital, pengembangan kerjasama antar lembaga dalam gerakan literasi yang melibatkan berbagai komunitas, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat luas, serta peningkatan kualitas staf pengelola perpustakaan dan fasilitas layanan perpustakaan.

3.3 Evaluasi Renstra 2020-2024 Bidang Agama dan Budaya

Pembangunan agama dan budaya dalam sistem pembangunan nasional diampu oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Perpustakaan Nasional. Renstra 2020-2024 pada ketiga institusi ini memiliki visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu 2020-2024 dengan berfokus pada pencapaian RPJMN 2020-2024. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 5 tahun, K/L memiliki Sasaran Strategis yang dalam perumusannya saling terintegrasi dengan penyusunan RPJMN. Pelaksanaan evaluasi renstra ini dilakukan untuk melihat bagaimana capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis dalam bidang agama dan budaya.

3.3.1. Renstra Kementerian Agama

Dalam upaya menyelenggarakan tugasnya terkait pembangunan di bidang agama, Kementerian agama telah menyusun beberapa sasaran strategis. Fokusnya meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Agama, yang tercermin dalam peningkatan wawasan keagamaan moderat dan kualifikasi pelatihan. Indikator lain mencakup kualitas layanan pentahsihan Al-Qur'an, pengunjung Museum Bayt Al-Qur'an, dan penilaian buku pendidikan agama.

Ada juga penilaian terhadap program kerukunan umat beragama, termasuk aktivitas FKUB dalam membina kerukunan dan penyelesaian konflik antarumat beragama. Tabel mencakup juga indikator terkait pembinaan moderasi beragama dan layanan administrasi keagamaan digital, serta pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dari tabel ini, terlihat target dan realisasi berbagai sasaran strategis dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan upaya konsisten pemerintah dalam meningkatkan layanan keagamaan dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia..

Tabel 3.3 Capaian Rencana Strategis Kementerian Agama

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
SP 1.4	Meningkatnya kompetensi sumberdaya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul						
IKP 1.4.1	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	%	13,00	23,50	33,50	44,00	55,00
IKP 1.4.2	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar		50.563	125.511	212.139	200.000	350.000

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
IKP 1.4.3	Capaian Standar kompetensi peserta diklat	%	90,50	90,50	95,00	87,00	90,00
IKP 1.4.4	Indeks pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan	%	84,44	85,50	89,66	85,80	86,00
IKP 1.4.5	Pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	%		26,70	38,46	75,00	100,00
SP 1.5	Meningkatnya kualitas layanan pentahsiam, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan						
IKP 1.5.1	Indeks kepuasan layanan pentahsihan Mushaf Al-Qur'an	%	76,74	82,01	84,67	85,60	85,80
IKP 1.5.2	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	%	89,80	85,92	87,09	85,60	85,80
IKP 1.5.3	Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama		491.432	662.451	1.271.466	980.000	1.250.000
IKP 1.5.4	Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Byt Al'Qur'an		23.971	51.794	129.297	270.000	350.000
IKP 1.5.5	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	%	73,54	84,40	88,80	77,00	79,00
1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama							
SP 2.1	Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama						
IKP 2.1.1	Presentasi FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama	%	82,00	99,41	100,00	100,00	100,00
IKP 2.1.2	Presentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan	%	97,00	68,61	88,00	90,99	92,00
SP 2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama						
IKP 2.2.1	Rosio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama		1:3	1:4	1:4	1:5	1:4
IKP 2.2.2	Presentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	%	99,00	99,53	89,94	83,24	85,74
SP 2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama						
IKP 2.3.1	Presentase kasus konflik intr umat beragama yang diselesaikan	%	75,00	100,00	100,00	66,67	73,33
SP 2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama						
IKP 2.4.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama		70,00	79,35	100,00	66,67	73,33
SP 2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama						

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
IKP 2.5.1	Presentase ksasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	%	70,00	70,35	100,00	78,33	79,17
SP 2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan						
IKP 2.6.1	Presentase layanan administrasi keagamaan secara digital	%	60,00	89,47	100,00	78,33	79,17
IKP 2.6.2	Presentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	%	100,00	68,29	200,00	95,00	100,00
IKP 2.6.3	Presentase KUA yang memenuhi standar pelayanan	%	18,47	65,63	67,45	60,00	56,00
SP 2,7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan						
IKP 2.7.1	Presentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan	%	75,00	80,35	85,00	29,89	33,36
IKP 2.7.2	Presentase peningkatan wakaf produktif	%	4,06	3,72	3,75	10,89	13,51
SP 2.8	Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel						
IKP 2.8.1	Presentase jamaah haji yang diberangkatkan dari kuota	%	-	-	99,83	99,65	99,70
IKP 2.8.2	Presentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jamaah haji sesuai standar	%	-	-	90,45	86,50	87,00
IKP 2.8.3	Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jamaah haji		-	-	1:23	1:31	1:30
IKP 2.8.4	Presentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji		-	-	4,19	1,40	1,50
SP 2.9	Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah haji khusus sesuai standar						
IKP 2.9.1	Presentase lembaga penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi	%	-	-	95,20	95,80	96,00
IKP 2.9.2	Presentase lembaga ibadah haji khusus yang terakreditasi		-	-	64,00	81,00	82,00
SP 2.10	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal						
IKP 2.10.1	Presentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	%	26,23	61,15	76,69	66,00	72,00
IKP 2.10.2	Presentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
SP 2.11	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal						

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
IKP 2.11.1	Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
IKP 2.11.2	Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	%	-	77,78	95,00	100,00	100,00

3.3.2. Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia memiliki rencana strategis yang mencakup sasaran strategis dari tahun 2022 hingga 2024. Dalam konteks kebudayaan, ada satu sasaran strategis yang sudah dilakukan oleh Kementerian ini, yakni peningkatan kemahiran dalam bahasa Indonesia dan pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari sasaran strategis. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Realisasi tahun 2022 untuk kemahiran berbahasa Indonesia mencapai 81.02 persen, yang jauh melampaui target 2024 sebesar 81.00 persen. Ini artinya, di tahun 2022 Kemendikbudristek telah memperlihatkan capaian yang mencapai di atas 100 persen. Sementara itu, untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan, realisasi 2022 adalah 51.90 dengan target 2024 sebesar 62.70, menandakan capaian **82.78** persen dari target. Data ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aspek pemajuan bahasa dan kebudayaan.

Tabel 3.4 Capaian Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bidang Kebudayaan

KODE	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET		PERBANDINGAN REALISASI 2022 DENGAN TARGET 2024
				2022	2023	
SS 3	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan					
IKSS 3.1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Indeks	81.02	75.00	81.00	100.02%
IKSS 3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	51.90	61.20	62.70	82.78%

3.3.3. Renstra Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional memiliki tujuan dan sasaran strategis terkait pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat, serta pengembangan perpustakaan sesuai standar nasional. Data yang dicatat termasuk nilai budaya kegemaran membaca, indeks pembangunan literasi, rasio ketercukupan koleksi dan tenaga perpustakaan, serta tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Tabel ini juga mengukur kepatuhan standar pelayanan publik, peningkatan kunjungan perpustakaan, dan pelestarian bahan pustaka. Selain itu, terdapat pencapaian dalam tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional, termasuk indeks reformasi birokrasi, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), opini BPK atas laporan keuangan, dan indeks persepsi anti-korupsi.

Tabel 3.5 Capaian Rencana Strategis Perpustakaan Nasional

TUJUAN/ ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2020	Realisasi 2020	2021	Realisasi 2021	2022	Realisasi 2022	2023	2024
		SASARAN STRATEGIS	Nilai budaya kegemaran membaca	55.3	55,74	59.3	59.52	63.3	63,58
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	11,0	12,93	12,0	13,54	13,0	13,55	14,0	15,0
SASARAN PROGRAM 1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1:16	1 : 12,08	1:15	1 : 11	1:14	1 : 10	1:13	1:12
	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 : 20.000	1 : 20.090	1 : 19.000	1 : 16.667	1 : 18.000	1 : 17.978	1 : 17.000	1 : 16.000
	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	19.48	13,58	20.45	36,75	21.42	47,53	22.39	23.36
	Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1.00 %	0,13%	1.25 %	1,50%	1.50%	2,08	1.75 %	2.00%
SASARAN PROGRAM 2	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	75,5	98,00	78,50	81,30	80,0	89,16	82,0	85,0
	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di PERPUSNAS	0,5	15,27	1,0	29,45	1,5	50,94	2,0	2,5
	Persentase peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam menjadi koleksi nasional	5	42,76	5	1,01	5	9,82	5	5
	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	16.48	11,40	18,43	14,98	19.52	21,40	21.04	22.56

SASARAN PROGRAM 3 Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen PERPUSNAS Yang Baik dan Handal	Indeks reformasi birokrasi PERPUSNAS	75	73,05	80	74,01	85	78.17	90	95
	Indeks SPBE	3.06	3,06	3.20	3,40	3.34	3,51	3.48	3.62
	Opini BPK atas laporan keuangan PERPUSNAS	WTP	WTP	WT P	WTP	WT P	WTP	WT P	WTP
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,7	3,61	3,8	3,61	3,9	3,16	4,0	4,1

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET / REALISASI								UNIT KERJA
		2020	Realisasi 2020	2021	Realisasi 2021	2022	Realisasi 2022	2023	2024	
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai budaya kegemaran membaca	55,3	55,74	59,3	59,52	63,3	63,58	67,3	71,3	Kepala PERPUSNAS
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	11,0	12,93	12,0	13,54	13,0	13,55	14,0	15,0	
SASARAN PROGRAM 1 Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Nilai Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1:16	1 : 12,08	1:15	1 : 11	1:14	1 : 10	1:13	1:12	D2/Program Perpustakaan dan Literasi
	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 : 20.000	1 : 20.090	1 : 19.000	1 : 16.667	1 : 18.000	1 : 17.978	1 : 17.000	1 : 16.000	
	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	19,48	13,58	20,45	36,75	21,42	47,53	22,39	23,36	
	Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1,00%	0,13%	1,25%	1,50%	1,50%	2,08	1,75%	2,00%	
SASARAN PROGRAM 2 Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	75,5	98,00	78,50	81,30	80,0	89,16	82,0	85,0	D1/Program Perpustakaan dan Literasi
	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di PERPUSNAS	0,5	15,27	1,0	29,45	1,5	50,94	2,0	2,5	
	Persentase peningkatan serah simpan karya cetakan dan karya rekam menjadi koleksi nasional	5	42,76	5	1,01	5	9,82	5	5	
	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	16,48	11,40	18,43	14,98	19,52	21,40	21,04	22,56	
SASARAN PROGRAM 3 Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen PERPUSNAS Yang Baik dan Handal	Indeks reformasi birokrasi PERPUSNAS	75	73,05	80	74,01	85	78.17	90	95	Sekretaris Utama/Program Dukungan Manajemen
	Indeks SPBE	3.06	3,06	3.20	3,40	3.34	3,51	3.48	3.62	
	Opini BPK atas laporan keuangan PERPUSNAS	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,7	3,61	3,8	3,61	3,9	3,16	4,0	4,1	

3.4 Tantangan Masa Depan yang Mempengaruhi Pembangunan Agama dan Kebudayaan

Dunia tengah mengalami perubahan yang cepat. Inovasi terus bermunculan tanpa jeda, disrupsi telah menghampiri masyarakat, kecerdasan buatan mulai menggantikan peran manusia, krisis Kesehatan seperti pandemi Covid-19, dan bumi kita juga semakin memanas dari waktu ke waktu. Inilah beberapa tantangan tren global (*megatrend*) yang sedang dihadapi Indonesia ke depan. Tentu saja, berbagai tantangan tersebut mempengaruhi pembangunan di sektor agama dan budaya. Sebab, megatrend itu berdampak pada berbagai lini kehidupan. Mulai dari demografi, geopolitik dan geoeкономи, perkembangan teknologi, urbanisasi global, hingga pertumbuhan kelas menengah global.

Pertama, perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Di tengah meningkatnya populasi dunia yang saat ini sudah mencapai 8 miliar jiwa per 21 Desember ([Worldometers 2023](#)), Asia dan Afrika diprediksi akan menjadi wilayah-wilayah yang dihuni oleh mayoritas penduduk dunia. Pada demografi skala mikro, perubahan demografi global turut memengaruhi struktur dan bentuk keluarga, termasuk berdampak pada kualitas keluarga. Misalnya saja adalah munculnya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), perilaku kehidupan seksual sesama jenis, dan hubungan tanpa pernikahan menjadi beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Indonesia ke depan. Khusus dua fenomena

yang telah disebut di awal, perilaku semacam itu juga menyebabkan turunnya angka kelahiran. Dalam enam dekade terakhir saja, angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif, angka kelahiran Indonesia sudah berkurang 30,64% selama periode 1990-2022 (Databoks 2023).

Kedua, dinamika politik global ke depan berdampak luas terhadap sektor kehidupan, tak terkecuali sektor agama dan kebudayaan. Perang antara Rusia dan Ukraina, kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina, dan potensi konflik geopolitik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, dan Laut China Selatan turut mengekskalasi simpati dan emosi masyarakat Indonesia. Ini dapat dilihat dari sumbangan kemanusiaan untuk Palestina dari masyarakat Indonesia. Bantuan terakhir yang tercatat secara resmi pada 6 November 2023, Indonesia mengirimkan bantuan sebanyak 51,5 ton yang berisi alat-alat Kesehatan, 100 tenda peleton, 1.000 selimut, dan jaket musim dingin (Kemkes 2023). Belum lagi, dukungan juga dilakukan oleh masyarakat lintas agama pada 5 November 2023 dalam Aksi Bela Palestina (Tempo 2023). Ini semua menunjukkan bahwa agama turut memainkan peranan penting dalam percaturan konflik geopolitik yang tengah mengemuka di kancah global.

Ketiga, dalam konteks geoekonomi, secara signifikan, sejak tahun 1980-an, kontribusi negara-negara berkembang terhadap output ekonomi global telah meningkat secara dramatis. Pada tahun 2015, negara-negara ini menyumbang lebih dari setengah output global, dan diperkirakan akan mencapai sekitar 71% pada tahun 2050, dengan negara-negara Asia memainkan peran kunci. Lebih jauh lagi, transformasi ekonomi di negara-negara berkembang ini tidak lagi didominasi oleh sektor komoditas. Sebagai contoh, Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kini mengalami perkembangan pesat dalam ekonomi syariah. Laporan State of the Global Islamic Economy (2023) menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara teratas dalam produksi produk halal. Dengan adanya sektor keuangan Islam, produk konsumsi halal, dan rekreasi syariah, Indonesia membuktikan bahwa industri halal dapat menjadi substitusi bagi ekonomi berbasis komoditas yang selama ini menjadi andalan Indonesia. Selain itu, hal ini menandakan pergeseran signifikan dan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Perkembangan teknologi, **keempat**, sudah pasti berkontribusi pada disrupsi sosial di tengah masyarakat beragama dan berbudaya seperti Indonesia. Perkembangan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*, AI) dan media sosial, paling nyata mengubah pola kehidupan beragama dan berbudaya masyarakat Indonesia. Media sosial memunculkan fenomena pemuka agama pemengaruh (*influencer*). Belum lagi dengan teknologi seperti AI generatif seperti ChatGPT yang mampu menjawab berbagai pertanyaan manusia, tidak terkecuali pertanyaan terkait agama. Sisi positifnya, kemajuan teknologi tersebut memudahkan kehidupan manusia. Namun, ada sisi negatif yang berdampak pada kehidupan sosial seperti kejahatan siber (*cybercrime*), perundungan maya (*cyber bullying*), mengintimidasi kelompok tertentu dengan cara menyebarkan data atau informasi seseorang di internet tanpa izin (*doxing*), dan berbagai kejahatan lainnya.

Kelima, salah satu fenomena global penting yang kita hadapi saat ini adalah urbanisasi. Proses ini berarti lebih banyak orang pindah ke kota, yang mengakibatkan pertumbuhan populasi perkotaan dan ekspansi wilayah kota. Di negara-negara berkembang, urbanisasi ini seringkali menghadirkan tantangan besar bagi kualitas hidup dan pembangunan kota. Urbanisasi yang terjadi seringkali tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai dan perencanaan yang efektif. Ini menyebabkan menurunnya kualitas layanan publik, ekonomi, dan interaksi sosial di area perkotaan. Studi klasik oleh Harvey Cox (1965) dan Martin van Bruinessen dkk. (2013) menunjukkan bahwa urbanisasi tidak selalu mengarah pada sekularisme, tetapi justru dapat

mendorong munculnya gerakan keagamaan revivalis. Dalam konteks Indonesia, ini telah membawa ke permukaan fenomena sufisme perkotaan (Darmadi 2001), di mana orang-orang kota menjadi lebih taat beragama. Namun, fenomena ini juga memiliki sisi negatif, seperti politisasi identitas keagamaan dan komodifikasi agama, di mana agama seringkali digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi daripada sebagai alat untuk kemaslahatan bersama.

Keenam, pertumbuhan kelas menengah global menjadi fenomena penting yang kita amati saat ini. Proyeksi untuk tahun 2045 menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah bisa mencapai sekitar 8,8 miliar, yang berarti lebih dari 90% dari populasi dunia. Sebuah studi dari Future Platform (2023) mengungkapkan bahwa terdapat kenaikan tahunan sekitar 140 juta orang yang bergabung ke dalam kelas menengah, sebuah laju pertumbuhan yang melebihi perkiraan sebelumnya. Fenomena ini membawa dampak yang signifikan, termasuk munculnya berbagai jenis pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam, mencerminkan pergeseran gaya hidup. Dalam konteks kehidupan sosial dan budaya, kita melihat bahwa kelas menengah cenderung mengadopsi nilai-nilai budaya Barat, seperti penekanan pada pendidikan tinggi, kepemilikan properti, dan gaya hidup konsumtif (Reeves, Guyot, dan Krause 2018). Selain itu, kelas menengah yang beragama juga menunjukkan semangat yang meningkat dalam menjalankan praktik keagamaan yang seringkali memerlukan biaya, seperti bersedekah, ziarah ke tempat-tempat suci, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial sebagai bagian dari solidaritas beragama (Lichterman 2014).

Ketujuh, menghadapi darurat iklim dan tantangan perubahan lingkungan adalah tantangan global yang signifikan dan mendesak, tidak terkecuali bagi Indonesia. Sebagai negara bahari yang memiliki banyak pulau, kekayaan alam melimpah, dan keragaman biodiversitas yang luar biasa, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Namun, fakta di atas tidak menjadikan orang-orang Indonesia berbudaya bahari dan sadar akan menjaga kelestarian lingkungan. Justru ironisnya, berdasarkan data dari YouGov (2022) dan *International Public Opinion on Climate Change* (2022), mayoritas warga Indonesia memiliki pemahaman yang sangat minim mengenai perubahan iklim dan global warming. Bahkan, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan warga terbanyak yang tidak mempercayai adanya global warming. Lebih dari itu, Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama. Ini memberikan peluang untuk menggunakan nilai-nilai dan doktrin agama sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan. Agama dapat menjadi motivator yang kuat dalam mendorong perubahan perilaku dan sikap masyarakat.

3.5 Analisis Situasi

3.5.1 Analisis Situasi Bidang Agama

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2023, Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam pembangunan di bidang agama dan budaya. Apalagi di masa-masa itu muncul berbagai persoalan global yang tidak terduga, seperti Pandemi Covid-19, Perang Rusia-Ukraina, dan krisis ekonomi global. Bagian ini menganalisis isu-isu yang terjadi sepanjang tahun 2019-2023, terutama yang berkaitan dengan sektor keagamaan dan kebudayaan. *Pertama*, dalam konteks agama, studi ini melihat ada beberapa isu penting yang harus diperhatikan untuk memperkuat proses tahapan landasan transformasi dari RPJPN 2025-2045. Beberapa isu masih berkaitan dengan RPJMN 2019-2024, namun beberapa isu lain menjadi isu yang mulai mengemuka (*rising issues*). Moderasi beragama, kerukunan umat beragama, jaminan hak beragama masih menjadi salah satu perhatian utama yang perlu diamati. Kemudian, isu yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan

seperti Kantor Urusan Agama (KUA), penyelenggaraan haji dan umrah, produk halal, dan sarpras pelayanan kehidupan keagamaan di lembaga sosial keagamaan maupun institusi agama. Adapun isu lain yang penting dijabarkan adalah persoalan jaminan produk halal dan dana sosial keagamaan.

Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Dalam konteks hubungan antar pemeluk agama, kerukunan menjadi prasyarat yang bersandar pada toleransi, penghargaan atas kesetaraan dalam praktik kepercayaan, serta kolaborasi dalam ranah sosial, nasional, dan negara. Kementerian Agama secara aktif menguatkan pilar-pilar kerukunan dengan memperkenalkan berbagai inisiatif strategis, seperti memperdalam dialog antar umat, meningkatkan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menciptakan desa yang sadar akan pentingnya kerukunan, dan menjalin kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai alat untuk menggambarkan dan memahami dinamika kerukunan dalam konteks pembangunan sosial keagamaan, pemerintah telah merancang Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB). Indeks ini diukur berdasarkan tiga dimensi utama: (1) toleransi; (2) kesetaraan; dan (3) kolaborasi. Selain itu, dalam kalkulasi Indeks KUB, pertimbangan diberikan kepada variabel-variabel seperti tingkat pendidikan, pendapatan, partisipasi dalam aktivitas sosial, pemahaman terhadap regulasi, perspektif terhadap kemajemukan berdasarkan daerah tinggal, baik itu pedesaan maupun perkotaan. Data berikut menunjukkan hasil dari Indeks KUB periode 2019-2021, dan capaian target yang perlu dicapai sampai 2045.

Berdasarkan data terkini, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) telah mencapai poin yang signifikan namun cenderung stagnan dengan angka sekitar 73, menunjukkan variabilitas selama lahan tahun terakhir. Indikator ini menggambarkan adanya penurunan dalam kerukunan antarumat beragama di Indonesia meskipun masih berada dalam kategori tingkat yang dianggap tinggi. Variabilitas nilai dari Indeks KUB, berdasarkan analisis, lebih dipengaruhi oleh aspek non-religius seperti disparitas ekonomi dan perubahan politik. Selama periode waktu yang ditinjau, terdapat penyebaran isu sensitif, misinformasi, pernyataan yang bersifat diskriminatif, serta eksploitasi agama untuk kepentingan politik di berbagai wilayah. Saat menghadapi pandemi Covid-19, sejumlah wilayah masih mempertahankan kerukunan antarumat beragama. Akan tetapi, inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kerukunan melalui interaksi langsung mengalami keterbatasan karena reorientasi beberapa program guna mendukung respons pandemi sebagai prioritas nasional. Kondisi ini berdampak pada pencapaian target Indeks KUB, walaupun sudah berada dalam kisaran yang dianggap harmonis.

Variabilitas nilai Indeks KUB menunjukkan pentingnya penguatan program kerukunan di tingkat lokal, dan jika memungkinkan, diimplementasikan hingga tingkat kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam kerangka ini, upaya peningkatan kerukunan seharusnya tidak hanya berfokus pada toleransi, tetapi juga mempromosikan kesetaraan dan kolaborasi di tengah keberagaman masyarakat. Hasil survei khusus pada tahun 2022 menegaskan adanya korelasi signifikan antara sikap moderasi dalam beragama dengan Indeks KUB. Ini menandakan bahwa postur moderasi masyarakat beragama di Indonesia memiliki dampak besar terhadap tingkat kerukunan. Sehingga, berdasarkan data tersebut, ada kebutuhan untuk mengintensifkan upaya moderasi beragama melalui serangkaian program unggulan dari Kementerian Agama.

Dalam Indeks KUB, ditemukan bahwa indikator toleransi mencatat angka yang paling rendah jika dibandingkan dengan indikator lain. Spesifik pada indikator ini, aspek penghormatan terhadap pembangunan fasilitas keagamaan serta perayaan ritual agama lain menunjukkan skor

yang kurang memuaskan. Sebagai respon, Kementerian Agama telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi konflik inter-religius, mempromosikan budaya damai, meningkatkan toleransi, dan memperkuat kerangka hukum yang mendukung kerukunan beragama. Sejumlah inisiatif yang telah dijalankan mencakup: (1) peningkatan dan sosialisasi regulasi yang mendukung kerukunan antar umat beragama; (2) pengembangan kapabilitas para pelaku yang berkontribusi pada kerukunan antar umat beragama; (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta entitas keagamaan dan media; (4) advokasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai harmoni antar umat beragama; dan (5) upaya pendidikan untuk mempromosikan pemahaman keagamaan yang moderat dan inklusif, serta pengawasan terhadap berbagai aliran kepercayaan.

Tabel 3.6 Indikator Pembangunan Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1) Nilai Dimensi Toleransi KUB	70,39 (2022)	74,47 (2023)
2) Nilai aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial IPMas	61,78 (2021)	tbd
3) Persentase Penyuluh Agama yang ditingkatkan kompetensinya	81,6% (Rerata semua agama tahun 2022-2023)	tbd

Jaminan Hak Beragama dan Advokasi Konflik Sosial Keagamaan

Jaminan hak beragama merujuk pada perlindungan konstitusional dan hukum yang memastikan setiap individu bebas memilih, mengamalkan, dan mengekspresikan kepercayaan agamanya. Di Indonesia, yang memiliki keberagaman agama, jaminan ini penting untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari diskriminasi. Advokasi konflik sosial keagamaan adalah proses menangani dan menyelesaikan perselisihan yang berakar pada perbedaan agama, yang dapat mencakup mediasi, pendidikan, dan pembentukan kebijakan yang inklusif.

Bagi masyarakat Indonesia yang religious, hal tersebut penting guna menjaga kerukunan dalam keragaman, mencegah polarisasi berbasis agama, dan memastikan setiap warga memiliki hak yang sama dalam beragama dan beribadah. Hal ini selaras dengan penelitian berbagai ilmuwan sosial seperti Robert Putnam (2000) dan David Campbell (2023) yang mengemukakan bahwa masyarakat yang memiliki keragaman agama dan etnis memerlukan kerjasama dan dialog yang lebih besar untuk menghindari konflik dan memperkuat ikatan sosial.

Dalam konteks Indonesia, dimana agama memegang peranan penting dalam kehidupan sosial, upaya-upaya ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik. Pengembangan toleransi, peningkatan pemahaman sosial, dan peningkatan kompetensi penyuluh agama adalah langkah-langkah penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Maka, ada ukuran-ukuran pembangunan yang mungkin bisa digunakan untuk mengukur ketercapaiannya. *Pertama*, Nilai Dimensi Kesetaraan dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama. peningkatan dari 75,32 (2022) menjadi 77,61 (2023) menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan dan toleransi agama. Ini relevan dengan jaminan hak beragama karena mencerminkan kondisi

sosial di mana semua agama diperlakukan dengan adil dan sama. peningkatan nilai ini mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan beragama di Indonesia. Menurut Habermas (2006), kesetaraan dalam praktik agama merupakan bagian penting dari integrasi sosial dalam masyarakat pluralis. Kesetaraan ini penting di Indonesia, di mana agama memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik.

Kedua, Persentase KUA yang Mengembangkan Early Warning Sistem (EWS). Meskipun datanya belum tersedia, pengembangan EWS oleh Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko konflik keagamaan sejak dini. Meskipun datanya masih belum tersedia, implementasi EWS oleh KUA merupakan langkah penting. EWS bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal konflik keagamaan, memungkinkan intervensi dini untuk mencegah eskalasi. Penelitian oleh Boulding dan Galtung (1980) menunjukkan bahwa deteksi dini dan mediasi konflik merupakan kunci untuk mencegah kekerasan dan memelihara perdamaian dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

Tabel 3.7 Indikator Pembangunan Jaminan Hak Beragama dan Advokasi Konflik Sosial Keagamaan

Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1) Nilai Dimensi Kesetaraan IKUB	75,32 (2022)	77,61 (2023)
2) Persentase KUA yang mengembangkan <i>Early Warning Sistem</i> (EWS)	0	tbd

Peran Lembaga Sosial Keagamaan dan Keagamaan

Lembaga sosial keagamaan dan lembaga keagamaan punya peranan signifikan. Apalagi di Indonesia, dengan keragaman agama yang besar, peran lembaga-lembaga ini bisa menjadi katalisator pembangunan berbasis agama. Mereka tidak hanya membantu dalam menjaga kesinambungan praktik keagamaan tetapi juga dalam menciptakan harmoni dan pemahaman antar komunitas beragam. Dengan mengajar dan menanamkan nilai-nilai agama yang moderat, lembaga-lembaga ini membantu dalam mengurangi ekstremisme dan meningkatkan toleransi.

Ada beberapa peran yang mereka mainkan selama ini. Pada aras pendidikan dan penyebaran ajaran agama, lembaga sosial keagamaan dan lembaga keagamaan berfungsi sebagai arena pembelajaran yang membantu masyarakat memahami dan mengamalkan keyakinan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga bisa menjadi mediator bagi negara untuk menterjemahkan nilai-nilai pembangunan yang tengah dirancang—misalnya seperti RPJPN dan RPJMN—di tengah masyarakat.

Selain itu, mereka juga aktif dalam memberikan bantuan sosial di kala krisis. Pada pengalaman Covid-19 maupun berbagai pengalaman bencana alam di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut aktif memberikan bantuan yang sifatnya sementara (*relief*), namun dapat meringankan penderitaan korban-korban. Misalnya saja, untuk menyebut beberapa, adalah pemberian makanan, layanan pendidikan sementara, pos Kesehatan, dapur umum, pakaian, dan keperluan-keperluan lain yang genting seperti posko ibu menyusui dan ibu hamil. Sifat mereka yang responsif terhadap bencana seperti ini yang kemudian menumbuhkan toleransi dan Kerjasama antarumat beragama.

Lalu, kontribusi mereka terhadap pembangunan sesungguhnya bisa diukur lewat beberapa indikator. Misal, mengacu pada tabel di bawah, peningkatan nilai IKUB dari 73,65 pada tahun 2022 menjadi 76,00 pada 2023 menandakan adanya kemajuan signifikan dalam kerjasama antar umat beragama. Ini bisa dilihat sebagai indikasi meningkatnya toleransi dan kolaborasi antar komunitas keagamaan. Penelitian oleh Allport dan Ross (1967) yang mengembangkan Skala Orientasi Agama menunjukkan bahwa individu dengan orientasi agama inklusif cenderung lebih toleran dan terbuka terhadap kerjasama lintas agama. Ini dapat diterapkan pada level lembaga, di mana lembaga dengan orientasi intrinsik kemungkinan besar lebih bersedia berkolaborasi dan bekerjasama untuk tujuan bersama.

Kemudian, meskipun data aktual belum tersedia, pentingnya memiliki lembaga keagamaan yang profesional tidak dapat diremehkan. Profesionalisme dalam konteks ini berarti memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola kegiatan keagamaan dan sosial secara efektif. Fowler (1981) dalam karyanya berjudul *Stages of Faith* menekankan pentingnya pemahaman dan interpretasi agama yang matang untuk membimbing umat. Lembaga keagamaan yang profesional akan lebih mampu menghadirkan pandangan dan ajaran yang lebih inklusif dan progresif.

Seperti halnya persentase lembaga keagamaan yang profesional, data untuk akreditasi masih belum tersedia. Namun, akreditasi lembaga keagamaan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas dan kredibilitas mereka. Proses akreditasi memastikan bahwa lembaga keagamaan mematuhi standar tertentu dalam penyampaian ajaran dan layanan mereka. Hal ini sejalan dengan studi Putnam (2000) berjudul *Bowling Alone*, yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang memiliki standar dan kredibilitas yang tinggi cenderung lebih dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai IKUB dan upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan akreditasi lembaga keagamaan mencerminkan tren positif dalam pengembangan harmoni sosial dan keagamaan. Ini sesuai dengan literatur yang menunjukkan bahwa lembaga agama yang kuat dan profesional berperan penting dalam mendorong kerjasama antar umat beragama, toleransi, dan pengembangan masyarakat yang lebih inklusif.

Tabel 3.8 Indikator Pembangunan Peran Lembaga Sosial Keagamaan dan Keagamaan

Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023
1) Nilai Dimensi Kerjasama IKUB	73,65(2022)	76,00 (2023)
2) Persentase lembaga keagamaan yang profesional (kompeten)	0	tbd
3) Persentase Lembaga agama/keagamaan yang terakreditasi (Baik/A)	0	tbd

Sarpras Pelayanan Kehidupan Keagamaan

Istilah sarana dan prasarana (sarpras) pelayanan kehidupan keagamaan mencakup semua

fasilitas dan infrastruktur yang mendukung praktik dan aktivitas keagamaan dalam masyarakat. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tempat ibadah, fasilitas pendidikan keagamaan, dan infrastruktur pendukung lainnya seperti ruang komunal untuk pertemuan dan studi keagamaan. Sarpras ini esensial dalam memfasilitasi praktik keagamaan yang nyaman dan aman. Bagi masyarakat Indonesia, yang mayoritas religius, keberadaan sarpras pelayanan kehidupan keagamaan relatif signifikan. Fasilitas keagamaan yang memadai mendukung ekspresi keagamaan yang lebih efektif dan inklusif, serta memperkuat jaringan sosial dalam komunitas. Ini juga membantu dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan pemahaman lintas agama, yang krusial di negara multikultural seperti Indonesia.

Maka, penting mengembangkan dan memelihara sarpras keagamaan di Indonesia. Mereka termasuk sebagai bagian dari infrastruktur keagamaan. Pada gilirannya, infrastruktur keagamaan yang memadai dan inklusif tidak hanya mendukung praktik keagamaan tetapi juga mempromosikan kesejahteraan sosial dan spiritual. Ini termasuk peningkatan aksesibilitas untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan anak-anak, serta memastikan bahwa fasilitas keagamaan aman dari bencana dan mendukung lingkungan yang bersih dan sehat. Peningkatan sarpras keagamaan adalah investasi sosial penting untuk masa depan masyarakat Indonesia yang harmonis dan inklusif.

Ada beberapa ukuran pembangunan yang bisa melihat keberhasilan infrastruktur keagamaan. *Pertama* adalah Indeks Layanan Keagamaan – Dimensi Sarpras. Meski saat ini masih belum diluncurkan (*to be determined*), mengukur sejauh mana fasilitas keagamaan tersedia dan memadai dalam melayani kebutuhan komunitas sudah menjadi kesadaran Kementerian Agama. Indeks ini penting karena sarana dan prasarana yang memadai secara langsung mempengaruhi kualitas pengalaman keagamaan individu. Menurut literatur oleh Glock dan Stark (1965) dalam "Religion and Society in Tension", infrastruktur keagamaan yang memadai berkontribusi pada kepuasan religius.

Kedua adalah Persentase Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar. Dengan hanya 8,78% rumah ibadah yang memenuhi standar (ramah disabilitas, aman dari bencana, nyaman untuk anak, lingkungan bersih dan sehat) pada tahun 2022-2023, terlihat jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas tempat ibadah. Ini berkaitan dengan konsep "spiritual security" yang dijelaskan oleh Christopher Baker (2009) dalam "Spiritual Capital and Moral Purpose", di mana akses ke ruang keagamaan yang aman dan nyaman merupakan bagian integral dari keamanan spiritual seseorang.

Tabel 3.9 Indikator Pembangunan Sarpras Pelayanan Kehidupan Keagamaan

Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1) Indeks Layanan Keagamaan – Dimensi Sarpras	0	tbd
2) Persentase Rumah Ibadah yang memenuhi standar (ramah: disabilitas, aman dari bencana, nyaman untuk anak, lingkungan bersih dan sehat)	8,78% (Rerata semua agama tahun 2022-2023)	tbd

Penguatan Peran Kantor Urusan Agama (KUA)

Permasalahan pelayanan keagamaan untuk pembangunan di Indonesia cukup kompleks. Salah satu fokus utama adalah revitalisasi kantor urusan agama dan penyuluh agama untuk memaksimalkan pembangunan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi-institusi ini dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan pelayanan keagamaan dan juga berkontribusi pada proses pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. *Pertama*, sejumlah masyarakat minoritas beragama di Indonesia masih mendapat perlakuan diskriminatif dalam pelayanan keagamaan dan administratif. Ini bisa mencakup hal-hal seperti akses yang tidak merata ke fasilitas keagamaan, hambatan dalam pembangunan tempat ibadah, atau diskriminasi dalam layanan administratif yang berkaitan dengan agama. Masalah ini telah dilaporkan oleh berbagai sumber (BBC 2023; Kompas 2023). *Kedua*, ada kritik yang menyatakan bahwa Kementerian Agama terlalu fokus pada masyarakat yang memeluk agama Islam dan cenderung lupa dengan penganut agama lain yang ada di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Melati (2019), ini bisa berarti bahwa kebutuhan dan hak-hak penganut agama lain mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam kebijakan dan praktik pelayanan keagamaan.

Berdasarkan data tahun 2021, Indeks Kepuasan Layanan KUA mencatat skor sebesar 78,90, yang merepresentasikan 97,4 persen dari target yang ditetapkan pada angka 81,00. Skor ini ditempatkan dalam klasifikasi yang dianggap memuaskan. Walaupun demikian, terdapat penurunan signifikan sebesar 17,05 poin atau 22,53 persen jika dibandingkan dengan hasil pada tahun 2020, yang mencapai 95,95 persen. Penting untuk dicatat bahwa evaluasi pada tahun 2020 kemungkinan besar tidak memberikan gambaran yang komprehensif karena situasi pandemi Covid-19 yang membatasi pelaksanaan survei hanya di wilayah Jawa. Namun, jika dinilai berdasarkan data tahun 2019, terjadi peningkatan indeks sebesar 5,07 persen pada tahun 2021. Survei yang dilakukan pada tahun 2021 mencakup 28 provinsi, namun beberapa provinsi, seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dikecualikan dari survei. Hal ini didasari oleh fakta bahwa proporsi KUA di wilayah tersebut dinilai minim, sehingga dalam pemilihan sampel dari 400 KUA, provinsi-provinsi tersebut tidak terwakili. Menilik ke depan, bila disandingkan dengan target 2024, masih terdapat kekurangan indeks sebesar 5,10 poin atau 6,07 persen.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama pada 2021, indeks pelayanan KUA terdiri dari sembilan dimensi esensial. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: sistematisasi layanan, prosedur operasional, struktur biaya, durasi penyelesaian, fasilitas dan infrastruktur, kriteria yang harus dipenuhi, klasifikasi pelayanan, kapabilitas pegawai, etika pelaksanaan, serta mekanisme pengaduan. Ilustrasi yang memperlihatkan penilaian tiap dimensi disajikan pada visualisasi yang ada di bawah ini.

Dalam analisis terhadap layanan KUA, disimpulkan bahwa seluruh dimensi yang dievaluasi menghasilkan skor melebihi 75. Namun, terdapat satu aspek yang menunjukkan performa yang lebih rendah, yakni dimensi sarana dan prasarana dengan skor 72,48. Disparitas yang cukup signifikan, sebesar -15, antara harapan dan realitas pada dimensi sarana dan prasarana mengindikasikan bahwa fasilitas yang disediakan oleh KUA belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, dimensi yang terkait dengan sistem, mekanisme, dan prosedur mendapatkan apresiasi tertinggi, menegaskan bahwa kerangka kerja pelayanan

pencatatan nikah telah diimplementasikan dengan efektif. Hasil survei juga menyoroti bahwa masih terdapat segmen masyarakat yang kurang familiar dengan peran dan fungsi KUA di luar tugas pencatatan nikah. Hal ini tercermin dari sebagian besar responden yang belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai portofolio kinerja KUA. Di era pandemi Covid-19, inovasi pendaftaran nikah secara daring tampaknya belum sepenuhnya dikenal luas, hanya dikenali oleh 46,7 persen dari total responden.

Selain itu, apa yang perlu diperhatikan pada pembangunan periode 2025-2029 adalah bimbingan perkawinan. Ia adalah sebuah proses konseling dan edukasi berdasarkan prinsip dan nilai agama tertentu yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah atau sudah menikah. Dalam konteks Indonesia, bimbingan ini menjadi sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama adalah tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Statistik Indonesia, kasus perceraian meningkat dari 447.743 kasus di 2021 menjadi 516.334 kasus pada 2022. Jelas ada peningkatan perceraian sebesar kira-kira 15 persen. Lebih jauh, mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21 persen dari total kasus perceraian yang terjadi. Kebanyakan alasan perceraian terjadi karena perselisihan dan pertengkaran (sekitar 285 ribu kasus lebih), lalu disusul oleh ekonomi (115 ribu kasus lebih). Ini berarti, pernikahan tidak dilandasi dengan pertimbangan yang matang.

Kedua, alasan lainnya mengapa perlu ada penguatan pendidikan perkawinan adalah mulai kurangnya aspek pendidikan keluarga di tengah keluarga muda. Ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab perceraian. Maka, bila hal ini dilakukan, dirasa dapat mengurangi tingkat perceraian. Selain itu, bimbingan ini juga dapat mendukung pembentukan keluarga-keluarga yang harmonis sebagai fondasi penting bagi masyarakat yang stabil dan Sejahtera. Tujuan bimbingan ini antara lain untuk membentuk keluarga maslahat dan sakinah (bagi Muslim), keluarga Kristiani (bagi Kristen), keluarga Katolik Bahagia (bagi Katolik), Keluarga Sukinah (bagi Hindu), dan keluarga Hitta Sukkhaya (bagi Buddha).

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sebagai salah satu rukun Islam kelima, haji menjadi cita-cita hampir semua umat Muslim di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hanya saja, ibadah ini menjadi yang paling sulit dilakukan ketimbang keempat rukun Islam lainnya. *Pertama*, sebagai orang Indonesia, membutuhkan biaya yang relatif besar untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci di Arab Saudi. Sebagai catatan, setidaknya dibutuhkan biaya hampir 100 juta rupiah untuk melaksanakan ibadah haji tanpa bantuan dana manfaat kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sampai 2023, jamaah haji yang mendaftar jalur reguler mendapatkan keuntungan dari dana sebesar 55,3 persen dari total biaya perjalanan ibadah haji (BiPIH) yang diperlukan.

Tantangan *kedua* adalah kuota haji yang terbatas. Mungkin saja, dari 240 jutaan Muslim di Indonesia banyak yang sebetulnya melakukan perjalanan haji dengan biaya sendiri. Hanya saja pemerintah Arab Saudi pada tahun 2023 hanya memberikan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221,000 jamaah haji, dengan rincian 203,320 untuk kuota haji reguler dan 17,680 untuk kuota haji khusus. Jumlah ini, bila dibandingkan dengan total seluruh umat Muslim di Indonesia, sungguh kecil. Kira-kira hanya 0,092 persen jumlah masyarakat Muslim yang bisa berangkat ke tanah suci. Maka tidak heran bila muncul persoalan waktu tunggu bertahun-tahun, terkhusus bagi mereka yang mendaftar haji reguler. Bila mendaftar haji pada tahun 2023, maka paling tidak dibutuhkan waktu 11 tahun sampai 47 tahun untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Itupun bila masih ada umur dalam masa menunggu.

Tantangan *ketiga* adalah pelaksanaan teknis ibadah haji yang dianggap belum maksimal. Beberapa tantangan itu misalnya berupa persoalan konsumsi, kurangnya jumlah petugas haji, persoalan penginapan, dan persoalan transportasi. Meski demikian, persoalan tidak selalu berasal dari pemerintah Indonesia. Kerap kali persoalan datang dari pihak pengelola haji Arab Saudi.

Persoalan di atas adalah beberapa tantangan yang perlu diselesaikan. Sebagai penyelenggara, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama tentu sudah banyak program yang mereka laksanakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pun dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mengembangkan dana mengendap jamaah haji agar ada perolehan manfaat yang bisa digunakan untuk membantu para Jemaah haji di Indonesia. Meski demikian, ada beberapa upaya yang bisa dimaksimalkan bersama-sama sebagai penyelenggara haji maupun lembaga yang berkaitan dengan urusan tersebut.

Mengenai hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) berupaya memastikan bahwa kerja-kerja Dirjen PHU dan BPKH sejalan dengan amanah pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ada salah satu Kegiatan Pembangunan (KP) yang berkaitan dengan haji dan umrah, yakni: “Transformasi layanan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, dan aman”. Ada tiga aspek yang akan diperhatikan untuk memastikan KP ini berjalan lancar, yakni aspek dukungan terhadap ibadah haji dan umrah, dukungan pelayanan ibadah haji dan umrah, serta terakhir pengawasan dan pengendalian pelaksanaan haji dan umrah.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH tahun anggaran 2021 dan 2022, ada beberapa catatan yang bisa disampaikan di sini. *Pertama* perlu diapresiasi bahwa pada tahun 2021 ke 2022, BPKH melaporkan bahwa saldo dana haji Indonesia mencapai Rp 166,01 triliun, meningkat 4,55% dibanding akhir 2021. Namun demikian, *kedua*, nilai manfaat dana haji pada akhir 2022 mencapai Rp10,08 triliun, turun 4 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 10,5 triliun. Kedua catatan, bila ditelisik lebih jauh, mengindikasikan bahwa performa BPKH belum begitu maksimal. Naiknya saldo dana haji pada tahun 2021 ke 2022 sangat berkaitan dengan jumlah jamaah haji yang diberangkatkan ketika masa Covid-19 yang jumlahnya lebih sedikit pada 2021. Namun demikian, idealnya justru perolehan dana manfaat bisa membesar karena adanya dana mengendap yang lebih banyak untuk dikelola di 2022. Tapi hal tersebut belum terjadi.

Catatan lain, kali ini untuk Dirjen PHU, selain yang telah dijelaskan di atas, adalah soal indeks layanan kepuasan haji. Selama ini, indeks pelayanan kepuasan haji cukup tinggi. Pada 2022 saja, misalnya, jumlahnya mencapai 90,45 persen. Ini merupakan catatan baik di satu sisi, tapi tantangan di sisi lain. Pasalnya, Kementerian Agama, lewat Dirjen PHU, memiliki tugas berat untuk terus menjaga indeks ini di angka tinggi. Setidak-tidaknya nilai kepuasan haji tidak turun dari tahun sebelumnya. Catatan lain, ternyata indeks ini mengukur pelayanan haji ketika para jamaah di Indonesia. Artinya, preseden-preseden yang terjadi di tempat pelaksanaan haji di Arab Saudi sana tidak terukur secara maksimal. Padahal, pelbagai persoalan haji dan umrah lebih banyak muncul di sana. Perlu terobosan penting untuk menjaga ritme kerja yang sudah dicapai dengan baik itu.

Maka, 10 inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama pada 2019 meningkatkan kualitas layanan haji patut diapresiasi. Adapun inovasi-inovasi itu adalah sebagai berikut: (1) penyediaan jalur fast track di seluruh embarkasi; (2) sistem sewa hotel penuh musim di Madinah sebanyak 76 persen; (3) penomoran tenda Arafah dan Mina berisi nomor tenda, nomor kloter, dan kapasitas tenda, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi jemaah; (4)

revitalisasi satuan tugas Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina); (5) penggunaan sistem laporan haji terpadu dalam laporan petugas kloter; (6) moderasi berhaji melalui penguatan manasik, dengan penambahan materi sejarah haji; (7) revitalisasi kantor daerah kerja baru; (8) integrasi rekam kesehatan jemaah; (9) zonasi wilayah akomodasi di Makkah; dan (10) pemasangan AC di tenda Arafah. Terkait dengan tidak terselenggaranya ibadah haji pada tahun 2021, Kementerian Agama melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung tingkat layanan ibadah Haji. Kementerian Agama melakukan refocusing dan realokasi disebabkan beberapa hal: (1) refocusing dan realokasi Kementerian Keuangan; (2) pelaksanaan 7 (tujuh) program prioritas kebijakan Kementerian Agama; (3) rehab kantor wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi; (4) kegiatan kemitraan; (5) kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah); (6) diseminasi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji; dan (7) renovasi tata ruang pelayanan haji. Peningkatan fasilitas untuk mendukung peningkatan layanan haji dilakukan karena beberapa hal: (1) dukungan operasional untuk asrama haji terdampak Covid-19; (2) perbaikan/renovasi tata ruang pelayanan haji; (3) peremajaan perangkat Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (4) pengadaan kendaraan operasional; (5) pengadaan peralatan dan mesin; dan (6) kegiatan kemitraan lainnya.

Mengacu pada Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Skor IKJHI 90,45 pada tahun 2022 menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi di kalangan jemaah haji Indonesia. Skor ini menggambarkan efektivitas penyelenggaraan haji, termasuk aspek logistik, akomodasi, dan fasilitas ibadah. Tingkat kepuasan yang tinggi ini penting karena berkontribusi pada pengalaman spiritual yang memuaskan bagi jemaah, seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Rinschede (1992) dalam "Geography of Religion".

Selain itu, Dirjen PHU juga sudah melakukan akreditasi lembaga penyelenggara haji khusus & umrah. Sejauh ini, sudah ada 2170 lembaga PPIU yang terakreditasi, atau sekitar 95 persen. Ini pun menunjukkan sebuah sistem yang telah ditingkatkan untuk memastikan standar tinggi dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Akreditasi ini penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan syariat. Seperti yang dijelaskan oleh King dan Sondhi (2017) dalam "Religious Tourism and Pilgrimage Management", manajemen yang baik pada lembaga penyelenggara ini meningkatkan pengalaman spiritual dan umum para jemaah.

Tabel 3.10 Indikator Pembangunan Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1) Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI)	90,45 (2022)	tbd
2) Pertumbuhan perolehan nilai manfaat dana haji	-3,12% (2022)	tbd
3) Lembaga penyelenggaraan haji khusus & umrah yang terakreditasi (baik/A) [%]	2170 lembaga PPIU [95%]	tbd

Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal adalah suatu sistem yang menjamin bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup proses produksi, bahan baku, dan cara pengolahan produk. Sertifikasi halal merupakan bagian penting dari jaminan ini, memberikan kepastian bahwa produk memenuhi standar halal. Untuk melihat hal ini, pada 2022, Indeks Kepuasan Terhadap Produk Halal mencatat skor sebesar 88,10 dan dikategorikan sebagai prestasi "sangat baik".

Dalam rangka upaya pengesahan produk sesuai dengan prinsip syariah, Kementerian Agama pada periode 2021 telah sukses mengeluarkan 16.297 sertifikat kehalalan. Sertifikat-sertifikat ini tidak hanya mencakup produk konsumsi seperti makanan dan minuman, namun juga meliputi hasil dari proses penyembelihan, komponen dasar makanan, aditif pangan, bahan pendukung produk konsumsi, serta produk farmasi, barang konsumsi harian, dan produk kecantikan. Proses penerbitan sertifikat tersebut dijalankan melalui berbagai program, antara lain: Program Mandiri, Program Sehati, Program Self Declare, dan Program Fasilitasi oleh entitas pemerintah atau lembaga terkait, yang rinciannya akan diuraikan lebih lanjut. Dengan 75,93 persen pemanfaatan layanan sertifikasi halal gratis pada tahun 2022, ini menunjukkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap produk halal. Layanan gratis ini mungkin memudahkan UMKM dan produsen kecil untuk mematuhi standar halal, sebagaimana dibahas oleh Wilson dan Liu (2011), yang menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk integritas pasar dan kepercayaan konsumen.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 57 Tahun 2020, BPIPH telah ditunjuk sebagai Entitas Pemerintah yang mengoperasikan berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Dalam konteks ini, terdapat sejumlah institusi perbankan yang diberikan mandat untuk mengurus dana sertifikasi halal, termasuk Bank BSI, Muamalat, dan BTN Syariah. Pada tahun 2021, telah diselenggarakan serangkaian pelatihan bagi pendamping dalam proses sertifikasi produk halal serta bagi penyelia halal. Adapun Kementerian Agama, selain menyelenggarakan pelatihan di tanah air, juga telah memfasilitasi pelatihan untuk penyelia halal dari warga negara Indonesia yang berada di Jerman. Dalam upaya memperkuat kerjasama jaminan produk halal, kolaborasi telah dijalin dengan sembilan kementerian/lembaga domestik serta dua negara mitra, yakni Chile dan Argentina. Terkait dengan standarisasi dalam bidang halal, beberapa instrumen telah dirumuskan, meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Penyelia Halal, SKKNI untuk Auditor Halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta enam panduan JPH.

Meski begitu, pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa halal masih terbilang belum baik. Angka 45,3 untuk pengetahuan terhadap produk dan jasa halal menunjukkan bahwa masih ada ruang yang cukup besar untuk peningkatan dalam edukasi dan kesadaran halal. Peningkatan kesadaran ini krusial, seperti yang dijelaskan oleh Alserhan (2010), yang menekankan perlunya konsumen Muslim memahami prinsip halal untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kepuasan yang tinggi terhadap layanan jaminan produk halal, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang halal di kalangan masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang religius dapat membuat pilihan yang sesuai dengan keyakinan mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.11 Indikator Pembangunan Jaminan Produk Halal

Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1) Indeks kepuasan layanan jaminan produk halal	88,10 (2022)	tbd
2) Persentase pemanfaatan layanan sertifikasi halal gratis	75,93 (2022)	tbd
3) Nilai (Tingkat) Pengetahuan terhadap Produk dan Jasa Halal (<i>well & sufficient</i>)	45,3 (2022)	tbd

Dana Sosial Keagamaan

Pada dasarnya, Indonesia adalah negara yang sangat religius dan memiliki sejarah panjang dalam melibatkan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam filantropi. Namun, menurut penelitian dan data terbaru, tampaknya terdapat tantangan dalam mengoptimalkan peran agama, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Menurut Charity Aid Foundation (CAF), masyarakat Indonesia merupakan yang paling dermawan di dunia selama satu dekade terakhir, namun terdapat jarak yang signifikan antara potensi dan realisasi dana filantropi keagamaan. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa potensi dana filantropi keagamaan, dalam hal ini Islam, mencapai 327 trilyun per tahun, namun realisasinya hanya 22,4 trilyun per tahun (Kemenag 2023). Dengan kata lain, ada sejumlah besar dana filantropi yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dana sosial keagamaan, seperti zakat, infaq, derma, dan lain-lain, memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, menurut Kompas (2022), dana ini belum dioptimalkan untuk pembangunan. Ini mungkin karena sejumlah alasan, termasuk kurangnya koordinasi dan regulasi, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana dana ini dapat digunakan untuk pembangunan, dan mungkin juga karena ketidakpercayaan atau ketidakpuasan terhadap lembaga yang mengelola dana ini.

Selain itu, perempuan memainkan peranan penting dalam aktivitas filantropi keagamaan. Penelitian oleh Fauzia dan Sakai (2022), serta oleh STF UIN Jakarta (2021), menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berkontribusi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana filantropi, tetapi juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, peran dan kontribusi perempuan dalam filantropi keagamaan dan pembangunan belum begitu maksimal.

Dalam kerangka RPJMN 2020-2024, pengoptimalan ekonomi dan aset keagamaan disebutkan sebagai salah satu dari lima inisiatif kunci dalam memajukan moderasi beragama. Sejumlah inisiatif strategis nasional, seperti revitalisasi dana sosial berbasis keagamaan dan pemajuan lembaga ekonomi komunitas, telah dirancang. Pemajuan sektor ekonomi dan kesejahteraan umat merupakan tanggung jawab yang dibagi antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat, termasuk institusi keagamaan. Lembaga keagamaan di tanah air, selama

ini, tidak hanya berfungsi sebagai pilar pendidikan dan pembinaan rohani, namun juga sebagai entitas yang mengumpulkan dana sosial keagamaan, mendukung pendidikan spiritual serta memperkokoh ekonomi masyarakat. Dalam konteks revitalisasi dana sosial keagamaan, Indonesia memegang peran strategis, terbukti dengan kapasitas besar dalam zakat dan potensi tanah wakaf.

Pertama-tama, ada tren positif dalam pertumbuhan dana zakat, dimana dalam kurun waktu empat tahun terjadi peningkatan yang signifikan lebih dari dua kali lipat. Proyeksi menunjukkan bahwa tren ini kemungkinan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Kedua, tercatat bahwa wakaf tanah oleh masyarakat mengalami pertumbuhan, dengan total 436.302 lokasi pada tahun 2019. Namun, hanya 291.339 lokasi yang telah mendapatkan sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf menghadapi sejumlah kendala, meliputi: lamanya proses sertifikasi, keterbatasan anggaran sertifikasi, serta pembatasan wewenang Kementerian Agama yang hanya mencakup penerbitan Akta Ikrar Wakaf sementara sertifikasi berada di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional.

Sebagai respons atas hal ini, Direktorat Zakat dan Wakaf, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, memfokuskan upaya untuk meningkatkan potensi sumber dana keagamaan lain seperti infaq dan sedekah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik memperkuat pengelolaan dana ekonomi keagamaan melalui skema seperti kolekte dan lain-lain, serta mengoptimalkan Badan Amal Kasih Katolik. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan Hindu masing-masing melakukan upaya serupa dengan lembaga yang berada di bawah naungannya untuk mengoptimalkan sumber dana keagamaan.

Dalam rangka evaluasi kinerja kebijakan ini, Kementerian Agama menggunakan indikator kinerja berupa persentase alokasi dana sosial keagamaan untuk mendukung program pendidikan dan keagamaan. Pada 2021, pencapaian tersebut adalah sebesar 51,25%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 51,00%, dengan penilaian kategori sangat baik. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam kerangka pembahasan alokasi dana keagamaan, indikator kunci yang diambil meliputi proporsi dana yang dialokasikan bagi layanan keagamaan terhadap total dana sosial yang terakumulasi di lembaga-lembaga keagamaan. Sumber data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari lembaga sosial keagamaan Islam, yakni Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) dan dari tradisi Katolik melalui Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT). Untuk lembaga keagamaan lain yang menjadi penerima sumbangan, penetapannya telah diresmikan melalui surat keputusan dari direktur jenderal.

Walaupun demikian, proses akumulasi dan pengelolaan dana untuk lembaga-lembaga tersebut masih berada pada tahap inisiasi. Kementerian Agama, selain mengatur zakat, juga berperan aktif dalam pengelolaan wakaf. Mereka telah meluncurkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai platform utama untuk memonitor dan mengelola partisipasi masyarakat dalam berwakaf, khususnya dalam kategori wakaf tanah dan wakaf uang. Menurut data yang tersedia pada tahun 2021 di portal <http://siwak.kemenag.go.id/>, terdapat tren positif dalam partisipasi umat Islam dalam berwakaf pada bidang keagamaan dan edukasi. Sebagai ilustrasi, terdapat kenaikan alokasi tanah wakaf untuk masjid sebesar 37% atau setara dengan 9.079 lokasi, untuk mushola sebesar 24% atau 5.826 lokasi, untuk institusi pendidikan mencapai 12% atau sebanyak 2.809 lokasi, dan untuk pondok pesantren sebanyak 8% atau 1.994 lokasi.

Namun ke depannya, ada ukuran-ukuran lain yang perlu dikembangkan, terutama untuk membuat pengembangan dana sosial keagamaan sesuai dengan tujuan pembangunan. Mengacu

tabel di bawah, ada potensi besar dari dana sosial keagamaan di Indonesia yang nilainya mencapai 327 triliun Rupiah pada 2022. Namun, realisasi penyaluran ZIS untuk program ekonomi hanya sebesar 0,15% dari potensi dan 2,18% dari pengumpulan ZIS. Hal ini menunjukkan adanya ruang yang besar untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan penyaluran ZIS dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Menurut studi BPS dan Baznas (2019), efektivitas penyaluran zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Dengan hanya 0,15% dari potensi dan 2,18% dari pengumpulan ZIS yang dialokasikan untuk program ekonomi, terlihat bahwa penggunaan dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan belum optimal. Padahal, studi oleh Hafidhuddin dan Tahir (2012) menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana sosial keagamaan yang efisien dapat mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian.

Selain itu, data mengenai jumlah lembaga filantropi keagamaan yang terakreditasi juga masih belum tersedia. Namun, keberadaan lembaga filantropi keagamaan yang terakreditasi penting untuk memastikan pengelolaan dana sosial keagamaan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Retsikas (2012) dalam studinya tentang filantropi Islam di Indonesia menekankan pentingnya akreditasi dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas penyaluran dana. Ada keyakinan bahwa akreditasi lembaga filantropi keagamaan, adalah kunci dalam memaksimalkan potensi dana ini untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Tabel 3.12 Indikator Pembangunan Dana Sosial Keagamaan

Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023
1) Persentase realisasi penyaluran terhadap potensi dana sosial keagamaan pada pengentasan kemiskinan	potensi: 327,000,000,000,000 pengumpulan ZIS: 22,475,655,478,672 penyaluran ZIS 2022: 20,787,626,935,981 penyaluran untuk program ekonomi: 492,147,882,599	tbd
	realisasi potensi ZIS terhadap penyaluran di bidang ekonomi: 0,15% realisasi penyaluran ZIS di bidang ekonomi: 2,18%	
2) Lembaga Filantropi Keagamaan yang terakreditasi (baik/A)	tbd	tbd

3.5.2 Analisis Situasi Bidang Budaya

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2023, Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam pembangunan di bidang agama. Apalagi di masa-masa itu muncul berbagai persoalan global yang tidak terduga, seperti Pandemi Covid-19, Perang Rusia-Ukraina, dan krisis ekonomi global. Bagian ini ingin mengevaluasi capaian yang telah dicapai dalam sektor keagamaan di masa-masa tersebut, terutama dengan memfokuskan pada inisiatif dan kebijakan yang telah ditentukan dalam RPJMN 2019-2024. Ada delapan capaian pembangunan yang dievaluasi, dan ini akan menjadi

landasan bagi penetapan kegiatan-kegiatan pembangunan pada RPJMN 2024-2029. Adapun isu-isu yang akan dievaluasi adalah sebagai berikut:

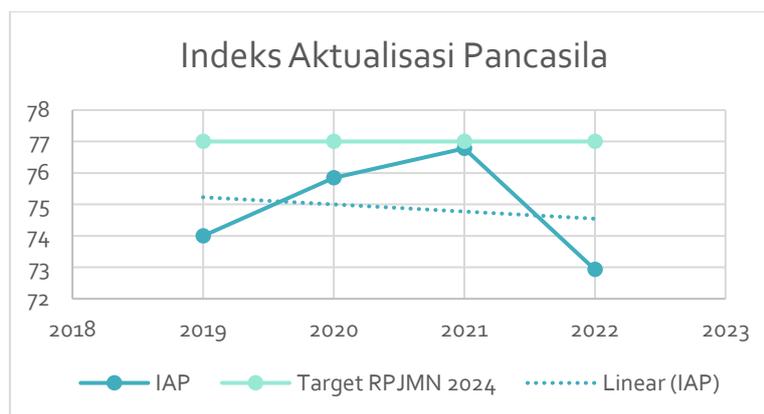
1. Pancasila dan Karakter Jati Diri Bangsa
2. Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya
3. Jaminan Hak Berkebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
4. Pengembangan Budaya Literasi
5. Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia
6. Pengembangan dan Pemanfaatan Khazanah Budaya Bangsa
7. Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah

Pancasila dan Karakter Jati Diri Bangsa

Ukuran keberhasilan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dituangkan dalam sebuah Indeks Aktualisasi Pancasila. Penghitungan IAP disusun atas lima dimensi dan 23 indikator, setiap dimensinya mencerminkan capaian pengamalan nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila berdasarkan kajian konsepsi dan rujukan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra BPIP 2020-2024.

Secara umum berdasarkan data yang disajikan, tren nilai IAP dari tahun ketahun sejak 2019 hingga 2022 cenderung menurun. Memang terjadi peningkatan yang cukup baik dari tahun 2019 hingga 2021 yang bahkan hampir menyentuh target nilai IAP ditahun tersebut, namun anjlok cukup dalam sehingga menggerus nilai IAP secara keseluruhan. Berdasarkan Gambar.1 terjadi penurunan nilai IAP pada tahun 2022 sebesar 72,93 sebanyak 3,85 poin dari tahun 2021 yaitu 76,78. Kondisi ini menunjukkan penurunan pengamalan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat dikarenakan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran COVID-19, sehingga pergerakan masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terhambat.

Gambar 3. 17 Indeks Aktualisasi Pancasila

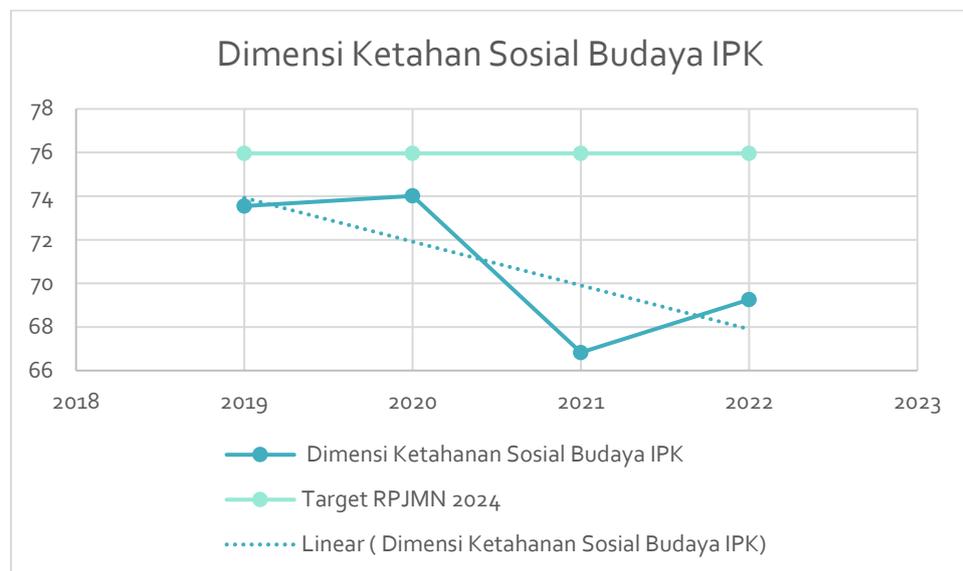


Indikator lain yang mendukung pembinaan ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa dapat dilihat melalui nilai dimensi warisan budaya IPK. Ketahanan Sosial Budaya dalam konteks ini mencerminkan kemampuan suatu budaya untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas serta praktik budayanya, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Ketahanan Sosial Budaya Ketahanan Sosial Budaya dalam konteks

penyusunan IPK didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan Gambar.2 Nilai Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK pada tahun 2019 hingga 2022 menggambarkan fluktuasi yang menarik. Pada tahun 2019, Nilai Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK mencapai 73,55, mendekati target RPJMN 2024 sebesar 75,96. Namun, pada tahun 2020, Nilai Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK sedikit meningkat menjadi 74,01, tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Kemudian, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang signifikan dalam Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, dengan Nilai Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK turun menjadi 66,83, jauh di bawah target yang diharapkan. Tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan lagi, mencapai 69,25, tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75,96. Kecenderungan pelemahan ketahanan budaya dewasa ini dicerminkan dalam perilaku intoleran, khususnya dalam hubungan antar kepercayaan.

Gambar 3. 18 Dimensi Ketahanan Sosial Budaya



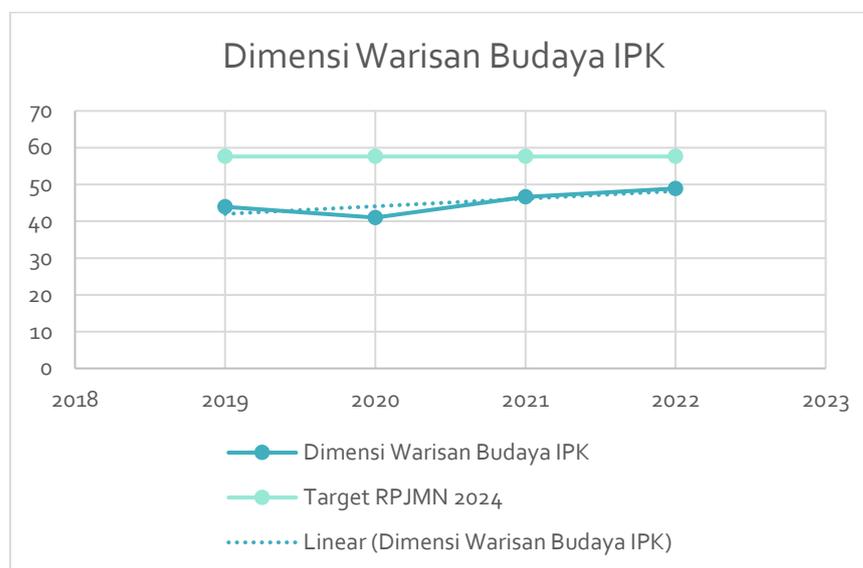
Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya

Pelindungan dan pelestarian warisan budaya mengacu pada upaya untuk menjaga, merawat, dan memelihara warisan budaya suatu bangsa. Warisan budaya ini bisa berupa artefak fisik seperti bangunan bersejarah, situs arkeologi, karya seni, serta tradisi lisan, musik, tari, dan adat-istiadat. Upaya ini melibatkan perlindungan terhadap kerusakan, degradasi, atau hilangnya warisan tersebut, baik oleh faktor alami maupun intervensi manusia.

Ukuran pembangunan mengenai hal ini tertuang dalam dimensi warisan budaya yang ada dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan. Data mengenai Dimensi Warisan Budaya IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan tren yang menarik dalam upaya pelestarian warisan budaya. Pada tahun 2019, Dimensi Warisan Budaya mencapai 43,89, masih di bawah target RPJMN 2024 sebesar 57,6. Namun, pada tahun 2020, angka ini turun menjadi 41, menunjukkan tantangan dalam pelestarian warisan budaya. Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 46,63, dan terus meningkat pada tahun 2022 dengan mencapai 48,92, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan. Trend keseluruhan dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami kenaikan meskipun perlu upaya lebih lanjut

untuk mencapai target pelestarian warisan budaya yang telah ditetapkan. Dimensi Warisan Budaya dalam konteks ini mencerminkan upaya dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, dalam melestarikan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

Gambar 3. 19 Dimensi Warisan Budaya IPK



Indonesia, yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, memiliki warisan budaya yang luas dan beragam. Pelindungan dan pelestarian warisan dapat memperkuat identitas nasional. Sebab, warisan budaya merupakan bagian penting dari identitas nasional. Mempelajari dan melestarikan warisan budaya membantu warga Indonesia memahami dan menghargai sejarah dan keunikan budaya mereka sendiri. Selain itu, pendidikan tentang warisan budaya meningkatkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa. Ini penting untuk membentuk rasa hormat dan kebanggaan terhadap warisan nasional. Kemudian, warisan budaya yang terpelihara dengan baik dapat menjadi daya tarik pariwisata yang signifikan, mendukung ekonomi lokal dan nasional.

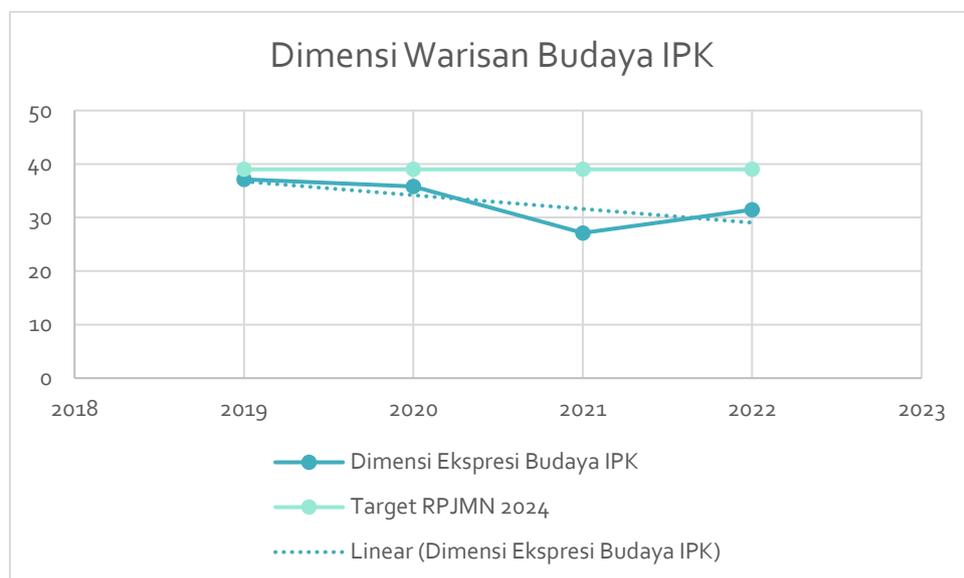
Jaminan Hak Berkebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Dalam usaha memajukan kebudayaan nasional, negara harus menjamin kebebasan masyarakat dalam lingkup kebudayaan. Ada tiga hal pokok yang mesti dijamin dari kebebasan masyarakat yaitu bebas dari diskriminasi sosial yang menyangkut aspek budaya, bebas dari kriminalisasi pengetahuan dan ekspresi budaya yang sejatinya melanggar Hak Asasi Manusia, serta bebas untuk menghasilkan ekspresi budaya sejauh tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Wujud konkret dari ketiganya adalah kebebasan untuk mencipta, memamerkan, berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam urusan ekspresi budaya. Kebebasan ini hanya dapat terjamin apabila negara menjunjung tinggi hak berkebudayaan rakyat Indonesia.

Salah satu ukuran pembangunan di bidang tersebut adalah Dimensi Ekspresi Budaya dalam IPK. Dari tahun 2019 hingga 2022, data tersebut mencerminkan tantangan dalam upaya mendukung proses penciptaan karya budaya oleh masyarakat. Pada tahun 2019, Dimensi Ekspresi Budaya mencapai 37,14, mendekati target RPJMN 2024 sebesar 39,01. Namun, pada tahun 2020, angka ini turun menjadi 35,82, dan tahun 2021 mengalami penurunan signifikan menjadi 27,13, jauh di bawah target yang ditetapkan. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun

2022 dengan mencapai 31,48, tetap belum mencapai target yang diharapkan.

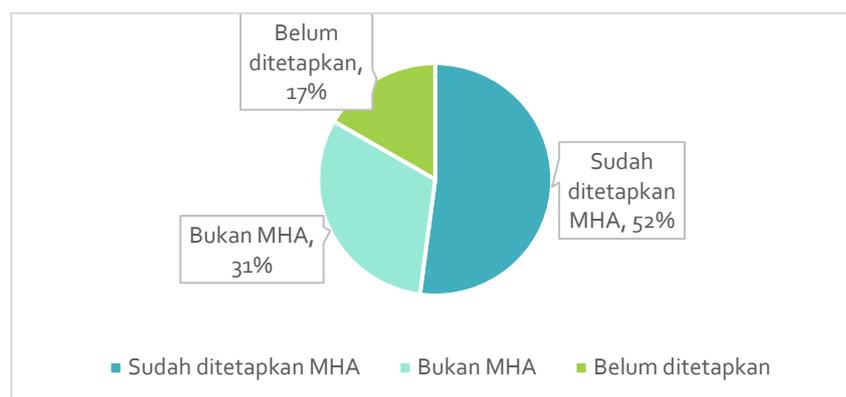
Gambar 3. 20 Dimensi Ekspresi Budaya IPK



Selain Dimensi Ekspresi Budaya IPK terdapat juga indikator lain terkait ketahanan budaya yaitu Masyarakat Hukum Adat. Seperti yang kita ketahui berdasarkan UU No.1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Masyarakat Hukum adat adalah Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data jumlah kelompok Masyarakat Hukum Adat berdasarkan data yang disajikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 22 MHA, tahun 2021 sebanyak 24 MHA, dan tahun 2022 sebanyak 25 MHA. Data ini merupakan MHA yang sudah ditetapkan oleh negara, sedangkan seiring berjalannya proses terdapat komunitas yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai MHA, yang tertuang dalam gambar berikut :

Gambar 3. 21 Jumlah Masyarakat Hukum Adat (hingga 2023)



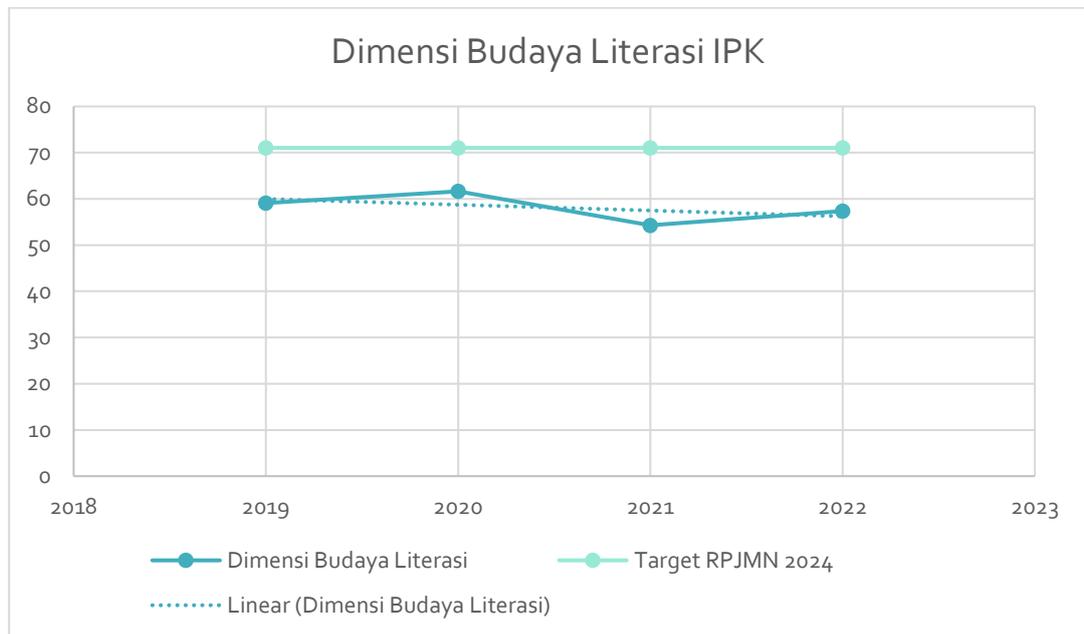
Hingga tahun 2023 sudah terdapat 25 komunitas yang ditetapkan sebagai MHA atau sebesar 52%, 8 komunitas terdaftar belum ditetapkan dengan prosentase sebesar 17%, dan sebanyak 15 komunitas tidak ditetapkan sebagai MHA atau sebanyak 31%.

Pengembangan Budaya Literasi

Pengembangan budaya literasi merujuk pada proses meningkatkan kapasitas dan minat masyarakat dalam membaca, menulis, dan memahami informasi. Ini melibatkan peningkatan akses terhadap bahan bacaan, pendidikan literasi, dan penanaman kebiasaan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut UNESCO, literasi tidak hanya melibatkan kemampuan membaca dan menulis tetapi juga kemampuan untuk menggunakan bahasa, angka, dan simbol-simbol lain dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan budaya literasi penting karena berkontribusi pada pembangunan individu dan masyarakat, meningkatkan kemampuan kritis dan analitis, serta memperkuat demokrasi dan partisipasi sosial.

Dimensi Budaya Literasi dan target RPJMN 2024 dari tahun 2019 hingga 2022 menggambarkan tantangan dalam pemberdayaan kecakapan masyarakat dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan. Pada tahun 2019, Dimensi Budaya Literasi mencapai 59,11, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 71,04. Namun, tahun 2020 menunjukkan peningkatan menjadi 61,63, meskipun masih belum mencapai target. Pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 54,29, yang menjadi tantangan dalam pemberdayaan literasi budaya. Tahun 2022 menunjukkan sedikit pemulihan dengan mencapai 57,4, tetapi tetap di bawah target yang diharapkan. Data ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam meningkatkan literasi budaya masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Gambar 3. 22 Dimensi Budaya Literasi IPK



Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia

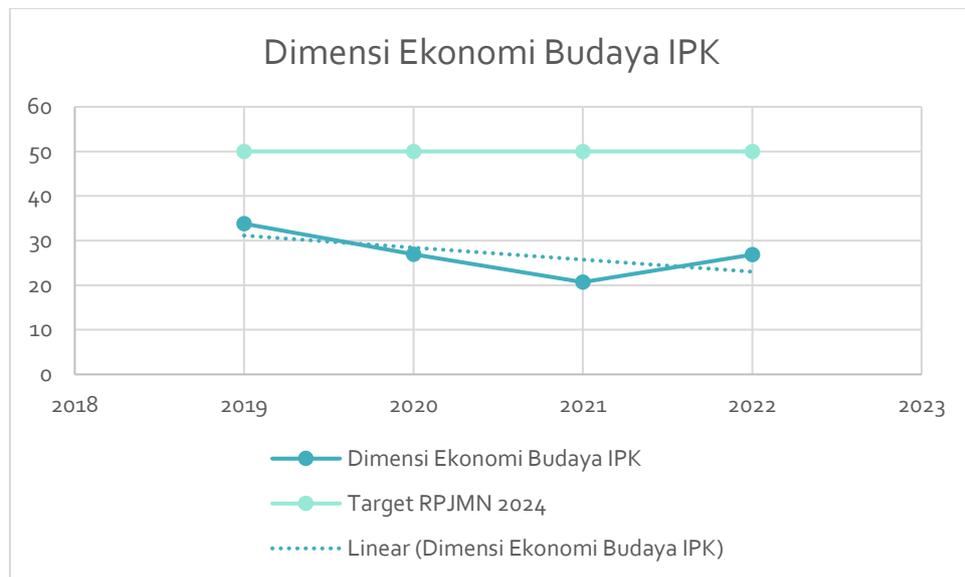
Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan proses yang bertujuan untuk memelihara, menumbuhkan, dan meningkatkan kualitas serta fungsi bahasa dan sastra Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks akademik, Bloom (1956) dalam "Taxonomy of Educational Objectives" menekankan pentingnya pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan bahasa, yang dapat diterapkan dalam pengembangan Bahasa Indonesia. Selain itu, teori-teori sastra kontemporer menyatakan pentingnya mengakui dan merayakan keberagaman dalam sastra, yang relevan dengan upaya pengembangan Sastra Indonesia.

Lalu, lebih jauh, menurut Krashen (1982) dalam "Principles and Practice in Second Language Acquisition", penguasaan bahasa sangat dipengaruhi oleh paparan dan penggunaan bahasa tersebut dalam berbagai konteks. Ini sesuai dengan tujuan meningkatkan Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang mencakup berbagai strategi untuk memperluas penggunaan dan pemahaman Bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Adapun skor Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2022 sebesar 81,02. Indonesia menargetkan skor 85,05 di akhir tahun 2029.

Pengembangan dan Pemanfaatan Khazanah Budaya Bangsa

Pengembangan dan Pemanfaatan Khazanah Budaya Bangsa mengacu pada proses identifikasi, pelestarian, dan promosi warisan budaya suatu bangsa. Ini termasuk berbagai aspek seperti bahasa, seni, tradisi, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional. Dalam konteks literatur akademis, seperti yang dijelaskan oleh UNESCO, pengembangan khazanah budaya tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tapi juga dengan adaptasi kontemporer dan transmisi warisan budaya kepada generasi yang lebih muda. Pemanfaatan khazanah budaya, seperti yang dijelaskan oleh Smith (2006) dalam "Uses of Heritage", mencakup penggunaan warisan budaya untuk pendidikan, pengembangan masyarakat, dan sebagai sumber inspirasi kreatif.

Gambar 3. 23 Dimensi Ekonomi Budaya



Salah satu ukuran untuk hal ini adalah dimensi Ekonomi Budaya dari IPK. Dari tahun 2019 hingga 2022, terlihat ada tantangan yang dihadapi dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis budaya. Pada tahun 2019, Dimensi Ekonomi Budaya mencapai 33,79, masih di bawah target RPJMN 2024 sebesar 50. Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 26,96, mencerminkan dampak negatif dari situasi tertentu. Pada tahun 2021, angka ini menurun lebih lanjut menjadi 20,69, menandakan tantangan ekonomi budaya yang lebih mendalam. Namun, tahun 2022 menunjukkan sedikit pemulihan dengan mencapai 26,88, meskipun masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Data ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih besar dalam memperkuat sektor ekonomi budaya guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah

Pengembangan budaya bahari merujuk pada upaya memperkuat pengenalan dan penghayatan terhadap kekayaan budaya yang berkaitan dengan laut. Ini mencakup pelestarian dan promosi praktik budaya, kepercayaan, dan sistem sosial kelautan yang ada di berbagai komunitas pesisir dan kepulauan. Sementara itu, revitalisasi jalur rempah berkaitan dengan upaya menghidupkan kembali jalur perdagangan sejarah yang pernah digunakan untuk perdagangan rempah-rempah. Ini melibatkan pengembangan kawasan pesisir dengan nilai sejarah tinggi dan pelestarian Cagar Budaya, ODCB (Objek Daya Tarik Budaya), dan OPK (Objek Peninggalan Kebudayaan).

Dalam konteks Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan sejarah maritim yang kaya, pengembangan budaya bahari dan revitalisasi Jalur Rempah menawarkan peluang untuk menguatkan identitas nasional, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan maritim dan kebudayaan bahari.

3.6 Isu Strategis

3.6.1 Urgensi Multiliterasi Budaya Majemuk

Multiliterasi menjadi kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Di tengah gempuran informasi yang begitu masif, kemampuan untuk bisa paham berbagai hal menjadi keniscayaan. Multiliterasi sendiri adalah suatu pendekatan dalam pendidikan dan komunikasi yang mengakui keberagaman cara berkomunikasi dan menganalisis informasi. Konsep ini berfokus pada penggunaan berbagai jenis literasi dalam masyarakat yang semakin global dan digital. Dalam konteks keagamaan, atau multiliterasi keagamaan adalah sebuah kemampuan untuk memahami dan menghargai berbagai tradisi agama dan keyakinan, merupakan suatu urgensi dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman agama dan budaya yang sangat luas. Meskipun Indeks Kerukunan Umat Beragama telah mendekati target yang ditentukan dalam RPJMN 2019-2024 (69,7 dari 75,8) (Kemenag 2022), masih ada berbagai tantangan yang perlu ditangani.

Negeri ini dirasa masih kekurangan dialog antar komunitas agama dan budaya lokal yang melibatkan generasi muda (PPIM 2020). Ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakharmonisan antara berbagai kelompok agama dan budaya. Generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi dalam masyarakat, jadi penting untuk melibatkan mereka dalam dialog dan diskusi antaragama dan budaya.

Kemah kepemudaan telah terbukti efektif dalam meningkatkan multiliterasi keagamaan dan mengurangi kecurigaan dan intoleransi (Garadian 2017; Fatah dkk. 2023). Program-program seperti ini, yang mencakup diskusi, pertukaran ide, dan belajar bersama, dapat membantu membangun pemahaman dan menghargai perbedaan, yang penting untuk kerukunan sosial.

Meski demikian, masih ada masalah dalam implementasi dan efektivitas beberapa inisiatif yang ditujukan untuk mempromosikan kerukunan antarumat beragama. Misalnya, 331 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah diinisiasi oleh masyarakat sipil dan difasilitasi oleh pemerintah dianggap belum maksimal dalam menjaga kerukunan umat beragama (Pusad Paramadina 2021). Ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan dalam cara forum-forum ini dioperasikan dan melibatkan berbagai pihak, serta perlu ada pemantauan dan evaluasi yang lebih baik tentang efektivitas dan dampaknya.

Secara keseluruhan, penting untuk memahami bahwa multiliterasi keagamaan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang sikap dan perilaku. Ini melibatkan membangun empati, menghargai perbedaan, dan belajar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam secara damai dan harmonis. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan holistik diperlukan dalam mempromosikan multiliterasi keagamaan.

3.6.2 Budaya Literasi di Era Transisi

Integrasi teknologi seperti media sosial dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam praktik agama telah menghasilkan berbagai persoalan menarik dan tantangan unik. Pada satu sisi, AI telah memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi dan bimbingan keagamaan. Misalnya, robot dengan AI telah mulai menggantikan posisi pemuka agama dalam memberi bimbingan kepada masyarakat. AI berbasis pengolahan bahasa seperti ChatGPT bahkan diketahui mampu menjawab persoalan-persoalan keagamaan dengan pendekatan yang lebih 'moderat' dan bertanggungjawab dari beberapa pemuka agama (World Religion News 2021).

Namun, kemajuan teknologi ini juga telah mempengaruhi bagaimana kita memahami dan melaksanakan agama. Misalnya, pergeseran ritual-ritual keagamaan yang difasilitasi AI telah memungkinkan kemunculan berbagai kelompok heterodoks (Geraci 2008). Praktik seperti ini dapat menantang norma dan tradisi yang ada, dan mungkin memicu kontroversi dan perdebatan

di kalangan pemeluk agama.

Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi telah mengganggu struktur otoritas keagamaan yang ada (Saat & Burhani 2020; Turner & Nasir 2016). Sebelumnya, pengetahuan dan interpretasi agama seringkali dikendalikan oleh sekelompok kecil pemuka agama. Namun, sekarang informasi dan penafsiran agama dapat dengan mudah didistribusikan dan diakses melalui media sosial dan platform digital lainnya. Ini dapat mengurangi kontrol pemuka agama tradisional atas pengetahuan dan praktik agama, dan membuka ruang bagi interpretasi dan pandangan yang lebih beragam atau bahkan bertentangan.

3.6.3 Media Sosial, Kecerdasan Buatan (AI), dan Disrupsi Praktik Beragama

Integrasi teknologi seperti media sosial dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam praktik agama telah menghasilkan berbagai persoalan menarik dan tantangan unik. Pada satu sisi, AI telah memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi dan bimbingan keagamaan. Misalnya, robot dengan AI telah mulai menggantikan posisi pemuka agama dalam memberi bimbingan kepada masyarakat. AI berbasis pengolahan bahasa seperti ChatGPT bahkan diketahui mampu menjawab persoalan-persoalan keagamaan dengan pendekatan yang lebih 'moderat' dan bertanggungjawab dari beberapa pemuka agama (World Religion News 2021).

Namun, kemajuan teknologi ini juga telah mempengaruhi bagaimana kita memahami dan melaksanakan agama. Misalnya, pergeseran ritual-ritual keagamaan yang difasilitasi AI telah memungkinkan kemunculan berbagai kelompok heterodoks (Geraci 2008). Praktik seperti ini dapat menantang norma dan tradisi yang ada, dan mungkin memicu kontroversi dan perdebatan di kalangan pemeluk agama.

Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi telah mengganggu struktur otoritas keagamaan yang ada (Saat & Burhani 2020; Turner & Nasir 2016). Sebelumnya, pengetahuan dan interpretasi agama seringkali dikendalikan oleh sekelompok kecil pemuka agama. Namun, sekarang informasi dan penafsiran agama dapat dengan mudah didistribusikan dan diakses melalui media sosial dan platform digital lainnya. Ini dapat mengurangi kontrol pemuka agama tradisional atas pengetahuan dan praktik agama, dan membuka ruang bagi interpretasi dan pandangan yang lebih beragam atau bahkan bertentangan.

3.7 Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029

3.7.1 Game Changer

Game-changer adalah perubahan fundamental yang mengubah aturan permainan di sebuah bidang. Dalam sebuah game-changer yang berubah bukan hanya hasil dari sebuah permainan, melainkan cara permainan itu dimainkan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, utamanya dalam RPJPN 2025-2045, juga RPJMN 2025-2029, konsep game-changer digunakan sebagai bentuk upaya transformatif super prioritas untuk transformasi Indonesia. Dalam kaitan pembangunan bidang agama dan kebudayaan, game-changer yang diusung adalah penguatan karakter dan jati diri bangsa, sebagai bagian dari ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber lima nilai utama yang dijadikan fokus pengembangan karakter dan jati diri bangsa, sebagaimana tertuang dalam Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Adapun nilai-nilai tersebut adalah nilai religius, nilai nasionalisme, nilai integritas, nilai kemandirian, nilai gotong royong. Nilai religius menggambarkan sikap toleransi dan harmoni antaragama. Nasionalisme mencerminkan rasa cinta tanah air dan apresiasi budaya. Integritas didefinisikan sebagai perilaku yang dapat

dipercaya dan bertanggung jawab. Kemandirian terlihat dalam sikap mandiri dan proaktif dalam mewujudkan cita-cita. Sedangkan gotong royong tercermin dalam kerjasama dan bantuan kepada sesama untuk mencapai tujuan bersama. Kesemua nilai ini saling terkait dan memperkuat pembentukan identitas nasional yang inklusif dan harmonis.

Bila dijabarkan lebih detil, *Pertama*, nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

Kedua, nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

Ketiga, nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan.

Keempat, nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Karakter seperti ini akan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang mandiri, memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, tantangan global yang menuntut seseorang beradaptasi akan terjawab oleh masyarakat Indonesia.

Kelima, *gotong royong*, terwujud dalam menghormati kerjasama dan kesetiakawanan untuk menyelesaikan masalah bersama. Ini juga tentang membangun hubungan dan pertemanan serta siap sedia memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selain itu, prinsip ini dibangun atas tindakan saling menghormati, semangat kolaboratif, dan kesetiakawanan dalam mengatasi masalah secara kolektif. Harapan dari nilai ini adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang dapat menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, kemampuan untuk bekerjasama, bersikap inklusif, berkomitmen terhadap keputusan yang dibuat bersama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, saling membantu, empati, solidaritas, serta menolak diskriminasi dan kekerasan, dan memiliki sikap sukarela.

Kemudian, bila diterjemahkan sebagai sebuah kerangka pikir, lima karakter tadi kemudian diturunkan ke dalam delapan Kegiatan Pembangunan (KP). Kelima karakter tersebut diharapkan dapat memperkuat peran agama dan budaya dalam agenda-agenda pembangunan. Lalu pada gilirannya dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, harmonis,

dan berdaya rekat sosial dalam kebhinekaan. Selain itu, ada proyek-proyek pembangunan (Pro-P) utama (*quick wins*) yang akan mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang ada. Adapun Kementerian/lembaga (K/L) pelaksananya adalah Kemendikbudristek, Kemenag, BPIP, Kemendagri, Perpusnas, KKP, Kemenko Marves, KemenPara, KPPPA, Lemhanas, TNI, Polri, dan KemenpanRB.



Gambar 2.9. Kerangka Pikir Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
Sumber: Bappenas (diolah)

Adapun KP yang menjadi prioritas dalam tahapan pembangunan landasan transformasi adalah sebagai berikut:

1. *Penguatan moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat toleran dan inklusif*

Memperkuat karakter dan jati diri bangsa Indonesia melalui moderasi beragama merupakan langkah penting untuk mewujudkan masyarakat yang toleran dan inklusif. Langkah **pertama** adalah dengan mengembangkan pendidikan inklusif yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum, sehingga membentuk kesadaran tentang pentingnya toleransi. **Kedua**, forum dialog antariman harus digalakkan untuk membangun kesepahaman dan menghindari konflik. **Ketiga**, lembaga keagamaan harus diberdayakan untuk mengambil bagian aktif dalam kegiatan sosial yang inklusif. **Keempat**, kampanye nasional tentang moderasi beragama harus diluncurkan untuk mengedukasi masyarakat luas. **Kelima**, perlu adanya pengembangan kepemimpinan yang dapat menjadi contoh dalam praktik moderasi beragama. **Keenam**, penguatan regulasi hukum perlu dilakukan untuk menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap diskriminasi serta kekerasan. **Ketujuh**, seni dan budaya dapat dijadikan sarana untuk menyebarkan pesan moderasi beragama. **Kedelapan**, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang mendorong moderasi dan toleransi beragama.

2. *Penguatan kedermawanan sosial melalui pengembangan dana sosial keagamaan produktif*

Memperkuat karakter dan jati diri bangsa Indonesia dapat dilakukan melalui penguatan kedermawanan sosial dengan pengembangan dana sosial keagamaan yang produktif. Langkah ini melibatkan peningkatan kesadaran dan kemampuan umat beragama dalam berkontribusi pada pembangunan melalui praktik filantropi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pengelolaan dana sosial harus transparan dan akuntabel, menjamin penggunaannya untuk program-program yang membangun kesejahteraan sosial dan mendorong inisiatif ekonomi yang mandiri. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tapi juga meningkatkan kemampuan finansial masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif.

3. *Perluasan bimbingan calon pengantin dan penguatan institusi keluarga untuk internalisasi nilai-nilai keagamaan, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak.*

Memperkuat karakter dan jati diri bangsa Indonesia bisa dilakukan melalui perluasan program bimbingan bagi calon pengantin. Program ini akan memfasilitasi pasangan untuk memahami pentingnya nilai-nilai keagamaan dan moral dalam membangun keluarga. Selain itu, penguatan institusi keluarga menjadi penting untuk menanamkan integritas karakter dan pengembangan psikososial anak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendidik generasi mendatang yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai bangsa dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

4. *Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya sebagai pusat peradaban bangsa*

Untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa Indonesia, langkah-langkah pembangunan harus melibatkan pelindungan warisan budaya, memastikan warisan tersebut dapat terus berkembang, dan memanfaatkannya sebagai pusat peradaban. Ini meliputi pelestarian tradisi, bahasa, dan seni, serta inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya. Pengembangan harus berbasis pendidikan dan penelitian untuk memahami dan menghargai khazanah budaya. Sementara pemanfaatan melibatkan integrasi budaya dalam aspek kehidupan masyarakat, seperti pariwisata dan pendidikan, untuk memperkuat identitas nasional dan kesadaran kolektif.

5. *Pengembangan budaya literasi serta bahasa dan sastra Indonesia*

Untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa Indonesia, pengembangan budaya literasi sangat penting. Langkah ini bisa dimulai dengan program membaca di sekolah dan masyarakat, yang mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap sastra Indonesia. Selanjutnya, peningkatan kurikulum bahasa dan sastra Indonesia yang inovatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat membantu peserta didik memahami dan menghargai kekayaan budaya lokal. Selain itu, pengadaan lomba-lomba kreatifitas literasi seperti menulis cerpen, puisi, dan debat bahasa dapat mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik

dan benar. Melalui langkah-langkah ini, pembangunan karakter dan jati diri bangsa dapat terintegrasi dalam praktik sehari-hari.

6. *Pengembangan budaya bahari dan revitalisasi jalur rempah*

Mengukuhkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia melalui pengembangan budaya bahari dan revitalisasi jalur rempah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pelestarian, dan pemberdayaan. Edukasi mengenai pentingnya warisan bahari dan jalur rempah, bersama dengan pemeliharaan situs-situs historis dan pengembangan wisata maritim, akan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap tradisi maritim. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan dukungan ekonomi lokal, serta kolaborasi antarsektor, akan memperkuat ekonomi berbasis bahari. Inovasi produk dan jasa yang terinspirasi dari budaya bahari dapat menjadi motor penggerak baru bagi industri kreatif. Perlindungan lingkungan dan integrasi materi Bahari ke dalam kurikulum pendidikan akan menjamin pelestarian budaya maritim sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.

7. *Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan serta pembinaan ideologi Pancasila*

Untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa Indonesia, kegiatan pembangunan diarahkan pada peningkatan pendidikan karakter dan kewarganegaraan serta pembinaan ideologi Pancasila. Langkah-langkah ini meliputi integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan metode pengajaran, pengembangan program pendidikan yang mendukung pembentukan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Pembinaan ideologi Pancasila dilakukan melalui pelatihan, diskusi, dan kegiatan yang memperkuat pemahaman dan aplikasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

8. *Penguatan karakter, pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, serta penguatan agensi perempuan*

Memperkuat karakter dan jati diri bangsa Indonesia melalui pembangunan melibatkan beberapa langkah strategis. **Pertama**, penguatan karakter dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dasar seperti integritas, kerja keras, dan kejujuran melalui pendidikan dan program sosialisasi. **Kedua**, pencegahan perilaku berisiko pada pemuda fokus pada pendidikan yang mencakup kesehatan mental, kesadaran narkoba, dan pengembangan keterampilan hidup. **Ketiga**, penguatan agensi perempuan dilakukan dengan mempromosikan kesetaraan gender, pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya ekonomi dan politik.

Sementara itu, proyek-proyek pembangunan (Pro-P) prioritas yang menyokong delapan KP di atas adalah sebagai berikut:

- Pengembangan rumah ibadah yang bersih dan ramah sebagai pusat moderasi beragama
- Perluasan bimbingan calon pengantin dan bimbingan keragaman pada keluarga untuk memperkuat karakter dan jati diri sejak dini

- Revitalisasi gerakan pramuka untuk memperkuat pendidikan karakter
- Revitalisasi museum dan taman budaya sebagai wahana penguatan karakter anak dan remaja berbasis kebudayaan
- Pengembangan kawasan cagar budaya (Muaro Jambi, Borobudur, Sangiran) sebagai pusat peradaban untuk memperkuat jati diri bangsa
- Perluasan layanan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi
- Pengembangan manajemen talenta nasional (seni budaya, olahraga, riset, dan inovasi) untuk meningkatkan rekognisi dan kebanggaan nasional

3.8 Strategi dan Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045

RPJPN 2025-2045 akan diimplementasikan ke dalam empat tahapan, yakni tahapan perkuatan fondasi (2025-2029), tahapan akselerasi transformasi (2030-2034), tahapan ekspansi global (2035-2039), dan tahapan perwujudan Indonesia Emas (2040-2045). Kemudian, tahapan pertama dari RPJPN 2025-2045 diturunkan menjadi RPJMN 2025-2029. Pada tahap pertama ini, pembangunan diharapkan dapat memperkuat fondasi transformasi. Untuk konteks ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan akan difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat.

Lebih jauh, terkhusus di bidang agama dan budaya, pembangunan juga didorong agar dapat meningkatkan ketangguhan manusia. Rukun, toleran, harmonis, dan berdaya rekat sosial menjadi tujuan utama mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi masyarakat kita yang bineka. Dalam pengawalan pembangunan di kedua bidang ini, berbagai kebijakan pembangunan harus berorientasi pada penguatan aspek-aspek krusial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti penguatan moderasi beragama, pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan, serta pemenuhan hak berkebudayaan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, pembangunan juga perlu melibatkan masyarakat hukum adat yang hidup di berbagai wilayah di Indonesia, terutama dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas penguatan keterlibatan masyarakat hukum adat.

Gambar 3. 24 Rencana Tahapan Pembangunan Manusia Menuju Indonesia Emas 2045



Sumber: Bappenas (diolah)

3.9 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN tahun 2025-2029, “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju” akan diwujudkan secara holistik melalui beberapa kebijakan dan strategi pembangunan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kehidupan beragama dan berkebudayaan yang transformatif. Adapun beberapa program pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan untuk mewujudkan “Beragama Maslahat”, yakni: (1) penguatan moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat toleran dan inklusif; (2) Peningkatan sarpras layanan keagamaan; (3) Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan; (4) Jaminan hak beragama & advokasi konflik sosial keagamaan; (5) Transformasi KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif; (6) Transformasi Penyelenggaraan Haji dan umrah yang transparan, akuntabel, dan aman; (7) Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; (8) Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif. Lebih spesifik, Agenda Pembangunan (AP) Beragama Maslahat dijalankan melalui satu Program Pembangunan (PP) Penguatan Moderasi Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif. Pengejawantahan PP tersebut dilakukan melalui delapan Kegiatan Pembangunan (KP), yakni:

Beberapa program pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan, yakni: (1) penguatan moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat toleran dan inklusif; (2) Peningkatan sarpras layanan keagamaan; (3) Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan; (4) Jaminan hak beragama & advokasi konflik sosial keagamaan; (5) Transformasi KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif; (6) Transformasi Penyelenggaraan Haji dan umrah yang transparan, akuntabel, dan aman; (7) Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; (8) Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif. Lebih spesifik, Agenda Pembangunan (AP) Beragama Maslahat dijalankan melalui satu Program Pembangunan (PP) Penguatan Moderasi Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif. Pengejawantahan PP tersebut dilakukan melalui delapan Kegiatan Pembangunan (KP), yakni:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan. Terwujudnya Layanan Bimbingan Keagamaan yang berkualitas untuk Calon Pengantin dan Rumah Tangga. Sasaran dari kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan literasi keagamaan yang sahih, inklusif, dan transformatif serta bermaslahat. Adapun implementasinya melalui: peningkatan kompetensi penyuluh, penyediaan konten keagamaan digital inklusif dan transformatif, bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, serta bimbingan keagamaan keluarga.
2. Jaminan Hak Beragama dan Resolusi Konflik Sosial Keagamaan. Sasaran dari kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan jaminan kebebasan beragama dan jumlah penyelesaian konflik sosial keagamaan. Adapun implementasinya melalui: pengembangan Kantor Urusan Agama (KUA) yang memberdayakan early warning system (EWS), memperkuat peran FKUB dalam melakukan advokasi, mitigasi konflik, dan dialog kerukunan.
3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan. Sasaran dari kegiatan pembangunan ini adalah untuk memperkuat peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan dalam mewujudkan layanan keagamaan yang inklusif. Adapun implementasinya melalui: pemberian bantuan operasional untuk lembaga keagamaan (MUI, Walubi, PGI, Matakini, KWI, PHDI) dan ormas keagamaan (NU, Muhammadiyah, Persis, Kelompok Kategorial-Katolik, SAGIN-Biksu, Prajaniti Hindu Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia (API), MUKI -Kristen, MAKIN-Khonghucu, dll), peningkatan profesionalisme lembaga sosial keagamaan, peningkatan kompetensi tokoh agama dalam layanan keagamaan, menggelar forum internasional tokoh lintas agama, dan memperbanyak sarasehan tokoh agama dan tokoh budaya.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan. Sasaran dari kegiatan pembangunan ini

- adalah tersedianya layanan keagamaan yang merata, memadai, dan memenuhi standar. Adapun implementasinya adalah melalui: peningkatan tata kelola sarpras layanan keagamaan yang handal dan sesuai standar ISO, penguatan sarpras IT dan digital, integrasi basis data keagamaan, penguatan peningkatan pelayanan rumah ibadah, dan penyediaan kitab suci bagi umat beragama.
5. Transformasi KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif. Sasaran dari kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan inklusivitas layanan KUA. Adapun implementasinya adalah melalui: revitalisasi dan pembangunan KUA, pengadaan lahan KUA yang layak dan strategis, layanan KUA berbasis digital, pelayanan satu atap pernikahan, peningkatan kompetensi penghulu, revitalisasi bimbingan manasik haji, revitalisasi bimbingan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), revitalisasi KUA sebagai pusat pemberdayaan sosial ekonomi umat, dan peningkatan layanan penyuluhan agama untuk semua umat beragama, dan pelayanan khusus untuk kelompok lanjut usia dan disabilitas.
 6. Transformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman. Sasaran kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan Haji dan Umrah, baik dalam negeri maupun di Saudi Arabia. Adapun implementasinya melalui: revitalisasi sarpras asrama haji, peningkatan produktivitas pemanfaatan asrama haji, pusat layanan haji dan umrah terpadu (PLHUT), penguatan sistem informasi haji berbasis *AI-Smart Service*, optimalisasi dana haji yang produktif, transparan, dan akuntabel, penguatan bimbingan manasik haji dan umrah, peningkatan profesionalitas petugas haji, penguatan layanan haji lansia, membangun Nota Kesepahaman (MoU) penyelenggaraan haji dan umrah antar negara agar aman, akuntabel, dan mempermudah jamaah, membangun kemitraan strategis pengelolaan daging sembelihan jamaah haji dan umrah, melakukan asesmen lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah, serta melakukan advokasi penyelenggaraan haji dan umrah.
 7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sasaran kegiatan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sertifikasi produk halal yang professional (menyeluruh, tepat, dan cepat). Adapun implementasinya melalui: edukasi produk/jasa halal kepada masyarakat/konsumen, peningkatan kesadaran produk/jasa halal di kalangan produsen, sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha UMKM, penguatan standar jaminan produk halal, peningkatan kompetensi pendamping halal, membangun kemitraan strategis dengan komunitas dan universitas dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, peningkatan jumlah akreditasi lembaga pemeriksa halal, dan MoU penjaminan produk halal antar negara.
 8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif. Sasaran kegiatan pembangunan ini adalah untuk mewujudkan pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas. Adapun implementasinya melalui: edukasi kedermawanan sosial keagamaan, kampanye program dana sosial keagamaan produktif, akreditasi lembaga filantropi keagamaan, integrasi basis data pengumpulan dan penyaluran dana sosial keagamaan, optimalisasi tanggap bencana berbasis dana sosial keagamaan, dan memperkuat program-program pengentasan kemiskinan melalui dana sosial keagamaan produktif.

Sementara itu, untuk mewujudkan “Berkebudayaan Maju”, RPJMN tahun 2025-2029 fokus pada beberapa program seperti: (1) pembinaan ideologi Pancasila serta penguatan karakter identitas bangsa; (2) perlindungan dan pelestarian warisan budaya; (3) jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (4) pengembangan budaya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi; (5) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia; (6) pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa; (7) pengembangan budaya Bahari dan

revitalisasi jalur rempah. Agenda Pembangunan (AP) Berkebudayaan Maju dijalankan melalui satu Program Pembangunan (PP) Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan. Adapun Pengejawantahan PP tersebut dilakukan melalui tujuh Kegiatan Pembangunan (KP), yakni:

1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Berdasarkan Pancasila. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter dan jati diri bangsa yang kokoh berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Adapun implementasinya melalui: internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh berbagai elemen, kampanye Pancasila di ruang publik dan forum internasional, memproduksi konten digital terkait Pancasila, pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi pengajar dan pelajar tingkat dasar, menengah, dan tinggi, penguatan karakter pelajar berdasarkan Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara, dan meningkatkan jumlah fasilitasi pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama, penghayat kepercayaan, ras, serta golongan.
2. Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan warisan budaya yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Adapun implementasinya melalui: Integrasi basis data kebudayaan, pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM)kebudayaan, pengelolaan koleksi cagar budaya dan benda budaya, pelestarian cagar budaya, Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), penetapan warisan budaya nasional dan warisan budaya kelas dunia, melakukan fasilitasi dan kemitraan warisan budaya, pengembangan pusat unggulan naskah Nusantara, meningkatkan upaya alih aksara, alih Bahasa, dan pengkajian naskah kuno, melakukan konservasi manuskrip dan naskah kuno, kodifikasi bahasa dan sastra daerah, dan sosialisasi dan perlindungan Bahasa dan sastra daerah, digitalisasi arsip statis, penyediaan informasi arsip di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan penetapan arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB).
3. Jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya hak berkebudayaan dan kebebasan berekspresi, serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kegiatan lokasi Pembangunan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia terkhusus wilayah MHA pesisir dan pulau-pulau kecil seperti misalnya di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Adapun implementasinya melalui: pelestarian nilai budaya dan OPK, integrasi basis data kekayaan intelektual komunal (KIK), advokasi pendaftaran KIK, pengahayat kepercayaan, dan lembaga adat, pemberdayaan MHA, melakukan pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil, pengembangan wilayah adat sebagai ruang pemajuan kebudayaan, penatausahaan Tanah Ulayat, pengembangan dan penetapan hutan adat, perlindungan dan penguatan kapasitas MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan program fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta harmonisasi pelaksanaan kebijakan terkait masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pengembangan budaya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Masyarakat literat untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya cipta. Adapun implementasinya melalui: penguatan konten literasi serta pengelolaan bahan perpustakaan dan langganan jurnal elektronik, peningkatan jejaring perpustakaan, peningkatan kualitas sarana prasarana dan SDM perpustakaan, penguatan sistem perbukuan, akreditasi seluruh jenis perpustakaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan (umum, khusus, sekolah/madrasah, dan PT), revitalisasi Gerakan Literasi Nasional, pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan perpustakaan disabilitas, pemberdayaan masyarakat berbasis konten

- perpustakaan, serta pengembangan dan penguatan budaya gemar membaca.
5. Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Adapun implementasinya melalui: pembinaan penutur Bahasa Indonesia, menyelenggarakan pengujian bagi penutur Bahasa Indonesia, pengujian penutur bahasa Indonesia, pembinaan program literasi Bahasa Indonesia, pembinaan komunitas sastra, peningkatan jumlah lembaga yang terfasilitasi program BIPA, penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum internasional, dan pengembangan Pusat Studi Bahasa Indonesia di luar negeri.
 6. Pengembangan dan Pemanfaatan Khazanah Budaya Bangsa. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan khazanah budaya bangsa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun implementasinya melalui: fasilitasi karya perfilman dan musik Indonesia, fasilitasi bidang kebudayaan, pembinaan desa sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan, peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan, film, dan musik.
 7. Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk wawasan dan kesadaran atas potensi dan nilai-nilai kebaharian dan jalur rempah. Adapun implementasinya melalui: pengembangan SDM pariwisata bahari, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas pariwisata bahari, pelestarian cagar budaya, ODCB, dan OPK di Jalur Rempah, penyelenggaraan event kebudayaan di Jalur Rempah, dan pelestarian manuskrip dan naskah kuno terkait jalur rempah.

3.10 Kertas Kerja *Cascading* Kebijakan RPJMN 2025-2029

Dalam rangka mencapai ketahanan sosial budaya dan ekologi, penyusunan struktur RPJMN 2025-2029 bidang agama dan budaya terdiri dari Arah (Tujuan) Pembangunan “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”. Dari 45 Indikator Pembangunan yang ada pada dokumen RPJPN 2025-2045, ada dua indikator utama yang dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada bidang agama dan budaya, yakni Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Meski begitu, pada dokumen RPJMN 2025-2029 ini, ada penyesuaian indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang agama, yakni IKUB, Dimensi Inklusi Sosial dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dan Indeks Layanan Keagamaan yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Lalu untuk kebudayaan, selain IPK, ada Dimensi Kohesi Sosial IPMas yang akan digunakan sebagai indikator capaian pembangunan. Di atas semua itu, IPMas juga akan menjadi indikator tambahan untuk mengukur ketercapaian Arah Pembangunan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.

Lebih jauh, ada dua Program Pembangunan (PP) dan 15 Kegiatan Pembangunan (KP). **Pertama**, untuk bidang agama, ada Program Pembangunan Kehidupan Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif. Sementara **kedua**, untuk bidang budaya ada Program Pembangunan (PP) Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan. Lalu, ada delapan Kegiatan Pembangunan (KP) untuk PP yang pertama, dan tujuh KP untuk PP yang kedua.

Gambar 3. 25 Kertas Kerja Cascading Arah Pembangunan “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”

Kertas Kerja Cascading Kegiatan Prioritas (KP) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	
Isu Strategis	
ISU AGAMA	ISU BUDAYA
<ul style="list-style-type: none"> Nilai agama belum optimal dijawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, ditandai dengan capaian IKUB di tahun 2022 sebesar 73,09 	<ul style="list-style-type: none"> Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global Pembangunan dan modernisasi yang eksploitatif mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak negatif pada ekosistem alam dan budaya lokal Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi Masyarakat, ditandai dengan capaian IPK di tahun 2022 sebesar 55,13
Agenda Pembangunan: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
Sasaran: Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	
Indikator: IPMas	
PP. Penguatan Kehidupan Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif	PP. Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
Indikator: IKUB, Dimensi Inklusif Sosial IPMas, Indeks Layanan Keagamaan*	Indikator: IPK dan Dimensi Kohesi Sosial IPMas
<ul style="list-style-type: none"> KP Penguatan Moderasi Beragama untuk mewujudkan masyarakat toleran dan inklusif KP Peningkatan sarpras layanan keagamaan KP Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan KP Jaminan hak beragama & advokasi konflik sosial keagamaan KP Transformasi KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif KP Transformasi Penyelenggaraan Haji dan umrah yang transparan, akuntabel, dan aman KP Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal KP Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif 	<ul style="list-style-type: none"> KP Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa KP Pelindungan dan pelestarian warisan budaya KP Jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat KP Pengembangan budaya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi KP Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia KP Pengembangan dan Pemanfaatan Khazanah Budaya Bangsa KP Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah

Sumber: Bappenas (diolah)

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah, setiap KP memiliki sasaran yang hendak dicapai. Ketercapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator-indikator yang telah ditentukan. Kemudian, KP tersebut diwujudkan melalui beberapa proyek pembangunan (Pro-P) atau Rincian Output (RO) di level Kementerian/Lembaga (K/L).

3.11 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 dibuat sebagai landasan untuk mencapai cita-cita yang lebih besar sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Bappenas mengimplementasikan manajemen risiko pembangunan nasional untuk mengantisipasi ketidakpastian ketika sebuah program pembangunan diimplementasikan. Dengan begitu harapannya pembangunan dapat tereksekusi secara maksimal di berbagai daerah di Indonesia. Adapun program pembangunan tersebut, terutama di beragama maslahat dan berkebudayaan maju, didukung oleh sekitar 7-8 Kegiatan Pembangunan (KP), tergantung wilayahnya.

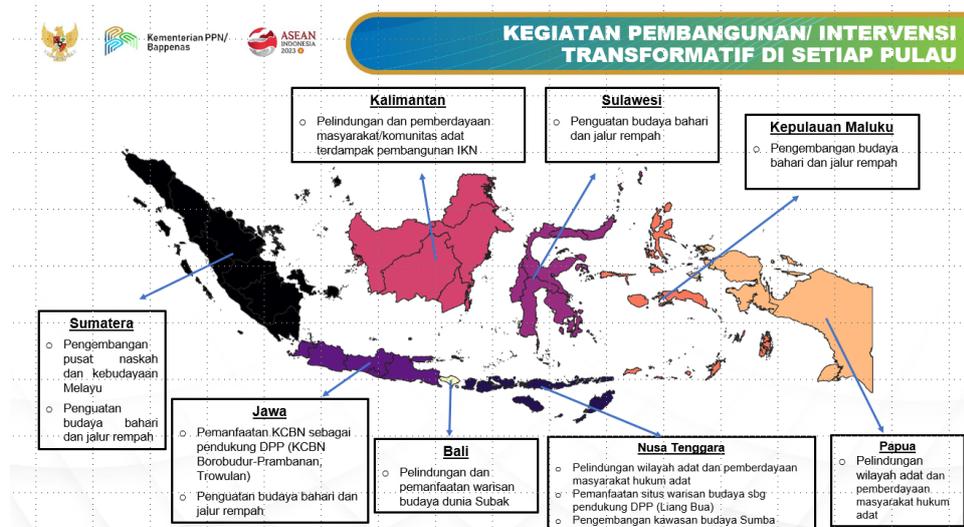
Dalam pengimplementasiannya, berbagai KP di bidang agama dan budaya secara umum akan menjadi kebijakan universal (*universal policy*) yang diimplementasikan di semua daerah di Indonesia tanpa membedakan populasi tertentu. Adapun kebijakan universal yang akan diimplementasikan untuk seluruh wilayah Indonesia adalah:

1. Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan serta pembinaan ideologi Pancasila melalui penguatan karakter profil pelajar pancasila, penguatan iklim keamanan satuan pendidikan, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara, serta internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila
2. Penguatan moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat toleran dan inklusif melalui literasi keagamaan, peningkatan kerukunan umat beragama, dan keselarasan relasi beragama dan budaya
3. Penguatan kedermawanan sosial melalui pengembangan dana sosial keagamaan Produktif

4. Perluasan bimbingan calon pengantin dan penguatan intitusi keluarga untuk internalisasi nilai-nilai keagamaan, moral, integritas karakter, & pengembangan psikososial anak
5. Penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda dan perempuan
6. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya sebagai pusat peradaban bangsa melalui pengelolaan terpadu cagar budaya, pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, pengembangan produk dan jasa berbasis seni budaya, serta pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional
7. Pengembangan budaya literasi serta bahasa dan sastra Indonesia melalui peningkatan layanan literasi yang berkualitas dan merata, peningkatan budaya kegemaran membaca, serta penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia

Meski demikian, ada beberapa wilayah di mana KP di bidang agama dan budaya menjadi kebijakan yang ditargetkan, terutama karena ciri khas mereka yang sejalan dengan agenda pembangunan RPJMN 2025-2029. Intervensi transformasi khusus di wilayah Pulau Sumatera, pertama, fokus pada pengembangan pusat naskah dan kebudayaan Melayu dan penguatan budaya Bahari dan jalur rempah. Sementara di Pulau Jawa fokus pada pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) seperti KCBN Borobudur-Prambanan-Trowulan. Di pulau Bali fokus pelindungan dan pemanfaatan warisan budaya dunia Subak. Di Kalimantan fokus pada pelindungan dan pemberdayaan masyarakat/komunitas adat yang terdampak Pembangunan IKN. Lalu penguatan budaya bahari dan jalur rempah menjadi fokus KP di pulau Sulawesi dan Maluku. Nusa Tenggara memiliki fokus KP dengan tiga poin terbanyak yaitu perlindungan wilayah adat, pemberdayaan masyarakat hukum adat, pemanfaatan status warisan budaya, dan pengembangan Kawasan budaya Sumba. Untuk pulau Papua perlindungan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat menjadi fokus KP. Untuk detail KP per wilayah dapat dilihat di bagian selanjutnya:

Gambar 3. 26 Kegiatan Pembangunan/Intervensi Transformatif di Setiap Pulau



Sumber: Bappenas (diolah)

3.11.1 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

1. Revitalisasi jalur rempah melalui pelestarian nilai-nilai opk di jalur rempah, penyelenggaraan event di jalur rempah, serta pelestarian manuskrip dan naskah kuno terkait jalur rempah
2. Pengembangan budaya bahari melalui pengembangan dan penguatan budaya gemar membaca, sistem perbukuan, konten literasi, serta akses dan kualitas perpustakaan dan repositori terkait kelautan, pertahanan, pengembangan dan peningkatan peran kawasan pesisir bersejarah, pengembangan SDM pariwisata bahari, serta pengembangan aksesibilitas dan konektivitas pariwisata bahari

3.11.2 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Jawa

1. Revitalisasi jalur rempah melalui pelestarian nilai-nilai opk di jalur rempah, penyelenggaraan event di jalur rempah, serta pelestarian manuskrip dan naskah kuno terkait jalur rempah
2. Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) seperti KCBN Borobudur-Prambanan-Trowulan

3.11.3 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara

1. Pelindungan dan pemanfaatan warisan budaya dunia Subak
2. Pelindungan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
3. Pemanfaatan situs warisan budaya sebagai pendukung Liang Bua, dan pengembangan budaya Sumba secara umum

3.11.4 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan

1. Pelindungan dan pemberdayaan masyarakat/komunitas adat yang terdampak Pembangunan IKN

3.11.5 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi dan Kepulauan Maluku

1. Pengembangan budaya bahari dan revitalisasi jalur rempah melalui pengembangan dan penguatan budaya gemar membaca, sistem perbukuan, konten literasi, serta akses dan kualitas perpustakaan dan repositori terkait kelautan, pertahanan, pengembangan dan peningkatan peran kawasan pesisir bersejarah, pengembangan sdm pariwisata bahari, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas pariwisata bahari, pelestarian nilai-nilai opk di jalur rempah, penyelenggaraan event di jalur rempah, serta pelestarian manuskrip dan naskah kuno terkait jalur rempah

3.11.6 Strategi dan Rancangan Arah Kebijakan Wilayah Papua

1. Pengembangan budaya bahari dan revitalisasi jalur rempah melalui pengembangan dan penguatan budaya gemar membaca, sistem perbukuan, konten literasi, serta akses dan kualitas perpustakaan dan repositori terkait kelautan, pertahanan, pengembangan dan peningkatan peran kawasan pesisir bersejarah, pengembangan sdm pariwisata bahari, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas pariwisata bahari, pelestarian nilai-nilai opk di jalur rempah, penyelenggaraan event di jalur rempah, serta pelestarian manuskrip dan naskah kuno terkait jalur rempah
2. Pelindungan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat

3.12 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.12.1 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi adalah serangkaian aturan dan standar hukum yang dirancang untuk memperkuat proses pembangunan nasional di Indonesia. Kerangka ini memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam rangka memperkuat implementasi RPJMN 2025-2029, telah disusun kerangka regulasi beragama maslahat dan berkebudayaan maju, yang diwujudkan dalam beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Salah satu RUU yang diusulkan adalah Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat oleh Direktorat APK dan Direktorat Kumlasi. RUU ini dianggap penting karena merupakan amanat UUD 1945, bertujuan untuk mengakui, menjamin, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, serta mengurus wilayah adat dan identitas budayanya. RUU ini juga bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menyelesaikan konflik terkait klaim tanah atau sumber daya alam. Target pembentukannya adalah pada tahun 2024-2025 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

RUU kedua adalah Revisi Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, diusulkan oleh Direktorat APK. Revisi ini mendesak karena perubahan cara masyarakat mengakses, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi di era disruptif, serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan perpustakaan dengan penyediaan literasi berkualitas. Proses pelaksanaan revisi ini ditargetkan pada periode 2024-2025, dengan penyelesaian naskah akademik dan kertas kebijakan dalam maksimal satu tahun anggaran. Pengusulnya adalah Perpustakaan Nasional.

RUU ketiga yang diusulkan adalah Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji oleh Direktorat APK. Urgensi revisi ini terletak pada jaminan keamanan dana haji, optimalisasi penggunaan dana haji, serta penguatan prinsip istitha'ah finansial dalam penyelenggaraan haji. Target pelaksanaan revisi ini juga dijadwalkan pada tahun 2024-2025, dengan Kementerian Agama sebagai pemrakarsa.

Selanjutnya, RUU Pelindungan Umat Beragama diusulkan oleh Direktorat APK dan Direktorat Kumlasi, dengan urgensi sebagai payung hukum untuk mencegah diskriminasi, persekusi, dan intoleransi berbasis agama. RUU ini juga bertujuan memfasilitasi setiap individu dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum untuk menjalankan dan mengekspresikan agamanya, serta mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Target pembentukan RUU ini adalah tahun 2024-2025, dengan Kementerian Agama sebagai pemrakarsa.

Keseluruhan rangka regulasi ini bertujuan untuk mengurai urgensi dasar pembentukan regulasi, termasuk uraian masalah kebijakan atau masalah hukum yang dihadapi, serta untuk menentukan arah dan materi muatan hukumnya. Penyelesaian naskah akademik untuk semua RUU ini diharapkan selesai dalam maksimal dua tahun anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Bidang Pendidikan

Pembangunan dan kemajuan negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki peran penting bagi kemajuan suatu negara, hal ini dikarenakan pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga dengan SDM yang baik maka kemajuan negarapun akan semakin baik dan berkembang. Inisiatif pendidikan sangat krusial, mengingat disparitas akses dan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan perubahan demografis. Kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dan meningkatkan kualitas pendidikan, mengatasi masalah seperti kekurangan guru dan kompetensi mereka, dan memanfaatkan bonus demografi.

Dalam dunia pendidikan saat ini pasti tidak lepas dari sebuah permasalahan, baik itu permasalahan yang timbul dalam komponen-komponen yang terdapat dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem. Ataupun permasalahan yang muncul dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem-sistem lainnya yang lebih luas di dalam seluruh kehidupan manusia. Selain itu, Indonesia hingga saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dan isu-isu terkait kualitas pendidikan yang masih mengalami ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara lain. Faktor-faktor lain penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia ini yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai di sebagian daerah, kualitas guru yang dipicu oleh kesejahteraan guru yang sangat minim dan berdampak pada prestasi peserta didik yang sangat rendah, serta kesempatan pemerataan pendidikan yang masih rendah.

Dari faktor-faktor disebut diatas ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Upaya dalam mencapai pembangunan pendidikan, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang berprinsip pendidikan berkualitas yang merata, mencakup: (a) Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk mencapai pemerataan akses pendidikan; (b) Pemerataan Akses pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas dan menguatnya bidang STEAM; (c) peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran untuk mewujudkan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif; (d) penguatan Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan Berkualitas untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif; (e) penguatan sistem tata kelola pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem tata kelola pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta reputasi kelembagaan pendidikan; (f) peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja.

4.1.2 Bidang Agama dan Kebudayaan

Kesimpulan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menawarkan visi strategis untuk pengembangan Indonesia dalam bidang pendidikan, agama, dan budaya. Studi ini mengidentifikasi dan menangani tantangan utama di area tersebut, seperti degradasi lingkungan akibat pengembangan yang eksploitatif, pemanfaatan kearifan lokal yang belum optimal, implementasi Pancasila yang belum lengkap, ancaman terhadap karakter dan identitas nasional, isu inklusivitas dalam praktik agama dan budaya, serta kebebasan beragama yang terbatas dengan literasi agama yang minim.

RPJMN 2025-2045 akan dijalankan dalam empat fase: penguatan pondasi (2025-2029), percepatan transformasi (2030-2034), ekspansi global (2035-2039), dan realisasi 'Indonesia Emas' (2040-2045). Fase pertama, RPJMN 2025-2029, berfokus pada penguatan dasar untuk transformasi dengan penekanan pada optimalisasi nilai-nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembentukan karakter dan mobilisasi kapital sosial.

Dalam bidang agama dan budaya, RPJMN mendorong ketahanan, toleransi, harmoni, dan kebersamaan sosial melalui moderasi agama, pemenuhan hak dan kepercayaan agama, serta kebebasan dan ekspresi budaya. Konsep 'Beragama Maslahat' ditekankan, yang mengadvokasi integrasi harmonis ajaran agama dengan pertimbangan sosio-ekonomi dan budaya untuk kesejahteraan yang luas.

Rencana strategis ini, dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, bertujuan tidak hanya untuk mengatasi tantangan saat ini tetapi juga untuk meletakkan fondasi yang kuat untuk masa depan. Visi ini menggambarkan sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif, masyarakat yang berakar pada praktik agama yang moderat dan inklusif, serta budaya yang hidup yang memperkuat identitas nasional dan berkontribusi pada peradaban global. Implementasi kebijakan ini akan sangat berperan dalam membentuk perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih adil, terdidik, dan kaya budaya.

4.2 Saran

Penyusunan kajian pendahuluan disarankan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 oleh Kementerian PPN Bappenas. Rancangan arah kebijakan pembangunan secara umum dapat disesuaikan ke dalam tahapan RPJMN 2025-2029. Di sisi lain, proses penyusunan kajian pendahuluan pada lingkup Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan didukung oleh masukan dari *stakeholder* baik kalangan pemerintah, pakar, maupun masyarakat. Kajian ini menjadi praktik baik yang dapat diterapkan dalam proses perumusan kebijakan dengan melibatkan banyak pihak agar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi ideal dalam lingkup masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahdiat, A. (2023, January 30). Angka Kelahiran Indonesia Turun 30% dalam Tiga Dekade. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/30/angka-kelahiran-indonesia-turun-30-dalam-tiga-dekade>
- Alhumaid, K. (2019). Four Ways Technology Has Negatively Changed Education. *Journal of Educational and Sosial Research*, 9(4), 10–20. <https://doi.org/10.2478/jesr-2019-0049>
- Aref, A. (2011). *Community Participation for Educational Planning and Development*. <http://www.sciencepub.net/nature68>
- Bantuan Kemanusiaan Indonesia Untuk Palestina Lengkap diberangkatkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023, November 6). <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/bantuan-kemanusiaan-indonesia-untuk-palestina-lengkap-diberangkatkan>
- Becker, G. S. (1992). *Education, Labor Force Quality, and the Economy* (Vol. 27, Issue 1). http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/23485900http://www.jstor.org/stable/23485900?seq=1dancid=pdf-reference#references_tab_contents
- Belke, A., dan Wernet, A. (2015). Poverty Reduction through Growth and Redistribution Policies-a Panel Analysis for 59 Developing Countries. *Review of Development Economics*, 19(1), 143–162. <https://doi.org/10.1111/rode.12131>
- Berkes, Fikret & Colding, Johan & Folke, Carl. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. *Ecological Applications*. 5. 1251-1252. 10.2307/2641280.
- Bouchard, G., & Taylor, C. (2008). Building the future: A time for reconciliation: Abridged report. Commission de consultation sur les pratiques d'accomodement reliées aux différences culturelles.
- Bruinessen, M. van. (2013). Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn.” Institute of Southeast Asian Studies.
- Burde, D. (2004). Weak State, Strong Community? Promoting Community Participation in Post-Conflict Countries. In *Current Issues in Comparative Education* (Vol. 6, Issue 2).
- Chalos, P. (1967). *An Examination of Budgetary Inefficiency in Education Using Data Envelopmentanalysis*.
- Cook, J. T., dan Frank, D. A. (2008). Food security, poverty, and human development in the United States. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1136, 193–209. <https://doi.org/10.1196/annals.1425.001>
- Cox, H. (1966). *The Secular City; Secularization and Urbanization in Theological Perspective*. Macmillan.
- Current world population*. Worldometer. (2023, December 21). <https://www.worldometers.info/world-population/>
- Darmadi, D. (2014). Urban Sufism: The new flourishing vivacity of contemporary Indonesian Islam. *Studia Islamika*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/sdi.v8i1.700>
- Dinar Standard. (2022). (rep.). 2022 State of the Global Islamic Report: Unlocking Opportunity (pp. 4–4). Dubai, UEA: Dinar Standard.
- E, Kudlová. (2004). Life Cycle Approach to Child and Adolescent Health. In *Cent Eur J Publ Health* (Vol. 12, Issue 3).
- Egana-delSol, P., Contreras, D., dan Valenzuela, J. P. (2019). The impact of art-education on human Capital: An empirical assessment of a youth orchestra. *International Journal of Educational Development*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102105>
- Ekaningrum, I. R., dan Hadi, N. (2022). The Role of Participatory Budgeting Management in Reducing the Budget Slack in an Islamic Education Institution. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 14(2), 603–616. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3572>
- Essuman, A., dan Akyeampong, K. (2011). Decentralisation policy and practice in ghana: The promise and reality of community participation in education in rural communities. *Journal of Education Policy*, 26(4), 513–527. <https://doi.org/10.1080/02680939.2011.554999>
- Frongillo, E. A., De Onis, M., dan Hanson, K. M. P. (1997). Socioeconomic and demographic factors are associated with worldwide patterns of stunting and wasting of children. *Journal of Nutrition*, 127(12), 2302–2309. <https://doi.org/10.1093/jn/127.12.2302>
- Fullan, M. (2002). The role of leadership in the promotion of knowledge management in schools. In *Teachers and Teaching: Theory and Practice* (Vol. 8, Issue 3, pp. 409–419). <https://doi.org/10.1080/135406002100000530>
- Gukurume, S. (2022). “You are blessed to be a blessing”: Pentecostal-Charismatic Churches and the politics of

- redistribution in Harare. *Religion and Development*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.30965/27507955-20220002>
- JUDE EGGOH, GILLES-ARMAND SOSSOU, dan HILAIRE HOUENINVO. (2015). Education, Health and Economic Growth in African Countries. *Journal of Economic Development*, 40(1), 93–111. <https://doi.org/10.35866/caujed.2015.40.1.004>
- Kusumaningrum, D. E., Ulfatin, N., Triwiyanto, T., dan Gunawan, I. (2017). *Community Participation in Improving Educational Quality*.
- Lanzi, D. (2007). Capabilities, human capital and education. *Journal of Socio-Economics*, 36(3), 424–435. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2006.12.005>
- Lucas, R. E. (1988). *ON THE MECHANICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT**.
- Mayo, A. (2000). The role of employee development in the growth of intellectual capital. *Personnel Review*, 29(4), 521–533. <https://doi.org/10.1108/00483480010296311>
- Mihai, M., Țițan, E., dan Manea, D. (2015). Education and Poverty. *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 855–860. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01532-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01532-4)
- Monyatsi, P. P. (2005). Transforming schools into democratic organisations: The case of the secondary schools management development project in Botswana. *International Education Journal*, 6(3), 354–366. <http://iej.cjb.net>
- Mulyadi, B. (2020). *The Uniqueness of An Early Childhood Education Sistem in Japan*. 9(1). <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/izumi>
- Nafukho, F. M., Hairston, N. R., dan Brooks, K. (2004). Human capital theory: Implications for human resource development. *Human Resource Development International*, 7(4), 545–551. <https://doi.org/10.1080/1367886042000299843>
- Nguyen-Van, P., Pham, T. K. C., dan Le, D. A. (2019). Productivity and public expenditure: a structural estimation for Vietnam’s provinces. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 3(1), 95–120. <https://doi.org/10.1007/s41685-018-0085-1>
- Nindie, A. (2022). Leadership Management of School Principles: A Case Study of Public Elementary Schools in Bogor Regency. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 2(1).
- Nirola, N., dan Sahu, S. (2019). The interactive impact of government size and quality of institutions on economic growth- evidence from the states of India. *Heliyon*, 5(3), e01352. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01352>
- Parji, F., dan Prasetya, A. (2020). Community participation in developing educational quality for primary school in Madiun City. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra6), 189–196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3987601>
- Ranson, S., Farrell, C., Peim, N., dan Smith, P. (2005). Does governance matter for school improvement? In *School Effectiveness and School Improvement* (Vol. 16, Issue 3, pp. 305–325). <https://doi.org/10.1080/09243450500114108>
- Rao, V. S. (2009). *Lack of Community Participation in the Sarva Shiksha Abhiyan: A Case Study* (Vol. 44, Issue 8).
- Rastogi, P. N. (2002). Knowledge management and intellectual capital as a paradigm of value creation. In *Human Systems Management* (Vol. 21). IOS Press.
- Richard V. Reeves, K. G., Wessel, D., Eric Milstein, D. W., & Klein, A. (2023, June 20). Defining the middle class: Cash, credentials, or culture?. Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/defining-the-middle-class-cash-credentials-or-culture/>
- Robeyns, I. (2006a). Three models of education: Rights, capabilities and human capital. *Theory and Research in Education*, 4(1), 69–84. <https://doi.org/10.1177/1477878506060683>
- Robeyns, I. (2006b). Three models of education: Rights, capabilities and human capital. *Theory and Research in Education*, 4(1), 69–84. <https://doi.org/10.1177/1477878506060683>
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. In *Source: Journal of Political Economy* (Vol. 94, Issue 5).
- Kelley, D., Singer, S., Herrington, M., & Global Entrepreneurship Research Assistance. (2016). (rep.). Global Entrepreneurship Monitor 2015-2016 Global Report.
- Leiserowitz, A., Carman, J., Buttermore, N., Neyens, L., Rosenthal, S., Marlon, J., Schneider, J., & Mulcahy, K. (2022). International Public Opinion on Climate Change, 2022. New Haven, CT: Yale Program on Climate Change Communication and Data for Good at Meta.
- Lichterman, P. (2014). Religion and sosial solidarity. *Nonprofit and Civil Society Studies*, 241–261.

- https://doi.org/10.1007/978-3-319-04585-6_12
- Marana, M. (2010). UNESCO Etxea working papers. no 1. Culture and Development - Evolution and Prospect. https://www.ehu.es/documents/3120344/3356415/Culture_Development.pdf/837c2fac-4627-4a29-a21b-f41ddb52ab2
- Mohanty, C. T. (2003). “Under Western Eyes” Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28(3), 499–535. <https://doi.org/10.1086/signs.2003.28.issue-3>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone*. Simon & Schuster.
- Sachs, J. D. (2015). The Age of Sustainable Development. *Journal of the American Planning Association*, 81(3), 241–242. <https://doi.org/10.1080/01944363.2015.1077080>
- Sanisah, S., dan Santosa, H. (2023). Education Budget Fluctuation and Its Relevance to the Achievement of Human Development Index on the Dimension of Education. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 9(1), 140. <https://doi.org/10.33394/jk.v9i1.7041>
- Schultz, T. W. (1961). *Investment in Human Capital*. <http://www.jstor.org/stable/1818907> .
- Sen, A. (1988). *The Concept of Development*.
- Shatri, Z. G. (2020). Advantages and disadvantages of using information technology in learning process of students. *Journal of Turkish Science Education*, 17(3), 420–428. <https://doi.org/10.36681/tused.2020.36>
- Storey, A. (2002). Performance management in schools: Could the Balanced Scorecard help? In *School Leadership and Management* (Vol. 22, Issue 3, pp. 321–338). <https://doi.org/10.1080/1363243022000020435>
- Sultana, T., Dey, S. R., dan Tareque, M. (2022a). Exploring the linkage between human capital and economic growth: A look at 141 developing and developed countries. *Economic Systems*, 46(3). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2022.101017>
- Sultana, T., Dey, S. R., dan Tareque, M. (2022b). Exploring the linkage between human capital and economic growth: A look at 141 developing and developed countries. *Economic Systems*, 46(3). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2022.101017>
- Todaro, M. P., dan Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Addison-Wesley.
- UNESCO - 1982-2000: From mondiacult to our creative diversity. Intangible Cultural Heritage. (n.d.). <https://ich.unesco.org/en/1982-2000-00309>
- van de Grift, W., dan Houtveen, T. (2007). Weaknesses in Underperforming Schools. *Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR)*, 12(4), 383–403. <https://doi.org/10.1080/10824660701758942>
- Vázquez-Cano, E., Parra-González, M. E., Segura-Robles, A., dan López-Meneses, E. (2022). The Negative Effects of Technology on Education: A Bibliometric and Topic Modeling Mapping Analysis (2008-2019). *International Journal of Instruction*, 15(2), 37–60. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.1523a>
- Wienanto, S. A. (2023, November 6). Melihat Lagi 6 Tuntutan Tokoh lintas agama Dalam Aksi Bela Palestina Kemarin. *Tempo*. <https://metro.tempo.co/read/1793336/melihat-lagi-6-tuntutan-tokoh-lintas-agama-dalam-aksi-bela-palestina-kemarin>
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological Empowerment: Issues and Illustrations. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 581–599. <https://doi.org/0091-0627/95/1000.0581507.50/0>